



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries

LAPORAN TAHUNAN | 2020
ANNUAL REPORT



Transformasi di Masa Krisis

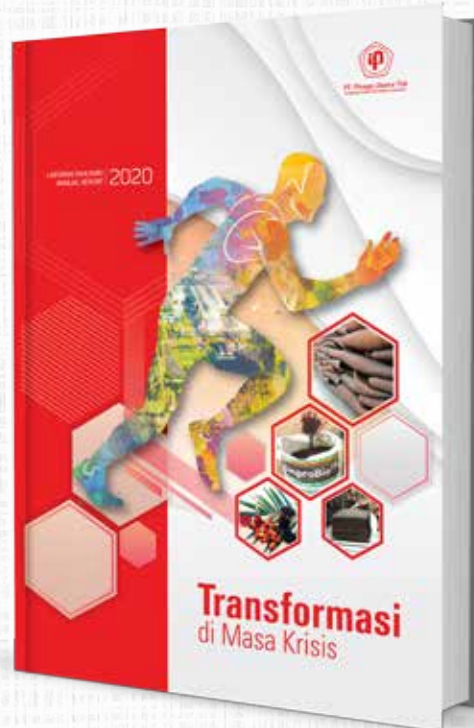
An aerial photograph of a modern campus or industrial park. The scene features several large, multi-story buildings with light-colored facades and dark roofs. A prominent river or canal flows through the center of the area, bordered by lush green trees and vegetation. To the right, there are large, cylindrical storage tanks and other industrial structures. The overall environment is well-maintained with significant green space and a clear layout.

Penjelasan Tema

Explanation of Themes



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Transformasi di Masa Krisis

Transformation in Crisis

Fase fluktuatif yang disebabkan oleh efek domino dari fenomena pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap seluruh industri dan entitas, termasuk PT Pinago Utama Tbk. Terlepas dari peristiwa tersebut, Perseroan mampu mengembalikan stabilitas kegiatan produksi serta meningkatkan kinerja Perseroan dengan melakukan berbagai langkah strategis. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan signifikan harga komoditas yang sempat mengalami penurunan dalam perdagangan. Kami akan terus bertransformasi, berevolusi dan menjaga konsistensi kegiatan usaha Perseroan demi pencapaian yang lebih baik di masa akan datang.

Semangat dan komitmen Perseroan didemonstrasikan dengan langkah mantap Perseroan dalam melakukan *Initial Public Offering* di tengah pandemi. Dengan determinasi tinggi untuk selalu memberikan hasil yang memuaskan, pada tahun 2020, Perseroan tumbuh dengan baik sehingga dapat berperan sebagai modal besar dalam perjalanan memperkuat pertumbuhan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang tak terelakkan.

Ke depannya, demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta pemangku kepentingan, kami akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi tantangan-tantangan melalui Nilai Perusahaan yang terpatrit di setiap insan Perseroan.

The fluctuating phase triggered by the domino effect of the Covid-19 pandemic has had a significant collision on all industries and entities, including PT Pinago Utama Tbk. Apart from these events, the Company was able to restore stability to production activities and to improve the Company's performance by taking multifarious strategic steps. The increase could be seen on the cutback of commodity stock which significantly grew. We will remain strong in order to transform, to evolve, and to maintain consistency in the Company's business activities for better achievements in the future.

Moxie and commitment of the Company are demonstrated through the Company's solid pace on having the IPO conducted in the midst of pandemic. Along with determined willingness streaming inside our system, in 2020, the Company has been endeavouring to deliver its very best which, at the final stage, led the Company to the fine business growth giving a firm stance to strengthen sustainable development amid irresistible economic challenges at its highest point.

Forward-looking, in terms of preserving economic development and of improving services mechanism for customers and stakeholders, we are to develop our capacity and capability to their full potential on facing challenges through Corporate Value strongly attached to each and every one of the the Company's individual.

01 Kilas Kinerja *Performance Highlights*

- 10 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlight
- 13 Ikhtisar Saham 2020
2020 Share Highlights
- 14 Ikhtisar Obligasi
Bonds Overview
- 14 Perdagangan Saham
Stock Trading
- 15 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications
- 15 Peristiwa Penting
Significant Events

02 Laporan Manajemen *Management Report*

- 18 Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioner's Report
- 28 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
- 32 Laporan Direksi
The Board of Director's Report
- 42 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors
- 50 Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020
PT Pinago Utama Tbk
*Statement of Board of Commissioners and Board of
Directors on the Responsibility for the Annual Report
2020 of PT Pinago Utama Tbk.*



03 Profil Perusahaan *Company Profile*

- 55 Identitas Perusahaan
Company Identity
- 56 Jejak Langkah
Milestones
- 58 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company
- 59 Kegiatan dan Bidang Usaha
Corporate Activities and Line of Business
- 60 Produk
Product
- 62 Pengembangan dan Inovasi Produk
Development and Product Innovation
- 63 Visi dan Misi
Vision and Mission
- 64 Nilai Perusahaan
Corporate Values
- 65 Strategi Perusahaan
Corporate Strategy
- 67 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capital Management
- 76 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure
- 78 Informasi Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professionals Information
- 79 Alamat Kantor Pusat & Entitas Anak
Addresses of Head Office and Subsidiaries
- 80 Jangkauan Pasar dan Wilayah Operasi
Market Coverage and Operation Areas

04 Analisa & Pembahasan Manajemen *Management Discussion & Analysis*

- 84 Tinjauan Industri & Kondisi Makro Ekonomi
Industry Overview & Macroeconomic Conditions
- 91 Tinjauan Operasional
Operational Review
- 93 Tinjauan Keuangan
Financial Review
- 96 Utang dan Struktur Modal
Debts and Capital Structure

96 Kebijakan Dividen dan Dividen Kas per Saham
Dividends Policy and Cash Dividends per Share

96 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material
Commitment for Capital Goods Investment

97 Investasi Barang Modal
Capital Expenditure

97 Prospek dan Rencana Strategis 2021
Prospects and Strategic Plans for 2021

98 Target 2021
2021 Targets

98 Informasi Mengenai Investasi
Information on Investment

99 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Baru
New Statements of Accounting Standard Implementation

05 Tata Kelola Perusahaan ***Corporate Governance***

104 Pendahuluan
Introduction

104 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Objectives of Corporate Governance Implementation

105 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment of Corporate Governance Implementation

106 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Principles of Corporate Governance

109 Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Guidelines

109 Kegiatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan 2020
Corporate Governance Implementation Activities in 2020

110 Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Self-Assessment of GCG

111 Implementasi Rekomendasi OJK
Implementation of FSA Recommendation

117 Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy and Structure

118 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

119 Penyelenggaraan RUPS
The Enforcement of GMS

122 Agenda dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2019
Agenda and Decision of 2019 GMS

128 Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Realization of the Previous Year GMS Decision

128 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

134 Independensi Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Independence

135 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct

137 Tugas dan Kewajiban Komisaris Utama
The Board of Commissioners' Duties and Obligations

139 Wewenang Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Authorities

141 Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020
The Board of Commissioners' Assignment Implementation Report 2020

141 Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Training and Competency Development

142 Direksi
The Board of Directors

144 Komposisi Direksi
The Board of Directors' Composition

144 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
The Board of Directors' Guideline and Code of Conducts

145 Tugas dan Wewenang Direksi
The Board of Directors' Duties and Authorities

146 Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi
The Company's Policies Stipulation by the Board of Directors

146 Hak dan Kewajiban Direksi
The Board of Directors' Rights and Obligations

148 Pembagian Tugas Direksi
The Board of Directors' Assignment Distribution

148 Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020
Report on the Implementation of Directors' Duties in 2020

148 Program Orientasi Direksi
The Board of Directors' Orientation Program

149 Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi
The Board of Directors' Competence Training and Development

149 Etika Jabatan
Ethics in Position

- 150 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
The Board of Commissioners and Directors' Performance Assessment
- 150 Proses Pelaksanaan Penilaian
Assessment Process
- 151 Kriteria/Indikator Kinerja
Performance Criteria/Indicators
- 152 Pihak yang Melaksanakan Penilaian
Party Conducting the Assessment
- 154 Indikator Pengukuran Kinerja Utama Untuk Mengukur Kinerja Direksi Tahun 2020 Berdasarkan Rkap 2020
Key Performance Measurement Indicators for Measuring The Board of Directors' Performance in 2020 Based on the Company's Work Plan & Budget 2020
- 155 Penilaian atas Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Board of Commissioners' Supporting Committees
- 155 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 156 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and Directors Meetings
- 158 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
The Evaluation Performance of the Board of the Commissioners
- 159 Rapat Direksi
The Board of Directors' Meeting
- 162 Evaluasi Kinerja Direksi
The Board of Directors' Performance Evaluation
- 163 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 164 Risalah Rapat
Minutes of Meetings
- 164 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information About Major and Controlling Shareholders
- 164 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Affiliation of the Board of Commissioners and Directors with Major and Controlling Shareholders
- 166 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under the Board of Commissioners
- 169 Susunan Komite Audit
Audit Committee Composition
- 170 Profil Komite Audit
Audit Committee's Profile
- 177 Profil Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of the Nomination and Remuneration Committee
- 180 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 181 Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of Corporate Secretary
- 181 Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Training Program
- 182 Audit Internal
Internal Audit
- 183 Profil Unit Audit Internal
Internal Audit Unit's Profile
- 184 Piagam Audit Internal
Internal Supervisory Unit Charter
- 185 Struktur dan Kedudukan Internal Audit
Structure and Position of Internal Supervisory Unit
- 186 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal
Report on the Implementation of Internal Audit Activities
- 186 Program Pelatihan AUDIT INTERNAL
Training Program of Internal Supervisory Unit
- 187 Akuntan Publik
Public Accountant
- 187 Mekanisme Penunjukkan Akuntan Publik
Public Public Accountant Appointment Mechanisms
- 188 Periode Audit dan Biaya Audit
Audit Period and Audit Fees
- 189 Manajemen Risiko
Risk Management
- 193 Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Upaya Mitigasi Risiko
Risks Faced by Companies and Risk Mitigation Measures
- 194 Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement
- 196 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Policy
- 196 Informasi Praktik Bad Corporate Governance
Bad Corporate Governance Practice Information



- 196 Ketidakpatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Non-Compliance in Fulfilling Tax Obligations
- 197 Informasi Ketidakesesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Incompatible Information on Annual Reports and Financial Reports Presentation
- 197 Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Important Issues Faced by the Company
- 198 Sanksi Administratif
Administrative Sanction
- 198 Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct
- 201 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
- 202 Penanganan Pengaduan
Whistleblowing Supervision
- 203 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data
- 205 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors
- 205 Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

06 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility*

- 210 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
Governance of Social Responsibilities
- 217 Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia
Social Responsibility Related to Human Rights
- 222 Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil
Social Responsibilities Related to Fair Operations
- 224 Tanggung Jawab Sosial Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
Social Responsibilities of the Environmental Preservation
- 227 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibilities Related to Labour, Health, and Safety
- 231 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Mitra Kerja
Corporate Social Responsibilities Related to Business Partner Responsibilities
- 232 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development



07 Laporan Keuangan *Financial Reports*





PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



01

Kilas **Kinerja**
Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlight

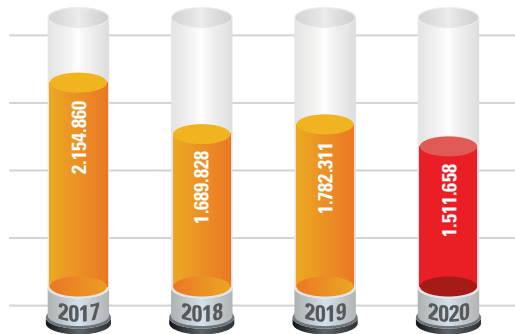
(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

(in million Rupiah unless stated otherwise)

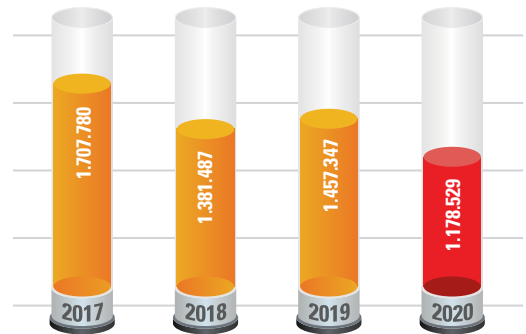
Uraian	2020	2019	2018	2017	Description
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian					Statements of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Penjualan	1.511.658	1.782.311	1.689.828	2.154.860	Sales
Beban Pokok Penjualan	1.178.529	1.457.347	1.381.487	1.707.780	Cost of Goods Sold
Laba Kotor	333.128	324.963	308.341	447.080	Gross Profit
Beban Usaha	177.173	192.114	188.955	179.176	Operating Expenses
Laba Usaha	155.955	132.848	119.385	267.903	Profit from Operations
Beban Lain-Lain - Neto	(51.803)	(105.180)	(67.204)	(56.047)	Other Expenses – Net
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	104.151	27.668	52.180	211.856	Income Before Tax Expense
Laba Neto Tahun Berjalan	81.273	21.139	36.800	153.390	Profit for the Year, Net
Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain-Setelah Pajak	205	(261)	(979)	800	Other Comprehensive Income (Loss)-After Tax
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	81.479	20.878	35.820	154.191	Total Current Comprehensive Income
Laba Neto Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:					Net Profit for the Year Attributable to:
• Pemilik Entitas Induk	81.072	21.504	36.881	153.501	• Parent Entity Owner
• Kepentingan Non Pengendali	200	(365)	(80)	(110)	• Non-controlling interests
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:					Comprehensive Income for the Year Attributable to:
• Pemilik Entitas Induk	81.277	21.244	35.900	154.301	• Parent Entity Owner
• Kepentingan Non Pengendali	201	(366)	(79)	(110)	• Non-controlling interests
Laba Saham yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (dalam Rp Penuh)	311,32	4.300.978	7.376.232	30.700.258	Profit Share Attributable to Owners of the Parent Entity (in full Rp)



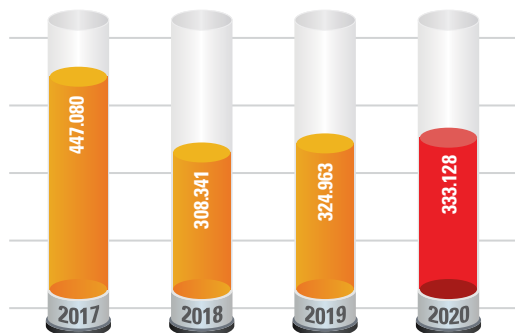
Penjualan / Sales



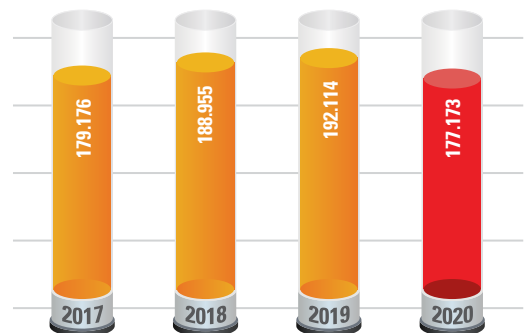
Beban Pokok Penjualan / Cost of Goods Sold



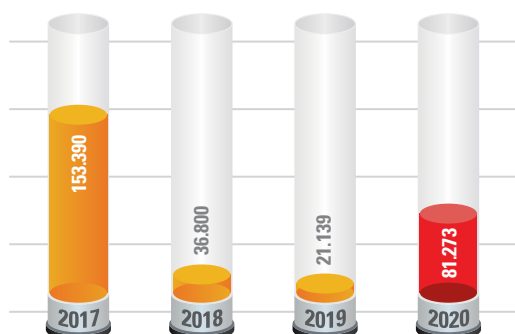
Labar Kotor / Gross Profit



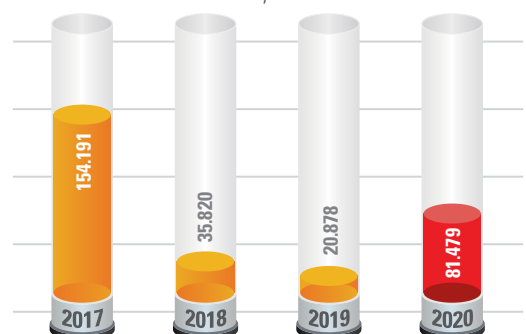
Beban Usaha / Operating Expenses



Labar Neto Tahun Berjalan / Profit for the Year, Net



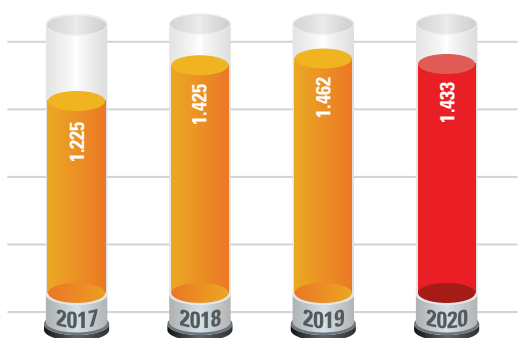
Total Labar Komprehensif Tahun Berjalan / Total Current Comprehensive Income



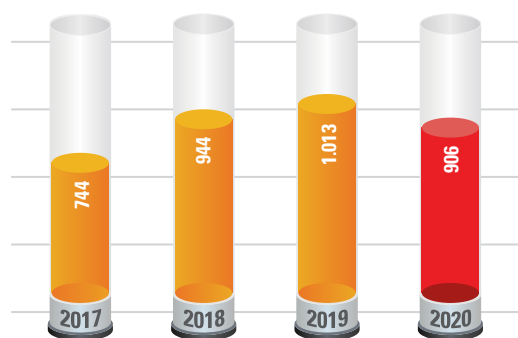
(dalam miliar Rupiah)

(in billion Rupiah)

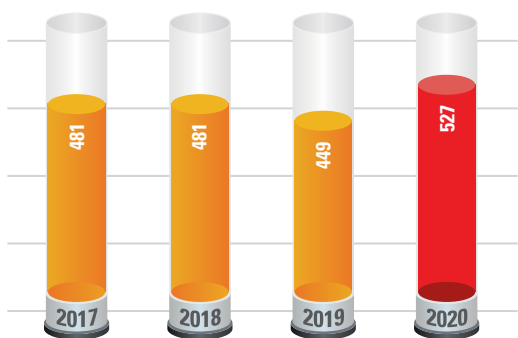
Uraian	2020	2019	2018	2017	Description
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					Statements of Consolidated Financial Position
Jumlah Aset	1.433	1.462	1.425	1.225	Total Assets
Jumlah Liabilitas	906	1.013	944	744	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	527	449	481	481	Total Equity
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62,5	50	50	50	Issued and Paid-up Capital
Rasio Keuangan					Financial Ratio
Laba Bersih Terhadap Aset	5,67%	1,45%	2,58%	12,52%	Return on Assets
Laba Bersih Terhadap Ekuitas	15,43%	4,71%	7,64%	31,91%	Return on Equity
Rasio Lancar	144%	126%	147%	115%	Current Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	172%	226%	196%	155%	Debt to Equity Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	63,23%	69%	66%	61%	Debt to Asset Ratio

Jumlah Aset / Total Assets


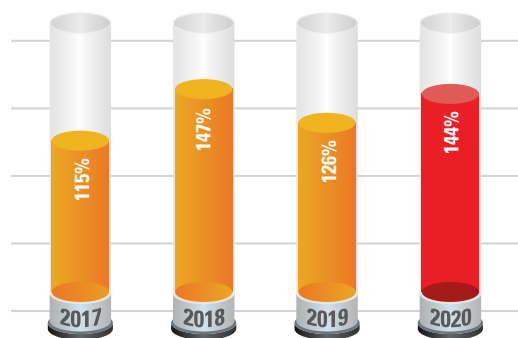
(dalam miliar rupiah/in billion rupiah)

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities


(dalam miliar rupiah/in billion rupiah)

Jumlah Ekuitas / Total Equity


(dalam miliar rupiah/in billion rupiah)

Rasio Lancar / Current Ratio


(dalam miliar rupiah/in billion rupiah)



Ikhtisar Saham 2020

2020 Share Highlights

Jumlah saham beredar Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar 156.250.000 saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp125.000.000.000.

The total outstanding shares of the Company as of December 31, 2020 amounted to 156,250,000 shares with a market capitalization of Rp125.000.000.000.

Pergerakan Harga Saham PT Pinago Utama Tbk Tahun 2020

Share Price Movement of PT Pinago Utama Mitra Tbk in 2020

	2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Harga Saham Pembukaan (Rp) <i>Opening Stock Price (Rp)</i>	0	0	0	250
Harga Saham-Tertinggi (Rp) <i>Highest Stock Price (Rp)</i>	0	0	0	850
Harga Saham-Terendah (Rp) <i>Lowest Stock Price (Rp)</i>	0	0	0	250
Harga Saham-Penutupan (Rp) <i>Closing Stock Price (Rp)</i>	0	0	0	800
Volume Saham <i>Stock Volume</i>	0	0	0	11.768.900
Jumlah Saham Beredar <i>Outstanding Share</i>	0	0	0	156.250.000

Ikhtisar Obligasi

Bonds Overview

Per 31 Desember 2020, Perseroan tidak menerbitkan obligasi sehingga Perseroan tidak menyajikan Informasi tentang:

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);
2. Tingkat bunga/imbalan;
3. Tanggal jatuh tempo; dan
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2019 dan 2020.

Up to December 31, 2020, the Company did not issue any corporate bonds; thus, the following information are not elucidated here:

1. *Outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;*
2. *Interest rate/reward;*
3. *Maturity date; and*
4. *Bonds/sukuk rating in 2019 and 2020.*

Perdagangan Saham

Stock Trading

Sampai akhir tahun 2020, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) yang dilakukan oleh Perseroan.

Until the end of 2020, the Company did not face any stock trading suspension or stock delisting.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

- | | |
|--|--|
| 1. Sertifikat ISPO PT Pinago Utama Tbk | 1. <i>ISPO Certificate of PT Pinago Utama Tbk</i> |
| 2. Sertifikat ISPO PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera | 2. <i>PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera's ISPO certificate</i> |
| 3. Sertifikat ISPO KUD Sejahtera - Plasma KKPA 1 dan 2 | 3. <i>ISPO KUD Sejahtera Certificate - Plasma KKPA 1 and 2</i> |
| 4. Sertifikat ISO 9001:2015 Pabrik CRF | 4. <i>ISO 9001: 2015 CRF Factory Certificate</i> |
| 5. Sertifikat ISO 9001:2015 Pabrik RSS | 5. <i>ISO 9001: 2015 RSS Factory Certificate</i> |
| 6. Sertifikat ISO 14001:2015 Pabrik CRF | 6. <i>ISO 14001: 2015 CRF Factory Certificate</i> |
| 7. Sertifikat ISO 14001:2015 Pabrik RSS | 7. <i>ISO 14001: 2015 RSS Factory Certificate</i> |
| 8. SNI 06-1903-2000 Pabrik CRF | 8. <i>SNI 06-1903-2000 CRF Factory</i> |
| 9. SNI 06-0001-1987 Pabrik RSS | 9. <i>SNI 06-0001-1987 RSS Factory</i> |
| 10. Sertifikasi Organik Pabrik Improbio | 10. <i>Improbio Factory Organic Certification</i> |
| 11. Sertifikasi Industri Hijau Pabrik CRF | 11. <i>CRF Factory Green Industry Certification</i> |
| 12. Penghargaan Proper Biru CRF | 12. <i>CRF Blue Proper Award</i> |
| 13. Penghargaan Proper Biru PMKS | 13. <i>PMKS Blue Proper Award</i> |
| 14. Penghargaan Pengelolaan KARHUTLAH Peringkat "Sangat Baik" tingkat Provinsi Sumatra Selatan | 14. <i>for "Excellent" rating in the Management of Forest and Forestry in South Sumatra Province</i> |

Peristiwa Penting

Significant Events

- | | |
|--|---|
| 1. Kick Off Budget Meeting 8 Januari 2020
PT Pinago Utama Tbk menyelenggarakan <i>Kick Off Budget Meeting</i> di Kantor Group Musi Banyuasin pada tanggal 8 Januari 2020. | 1. Kick Off Budget Meeting January 8, 2020
<i>PT Pinago Utama Tbk held a Kick Off Budget Meeting at the Musi Banyuasin Group Office on January 8, 2020.</i> |
| 2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 4 Juni 2020
Mengenai perubahan AD/ART Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka sekaligus perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. | 2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated on June 4, 2020
<i>Regarding the changes in the statutes of the Company from a private company to a public company as well as changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i> |
| 3. Pengesahan Menkumham 5 Juni 2020

Pengesahan Menkumham No.AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pinago Utama Tbk. | 3. Ratification of the Ministry of Law and Human Rights dated on June 5, 2020
<i>Ratification of the the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Pinago Utama Tbk.</i> |
| 4. IPO 31 Agustus 2020
Pada tanggal 31 Agustus 2020 saham PT Pinago Utama Tbk pertama kali melantai ke Bursa. | 4. IPO August 31, 2020
<i>On August 31, 2020 the shares of PT Pinago Utama Tbk were first listed on the Stock Exchange.</i> |





PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries

02

Laporan **Manajemen**
Management Report



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Kilas Kinerja
Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report



WILSON SUTANTIO

Komisaris Utama
President Commissioner



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, semoga berkah dan rahmat-Nya selalu dilimpahkan untuk kita semua. Dewan Komisaris mensyukuri bahwa Perseroan berhasil melalui tahun 2020 dengan baik di tengah pandemi Covid-19. Merupakan kehormatan bagi saya, mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT Pinago Utama Tbk untuk tahun buku 2020.

Perkembangan Ekonomi Global dan Indonesia

Perbaikan perekonomian global berlanjut pada kuartal IV

Pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, terutama Amerika Serikat (AS). Perbaikan juga didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran Covid-19, yang meningkatkan investasi di sektor manufaktur, di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi negara berkembang lainnya. Pemulihan ekonomi global mendorong peningkatan beberapa indikator dini bulan September 2020, seperti mobilitas masyarakat global, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur dan Jasa di beberapa negara, serta keyakinan konsumen di AS dan kawasan Eropa. Ke depan, berlanjutnya perbaikan ekonomi global didorong oleh berkurangnya penyebaran COVID-19, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sesuai prakiraan sebelumnya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, dipicu isu geopolitik seperti ketidakpastian pemilu AS dan perundingan Brexit, serta ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok. Perkembangan ini berdampak pada terbatasnya aliran modal ke negara berkembang dan menahan penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan III 2020 tetap terjaga, di tengah dinamika penyesuaian aliran modal global

Transaksi berjalan triwulan III 2020 diperkirakan mencatat *surplus* dipengaruhi perbaikan ekspor dan penyesuaian impor sejalan permintaan domestik yang belum kuat. Prakiraan ini didorong potensi kenaikan surplus neraca perdagangan triwulan III 2020 yang relatif besar dibandingkan dengan *surplus* pada triwulan sebelumnya. Pada Juli-Agustus 2020, neraca perdagangan mencatat *surplus* 5,57 miliar

Dear respected Shareholders and Stakeholders,

Let us express our fervent sense of obligation to the Almighty and Merciful Lord and may His benevolence and lenience be poured upon us, eternally. The Board of Commissioners is grateful that the Company has managed to go through 2020, distinctively, in the midst of the Covid-19 hindrances. It is an ardent honour for me, representing the Board of Commissioners, to transparently convey the Annual Report of PT Pinago Utama Tbk for 2020 fiscal year.

Global and Indonesia Economic Development

The global economic recovery continues in towards Q4

World economic growth continues to improve due to the size of the fiscal stimulus in several developed countries, especially the United States (US). The improvement was also supported by China's economic recovery as a result of the size of the fiscal stimulus and the reduced spread of Covid-19, which increased investment in the manufacturing sector, amidst the limited improvements in other developing economies. The global economic recovery has prompted an increase in several early indicators for September 2020, such as global community mobility, the Manufacturing and Services Purchasing Managers' Index (PMI) in several countries, as well as consumer confidence in the US and the European region. Going forward, the continued improvement in the global economy will be driven by the reduced spread of COVID-19, increased mobility of the people, and continued policy stimulus. The improvement in the global economy prompted an increase in trade volume and world commodity prices in line with previous forecasts. Meanwhile, global financial market uncertainty remains high, triggered by geopolitical issues such as uncertainty in the US election and Brexit negotiations, as well as tensions in US-China trade relations. These developments have resulted in limited capital flows to developing countries and prevented the strengthening of the currencies of various countries, including Indonesia.

The resilience of Indonesia's external sector in the third quarter of 2020 was maintained, amid the dynamics of adjustments to global capital flows

The current account for Q3/2020 is predicted to record a surplus, influenced by improvement in exports and adjustment in imports, in line with subdued domestic demand. This forecast is driven by the potential for a relatively large increase in the trade balance surplus for the third quarter of 2020 compared to the surplus in the previous quarter. In July-August 2020, the trade balance recorded a surplus

dolar AS. Dengan prospek *surplus* neraca transaksi berjalan tersebut dan *surplus* neraca finansial, secara keseluruhan neraca pembayaran pada triwulan III 2020 diperkirakan mengalami *surplus*, meskipun terdapat aliran keluar investasi portofolio asing (*net outflows*) sebesar 1,24 miliar dolar AS. Pada awal Oktober 2020, aliran masuk modal asing secara berangsur membaik sehingga per 9 Oktober 2020 tercatat *net inflows* sebesar 0,33 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2020 tetap tinggi, yakni 135,2 miliar dolar AS, setara pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun 2020 diperkirakan tetap rendah, di bawah 1,5% dari PDB, sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Wabah Covid-19 diperkirakan menurunkan kinerja ekonomi negara maju maupun negara berkembang

Dampak wabah Covid-19 akan memengaruhi ekonomi setidaknya melalui tiga jalur, yaitu jalur keuangan akibat pemburukan *confidence* dunia, jalur *supply chain* akibat gangguan produksi terutama di Tiongkok, dan jalur pariwisata akibat pembatasan perjalanan oleh berbagai negara. Di Tiongkok, meski penyebaran Covid-19 pada awal Maret 2020 telah menurun (lihat artikel Dampak *Coronavirus* Terhadap Ekonomi Global), kebijakan pemerintah Tiongkok yang ketat dalam mengatasi penyebaran Covid-19-antara lain mengisolasi Provinsi Hubei-diprakirakan menekan kinerja ekonomi Tiongkok terutama pada TW1-20. Di luar Tiongkok, sejumlah negara telah melakukan restriksi perjalanan yang ketat dan bahkan melakukan isolasi secara nasional seperti yang dilakukan oleh Italia. Kebijakan restriksi perjalanan yang ketat akan menurunkan *outlook* ekonomi berbagai negara. OECD memprediksi *outlook* ekonomi negara utama akan turun signifikan, diantaranya Tiongkok, AS, dan Kawasan Euro yang masing-masing diprediksi tumbuh 4,9% yoy, 1,9% yoy, dan 0,8% yoy. Sementara itu, ekonomi Brazil diprakirakan hanya tumbuh 1,7% yoy. Brazil yang semula diprediksi akan menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi dunia 2020 berpotensi tumbuh tidak sebaik prakiraan sebelumnya, antara lain akibat pelemahan permintaan dari Tiongkok dan penurunan harga komoditas.

Secara domestik, Pemerintah Indonesia optimis dalam menangani penyebaran Covid-19 melalui kebijakan berupa percepatan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong adanya proyek-proyek baru, khususnya di proses hilirisasi industri mineral dan batu bara. Langkah tersebut diharapkan akan mendongkrak kebutuhan baja khususnya steel struktur. Investasi di sektor jasa pertambangan sampai dengan

of US\$5.57 billion. With the prospect of a current account surplus and financial balance surplus, the overall balance of payments is predicted to experience a surplus in Q3/2020, despite the net outflows of US\$1.24 billion in foreign portfolio investment. At the beginning of October 2020, foreign capital inflows gradually improved so that as of October 9, 2020, a net inflow of US\$0.33 billion was recorded. The position of Indonesia's foreign exchange reserves at the end of September 2020 remained high, namely 135.2 billion US dollars, equivalent to financing 9.5 months of imports or 9.1 months of imports and servicing of government external debt, and is above the international adequacy standard of around 3 months of imports. Looking forward, the overall current account deficit for 2020 is projected to remain low, below 1.5% of GDP, thereby supporting the resilience of the external sector.

The Covid-19 outbreak is predicted to reduce economic performance in both developed and developing countries

The impact of the Covid-19 outbreak will affect economy through at least three routes, namely the financial route due to deteriorating world confidence, the supply chain due to production disruptions, especially in China, and the tourism route due to travel restrictions by various countries. In China, although the spread of Covid-19 in early March 2020 has decreased (see article *The Impact of Coronavirus on the Global Economy*), the Chinese government's strict policies in dealing with the spread of Covid-19 - including isolating Hubei Province are predicted to suppress China's economic performance, especially in Q1-20. Outside of China, a number of countries have implemented strict travel restrictions and even carried out national isolation, as has been done by Italy. The strict travel restriction policy will lower the economic outlook of various countries. The OECD predicts that the economic outlook for major countries will decline significantly, including China, the US and the Euro Area, which are predicted to grow by 4.9% yoy, 1.9% yoy and 0.8% yoy, respectively. Meanwhile, the Brazilian economy is projected to grow only 1.7% yoy. Brazil, which was originally predicted to be one of the driving factors for world economic recovery in 2020, has the potential to grow less than previously predicted, partly due to weakening demand from China and falling commodity prices.

Domestically, the Indonesian Government is optimistic in dealing with the spread of Covid-19 through policies in the form of accelerating national economic recovery which encourages new projects, especially in the downstream process of the mineral and coal industry. This step is expected to boost demand for steel, especially steel structures. Investment in the mining services sector until the third quarter of



kuartal III 2020 mencapai Rp70,31 triliun. Jumlah ini meningkat cukup signifikan yakni 25,4% dibandingkan dengan 2019 yang sebesar Rp56,07 triliun.

Pada sektor perkebunan kelapa sawit nasional, dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif juga dirasakan dengan menurunnya permintaan CPO sehingga harga sempat menyentuh level angka USD 531 per ton pada bulan Mei 2020 yang disebabkan oleh *lockdown* di beberapa negara tujuan ekspor. Hal yang sama juga dialami industri karet, dimana ekspor karet alam mengalami penurunan dari berbagai negara industri yang menggunakan bahan baku karet sehingga harga sempat menyentuh angka 1 USD dari rata-rata di awal tahun 2020 sekitar 1,4 USD. Di Sumatera Selatan, karet sempat menyentuh harga Rp13.892/kg untuk KKK 100%, untuk KKK 50-60% senilai Rp6.946-8.335/kg pada 30 Maret 2020.

Selain faktor permintaan dan harga, tantangan lain yang dihadapi adalah penurunan produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang terjadi sebagai dampak dari musim kemarau panjang tahun 2019. Sedangkan, di sektor karet, wabah *Pestalotipis* atau penyakit gugur daun pada pohon karet membayangi produksi yang menurun dari sektor karet nasional sepanjang tahun 2020.

Di sektor kelapa sawit, pertumbuhan ekonomi ditopang juga oleh kenaikan harga CPO di triwulan IV 2020 yang juga menopang kinerja keuangan Perseroan perkebunan. Di bulan Desember 2020, harga CPO mencapai level tertinggi di USD 959 per ton setelah sebelumnya berfluktuasi, dimana harga terendah mencapai pada level USD 531 per ton pada Mei yang disebabkan oleh kebijakan *lockdown* di beberapa negara tujuan ekspor. Harga komoditas karet juga mengalami perbaikan di triwulan IV 2020, dimana di Bulan Oktober di bursa karet *sicom* dan *tocom* mengalami lonjakan harga. Khusus di bursa *tocom*, harga sempat di 232.1 yen per kg, harga tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Walaupun ekspor minyak sawit Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,1% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, permintaan minyak sawit di pasar domestik relatif lebih stabil karena pelaksanaan program mandatori B30 bauran 30% biodiesel di tahun 2020.

Kondisi tersebut merupakan refleksi dari kinerja berkesinambungan yang mampu menopang Perseroan untuk melalui 2020. Perseroan siap untuk mengaktualisasikan kinerja yang lebih baik dan menjawab setiap kesempatan dengan performa yang lebih gemilang.

2020 reached Rp70.31 trillion. This number increased quite significantly, namely 25.4% compared to 2019, which amounted to Rp56.07 trillion.

In the national oil palm plantation sector, the impact of negative economic growth was also perceived by the decline in demand for CPO so that prices had touched the level of USD 531 per ton in May 2020 due to lockdown in several export destination countries. The same thing was experienced by the rubber industry where natural rubber exports experienced a decline from various industrialised countries that used rubber as raw material so that the price had touched 1 USD from the average in early 2020 of around 1.4 USD. In South Sumatra, rubber had touched a price of Rp13,892/kg for a 100% KKK, for a 50-60% KKK worth Rp6,946-8,335/kg on March 30, 2020.

Apart from demand and price factors, another challenge faced is the decline in the production of Fresh Fruit Bunches (FFB) which occurred as a result of the long dry season in 2019. Meanwhile, in the rubber sector, the outbreak of *Pestalotipis* or deciduous disease on rubber trees overshadows the decreased production of national rubber sector throughout 2020.

In the palm oil sector, economic growth was also supported by the increase in CPO prices in the fourth quarter of 2020 which also supported the financial performance of plantation companies. In December 2020, CPO prices reached the highest level at USD 959 per ton after previous fluctuations, where the lowest price reached USD 531 per ton in May due to lockdown policies in several export destination countries. The price of rubber commodities also experienced improvement in the fourth quarter of 2020, where in October the *sicom* and *tocom* rubber exchanges experienced a price hike. Especially on the *tocom* exchange, the price was at 232.1 yen per kg, the highest price in the last 3 years. Although Indonesia's palm oil exports decreased by 9.1% in 2020 compared to 2019, the demand for palm oil in the domestic market is relatively more stable due to the implementation of the mandatory 30% biodiesel mix B30 program in 2020.

The happenstances are a reflection of performance sustainability capable of sustaining the Company in terms of facing challenges in 2020. Thus, the Company is prepared to actualise better performances and to embrace opportunities within work prominence.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kami memandang bahwa pertumbuhan Perseroan di tahun 2020 sangat luar biasa; terutama dilihat dari kemampuan Perseroan untuk tetap bertumbuh dan meraih peluang yang ada terlepas dari kondisi global dan Indonesia yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi yang meliputi aspek operasional, keuangan dan aspek lainnya yang berkaitan erat bagi keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan. Dasar penilaian yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi pencapaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dewan Komisaris terus mendorong kepada manajemen dan seluruh karyawan Perseroan untuk berupaya secara konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di seluruh area Perseroan baik di lokasi perkebunan, pabrik, maupun perkantoran di seluruh area kerja Perseroan.

Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, Dewan Komisaris juga sepanjang tahun 2020 mengurangi aktivitas tatap muka secara langsung. Namun demikian, fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan tetap dilakukan melalui proses komunikasi langsung dengan Direksi, pertemuan, rapat dan sejenisnya banyak dilakukan melalui *teleconference*, telepon dan aplikasi *zoom meeting*. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam hal pencapaian RKAP 2020 di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Merupakan hal yang patut disyukuri bahwa Perseroan berhasil mewujudkan kinerja yang cukup stabil di tahun 2020 serta memberikan kontribusi kepada Perseroan dan juga kepada pemegang saham lainnya.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi suatu pencapaian yang baik bagi Perseroan dimana "PT Pinago Utama" bertransformasi menjadi "PT Pinago Utama Tbk" di tahun 2020. Perseroan telah sukses melaksanakan *Initial Public Offering (IPO)* dan mulai mencatatkan saham "PNGO" di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2020. Karena itulah, Dewan Komisaris juga harus memastikan bahwa manajemen Perseroan telah melaksanakan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

On a basis of the aforementioned background, we had a point of view that the Company's growth was extremely in a good level in 2020; particularly should it be scrutinised by the Company's capability of fetching growth and of attaining the occasion laying on the table regardless to the atmosphere of global and Indonesia which were full of confrontations and of unpredictability.

Assessment on the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners has undertaken the assessment on the Board of Directors consisting of operational aspect, financial movement, and other layers regarding to sustainability of the Company's business activity. The principle of assessment exercised by the Board of Commissioners was the achievement upon the Company's Work Plan and Budget.

The Board of Commissioners continues to encourage the management and all employees of the Company to consistently strive to implement health protocols in order to prevent the spread of Covid-19 in all areas of the Company, both in plantations, factories and offices in all Company work areas.

In order to comply with health protocols, the Board of Commissioners also throughout 2020 will reduce face-to-face activities. The supervisory function of the Company's operations, however, is still performed through the direct communication process with the Board of Directors, meetings, and others are mostly carried out through teleconferences, telephones, and zoom meeting applications. The Board of Commissioners appreciated the performance showcased by the Board of Directors in terms of 2020 Work Plan and Budget achievement in the middle of economic challenges and dynamics. It is a respectful moment for us that the Company managed to embody an acceptable performance in 2020 and contributed to the Company as well as to other shareholders.

The Board of Commissioners also appreciates a good achievement in the morning of the Company where "PT Pinago Utama" transformed into "PT Pinago Utama Tbk" in 2020. The Company has successfully carried out its Initial Public Offering (IPO) and started listing "PNGO" shares on the Indonesia Stock Exchange at August 31, 2020. For this reason, the Board of Commissioners must also ensure that the Company's management has carried out the company's operations in accordance with the principles of Good Corporate Governance including the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in accordance with the regulations set by the Government.



Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Bahkan, Dewan Komisaris juga menilai bahwa antar anggota Direksi saling berkoordinasi dengan baik dan memiliki sinergi yang solid sehingga Perseroan dapat mewujudkan kinerja yang positif. Meskipun seiring berjalannya waktu tantangan yang muncul di sepanjang tahun senantiasa berubah, hal ini mampu disikapi dengan baik oleh Direksi dengan merumuskan dan menerapkan inisiatif strategis yang tepat sasaran.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Direksi

Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian penting pada pengawasan pelaksanaan strategi yang disusun oleh Direksi. Hal ini sejalan dengan peran Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi Perseroan berada di jalur yang tepat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Perseroan didasarkan pada Undang-Undang, Anggaran Dasar, *Code of Conduct* GCG, serta pedoman kerja yang dimiliki Perseroan.

Atas dasar ini, selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah berupaya sebaik-baiknya untuk memastikan pengawasan terhadap strategi tersebut berjalan dengan baik. Secara berkala, Dewan Komisaris menghadiri Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda pemaparan informasi terkait kinerja Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris atas prakarsa Direksi juga melakukan pertemuan dalam hal terdapat pembahasan yang bersifat penting dan darurat atau hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

Pada khususnya, fungsi pengawasan Dewan Komisaris senantiasa ditingkatkan secara signifikan. Dalam praktiknya, Dewan Komisaris juga berupaya menjaga komunikasi yang intensif dengan Direksi agar pengawasan terhadap kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan lebih terfokus dan terencana.

Pandangan atas Penerapan GCG dan Whistleblowing System

Implementasi tata kelola yang baik merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris tidak hanya

On the Board of Commissioners' vantage point, the Board of Directors has executed their duties in an excellent manner on basis of their own realms, respectively. In point of fact, the Board of Commissioners has also assessed that the coordination amongst the Board of Directors was running effectively and was having a solid synergy leading the Company to be able to personify positive vibes of performances. Granted that the challenges which have emerged throughout the year have always revamped, this has been well-addressed by the Board of Directors by formulating and implementing strategic initiatives which were pinning on the paramount scheme.

Supervision on the Implementation of Board of Directors' Strategy

The Board of Commissioners has perpetually given a pivotal attention to the supervision of the strategic implementation prepared by the Board of Directors. This was in line with the role of the Board of Commissioners to ensure that the implementation of the Company's strategy was on the right track without overriding compliance with applicable regulations. The authority of the Board of Commissioners in supervising the Company's business activities is on the basis of the Law, Articles of Association, GCG's Code of Conducts, and work guidelines that the Company possesses.

On the baseline, during 2020 the Board of Commissioners has made every attempt to vouch that the oversight of the strategy has been well-governed. At regular intervals, the Board of Commissioners attended the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors with the information presentation agenda related to the Company's performance. Furthermore, the Board of Commissioners on the initiative of the Board of Directors also conducted meetings in the event of imperative and emergency discussions or matters requiring the approval of the Board of Commissioners.

In specific axis, the supervisory function of the Board of Commissioners has always been significantly improved. In practice, the Board of Commissioners has also endeavoured to maintain intensive communication with the Board of Directors; thus, supervision of the Company's business activities could be more focused and well-planned.

Viewpoint on GCG and Whistleblowing System Implementation

The completion of good governance has been the duty and the responsibility of the Board of Commissioners together with the Board of Directors. In conducting them, the Board of Commissioners was

bertanggung jawab pada hasil akhir tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi berkomitmen untuk mewujudkan implementasi tata kelola perusahaan yang melebihi ekspektasi (*beyond governance*) sehingga dapat menghasilkan nilai yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan proses-proses penyesuaian yang dilakukan Perseroan untuk selaras dengan regulasi di bidang pasar modal dan perusahaan publik, maka Komposisi di Dewan Komisaris dilakukan perubahan dan juga disertakan organ-organ pendukung seperti Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perubahan komposisi Dewan Komisaris tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pinago Utama Tbk, 05 Juni 2020. Untuk kelengkapan pendukung organ komisaris, maka dibentuk Komite Audit melalui SK No.003/PU/SK-KOM/VI/2020, 08 Juni 2020 dan juga dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui SK No. 004/PU/SK-KOM/VI/2020, 08 Juni 2020. Terbentuknya organ-organ pendukung organ utama tersebut diharapkan dapat semakin terpelihara secara konsistennya fungsi pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di setiap aspek merupakan kunci untuk meraih sukses perseroan untuk tahun ini, mulai melakukan *self-assessment* yang mana di tahun 2020 mencapai skor 75,927 poin, lebih tinggi dari yang ditargetkan, yakni 60,001 poin sebagai nilai awal untuk perusahaan yang baru IPO dari 100,000 poin maksimum dari aspek, indikator, dan parameter yang dilakukan penilaian secara mandiri.

Penerapan GCG di Perseroan tidak lagi sebagai sesuatu yang bersifat *mandatory* tetapi sudah menjadi budaya dan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas bisnis mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di lapangan. Namun, masih banyak *area of improvement* GCG yang harus dilaksanakan Perseroan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian GCG tersebut.

Di sisi lain, penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Perseroan sudah berjalan cukup baik. Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris tidak menerima adanya laporan pelanggaran yang terjadi. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa kepatuhan di dalam Perseroan berjalan dengan baik. Dewan Komisaris bekerja sama dengan UAI (Unit Audit Internal) dalam menjalankan peran pengawasan terhadap implementasi sistem pelaporan pelanggaran di Perseroan. Dalam hal ini, semua temuan yang masuk melalui

not only responsible for the final results, but also monitored the process to achieve the expected results in a constant effect. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, have been committed to actualising beyond governance; thus, it could manifest sustainable value.

In connection with the adjustment processes carried out by the Company to be in line with regulations in the capital market and public companies, the composition of the Board of Commissioners was revamped and also included supporting organs, such as the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Changes in the composition of the Board of Commissioners are stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0038685.AH.01.02. Year 2020 concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Pinago Utama Tbk, June 5, 2020. For completeness of the board of commissioners' organs, an Audit Committee was formed through a Decree. No.003/PU/SK-KOM/VI/2020, June 8, 2020, and a Nomination and Remuneration Committee was also formed through Decree No. 004/PU/SK-KOM/VI/2020, June 8, 2020. The formation of the supporting organs of the main organs is expected to be more consistent in the monitoring function and the application of the principles of good corporate governance (GCG).

The application of the principles of good corporate governance in every aspect is the key to achieving the company's success this year, starting to carry out self-assessments which in 2020 reached a score of 75.927 points, higher than the target of 60.001 points as the initial score for companies that have just IPO of the maximum 100.000 points of aspects, indicators, and parameters that are assessed independently.

The implementation of GCG in the Company is no longer something that is mandatory but has become a culture and necessity in performing business activities from top management to employees in the field. However, there are still crowds of areas of GCG improvement that the Company requires to implement based on the recommendations of the GCG assessment.

On the other hand, the implementation of a whistleblowing system in the Company has run, efficiently. Throughout 2020, the Board of Commissioners did not receive reports of violations. This was one indicator that compliance in the Company was running well. The Board of Commissioners cooperated with IAU (Internal Audit Unit) in carrying out a supervisory role on the implementation of the violation reporting system in the Company. Within this term, all findings inserting through the violation mechanism reporting system were



mekanisme sistem pelaporan pelanggaran senantiasa ditindaklanjuti secara bersama melalui rapat Dewan Komisaris dengan UAI.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite di bawah Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2020, komite-komite tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik dengan mengimplementasikan banyak inisiatif baru untuk menunjang kegiatan Dewan Komisaris.

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Di tahun 2020, Komite Audit telah melakukan perannya dengan optimal sehingga sangat mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan.

Di sisi lain, Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Secara terpisah, tugas Komite Nominasi adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menominasikan Direktur baru pada dewan, dan juga memfasilitasi pemilihan direksi baru oleh pemegang saham. Sementara Komite Remunerasi bertugas menentukan besaran kompensasi atau gaji atau bonus bagi direksi dan komisaris.

Selain pelaksanaan program kerja yang tepat, peran dari masing-masing komite juga senantiasa ditingkatkan secara signifikan untuk dapat mendukung tugas dan kewajiban Dewan Komisaris lebih jauh. Berbekal dukungan kedua komite tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola yang baik di semua aspek operasional Perseroan.

Perubahan pada Komposisi Dewan Komisaris

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa di tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris Perseroan yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0038685.AH.01.02.

eternally followed up jointly through a meeting of the Board of Commissioners together with IAU.

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners' Committees

In terms of executing the duties and the responsibilities, the Board of Commissioners were assisted by the committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. During 2020, the committees showcased fine performance by applying bountiful new initiatives to support the activities of the Board of Commissioners.

The Audit Committee was designed to avail the Board of Commissioners in promoting corporate governance, establishing a sufficient internal control structure, improving the quality of financial disclosure and reporting, and reviewing the scope, accuracy, independence and objectivity of public accountants. In 2020, the Audit Committee has transacted its role, optimally, hence it strongly propelled the Board of Commissioners' oversight function of the Company's operations.

On the other hand, the Nomination and Remuneration Committee is formed by and is responsible to the Board of Commissioners in assisting in carrying out the functions and duties of the Board of Commissioners related to the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. Separately, the duties of the Nomination Committee are to identify, evaluate and nominate new Directors on the board, and also facilitate the selection of new directors by shareholders. Meanwhile, the Remuneration Committee is in charge of determining the amount of compensation or salary or bonus for directors and commissioners.

Besides the implementation of the legitimate work program, the role of each committee was also increased significantly to be able to support the duties and the obligations of the Board of Commissioners further. With the support of the both committees, the Board of Commissioners always encouraged the implementation of good governance standards in all layers of the Company's operations.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

On this occasion, we would like to convey that in 2020, the composition of the Company's Board of Commissioners stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0038685.

Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pinago Utama Tbk, 5 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

- Wilson Sutantio sebagai Komisaris Utama
- Hasan Tantri sebagai Komisaris
- Chairul Muluk sebagai Komisaris Independen

AH.01.02. Year 2020 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Pinago Utama Tbk on June 5, 2020, are as follows:

- *Wilson Sutantio as a President Commissioner*
- *Hasan Tantri as a Commissioner*
- *Chairul Muluk as an Independent Commissioner*

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1.	Wilson Sutantio	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	• Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. • KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020 • <i>Deed No. 7 dated June 4, 2020 Notary Fatiah Helmi, S.H.</i> • <i>KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. 2020 year</i>
2.	Hasan Tantri	Komisaris <i>Commissioner</i>	• Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. • KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020 • <i>Deed No. 7 dated June 4, 2020 Notary Fatiah Helmi, S.H.</i> • <i>KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. 2020 year</i>
3.	Chairul Muluk	Komisaris Independen <i>Commissioner</i>	• Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. • KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020 • <i>Deed No. 7 dated June 4, 2020 Notary Fatiah Helmi, S.H.</i> • <i>KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. 2020 year</i>

Pandangan atas Kebijakan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial

Komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tercermin dalam Kebijakan Keberlanjutan Perseroan. Dewan Komisaris akan terus memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perseroan telah sesuai dan memenuhi kriteria seperti diatur pada *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Perseroan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan mengingat tuntutan pasar yang menghendaki minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan menerapkan enam pilar bidang program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kepemudaan, bina lingkungan & pengembangan Infrastruktur.

Prospek Bisnis

Berdasarkan *status quo*, pandemi Covid-19 masih menjadi bayang-bayang tantangan di tahun 2021; namun, distribusi vaksin Covid-19 secara bertahap akan memberikan harapan kepada dunia atas pemulihan perekonomian global, walaupun waktu dan tingkat pemulihan pada tahun 2021 belum bisa diperkirakan secara pasti.

Analyses on Sustainable Policy and Social Responsibility

The commitment to carrying through business activities that are environmentally sound and sustainable is reflected in the Company's Sustainability Policy. The Board of Commissioners will continue to ensure that the oil palm plantations managed by the Company comply with the criteria stipulated in Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). The Company proceeds to make improvements in view of the market demands for sustainable palm oil.

Scrutinising the Corporate Social Responsibility, the Company implements six pillars of the Corporate Social Responsibility program which consists of community empowerment, education, health, sports and youth, environmental development & infrastructure development.

Business Prospects

Based on the status quo, the Covid-19 pandemic is still a shadow of challenges in 2021; However, the gradual distribution of the Covid-19 vaccine will give the world hope of a global economic recovery, although the time and rate of recovery in 2021 cannot be predicted with certainty.



Kampanye negatif di pasar global masih terus terjadi dan upaya pemerintah RI serta pelaku industri kelapa sawit di bawah naungan asosiasi, misalnya GAPKI, terus diperlukan untuk melakukan kampanye positif sebagai upaya menangkal efek lebih luas dari pengaruh kampanye negatif tersebut. Referendum Swiss di bulan Maret 2021 merupakan poin penting pagi menangnya kampanye positif dan sekaligus penekanan bahwa keberlanjutan harus menjadi perhatian serius agar memperkuat kepercayaan dan menumbuhkan keyakinan pasar internasional mengingat hasil tipis yang hanya unggul 3,3 persen menunjukkan bahwa isu kelapa sawit, dalam hal keberlanjutan, masih menjadi batu sandungan bagi kepercayaan dunia, dalam hal ini pasar Eropa.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel dengan bauran 30% (B30) dan komitmen Pemerintah terhadap program biodiesel diharapkan memberikan pengaruh positif untuk menopang permintaan maupun menjaga harga minyak sawit.

Dewan Komisaris tetap optimis bahwa melalui berbagai inovasi dan strategi di bawah arahan Direksi, Perseroan akan mampu bertahan di tengah efek domino dan semakin berkembang.

Apresiasi Kami

Kami ingin menyampaikan apresiasi kami kepada PT Pinago Utama Tbk, pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya. Apresiasi terdalam juga kami tujukan kepada segenap jajaran Direksi, karyawan, serta mitra bisnis yang senantiasa mendukung Perseroan untuk tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris sangat optimis bahwa keberhasilan Perseroan di masa depan akan sangat tergantung dari kesungguhan kita semua untuk bersama-sama membawa Pinago menjadi perusahaan yang kita inginkan bersama.

Negative campaigns in the global market continue to occur and the efforts of the Indonesian government and palm oil industry players under the auspices of the association, for example GAPKI, are continuously needed to carry out positive campaigns in an effort to counteract the wider effects of the negative campaign effects. The Swiss referendum in March 2021 is an important point in the morning of winning the positive campaign and at the same time emphasizes that sustainability must be a serious concern in order to strengthen trust and foster confidence in the international market considering that the thin result that is only 3.3 percent superior shows that the issue of palm oil, in terms of sustainability, still a stumbling block for world confidence, in this case the European market.

In Indonesia, the implementation of the mandatory biodiesel policy with a mix of 30% (B30) and the Government's commitment to the biodiesel program are expected to have a positive effect on both supporting demand and maintaining palm oil prices.

The Board of Commissioners remains optimistic that through various innovations and strategies under the direction of the Board of Directors, the Company will be able to survive in the midst of a domino effect and continue to grow.

Our Appreciation

We would like to sound off our appreciation to PT Pinago Utama Tbk, to shareholders, and to stakeholders for their trust and support. Our deepest recognition is addressed, too, to the entire Board of Directors, employees, and business partners who evermore spur the Company to grow and to develop. The Board of Commissioners is to be determined that the accomplishment of the Company in the future would rest on our straightforwardness to jointly take Pinago up to be the Company we all wish for.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,

Wilson Sutantio
Komisaris Utama
President Commissioner

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Wilson Sutantio

Jabatan Position	Komisaris Utama President Commissioner
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Medan, 28 September 1959 Medan, September 28, 1959
Usia Age	61 tahun 61 years of age
Domisili Domicile	Palembang
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated June 4, 2020 Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. 2020 year

Latar Belakang Pendidikan Education Background	SMA Senior High School
Pengalaman Kerja Working Experiences	- Direktur Utama Perseroan (1991-2009 dan 2012-2014), - Komisaris Perseroan (2009-2010), - Komisaris PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2010-2012), - Direktur PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2012-2019), - Direktur PT Hamparan Mutiara Hijau (2012-2019), - Direktur PT Musi Andalan Sumatera (2013-2019), - Direktur PT Buana Sriwijaya Sejahtera (2016-2020), - Direktur Utama di PT Buana Sriwijaya Sejahtera (2006-2016), - Komisaris di PT Sentosa Sriwijaya Sejahtera (2019-2020), - Direktur PT Buana Agro Mandiri (2017-2020), - Direktur PT Perkasa Anugerah Mining (2016-2020), - Direktur PT Sriwijaya Karya Persada (2013-2020), - Direktur PT Gading Karya Makmur (2012-2020), - Direktur Utama PT Gading Karya Makmur (2008-2012), - Direktur PT Sri Andal Lestari (2011-2020), - Direktur Utama di PT Buana Agro Mandiri (2011-2017) - Direktur PT Ciptamas Bumi Subur (2010-2020).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham He has an affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and shareholders
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Tidak ada None



Hasan Tantri

Jabatan <i>Position</i>	Komisaris <i>Commissioner</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Medan, 1 Desember 1956 <i>Medan, December 1, 1956</i>
Usia <i>Age</i>	64 tahun <i>64 years of age</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Dasar Hukum Pengkangkatan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated June 4, 2020 Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. 2020 year

Latar Belakang Pendidikan <i>Education Background</i>	- Master of Engineering, jurusan Engineering, University of Florida – USA (1983) - Bachelor of Engineering, jurusan Engineering dari Chinese Culture University, Taipei, Taiwan (1980)	- Master of Engineering, majoring in Engineering, University of Florida - USA (1983) - Bachelor of Engineering, majoring in Engineering from Chinese Culture University, Taipei, Taiwan (1980)
Pengalaman Kerja <i>Working Experiences</i>	- Engineering Superintendent, Fairchild Semiconductor, USA (1983-1989) - Komisaris Utama PT Pinago Utama Tbk (1991-2010 & 2012-2014), Direktur Utama (2010-2012) - Komisaris PT Hamparan Mutiara Hijau (2014-2015) - Direktur PT Hamparan Mutiara Hijau (2010-2014)	- Engineering Superintendent, Fairchild Semiconductor, USA (1983-1989) - President Commissioner of PT Pinago Utama Tbk (1991-2010 & 2012-2014), President Director (2010-2012) - Commissioner of PT Hamparan Mutiara Hijau (2014-2015) - Director of PT Hamparan Mutiara Hijau (2010-2014)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>	
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham <i>He has an affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and shareholders</i>	
Pendidikan/Pelatihan <i>Education/Training</i>	Tidak ada <i>None</i>	



Chairul Muluk

Jabatan <i>Position</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Cianjur, 19 April 1957 <i>Cianjur April 19, 1957</i>
Usia <i>Age</i>	63 tahun <i>63 years of age</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Medan
Dasar Hukum Pangkatkutan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated June 4, 2020 Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. 2020 year

Latar Belakang Pendidikan <i>Education Background</i>	- Meraih gelar Ph.D. University of Kentucky, Lexington Ky-USA (1991-1996) - Magister Sains, jurusan Agronomi dari Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1983-1986) - Sarjana, Departemen Statistika dan Komputasi Institut Pertanian Bogor, jurusan penunjang Sosial Ekonomi (1976-1980)	- Holds a Ph.D. University of Kentucky, Lexington Ky - USA (1991-1996) - Master of Science, majoring in Agronomy from the Bogor Agricultural Institute, Bogor City (1983-1986) - Bachelor degree from the Department of Statistics and Computing, Bogor Agricultural University, majoring in supporting Social Economic (1976-1980)
Pengalaman Kerja <i>Working Experiences</i>	- Periset di BPP-RISPA Medan 1981-1998 - Kepala Urusan dan Corporate Secretary di PTPN-III tahun 1998-2005 - Direktur Perencanaan dan Pengembangan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2006-2012) - Kepala Bagian Transformasi Bisnis dan CMR - Komisaris Utama PT Tiga Mutiara Nusantara (2007-2014) - Komisaris Utama di PT Biro Industri (2009-2014) - Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2013-2015) - Paruh waktu sebagai Dosen di Program Pasca Sarjana USU 1998-sekarang - Majelis Wali Amanah di Universitas Sumatera Utara, Medan (2015-2020) - Kordinator Konsultan KEK Sei Mangkei 2012-2013 - Direktur Utama PT Pinago Utama Tbk (2016-2019)	- Researcher at BPP-RISPA Medan 1981-1998 - Head of Affairs and Corporate Secretary at PTPN-III 1998-2005 - Director of Planning and Development at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2006-2012) - Head of Business Transformation and CMR - President Commissioner of PT Tiga Mutiara Nusantara (2007-2014) - President Commissioner of PT BioIndustri (2009-2014) - Commissioner of PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2013-2015) - Part time as a Lecturer in the 1998-present USU Sarajana Postgraduate Program - Board of Trustees at the University of North Sumatra, Medan (2015-2020) - Consultant Coordinator for KEK Sei Mangkei 2012-2013 - President Director of PT Pinago Utama Tbk (2016-2019)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Ketua Komite Audit	- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee - Chairman of the Audit Committee
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham <i>He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders</i>	
Pendidikan/Pelatihan <i>Education/Training</i>	Pernah mengikuti pendidikan MBA tahun 1997-1999. Selanjutnya pada tahun 2006-2007 mendapat kesempatan mengikuti Advance Leadership Program TANRI ABENG kerja sama ECGL- RSM - Erasmus University. Disela pekerjaannya sempat menyelesaikan kuliah Magister Manajemen pada tahun 2016. Sejak tahun 1981 hingga 2015 mendapat berbagai training dan short course baik di dalam maupun luar negeri.	He has attended an MBA education program in 1997-1999. In 2006-2007, he had the opportunity to take part in the Advance Leadership Program of the TANRI ABENG in collaboration with ECGL-RSM - Erasmus University. In between his work, he completed his Masters in Management in 2016. From 1981 to 2015, he received various trainings and short courses both at home and abroad.



HASAN TANTRI

Komisaris
Commissioner

WILSON SUTANTIO

Komisaris Utama
President Commissioner

CHAIRUL MULUK

Komisaris Independent
Independent Commissioner



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Kilas Kinerja
Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Direksi

The Board of Directors Report



BAMBANG PALGOENADI

Direktur Utama
President Director



Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Tiga dekade sudah perjalanan Pinago Utama menjadi *partner* pilihan dalam menciptakan ruang keberlanjutan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di sepanjang tahun 2020, Perseroan berhasil menjaga stabilitas kegiatan operasional.

Suatu kehormatan bagi saya, atas nama seluruh jajaran Direksi, untuk menyajikan Laporan Tahunan PT Pinago Utama Tbk untuk tahun buku 2020.

Latar Belakang Makroekonomi, Ekonomi Indonesia dan Industri Kelapa Sawit

Pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong stimulus fiskal dan perbaikan ekspor

Perkembangan Agustus-September 2020 menunjukkan belanja Pemerintah meningkat didorong stimulus fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Ekspor lebih baik dari prakiraan ditopang berlanjutnya permintaan global, terutama dari AS dan Tiongkok, untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, *pulp* dan *waste paper*, serta tekstil dan produk tekstil (TPT). Secara spasial, perbaikan ekspor juga didorong oleh beberapa daerah luar Jawa, seperti Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi-Maluku-Papua. Peran positif stimulus fiskal dan kenaikan ekspor serta investasi bangunan yang tetap baik sejalan berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), menyangga pemulihan ekonomi, di tengah konsumsi rumah tangga yang masih terbatas. Perbaikan ekonomi Indonesia tercermin pada kenaikan sejumlah indikator dini seperti penjualan eceran dan *online*, *job vacancy*, serta pendapatan masyarakat. Ke depan, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian global serta meningkatnya realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, dan berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

Dear esteemed shareholders and stakeholders,

It has been three decades that Pinago Utama has become the partner of choice in creating space of sustainability for worthier human life. In spite of being up against with multiple challenges and dynamics throughout 2020, the Company has managed to keep up its operational activities' stability.

It is an honour for me, on behalf of the Board of Directors, to present the Annual Report PT Pinago Utama Tbk for the 2020 fiscal year.

Macroeconomic Background, Indonesian Economy, and Oil Palm Industry

Domestic economic growth is also slowly improving, mainly driven by fiscal stimulus and improving exports

Developments in August-September 2020 show that government spending has increased due to fiscal stimulus related to social protection and support for MSMEs. Exports were better than expected on the back of continued global demand, especially from the US and China, for several commodities such as iron and steel, pulp and waste paper, as well as textiles and textile products (TPT). Spatially, the improvement in exports has also been driven by several regions outside Java, such as Sumatra, Bali-Nusa Tenggara, and Sulawesi-Maluku-Papua. The positive role of fiscal stimuli and rising exports as well as building investment remains sound in line with the continuation of various National Strategic Projects (PSN), supporting the economic recovery, amidst limited household consumption. The improvement in the Indonesian economy was reflected in the increase in a number of early indicators, such as retail and online sales, job vacancies and public income. Looking forward, the domestic economic recovery is predicted to continue due to the improvement in the global economy and increased budget realisation for the Central and Local Governments, progress on the credit restructuring program, and the continuation of Bank Indonesia monetary and macroprudential stimulus. Bank Indonesia, through its policy mix, will continue to strengthen synergies with the Government and related authorities so that the various policies adopted are more effective in promoting economic recovery.

Prospek ekonomi global 2020 akan dipengaruhi sejumlah faktor antara lain keberhasilan negara-negara mengatasi penyebaran wabah Covid-19, menjaga *confidence* pelaku pasar keuangan, dan mencegah pelemahan ekonomi domestik

Penanganan penyebaran Covid-19 di Tiongkok dapat menjadi *lesson learned* bagi negara lain karena Tiongkok telah berhasil mengatasi penyebaran wabah Covid-19 dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Kunci keberhasilan pemerintah Tiongkok adalah komitmen yang kuat untuk mengatasi penyebaran Covid-19, meski harus melakukan kebijakan isolasi (*lockdown*) di beberapa provinsi. Selain itu, *outlook* ekonomi global juga dipengaruhi bagaimana negara-negara dapat menjaga *confidence* pelaku pasar keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pelemahan ekonomi dunia yang lebih dalam dapat dicegah apabila penyebaran Covid-19 dapat teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan respons kebijakan pemerintah serta otoritas mampu menjaga pemburukan sentimen dan mencegah pelemahan ekonomi domestik.

The global economic outlook for 2020 will be influenced by a number of factors, including the success of countries in overcoming the spread of the Covid-19 outbreak, maintaining the confidence of financial market players, and preventing a weakening of the domestic economy

Handling the spread of Covid-19 in China can be a lesson learned for other countries because China has succeeded in overcoming the spread of the Covid-19 outbreak in approximately three months. The key to the success of the Chinese government is a strong commitment to tackling the spread of Covid-19, even though it has to implement a policy of isolation (lockdown) in several provinces. In addition, the global economic outlook is also influenced by how countries can maintain the confidence of financial market players and promote domestic economic growth. A deeper global economic downturn can be prevented if the spread of Covid-19 can be resolved in the not-too-distant future, and government and regulatory policy responses are able to maintain deteriorating sentiment and prevent a weakening of the domestic economy.

Industri Kelapa Sawit

Dalam perjalanan tahun 2020, Industri kelapa sawit nasional kembali menghadapi tantangan, disebabkan oleh melemahnya permintaan akibat pandemi virus corona sehingga mengakibatkan kebijakan *lockdown* oleh beberapa negara konsumen CPO terbesar seperti China dan India. Hal ini tercermin dari penurunan volume impor China dan juga India pada 1Q20 menurun menjadi 1,2 juta ton (-31,0% YoY) dan 1,5 juta ton (-37,9% YoY) secara berurutan. Seiring dengan hal ini volume ekspor CPO dari Indonesia dan juga Malaysia di 1Q20 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,4 juta ton (-19,8% YoY) dan 5,7 juta ton (-18,4% YoY) secara berurutan. Secara produksi kedua negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia juga mengalami penurunan produksi, Indonesia dan Malaysia mencatatkan tren penurunan pada volume produksi. Kondisi ini disebabkan oleh: penurunan aktivitas penanaman lahan baru, adanya aktivitas replanting yang masif didorong dari rerata umur tanaman yang relatif tua, efisiensi pengurangan porsi pupuk berdampak pada kesuburan tanaman mendatang dan anomali cuaca di 2019 memberikan efek di 2020. Kondisi penurunan produksi ini diharapkan dapat menyeimbangkan menurunnya permintaan dari negara konsumen kelapa sawit sehingga diharapkan harga CPO tidak akan mengalami penurunan yang signifikan.

Secara jangka panjang industri kelapa sawit masih memiliki prospek, dikarenakan secara harga masih lebih ekonomis penggunaan minyak

Palm Oil Industry

In the course of 2020, the national palm oil industry is again facing challenges, due to weakening demand due to the corona virus pandemic which has resulted in lockdown policies by some of the largest CPO consuming countries such as China and India. This is reflected in the decrease in import volume of China and India in 1Q20 which decreased to 1.2 million tonnes (-31.0% YoY) and 1.5 million tonnes (-37.9% YoY) respectively. In line with this, the export volume of CPO from Indonesia and also Malaysia in 1Q20 decreased significantly to 6.4 million tonnes (-19.8% YoY) and 5.7 million tonnes (-18.4% YoY) respectively. In terms of production, the two largest palm oil producing countries in the world also experienced a decline in production, Indonesia and Malaysia recorded a downward trend in production volumes. This condition is caused by: a decrease in the activity of planting new land, the presence of massive replanting activity driven by the relatively old age of the plants, the efficiency of reducing the portion of fertilizers has an impact on future crop fertility and weather anomalies in 2019 will have an effect in 2020. This condition of decreasing production is expected to be able to balancing the decreasing demand from palm oil consuming countries so that it is hoped that CPO prices will not experience a significant decline.

In the long term, the palm oil industry still has prospects, because in terms of price it is still more economical to use vegetable oil from



nabati dari kelapa sawit dibanding minyak nabati dari biji bunga matahari atau tanaman sejenis, kemudian kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh berbagai negara konsumen CPO hanya bersifat sementara dan tidak hanya mengganggu pola konsumsi untuk sementara dikarenakan minyak kelapa sawit merupakan digunakan sehari-hari, dan pemerintah aktif mendorong industri kelapa sawit untuk tumbuh dengan berbagai kebijakan seperti *mandatory B30*, *ISPO* dan berbagai lainnya.

Sejak lama, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan Industri kelapa sawit nasional, berbagai Langkah dilakukan Pemerintah agar industri kelapa sawit nasional terus berkembang. Keseriusan pemerintah makin jelas setelah pada tahun 2009, melalui Kementerian Pertanian, pemerintah membentuk kebijakan yang disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* untuk menaikkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia serta dalam rangka memenuhi komitmen untuk mengurangi efek gas kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia membuat Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) dibawah Kementerian Keuangan dengan maksud menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan *CPO Supporting Fund (CSF)* yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Implementasi Strategi Usaha

Di tengah kondisi yang penuh tantangan tersebut, Perseroan berhasil menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan penerapan strategi usaha yang efektif serta efisien. Perseroan menyadari bahwa kendati luas lahan yang dimiliki oleh Perseroan masih relatif kecil, namun Manajemen dan seluruh insan Perseroan tetap optimis untuk tetap bersaing. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah menetapkan strategi-strategi utama yang diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun penerapan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Usaha
 - Mengelola kebun binaan dan plasma;
 - Melakukan penanaman pada area *landbank* Perseroan;
 - *Replanting* tanaman tua.
2. Strategi Pemasaran
 - Memproduksi RSS yang memanfaatkan ceruk pasar yang ada.
 - Pemasaran yang agresif melalui *Long-Term Contract (LTC)*
3. Strategi Operasi
 - Optimalisasi kapasitas produksi pabrik minyak kelapa sawit;
 - Optimalisasi kapasitas produksi pabrik pengolahan;

palm oil compared to vegetable oil from sunflower seeds or similar plants, then the lockdown policy implemented by various CPO consuming countries is only temporary and not only disturbing. consumption patterns for a while because palm oil is used daily, and the government actively encourages the palm oil industry to grow with various policies such as mandatory B30, ISPO and various others.

For a long time, the Indonesian government has paid great attention to the national palm oil industry. Various steps have been taken by the Government so that the national palm oil industry continues to develop. The seriousness of the government became clearer after in 2009, through the Ministry of Agriculture, the government formed a policy called the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) to increase the competitiveness of Indonesian palm oil in the world market and in order to fulfill commitments to reduce the effect of glass gases and pay attention against environmental problems. Furthermore, in 2015 the Indonesian Government created a Palm Oil Fund Management Agency (BPDKS) under the Ministry of Finance with the intention of raising funds from plantation business actors or better known as the CPO Supporting Fund (CSF) which will be used to support sustainable oil palm development programs.

Implementation of Business Strategy

In the thick of these challenging happenstances, the Company had managed to display perspicuous performance by undertaking the effective and efficient business strategies implementation. It comes to the Company's scrutiny that despite the fact that the area of land owned by the Company is a small-scale manufacture, the Management and all employees of the Company are confident to remain competitive. In performing its business in the realms of construction, investment, and concessions, the Company has established four cardinal strategies which are actualised in gradual and in continued motions from year to year. The application of the four strategies is as follows:

1. *Business Development Strategy*
 - *Managing the assisted and plasma estates;*
 - *Planting in the Company's land bank area;*
 - *Replanting old plants.*
2. *Marketing Strategy*
 - *Producing RSS that takes advantage of an existing market niche*
 - *An aggressive marketing through Long-Term Contract (LCT)*
3. *Operational Strategy*
 - *Optimisation of palm oil mill production capacity;*
 - *Optimisation of processing plant production capacity;*

- Program mekanisasi panen dan pemupukan;
- Sistem Digitalisasi supervisi lapangan melalui gadget.

4. Strategi Keuangan

- Efisiensi biaya
- Manajemen *Cash Flow* yang efektif

Berangkat dari 4 (empat) fokus strategi di atas, Perseroan juga menerapkan kebijakan strategis demi kemajuan Perseroan di tahun 2020 dan dalam menghadapi tantangan global. Salah satu inisiatif tersebut adalah dengan adanya mekanisasi panen dalam peningkatan efisiensi dan kualitas kerja serta biaya. Kegiatan budidaya kelapa sawit, khususnya kegiatan panen, tidak bergantung secara langsung dengan perubahan teknologi. Namun demikian, dengan tujuan peningkatan efisiensi kerja dan biaya serta meningkatkan kualitas TBS hasil panen, Perseroan beradaptasi dengan teknologi baru melalui kegiatan sistem mekanisasi pengumpulan dan pengangkutan hasil panen dengan menggunakan unit *TBS transporter* dan *mini tractor* yang dilengkapi dengan *scissor lift*, *bin system* dan *net system*.

Beberapa nilai tambah yang diperoleh dengan penerapan mekanisasi panen antara lain:

- Meningkatkan produktivitas kerja pemanen, sehingga menurunkan kebutuhan rasio jumlah pemanen terhadap luas kerja panen.
- Menurunkan jumlah kebutuhan unit angkut TBS ke pabrik.
- Meningkatkan kualitas TBS yang diangkut ke pabrik, dengan berkurangnya penanganan ganda TBS, yang juga dapat meningkatkan rendemen CPO (OER) saat proses di pabrik.

Di samping kegiatan panen, sistem mekanisasi juga diterapkan pada kegiatan pemupukan dengan menggunakan *fertilizer spreader*. Keuntungan yang diperoleh dengan mekanisasi pemupukan adalah peningkatan efisiensi tenaga kerja dan waktu pengaplikasian pupuk.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan dengan adanya efek domino dari pandemi Covid-19. Peristiwa ini merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dihindari dan memiliki pengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Salah satu hambatan yang terjadi adalah banyak proyek yang harus tertunda karena kondisi ini.

Di akhir tahun 2019 harga *Crude Palm Oil* ("CPO") yang menjadi produk terbesar perseroan, sempat meningkat tinggi mencapai USD774 per metrik ton CIF Rotterdam dan berlanjut di tahun 2020 sehingga

- *Harvest mechanisation and fertilisation programs;*
- *Field supervision Digitisation System through gadget.*

4. Financial Strategy

- *Budget Efficiency*
- *Effective Cash Flow Management*

Departing from the aforementioned 4 (four) strategic focuses, the Company also implements strategic policies for the Company's progress in 2020 and in facing global challenges. One of these initiatives is the mechanization of harvests in order to increase the efficiency and quality of work and costs. Oil palm cultivation activities, especially harvesting activities, do not depend directly on technological changes. However, with the aim of increasing work and cost efficiency as well as improving the quality of harvested FFB, the Company is adapting to new technology through a mechanised system for collecting and transporting crops using FFB transporter units and mini tractors equipped with a scissor lift, bin system and net system.

Some of the added values obtained by implementing harvest mechanization include:

- *Increasing the work productivity of harvesters, thereby reducing the ratio of the number of harvesters needed to the working area of the harvest.*
- *Reducing the number of units needed to transport FFB to the mill.*
- *Improving the quality of FFB transported to the mill, by reducing the double handling of FFB, which can also increase the yield of CPO (OER) during processing at the mill.*

Apart from harvesting activities, the mechanisation system is also applied to fertiliser activities using the fertiliser spreader. The advantages of mechanisation of fertilisation are increased efficiency of labour and time of application of fertilisers.

Target and Actual Performance in 2020

2020 is a moment of year full of challenges with the domino effect of the Covid-19 pandemic. This event is an external factor that cannot be averted and has an impact on the Company's performance. One of the obstacles that occurred was that many projects had to be delayed due to this condition. However, the Company continues to work hard to achieve the targets set in the Company's Work Plan and Budget.

At the end of 2019 the price of Crude Palm Oil ("CPO"), which is the company's largest product, had increased significantly to USD774 per metric ton CIF Rotterdam and continued in 2020 to reach USD959



mencapai USD959 per metrik ton CIF Rotterdam pada bulan Desember 2020. Hal tersebut diakibatkan karena turunnya produksi 2 besar produsen CPO dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia yang menyebabkan supply CPO turun secara signifikan. Selain itu khusus untuk Malaysia yang merupakan produsen CPO kedua terbesar dunia setelah Indonesia selain penurunan produksi akibat kekeringan, juga terjadi penurunan produksi akibat kekurangan tenaga kerja karena *lockdown* di negara tersebut. Selain masalah turunnya *supply*, kenaikan harga CPO tersebut juga ditunjang oleh komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap menjalankan kebijakan bauran energi melalui program B30 sehingga memberikan stabilitas permintaan CPO sebagai bahan baku bahan bakar nabati di dalam negeri.

Luas kelolaan kebun Perseroan sampai akhir 2020 adalah 14.220,79 ha Kelapa Sawit dan 4.288,98 ha Karet, dimana untuk Kelapa Sawit seluas 13.537,75 ha adalah kebun inti dan 683,04 ha kebun plasma dengan total luas tanaman menghasilkan sebesar 11.263,28 ha. Untuk kebun karet seluruhnya adalah kebun inti dengan luasan 2.957 ha tanaman menghasilkan. Selain hasil Tandan Buah Segar ("TBS") yang didapat dari kebun kelolaan perseroan, TBS pihak ke tiga dari individu, perkebunan kecil dan kebun binaan perseroan memberikan kontribusi yg signifikan terhadap produksi CPO Perseroan. Untuk komoditi karet diluar produksi dari kebun kelolaan perseroan, hasil kebun karet rakyat binaan perseroan juga memberikan kontribusi yang tinggi bagi produksi bahan jadi karet perseroan. Namun, pada tahun 2020, karena dampak musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2019 dan hambatan distribusi karena pembatasan pergerakan orang karena pandemi Covid-19, pasokan bahan baku dari pihak ke tiga menurun cukup signifikan. Total produksi yang dihasilkan perseroan tahun 2020 untuk CPO sebesar 73.441 ton turun 22%, Palm Kernel sebesar 15.371 ton turun 29%, Ribbed Smoke Sheet (RSS) 2.139 ton turun 14% dan Standar Indonesian Rubber (SIR) 37.457 ton turun 17% dibanding dengan produksi perseroan 2019.

Sepanjang 2020, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp1,5 triliun turun 15% dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan bersih ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan produk-produk Perseroan. Walaupun produk Perseroan turun volumenya dibandingkan tahun sebelumnya serta harga bahan baku pihak ke tiga naik karena naiknya harga CPO dan kernel tetapi karena Perseroan melakukan efisiensi di segala bidang, perseroan masih bisa mencatatkan laba kotor sebesar Rp333 miliar atau naik 2,7% dan laba bersih sebesar Rp81,1 miliar atau naik 286% dibandingkan tahun sebelumnya.

per metric ton CIF Rotterdam in December 2020. This was caused by due to the decline in production of the two largest CPO producers in the world, namely Indonesia and Malaysia, which caused CPO supply to drop significantly. Apart from that, specifically for Malaysia, which is the second largest CPO producer in the world after Indonesia, in addition to decreasing production due to drought, there is also a decrease in production due to labor shortages due to lockdown in the country. Apart from the problem of decreasing supply, the increase in CPO prices was also supported by the commitment of the Indonesian government to continue implementing the energy mix policy through the B30 program so as to provide stability to the demand for CPO as a raw material for biofuel in the country.

The area under management of the Company's plantations until the end of 2020 was 14,220.79 ha of oil palm and 4,288.98 ha of rubber where for palm oil an area of 13,537.75 ha was nucleus plantations and 683.04 ha of plasma gardens with a total yielding area of 11,263.28 ha. For rubber plantations, all of them are nucleus gardens with an area of 2,957 ha of yielding crops. Apart from the fresh fruit bunches ("FFB") obtained from the Company's managed plantations, third party FFB from individuals, small plantations and company-assisted plantations make a significant contribution to the Company's CPO production. For the commodity of rubber outside of production from the company's managed rubber plantations, the community rubber plantation products under the guidance of the company also provide a high contribution to the company's rubber production. In 2020, due to the impact of the prolonged dry season in 2019 and distribution constraints due to restrictions on the movement of people due to the Covid-19 pandemic, the supply of raw materials from third parties, however, has waned quite significantly. The company's total production in 2020 for CPO was 73,441 tonnes, down 22%, Palm Kernel 15,371 tonnes down 29%, Ribbed Smoke Sheet (RSS) 2,139 tonnes down 14% and Standard Indonesian Rubber (SIR) 37,457 tonnes down 17% compared to with the Company's 2019 production.

Throughout 2020, the Company documented net income of Rp1.5 trillion, going down to 15% from the erstwhile year. The decrease in net income was due to a decrease in the sales volume of the Company's products. Even though the Company's products decreased in volume compared to the previous year and the price of third-party raw materials increased due to the increase in CPO and kernel prices, for the Company carried out efficiency in all fields. The Company was still able to record a gross profit of Rp333 billion, an increase of 2.7% and a net profit of Rp81.1 billion or an increase of 286% over the previous year.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan kondisi keuangan perseroan tahun 2020 masih melebihi rencana anggaran tahun berjalan yang direncanakan walaupun sulitnya kondisi operasional dan masih adanya target-target operasional yang belum bisa direalisasikan.

Keberhasilan perseroan dalam melakukan efisiensi di segala bidang tidak lepas dari mulai berjalannya program mekanisasi panen dan pemupukan yang sudah mulai di rintis dari tahun 2019 sehingga meningkatkan produktivitas karyawan, pengembangan sistem supervisi digital dengan menggunakan gadget, sistem pemasaran produk yang agresif serta baku mutu produk yang tinggi khususnya untuk produk karet sehingga mendapatkan harga ekspor premium dan apresiasi dari pelanggan.

Persiapan pembangunan jaringan komunikasi yang dilakukan sejak tahun 2018 berdasarkan *IT-Based*, sangat memberikan bantuan yang esensial dalam masa pandemi tahun 2020. Dengan adanya keterbatasan pergerakan orang baik di dalam dan antar propinsi, sistem supervisi tidak terganggu dan tetap berjalan secara efektif. Bahkan pada akhir Agustus tahun 2020, Perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan proses rapat dan supervisi digital tanpa tatap muka yang merupakan komitmen perseroan dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya melalui Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, aspek-aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas dan kewajiban di seluruh proses operasional Perseroan.

Plantation production

FFB Tons	2019	2020	yoy
TBS			
- Inti	153.701	135.386	-11,9%
- Plasma	70.982	49.193	-30,7%
Total	224.683	184.579	-17,8%
Komposisi			
Latex	2.471	2.132	-13,7%
Cup Lump	1.188	1.681	41,5%
Total	3.659	3.813	4,2%
Komposisi			
Latex	67,5%	56%	
Cup Lump	32,5%	44%	

Di sisi lain, sebagai dampak musim kering berkepanjangan di tahun 2019 yang lalu, berimbas kepada penurunan produksi Tandan Buah

The aforementioned conditions cause the company's financial condition in 2020 to still exceed the planned current year's budget despite the difficult operational conditions and operational targets that have not been manifested.

The Company's success in carrying out efficiency in all fields cannot be separated from the start of the harvest mechanization and fertilization program which has been initiated since 2019 so as to increase employee productivity, development of a digital supervision system using gadgets, an aggressive product marketing system and high product quality standards. especially for rubber products; thus, they get premium export prices and appreciation from customers.

Preparations for building communication networks that have been carried out since 2018 based on IT-Based have provided essential assistance during the 2020 pandemic. With the limited movement of people both within and between provinces, the supervision system is not disrupted and continues to run effectively. Even at the end of August 2020, the Company succeeded in listing its shares on the Indonesia Stock Exchange with a face-to-face digital meeting and supervision process, which is the company's commitment to carrying out all its operational activities through Good Corporate Governance, compliance with all applicable laws and regulations in Indonesia, aspects of information disclosure, accountability and fairness in all operational processes of the Company.

Plantation production

On the other hand, as a result of the prolonged dry season in 2019, an impact on the decline in the production of Fresh Fruit Bunches



Segar (TBS) di tahun 2020. Penurunan produksi mulai terjadi pada awal April 2020. Produksi mulai meningkat kembali pada periode September-Desember 2020. Secara tahunan, total produksi TBS dari kebun inti dan plasma serta kebun binaan turun 17,8% YoY dari 224,683 tons menjadi 184.579 tons di tahun 2020.

Yield kebun Inti turun 12,5% dari 14,67 tons/ha di tahun 2019 menjadi 12,84 tons/ha di tahun 2020.

Untuk produksi kebun karet, total Kadar Karet Kering (KKK) naik 4,2% YoY dari 3.659 tons di tahun 2019 menjadi 3.813 tons di tahun 2020 sebagai dampak adanya serangan penyakit daun Pestalotiopsis dan program replanting.

Yield produksi kebun karet naik 7,7% YoY dari 1.197 kg/ha di tahun 2019 menjadi 1.289 kg/ha di tahun 2020.

Tantangan yang Dihadapi

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Perseroan di tahun 2020 dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, dari sisi eksternal Perusahaan dihadapkan oleh tantangan yang muncul dari tingginya tingkat kompetisi di industri dan efek domino yang disebabkan oleh Covid-19. Oleh karena itu, dalam hal ini Perseroan senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat membangun keunggulan kompetitif terutama dengan tetap mementingkan kualitas di setiap proyek yang dikerjakan. Yang kedua, dari sisi internal, Perseroan dihadapi oleh tantangan dalam hal pemenuhan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, di pertengahan tahun 2020 Perseroan telah melakukan perekrutan dan pelatihan yang mencakup karyawan baru (*fresh graduate*) maupun yang berpengalaman sehingga di tahun 2021 kelak Perseroan telah siap bersaing dan mewujudkan pencapaian kinerja yang jauh lebih baik lagi.

Prospek Usaha

Selama tahun 2020, pandemi Covid-19 dan tindakan penanganannya membuat perekonomian global menghadapi berbagai tantangan serta dilanda ketidakpastian. Namun, distribusi vaksin Covid-19 secara bertahap akan memberikan harapan kepada dunia atas pemulihan perekonomian global, walaupun waktu dan tingkat pemulihan pada tahun 2021 akan sulit untuk diprediksi.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel dengan bauran 30% (B30) dan komitmen Pemerintah terhadap program

(FFB) in 2020. The decline in production began to occur in early April 2020. Production began to increase again in the September-December 2020 period. yearly, the total FFB production from nucleus and plasma and assisted plantations decreased 17.8% YoY from 224,683 tons to 184,579 tons in 2020.

Core plantation yields decreased by 12.5% from 14.67 tons/ha in 2019 to 12.84 tons/ha in 2020.

For rubber plantation production, the total dry rubber content (KKK) increased by 4.2% YoY from 3,659 tons in 2019 to 3,813 tons in 2020 as a result of the attack of Pestalotiopsis leaf disease and the replanting program.

Yield of rubber plantation production was increase by 7.7% YoY from 1,197 kg/ha in 2019 to 1,289 kg/ha in 2020.

Facing Challenges

Primarily, the challenges accosted by the Company in 2020 could be divided into two layers. Firstly, from the external manner, the Company is confronted with challenges emerging from the high level of competition in the industry and the domino effect immensely created by Covid-19. Thereupon, in this case the Company proceeds to proliferate its capacity and capability to enact a competitive advantage by maintaining the importance of quality in every project undertaken in particular. Secondly, from the internal point of view, the Company is repelled with challenges in terms of fulfilling human capital's capacity. In this issue, in middle of 2020, the Company has recruited and conducted training regarding to green employees (*fresh graduate*) and experienced ones, thus by 2021 the Company is to be well-prepared to compete and to achieve a golden performance.

Business Prospects

During most of 2020, the Covid-19 pandemic and measures to contain it caused significant economic challenges and much uncertainty on a global scale. However, the increasing availability of various Covid-19 vaccines should give the world some hope for economic recovery although the timing and extent of recovery in 2021 will remain difficult to predict.

In Indonesia, the implementation of the policy on the mandatory use of 30% biodiesel mix (B30) and the Government's general commitment

biodiesel diharapkan memberikan pengaruh positif untuk menopang permintaan maupun menjaga harga minyak sawit.

Tantangan utama yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha sawit berupa maraknya kampanye negatif terhadap produk minyak kelapa sawit secara internasional. Saat ini, pelaku usaha sawit di Indonesia terus bekerjasama dengan Pemerintah untuk mengatasi tekanan-tekanan tersebut.

Perseroan optimis bahwa melalui berbagai inovasi dan strategi di bawah arahan Direksi seperti inisiatif Perseroan menuju *operational excellence and sustainability* dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan proses kerja serta kendali dari panen, pengangkutan hingga pengolahan pabrik, program *replanting*, pelaksanaan riset untuk mendorong produktivitas, program kemitraan dan penggunaan teknologi pada proses bisnis serta mekanisme pembelian dan penjualan CPO untuk membantu Perseroan dapat berkembang kedepannya.

Menatap tahun 2021, mulai terlihat adanya titik cerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Pergerakan ekonomi secara global dan regional sudah mulai terlihat pergerakannya, ditunjang oleh program vaksinasi yang di lakukan di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk mempercepat pencapaian *herd immunity* sehingga kondisi bisnis bisa berjalan normal kembali. Perseroan melihat tahun 2021 sebagai titik balik dari tahun pembelajaran yang terjadi di tahun 2020. Kiat-kiat operasional yang efisien yang terpaksa di lakukan pada masa krisis di tahun 2020 menjadi metode yang bisa di pertahankan dan dikembangkan untuk menjadi Perseroan yang ulet, bersaing dan berkelanjutan dalam bisnis perkebunan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) senantiasa menjadi landasan utama di seluruh elemen Perusahaan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan/kewajaran secara konsisten dalam setiap proses bisnis, maka kami dapat mempertahankan kinerja yang baik dan juga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG di dalam proses bisnis Perusahaan antara lain difokuskan pada upaya internalisasi agar semua elemen di Perusahaan dapat memahami fungsinya dengan baik. Sehingga sinergi di antara

toward biodiesel is expected to boost demand for palm oil and help support CPO prices.

A major challenge faced by the palm oil sector is the ongoing negative campaigns against palm oil products internationally. Currently, palm oil business operators in Indonesia are working closely with the Government to try to address these issues.

The Company is optimistic that the various innovations and strategies under the direction of the Board of Directors, such as the Company's Toward Operational Excellence and Sustainability initiatives, which include utilising digital technology to improve work process and control from harvesting, transport up to mill processing, replanting programs, research and development aimed at improving productivity, partnership programs, use of technology in the business processes and mechanisms in purchasing and selling CPO, will support the Company's growth into the future.

Looking forward to 2021, there is a bright spot in the response to the Covid-19 pandemic. The movement of the economy globally and regionally has begun to show its movement, supported by vaccination programs being carried out around the world including Indonesia to accelerate the achievement of herd immunity so that business conditions can run normally again. The Company sees 2021 as a turning point for the learning year that will take place in 2020. Efficient operational tips that were forced to do during the crisis in 2020 are methods that can be maintained and developed to become a company that is resilient, competitive and sustainable. in the plantation business.

Implementation of Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) has always been the main groundwork within the entire realms of the Company. We are sure that by administering the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality/fairness in a constant flux within every business process, we could manage excellent performance and also deliver added value to the stakeholders.

The implementation of GCG within the Company's business processes is aimed at having the efforts to internalize to make all sides of the coins in the Company could comprehend their functions, properly.



fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan dapat menghasilkan *output* yang relatif lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, komitmen Perseroan dalam meningkatkan implementasi GCG diukur melalui *self-assessment* yang ditargetkan untuk mendapatkan skor rata-rata.

Thus, the synergy among functions in the Company are able to yield output which are more controlled and accountable. Not to mention, the Company is committed to escalating the implementation of GCG, then it might be measured through targeted self-assessment in attaining an average score.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa di tahun 2020, tidak terdapat perubahan pada komposisi Direksi.

Changes in the Composition of the Board of Directors

On this occasion, we would like to convey that in 2020, there was no any change in the composition of the Board of Directors.

Hingga 31 Desember 2020, komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Bambang Palgoenadi sebagai Direktur Utama;
- Meli Tantri sebagai Direktur Keuangan dan Komersial;
- Raymon Wahab sebagai Direktur Processing dan Industri;
- Thomas Valian Christanto sebagai Direktur Kebun; dan
- Komaruzzaman sebagai Direktur Umum

As of December 31, 2020, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

- *Bambang Palgoenadi as a President Director;*
- *Meli Tantri as a Director of Finance and Commerce;*
- *Raymon Wahab as a Director of Processing and Industry;*
- *Thomas Valian Christanto as a Director of Plantation; and*
- *Komaruzzaman as a Director of General Affairs*

Penutup

Seluruh jajaran Direksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada manajemen dan karyawan PT Pinago Utama Tbk, para pemegang saham, pemangku kepentingan, serta mitra bisnis. Apresiasi mendalam khususnya juga ditujukan kepada Dewan Komisaris, Komite-Komite terkait, serta seluruh karyawan yang turut berkontribusi mendukung tumbuh kembang Perseroan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada pemerintah, pihak regulator, serta masyarakat luas atas segala dukungan yang senantiasa mendorong kemajuan Perseroan. Berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak, Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan visi menjadi Perusahaan yang terbaik dan berkelanjutan dengan kualitas produk dan layanan prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional.

Closing Remarks

The plenary of the Board of Directors promulgates the nethermost appreciation and gratitude to the employees of PT Pinago Utama Tbk, shareholders, stakeholders, and business partners. A profound indebtedness shall as well be addressed to the Board of Commissioners, the involved committees, and the entire employees whose contributions to the Company's growth and development are monumental. In other respects, our salutation goes to the government, regulators, and the people at large for all the support which always propels the Company's progress. With each party's involvement, the Company is committed to personifying the vision of becoming the best and sustainable Company along with excellent products and services supported by first-rate and professional human resources.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,

Bambang Palgoenadi
Direktur Utama
President Director

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Bambang Palgoenadi

Jabatan <i>Position</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Malang, 5 Februari 1958 <i>Malang, February 5, 1958</i>
Usia <i>Age</i>	62 tahun <i>62 years of age</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, SH - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated on June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Year 2020

Latar Belakang Pendidikan <i>Education Background</i>	Sarjana Mekanisasi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1981 <i>Bachelor of Agricultural Mechanization, Bogor Agriculture University, 1981</i>
Pengalaman Kerja <i>Working Experiences</i>	- Pimpinan Proyek Pembangunan Kebun PT Astra Agro Lestari Tbk di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (1981-1994). - Pemimpin Proyek Pembangunan Sistem Informasi Perkebunan Grup Astra Agro Lestari (1995-1996). - Deputi Direktur Produksi PT Astra Agro Lestari Tbk (1996-1998). - Deputi Direktur Pengembangan Produksi & Kontrol PT Astra Agro Lestari Tbk (1999-2000). - Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk (2000-2017). - Agronomy Consultant PT Pinago Utama Tbk (2018). - Direktur Utama PT Pinago Utama Tbk (2019-Sekarang). - Komisaris PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Sekarang). - Komisaris PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Sekarang) - Komisaris di PT Musi Andalan Sumatera (2019-Sekarang).
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Komisaris Entitas anak (PT MAS, PT SNS, dan PT HMM) <i>Commissioner of Subsidiaries (PT MAS, PT SNS, and PT HMM)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relations</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham <i>He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders</i>
Pendidikan/Pelatihan <i>Education/Training</i>	Tidak ada <i>None</i>



Meli Tantri

Jabatan Position	Direktur Keuangan dan Komersial Director of Finance and Commerce
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Medan, 30 Desember 1966 Medan, December 30, 1966
Usia Age	54 tahun 54 years of age
Domisili Domicile	Palembang
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated on June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Year 2020

Latar Belakang Pendidikan Education Background	Business Computer Science dari University of Applied Science Karlsruhe, Jerman (1990-1995). Business Computer Science from the University of Applied Science Karlsruhe, Germany (1990-1995).	
Pengalaman Kerja Working Experiences	- Direktur Keuangan dan Komersial PT Pinago Utama (1997-2019), - Direktur PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Sekarang), - Direktur PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Sekarang), - Direktur PT Musi Andalan Sumatera (2019-Sekarang), - Kuasa Direktur PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2015-2018), - Kuasa Direktur PT Hamparan Mutiara Hijau (2015-2018), - Kuasa Direktur PT Musi Andalan Sumatera (2016-2018), - Direktur Keuangan dan Komersial PT Pinago Utama Tbk (2020-sekarang).	- Director of Finance and Commerce PT Pinago Utama (1997-2019), - Director of PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Present), - Director of PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Present), - Director of PT Musi Andalan Sumatera (2019-Present), - Proxy of the Director of PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2015-2018), - Proxy of the Director of PT Hamparan Mutiara Hijau (2015-2018), - Proxy of the Director of PT Musi Andalan Sumatera (2016-2018), - Director of Finance and Commerce of PT Pinago Utama Tbk (2020-present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Direktur Entitas anak (PT MAS, PT SNS, dan PT HMMH) Director of Subsidiaries (PT MAS, PT SNS, and PT HMMH)	
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham She has affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders	
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Tidak ada None	



Raymon Wahab

Jabatan Position	Direktur Processing dan Industri Director of Processing and Industry
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Medan, 29 Maret 1967 Medan, March 29, 1967
Usia Age	53 tahun 53 years of age
Domisili Domicile	Palembang, Sumatera Selatan
Dasar Hukum Pangkat	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated on June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Year 2020

Latar Belakang Pendidikan Education Background	Plastic Engineering dari University of Applied Science Aalen, Jerman (1990-1995). Plastic Engineering from the University of Applied Science Aalen, Germany (1990-1995).	
Pengalaman Kerja Working Experiences	- Manajer Proyek PT Tamoratama Prakarsa (1996-1997). - Manajer Pabrik Karet PT Pinago Utama Tbk (1997-2011), - General Manager (GM) Pabrik Karet dan Pabrik Sawit Pinago Utama Tbk (2011-2016), - Direktur PT Pinago Utama (2016-2019). - Direktur PT Pinago Utama Tbk (2020-sekarang).	- Project Manager for PT Tamoratama Prakarsa (1996-1997). - Rubber Factory Manager of PT Pinago Utama Tbk (1997-2011), - General Manager (GM) of Pinago Utama Tbk Rubber and Palm Oil Factory (2011-2016), - Director of PT Pinago Utama (2016-2019). - Director of PT Pinago Utama Tbk (2020-present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham He has affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders	
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Tidak ada None	



Thomas Valian Christanto

Jabatan Position	Direktur Kebun Director of Plantation
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Purwokerto, 25 Mei 1973 Purwokerto, May 25, 1973
Usia Age	47 tahun 47 years of age
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pangangkatan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated on June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Year 2020

Latar Belakang Pendidikan Education Background	Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan dari STIE IBII, Kota Jakarta (1991-1995). Bachelor of Economics, majoring in Financial Management from STIE IBII, City of Jakarta (1991-1995).	
Pengalaman Kerja Working Experiences	- Head of Budget Control PT BW Plantation Tbk (sekarang "PT Eagle High Plantations Tbk") (2007-2010). - Head of Procurement PT Eagle High Plantations Tbk (2011-2012) - Deputy Managing Director PT Eagle High Plantations Tbk (2013-2014) - Plantation Head PT Eagle High Plantations Tbk (2015- 2016). - Chief Operation Officer PT Gaharu Galangan International (2017). - Direktur PT Pinago Utama (2018-2019) - Direktur Utama PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Sekarang). - Direktur Utama PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Sekarang). - Direktur Utama PT Musi Andalan Sumatera (2019-Sekarang). - Direktur PT Pinago Utama Tbk (2020-sekarang)	
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Direktur Utama Entitas anak (PT MAS, PT SNS, dan PT HMM) President Director of Subsidiaries (PT MAS, PT SNS, and PT HMM)	
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders	
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Tidak ada None	



Komaruzzaman

Jabatan Position	Direktur Umum Director of General Affairs
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandar Lampung, 13 Januari 1961 Bandar Lampung, January 13, 1961
Usia Age	59 tahun 59 years of age
Domisili Domicile	Bandar Lampung
Dasar Hukum Pangkatnakan	- Akta No. 7 Tanggal 4 Juni 2020 Notaris Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Tahun 2020
Legality of Appointment	- Deed No. 7 dated on June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H. - KepmenkumHAM RI No. AHU-0038685. A.H.01.02. Year 2020

Latar Belakang Pendidikan Education Background	- Magister Manajemen, jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1997-1998); - Sarjana Hukum, jurusan Hukum Perdata, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung (1979-1984).	- Master of Management, majoring in Agribusiness, Bogor Agricultural University, Bogor City (1997-1998); - Bachelor of Law, majoring in Civil Law, University of Lampung, Bandar Lampung City (1979-1984).
Pengalaman Kerja Working Experiences	- Staf Bagian Sumber Daya Manusia PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (1986-1990). - Kepala Urusan Personalia Bagian Sumber Daya Manusia PT Perkebunan Nusantara VII (1990-1997). - Kepala Urusan Pengawasan Administrasi/Keuangan Bagian Satuan Pengawasan Internal PT Perkebunan Nusantara VII (1999-2000). - Kepala Urusan Administrasi & Analisa Pasar Bagian Pemasaran PT Perkebunan Nusantara VII (2000). - Ketua Tim Khusus Penyelesaian Masalah Sengketa Lahan PT Perkebunan Nusantara VII (2000-2001). - Kepala Urusan Hukum & Agraria Bagian Umum PT Perkebunan Nusantara VII (2001-2003). - Kepala Bagian Umum PT Perkebunan Nusantara VII (2003-2012). - Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Perkebunan Nusantara II (Persero). - Komisaris Utama PT Nusa Dua Bekala (2013-2016). - General Manager Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pinago Utama (2017-2018). - Direktur Umum PT Pinago Utama (2019) - Direktur Umum PT Pinago Utama Tbk (2020-sekarang)	- Staff of the Human Resources Division of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (1986-1990). - Head of Human Resources Affairs, PT Perkebunan Nusantara VII (1990-1997). - Head of Administrative/Financial Supervision, Internal Supervision Unit of PT Perkebunan Nusantara VII (1999-2000). - Head of Administration & Market Analysis, Marketing Division of PT Perkebunan Nusantara VII (2000). - Chairman of PT Perkebunan Nusantara VII Special Team for Land Dispute Resolution (2000-2001). - Head of Legal & Agrarian Affairs, General Section of PT Perkebunan Nusantara VII (2001-2003). - Head of General Division of PT Perkebunan Nusantara VII (2003-2012). - Director of Human Resources and General Affairs of PT Perkebunan Nusantara II (Persero). - President Commissioner of PT Nusa Dua Bekala (2013-2016). - General Manager of Human Resources and General Affairs of PT Pinago Utama (2017-2018). - Director of General Affairs PT Pinago Utama (2019) - Director of General Affairs PT Pinago Utama Tbk (2020-Present)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	-	
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders	
Pendidikan/Pelatihan Education/Training	Tidak ada None	





PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Kilas Kinerja
Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile



KOMARUZZAMAN

Direktur Umum
Director of General Affairs

RAYMON WAHAB

Direktur Processing & Industri
Director of Processing and Industry

MELI TANTRI

**Direktur Keuangan dan
Komersial**
*Director of Finance and
Commerce*



BAMBANG PALGOENADI

Direktur Utama
President Director

THOMAS VALIAN CHRISTANTO

Direktur Kebun
Director of Plantation

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Pinago Utama Tbk

Statement of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the Annual Report 2020 of PT Pinago Utama Tbk

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2020 PT Pinago Utama Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below state that all information in the Annual report 2020 of PT Pinago Utama Tbk is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in this Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2021

Jakarta, May, 2021

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*

Wilson Sutanto
Komisaris Utama

President Commissioner

Hasan Tantri
Komisaris
Commissioner

Chairul Muluk
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi *Board of Directors*

Bambang Palgoenadi

Direktur Utama
President Director

Meli Tantri
Direktur Keuangan dan Komersil
Director of Finance and Commerce

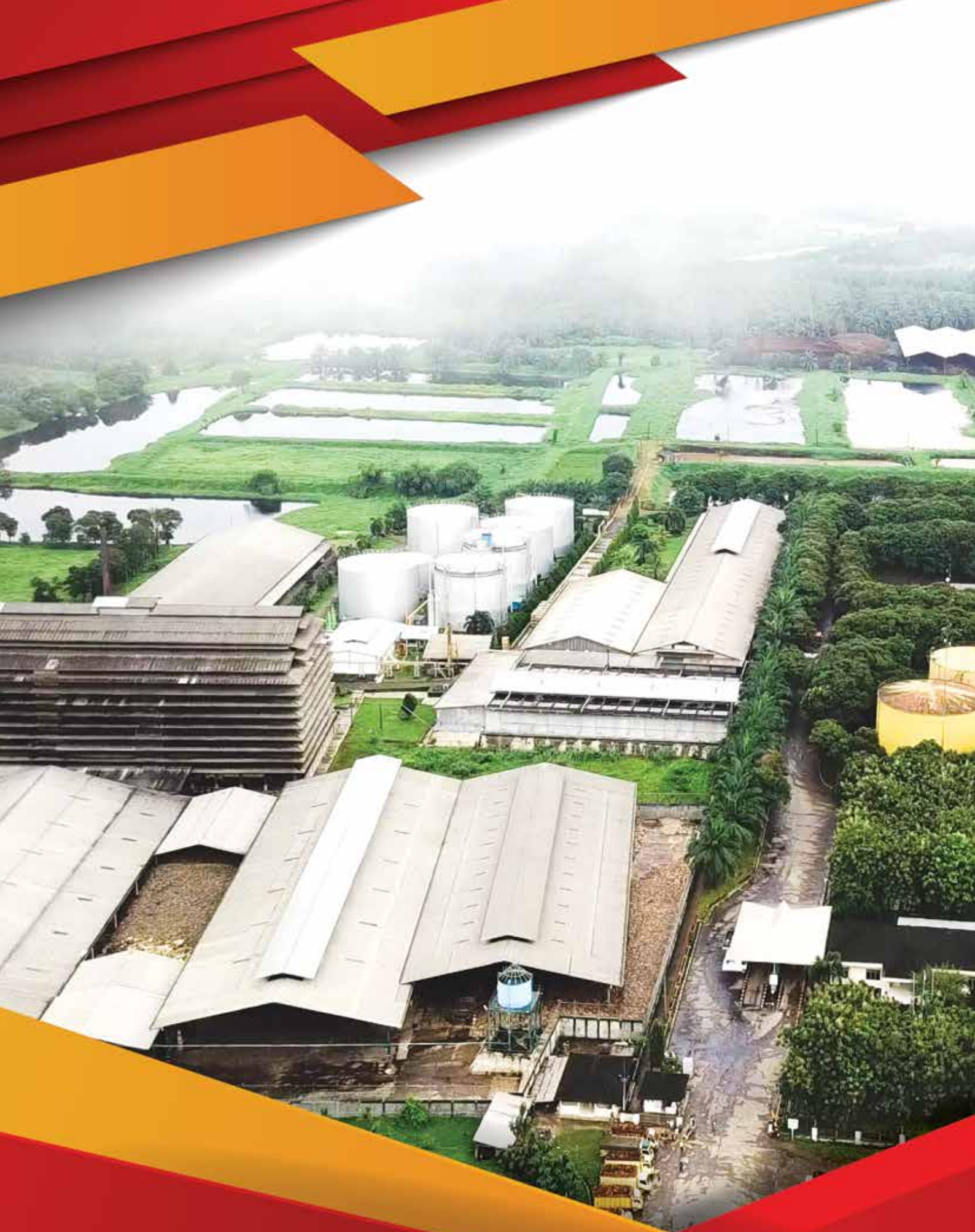
Raymon Wahab
Direktur Prosesing dan Industri
Director of Processing and Industry

Thomas Valian Christanto
Direktur Kebun
Director of Plantation

Komaruzzaman
Direktur Umum
Director of General Affairs

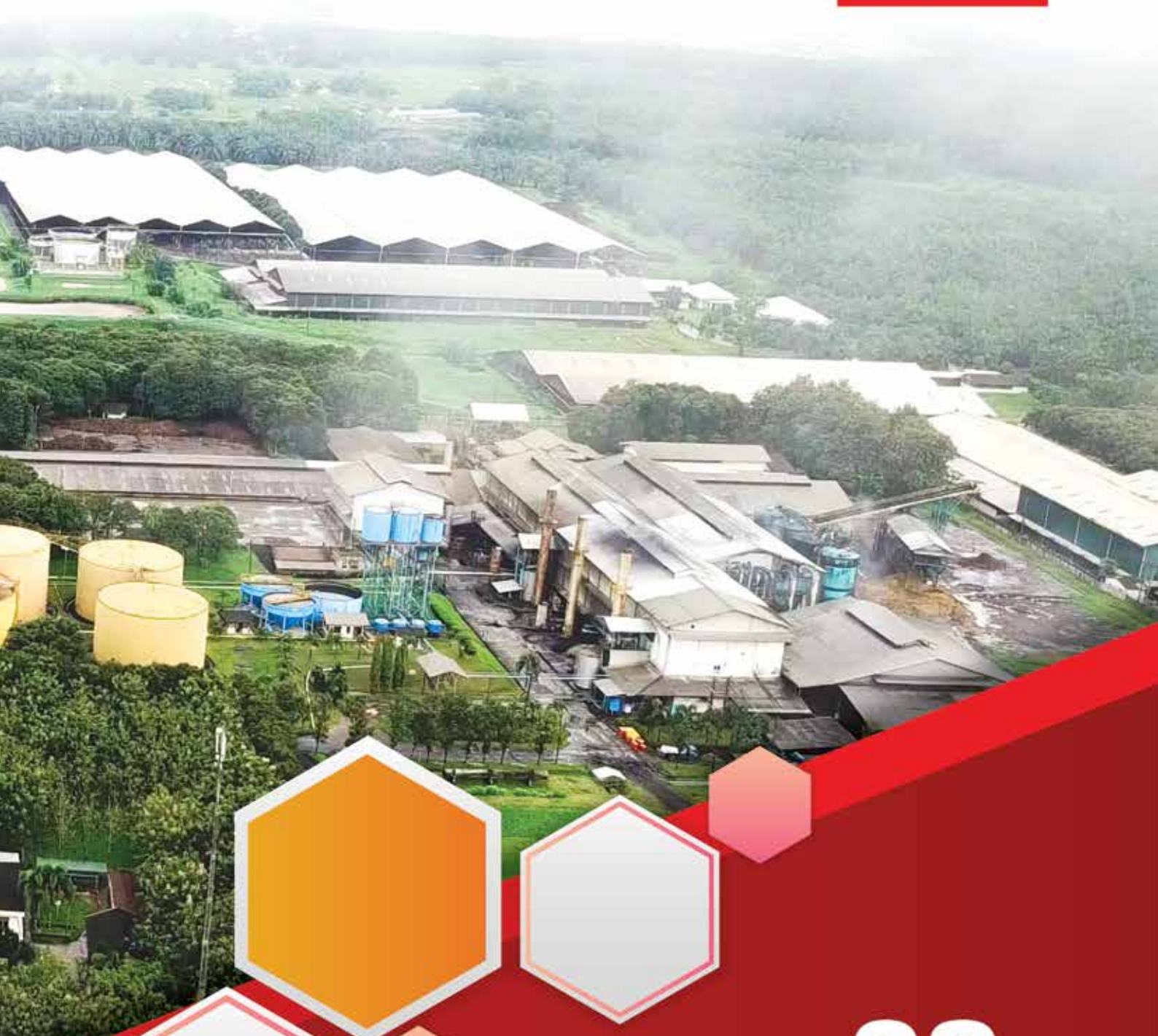


Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank





PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



03

Profil **Perusahaan**
Company Profile



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Kilas Kinerja
Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile





Identitas Perusahaan

Company Identity

Nama Perusahaan

Company Name

PT Pinago Utama Tbk

Kegiatan Usaha

Business Activities

Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet beserta Industri Penunjangnya

Palm Oil and Rubber Plantation and its Supporting Industry

Tanggal Pendirian

Date of Establishment

12 Mei 1979

May 12, 1979

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981

Decree No. YA5/81/20 dated on March 28, 1981

Modal Dasar

Authorised Capital

Rp200.000.000.000

Rp200,000,000,000

Modal Disetor

Paid-Up Capital

Rp62.500.000.000

Rp62,500,000,000

Pencatatan Saham di Bursa

Listing in Stock Exchange

31 Agustus 2020

August 31, 2020

Pemegang Saham

Shareholders

- Wilson Sutantio (173.250.000 Lembar saham)
- Hasan Tantri (139.000.000 Lembar saham)
- Charles Sutantio (139.000.000 Lembar saham)
- Peter Unggul Sutantio (139.000.000 Lembar saham)
- Suryani Tantri (34.750.000 Lembar saham)
- Masyarakat (156.170.000 Lembar saham)
- Employee Stock Allocation (ESA) (80.000 Lembar saham)

- Wilson Sutantio (173,250,000 shares)
- Hasan Tantri (139,000,000 shares)
- Charles Sutantio (139,000,000 shares)
- Peter Unggul Sutantio (139,000,000 shares)
- Suryani Tantri (34,750,000 shares)
- Public (156,170,000 shares)
- Employee Stock Allocation (ESA) (80,000 shares)

Karyawan

Employee

3.050 Karyawan

3,050 Employees

Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW. 003 Pantai Indah Kapuk. Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara 14470, DKI Jakarta

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW. 003 Pantai Indah Kapuk. Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan North Jakarta 14470, DKI Jakarta

Telepon

Telephone

(021) 5596 6133, 5596 5869, 5596 5870

Faksimile

Facsimile

(021) 5596 5977

Surat Elektronik

Email

corporate.secretary@pinagoutama.com



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Kilas Kinerja
Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report



Profil Perusahaan
Company Profile

Jejak Langkah Milestones

Perseroan didirikan
dengan nama
"PT Pinago Utama"

*The Company was established
under the name
"PT Pinago Utama"*

1979

Penanaman
Kebun karet

*Rubber plantation
planting*

1991

Pabrik Karet Remah
(Crumb Rubber Factory)
beroperasi

*Crumb Rubber
Factory operates*

1997

PT Pinago Utama
mendapatkan status hukum

*PT Pinago Utama has received
legal status*

1981

Penanaman kebun
Kelapa Sawit

Palm Oil planting

1995

Pabrik Minyak Kelapa Sawit
(Crude Palm Oil / CPO)
beroperasi

*Crude Palm Oil (CPO)
mills operate*

2003



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



Pabrik Karet Lembaran Asap
(Ribbed Smoke Sheet Factory)
beroperasi

*The Ribbed Smoke Sheet
Factory operates*

2006

Pendirian Entitas Anak
PT Musi Andalan Sumatera

*Establishment of a subsidiary,
PT Musi Andalan Sumatera*

2013

PT Sriwijaya Nusantara
Sejahtera Menerima
Sertifikasi ISPO

*PT Sriwijaya Nusantara
Sejahtera Receives ISPO
Certification*

2019

2010

PKO Mill, Biogas, dan Pabrik Pupuk
Organik beroperasi,

*Penyertaan kepemilikan
PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera*

*Pendirian Entitas Anak
PT Hamparan Mutiara Hijau*

*PKO Mill, Biogas, and Organic
Fertiliser Factory operates.*

*Participation in ownership of PT
Sriwijaya Nusantara Sejahtera.*

*Establishment of a subsidiary, PT
Hamparan Mutiara Hijau.*

2017

PT Pinago Utama Menerima
Sertifikasi ISPO

*PT Pinago Utama menerima
Penghargaan Industri Hijau
(Green Industry Award)*

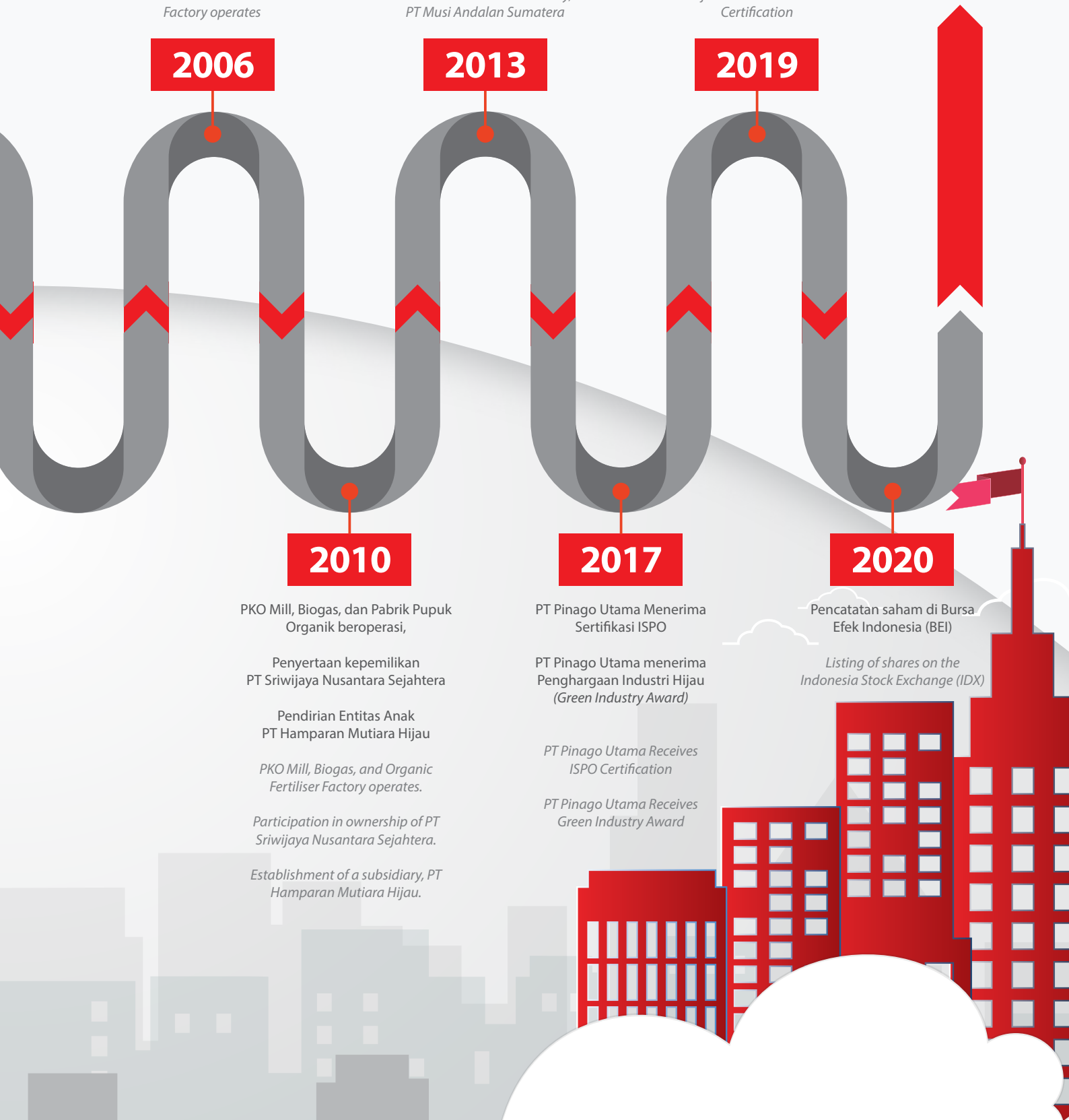
*PT Pinago Utama Receives
ISPO Certification*

*PT Pinago Utama Receives
Green Industry Award*

2020

Pencatatan saham di Bursa
Efek Indonesia (BEI)

*Listing of shares on the
Indonesia Stock Exchange (IDX)*



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

PT Pinago Utama Tbk ("Perseroan") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUP. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I - 09, RT. 004 RW. 003, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470.

Perseroan didirikan dengan nama PT Pinago Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 4 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 5 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020.

PT Pinago Utama Tbk ("Company") is an Indonesian legal entity, domiciled in North Jakarta, which is legally established and operated in accordance with and based on the provisions of the laws and regulations of the Republic of Indonesia, primarily the Company Law. Currently, the Company has its Head Office at Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I - 09, RT. 004 RW. 003, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, North Jakarta 14470.

The Company was established under the name PT Pinago Utama based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company PT Pinago Utama No. 15 dated on May 12, 1979, made before Aminus, Notary in Palembang, who had obtained approval from the Directorate General of Laws and Legislation of the Ministry of Justice as referred to in Decree No. YA5/81/20 dated on March 28, 1981, and has been registered at the Palembang District Court No. 66/1986 dated July 5, 1981 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 dated on January 11, 1991, Supplement to the State Gazette No. 211.

The Articles of Association of the Company have undergone several changes, most recently in connection with the change in the status of the Company from a private company to a public company and adjustments to the articles of association of the Company with Bapepam and LK Regulation IX.J.1, FSA Regulation No. 15/2020, FSA Regulation No. 16/2020 and FSA Regulation No. 33/2014 as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pinago Utama No. 7 dated on June 4, 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta, who has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as referred to in Decree No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 dated June 5, 2020 and amendments to the articles of association have been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights as stated in the Acceptance Letter for the Notification of Amendments to the Articles of Association of the Company No. AHU-AH.01.03-0236488 dated June 5, 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 dated June 5, 2020.



Kegiatan dan Bidang Usaha

Corporate Activities and Line of Business

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020. Maksud dan Tujuan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, peternakan dan kehutanan.
- b. Industri.
- c. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.
- d. Perdagangan.
- e. Jasa.
- f. Ketenagalistrikan.
- g. Pertambangan dan penggalian.
- h. *Real Estate*.
- i. Konstruksi.
- j. Pengangkutan dan pergudangan.
- k. Aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

On the basis of Article 3 of the Company's Articles of Association, as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pinago Utama No. 7 dated June 04, 2020 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta, who has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as referred to in Decree No. AHU-0038685. AH.01.02. Tahun 2020 dated on June 5, 2020, and the amendments to the articles of association have been received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights Legal Entity Administration System as stated in the Acceptance Letter for the Notification of Amendments to the Articles of Association of the Company No. AHU-AH.01.03-0236488 dated June 05, 2020 and has been registered in the Company Register No. AHU-0089227.AH.01.11. Tahun 2020 dated on June 5, 2020. The aims and objectives of the Company's business are to engage in:

- a. Agriculture, livestock and forestry.*
- b. Industry.*
- c. Water management, wastewater management, waste management and recycling, and remediation activities.*
- d. Trading.*
- e. Services.*
- f. Electricity.*
- g. Mining and excavation.*
- h. Real Estate.*
- i. Construction.*
- j. Transport and warehousing.*
- k. Human health activities.*

To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may undertake business activities as follows:

Produk Product

Perseroan bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet dengan produk-produk yang dihasilkan Perseroan adalah Tandan Buah Segar (TBS), Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel*), Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), Karet Remah (*Crumb Rubber*), Karet Lembaran Asap (*Ribbed Smoke Sheet*) dan pupuk kompos. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga bekerja sama dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma, atau lebih dikenal dengan skema perkebunan Inti-Plasma. Skema perkebunan Inti-Plasma merupakan program kemitraan antara petani dengan perusahaan Perkebunan, dimana Perseroan akan menunjang perkebunan Plasma yang dikelola oleh koperasi Plasma sekitar wilayah perkebunan Inti Perseroan. Selain memiliki perkebunan baik kelapa sawit maupun karet, Perseroan juga memiliki pabrik pengolahan karet, dan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk pengolahan kelapa sawit, Inti kelapa sawit serta ampas kelapa sawit untuk dijadikan pupuk. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 6 (enam) lahan perkebunan kelapa sawit dan 1 (satu) lahan perkebunan karet yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dimana 6 (enam) area perkebunan sawit, 3 (tiga) area perkebunan masing masing dimiliki oleh 3 (tiga) Entitas Anak.

Produk-produk yang dihasilkan perseroan adalah Tandan Buah Segar (TBS), Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel*), Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), Karet Remah Standar Indonesia Rubber (SIR), *Ribbed Smoke Sheet* (RSS) dan pupuk Organik. Perseroan menjual produk-produk kelapa sawit ke pasar domestik, sedangkan untuk produk-produk dari olahan karet Perseroan sebagian besar diekspor.

The Company is engaged in the oil palm and rubber plantation business with the products produced by the Company are Fresh Fruit Bunches (FFB), Palm Kernel, Crude Palm Oil, Crumb Rubber, Rubber Ribbed Smoke Sheet and compost. In carrying out its business activities, the Company also collaborates with plasma smallholders and plasma plantation cooperatives, or better known as the Inti-Plasma plantation scheme. The Inti-Plasma plantation scheme is a partnership program between smallholders and plantation companies, where the Company will support the Plasma plantations managed by the Plasma cooperative around the Company's nucleus plantation areas. Apart from owning both oil palm and rubber plantations, the Company also has a rubber processing factory and a palm oil mill (PKS) for processing palm oil, palm kernel and palm oil pulp for fertilizer. Currently, the Company and its Subsidiaries have 6 (six) oil palm plantations and 1 (one) rubber plantation area located in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province. Where 6 (six) oil palm plantation areas, 3 (three) plantation areas each owned by 3 (three) Subsidiaries.

The Company's products are Fresh Fruit Bunches (FFB), Palm Kernel, Crude Palm Oil, Indonesian Standard Crumb Rubber (SIR), Ribbed Smoke Sheet (RSS) and Organic Fertilizers. The Company sells palm oil products to the domestic market, while the majority of the Company's rubber products are processed exported.



Tandan Buah Segar



Buah Kelapa Sawit & Kemel



Lateks



Cup Lump



CPO dan Kemel



Crumo Rubber



Rubber Smoke Sheet



Pupuk ImproBio



Hasil dari perkebunan sawit dan karet Perseroan berupa TBS, bahan olahan karet rakyat (Bokar)/Slab/Lump dan lateks diolah ke pabrik sawit dan karet, menjadi CPO, PK, SIR dan RSS. Lateks adalah cairan atau getah kental yang dihasilkan pohon karet, berwarna mirip susu, dan dapat membeku ketika diberi tambahan zat pembeku atau terkena udara bebas, sedangkan bokar adalah lateks yang dibentuk menjadi gumpalan. Perseroan tidak hanya menggunakan bahan baku dari kebun Perseroan dalam menghasilkan produknya, Perseroan juga membeli bahan baku bokar dari pihak ketiga demikian juga TBS dari petani plasma dan pihak ketiga. Hasil limbah dari proses pabrik CPO, yakni janjang kosong dijadikan menjadi pupuk organik bermerek "ImproBio", sedangkan limbah cair pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi Biogas dimana oleh Perseroan digunakan sebagai energi untuk proses pengering karet (SIR & RSS) dan pupuk organik. Standar Indonesia Rubber (SIR) merupakan karet alam yang diolah secara khusus sehingga mutunya terjamin secara teknis sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar Indonesia Rubber (SIR) digunakan terutama sebagai bahan baku untuk memproduksi ban. SIR dibuat dengan bahan baku yang disebut Bokar/Slab/Lump. Ribbed Smoke Sheet (RSS) adalah produk karet alam berupa lembaran-lembaran tipis yang telah dikeringkan, bersih, bebas dari jamur, warnanya coklat kegelapan, tidak bergelembung udara dan bebas dari akibat pengolahan yang tidak sempurna, cara pengolahannya mengubah lateks segar menjadi lembaran karet kering bergaris (beralur) dan dikeringkan menggunakan udara hangat yang dihasilkan melalui *steam Boiler*.

Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit yang dimiliki Perseroan mampu mengolah 120 Ton/Jam. Saat ini Perseroan baru menggunakan kapasitas 70 Ton/Jam. Untuk PK, Perseroan memiliki kemampuan penggilingan sebesar 300 Ton/Hari. Disamping Pabrik Kelapa Sawit, Perseroan juga memiliki mesin pengolahan karet menjadi SIR dengan kapasitas terpasang 6.000 Ton/bulan, dengan kapasitas terpakai 4.500 Ton/bulan. *Standard Indonesian Rubber* merupakan suatu standar persyaratan mutu karet yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan tertentu, meliputi ruang lingkup, definisi, penggolongan, bahan olah, syarat ukuran, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, pengemasan, syarat penandaan dan catatan umum, standar ini dibuat oleh Badan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). Perseroan juga memiliki Pabrik RSS dengan kapasitas terpasang 600 Ton/bulan, dengan kapasitas terpakai 325 Ton/bulan.

The results of the Company's oil palm and rubber plantations are in the form of FFB, processed smallholder rubber (Bokar)/Slab/Lump and latex processed into palm and rubber mills, into CPO, PK, SIR and RSS. Latex is a thick liquid or sap produced by rubber trees, which is milky in color, and can freeze when added with freezing or exposed to free air, while bokar is latex which is formed into lumps. The Company not only uses raw materials from the Company's plantations to produce its products, the Company also buys raw materials for bokar from third parties as well as FFB from plasma farmers and third parties. The waste products from the CPO mill process, namely empty baskets, are turned into organic fertilizer with the brand "ImproBio", while palm oil mill effluent is processed into Biogas which the Company uses as energy for the rubber drying process (SIR & RSS) and organic fertilizers. The Indonesian Rubber Standard (SIR) is natural rubber that is specially processed so that its quality is technically guaranteed according to the Indonesian National Standard (SNI). The Indonesian Rubber Standard (SIR) is used primarily as a raw material for producing tires. SIR is made with a raw material called Bokar/Slab/Lump. Ribbed Smoke Sheet (RSS) is a natural rubber product in the form of thin sheets that have been dried, clean, free from mold, dark brown in colour, free from air bubbles and free from imperfect processing, the processing method converts fresh latex into dry rubber sheets. striped (grooved) and dried using warm air generated through a steam boiler.

The capacity of the Palm Oil Mill owned by the Company is capable of processing 120 tons/hour. Currently, the Company is only using a capacity of 70 tons/hour. For PK, the Company has a milling capability of 300 tons/day. In addition to the Palm Oil Factory, the Company also has a rubber processing machine into SIR with an installed capacity of 6,000 tons/month, with a used capacity of 4,500 tons/month. Indonesian Rubber Standard is a standard quality requirement for rubber made with certain conditions, including scope, definition, classification, processing materials, size requirements, quality requirements, sampling, test methods, packaging, marking requirements and general notes, these standards are made by the Goods Quality Testing and Certification Agency (BPSMB). The Company also has an RSS Factory with an installed capacity of 600 tons/month, with a used capacity of 325 tons/month.

Pengembangan dan Inovasi Produk

Development and Product Innovation

Perseroan memiliki departemen Agronomi yang bertanggungjawab untuk memantau segala aspek terkait pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan karet. Perseroan yakin bahwa departemen ini memiliki peran yang penting untuk meningkatkan dan perbaikan berkelanjutan dari pengelolaan kegiatan usaha Perseroan. Departemen Agronomi berupaya untuk terus memonitor dan mengimplementasi praktek agronomi terbaik sesuai kultur teknis tanaman yang berwawasan lingkungan, memonitor keseimbangan nutrisi hara tanaman kelapa sawit dan karet serta unsur hara dan kandungan PH di tanah untuk memastikan optimal produksi, memonitor dan mendeteksi awal hama dan penyakit tanaman dan menjaga norma pemakaian sumber daya untuk menjaga biaya yang efektif dan efisien. Perseroan juga memiliki sarana dan prasarana Laboratorium untuk mendukung aktivitas kegiatan agronomi dan menjaga serta meningkatkan mutu produk Perseroan. Perseroan juga mengembangkan jenis-jenis mikroba dengan alat fermentor untuk meningkatkan kualitas pupuk organik yang memberikan dampak positif terhadap unsur kimia tanah dan tanaman. Pengembangan berkelanjutan juga dilaksanakan pada pabrik pengolahan minyak sawit antara lain pembuatan *belt conveyor break cutter* untuk mempermudah pengumpulan cacahan *fiber* bahan baku untuk pabrik pupuk organik dimana sebelumnya menggunakan alat berat *wheel loader* dengan dampak positif penghematan bahan bakar solar.

The company has an Agronomy department which is responsible for monitoring all aspects related to the growth of oil palm and rubber plants. The Company believes that this department has an important role to play in enhancing and continuously improving the management of the Company's business activities. The Department of Agronomy strives to continuously monitor and implement best agronomic practices according to environmentally sound technical plant cultures, monitor the nutrient balance of oil palm and rubber plants as well as nutrients and PH content in the soil to ensure optimal production, monitor and detect early pests and plant diseases and maintain norms of resource usage to maintain cost effective and efficient. The Company also has laboratory facilities and infrastructure to support agronomic activities and maintain and improve the quality of the Company's products. The Company also develops types of microbes using a fermenter to improve the quality of organic fertilizers which have a positive impact on soil and plant chemical elements. Sustainable development is also carried out in palm oil processing plants, including the manufacture of belt conveyor break cutters to facilitate the collection of chopped fibre raw materials for organic fertilizer factories, which previously used heavy wheel loaders with a positive impact on diesel fuel savings.



Visi dan Misi

Vision and Mission



Visi | Vision

Menjadi perusahaan yang terbaik dan berkelanjutan dengan kualitas produk dan layanan prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional.

To be the best and sustainable Company along with excellent quality products and services supported by reliable and professional human resources.



Misi | Mission

- Menghasilkan produk karet, sawit dan produk lainnya secara efisien dengan kuantitas dan kualitas produk yang tinggi, sehingga mampu bersaing dalam tataran global maupun lokal.
- Menciptakan sumber daya manusia yang gigih, terampil, loyal dan bertanggungjawab dengan selalu memanfaatkan teknologi terkini sebagai acuan suatu perubahan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- Selalu bertindak taat asas demi kelestarian lingkungan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara lestari.
- Selalu bertindak cerdas, lugas, dan tuntas dalam memberikan layanan prima untuk tercapainya kepuasan pelanggan.
- Menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis sesama karyawan, antara karyawan dengan manajemen termasuk dengan masyarakat sekitar dan lingkungan.
- *Producing rubber, palm oil, and other products efficiently with high quantity and quality of products; thus, Company is to compete at the global and local levels.*
- *Creating human resources who are persistent, skilled, loyal and responsible by always harnessing the latest technology as a reference for change to earn the Company's objectives.*
- *Acting in compliance with principles for environmental sustainability so that the Company can grow and develop in a sustainable manner.*
- *Always acting smart, straightforward, and thorough in providing excellent service to achieve customer satisfaction.*
- *Creating a harmonious and harmonious relationship among employees, between employees and management, including the surrounding community and the environment.*

Nilai Perusahaan Corporate Values

Dalam menghadapi tantangan bisnis baru serta dinamika usaha yang semakin kompetitif, Nilai Perusahaan menjadi salah satu fokus Pinago Utama. Nilai Perusahaan diyakini dapat bermuara pada kualitas kinerja Perseroan melalui keyakinan, nilai-nilai serta perilaku dan sikap kerja.

Nilai Perusahaan menciptakan kepatuhan terhadap nilai inti Perseroan sehingga karyawan merasa bekerja untuk sesuatu yang mereka yakini dan diimplementasikan dalam berbagai kebiasaan, perilaku, dan identitas yang khas dalam berinteraksi internal, antar bagian, maupun dengan pelanggan dan *stakeholder* sehingga terbentuk *customer engagement*, *partner engagement* dan *human capital engagement*.

Perseroan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas serta meyakini nilai-nilai inti sebagai wujud dari Budaya Perusahaan yang terdiri dari:

With the encounter of the new business challenges as well as the dynamics of a progressively competitive business, the Corporate Value becomes focus of Pinago Utama. The Corporate culture is believed to originate on the quality of the company's performance through the beliefs, values as well as the behaviour and attitude.

The Corporate Value creates conformity to the core values of the Company; thus, an employees' sense of work for something they believe in and implemented in diverse habits, behavior, and a distinctive identity in the interaction internally, amongst the section, as well as with customers and stakeholders so as formed customer engagement, partner engagement, and human capital engagement.

The Company upholds integrity in performing its duties and convinces in the core values as a manifestation of the Corporate Culture that consists of:



• Target, Tanggung Jawab dan Tuntas

Bahwa setiap komponen Perusahaan dalam bekerja selalu sesuai target, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas secara cerdas, berkualitas dan tuntas.

• Targets, Responsibilities, and Completeness

That every component of the Company always works according to the target, is responsible for completing tasks intelligently, with quality and thoroughly.



• Efektif dan Efisien

Bahwa setiap komponen Perusahaan harus bertindak secara efektif dan efisien dalam menghasilkan produk yang berkualitas.

• Effective and Efficient

That every component of the Company must act effectively and efficiently in producing quality products.



• Gigih dan Gemilang

Bahwa setiap komponen Perusahaan harus gigih dan taat asas untuk meraih masa depan yang gemilang.

• Persistent and Glorious

That every component of the Company must be persistent and adhere to the principles in order to achieve a glorious future.



• Akurat dan Akuntabel

Bahwa setiap komponen dalam Perusahaan harus bertindak secara akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan dipersyaratkan.

• Accurate and Accountable

That every component in the Company must act accurately, transparently and be accountable in accordance with the norms and requirements.



• Serasi dan Selaras

Bahwa setiap komponen dalam Perusahaan harus bertindak secara serasi dan selaras dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sehingga Perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang secara lestari.

• Harmonious and Coordinated

Whereas every component in the Company must act harmoniously and in harmony with the surrounding community and environment so that the Company can continue to grow and develop in a sustainable manner.



Strategi Perusahaan

Corporate Strategy

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan beberapa strategi usaha dalam menjawab tantangan dan memenangkan kompetisi pasar dengan para pesaingnya, oleh sebab itu Perseroan telah menetapkan strategis dalam menciptakan produk yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar melalui kreativitas dan inovasi secara berkesinambungan. Strategi usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan agar dapat bersaing dengan kompetitor sejenis adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas produksi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit.
Perseroan saat ini memiliki kapasitas terpasang mesin penggilingan kelapa sawit sebesar 120 Ton Tandan Buah Segar (TBS)/Jam, dari kapasitas tersebut baru digunakan perseroan sebesar 70 Ton TBS/Jam. Perseroan menargetkan dapat memaksimalkan utilisasi pemakaian mesin hingga mencapai 110 Ton TBS/Jam artinya akan ada kenaikan produksi sebesar 57,1%. Untuk segmen Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel/PK), saat ini perseroan memiliki fasilitas pengolahan Palm Kernel dengan kapasitas penggilingan 300 Ton PK/Hari, namun fasilitas tersebut belum beroperasi, ke depan manajemen akan mulai mengoperasikan fasilitas tersebut apabila harga *Palm Kernel Oil* sudah menunjukkan kenaikan.
- b) Meningkatkan Kapasitas Produksi pabrik pengolahan karet.
Perseroan saat ini memiliki dua line produksi untuk pengolahan karet menjadi karet remah (*Crumb Rubber/CR*) dan karet lembaran asap (*Ribbed Smoked Sheet/RSS*). Kapasitas terpasang untuk *Crumb Rubber* adalah 6.000 Ton SIR (*Standart Indonesia Rubber*)/Bulan dimana saat ini kapasitas yang digunakan 4.500 Ton SIR/Bulan. Perseroan menargetkan dapat mengutilisasi kapasitas secara penuh, artinya akan ada kenaikan produksi 1.500 Ton SIR/Bulan atau sebesar 33,3%. Untuk segmen *Ribbed Smoked Sheet* perseroan baru menggunakan kapasitas sebesar 325 Ton RSS/Bulan, ditargetkan dapat digunakan dengan kapasitas penuh 600 Ton RSS/Bulan.
- c) Melakukan Penanaman atas sisa lahan kosong/*landbank* Perseroan.
Perseroan berencana melakukan penanaman pada lahan kosong yang dimiliki. Perseroan melalui Entitas Anak yaitu MAS akan melakukan penanaman pada lahan kosong yang tersedia, target awal Perseroan melakukan penanaman sebesar 3.500 Hektar dari 17.820 Hektar lahan yang diberi ijin lokasi.

In carrying out its business activities, the Company implements several business strategies in responding to challenges and winning market competition with its competitors, therefore the Company has set a strategic position in creating quality products that can compete with the market through continuous creativity and innovation. The business strategies that will be carried out by the Company in order to compete with similar competitors are as follows:

- a) *Increasing the production capacity of palm oil and palm kernel processing factories.*
The Company currently has an installed capacity of 120 tons of fresh fruit bunches (FFB)/hour, of which the Company only uses 70 tons of FFB/hour. The Company targets to maximise the utilisation of machines up to 110 tons of FFB/hour, meaning that there will be an increase in production of 57.1%. For the Palm Kernel (PK) segment, currently the company has a Palm Kernel processing facility with a milling capacity of 300 tons PK/day, but the facility is not yet operational, in the future management will start operating the facility if the price of Palm Kernel Oil has shown. increase.
- b) *Increasing the Production Capacity of a rubber processing factory.*
The Company currently has two production lines for processing rubber into crumb rubber (CR) and fume sheet rubber (Ribbed Smoked Sheet/RSS). The installed capacity for Crumb Rubber is 6,000 Tons of SIR (Standard Indonesian Rubber)/month where currently the capacity used is 4,500 Tons of SIR/month. The company targets to be able to fully utilize capacity, meaning that there will be an increase in production of 1,500 tonnes of SIR/month or 33.3%. For the Ribbed Smoked Sheet segment, the company only uses a capacity of 325 tons of RSS/month, targeted to be used with a full capacity of 600 tons of RSS/month.
- c) *Carrying out planting on the remaining vacant land/landbank of the Company.*
The Company plans to plant on its vacant land. The Company through its subsidiary, MAS will plant on the available vacant land, the initial target of the Company is to plant 3,500 hectares of the 17,820 hectares of land that has been granted a location permit.

d) Melakukan Penanaman Kembali (*Replanting*).

Perseroan senantiasa melakukan penanaman kembali tanaman yang sudah berusia tua, menggantikannya dengan tanaman baru agar menghasilkan produksi dan kualitas tanaman yang optimal.

e) Mekanisasi panen dan pemupukan dengan memanfaatkan teknologi serta sistem digitalisasi supervisi lapangan melalui *gadget*.

Hal ini dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, hasil kerja serta penggunaan biaya operasional Perseroan.

f) Mengelola kebun binaan dan plasma.

Selain dari kebun inti, Perseroan juga mengelola kebun binaan sesuai kultur teknis agronomi untuk menjamin pasokan tandan buah segar sesuai standar mutu buah yang ditetapkan Perseroan.

g) Memproduksi RSS sebagai produk ceruk pasar.

Produk RSS dikategorikan sebagai produk ceruk pasar dengan adanya jumlah produsen RSS yang lebih sedikit dibandingkan produk karet lainnya seperti karet remah. Hal ini antara lain disebabkan adanya prasyarat baku mutu yang tinggi untuk produk RSS (di atas SIR) dan lateks yang dihasilkan kebun karet harus segera diproses menjadi RSS sebelum menggumpal karena proses alami. Di wilayah Sumatera Selatan kurang lebih terdapat 4 pabrik RSS termasuk perseroan di mana 2 pabrik RSS dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dengan total kapasitas olah 52 ton kering per hari dan 1 pabrik RSS dimiliki PT Milenia Sipef dengan kapasitas olah 25 tons kering per hari. Produk RSS digunakan untuk proses lebih lanjut menjadi alat dan produk kesehatan.

d) *Performing Replanting.*

The Company always replants old plants, replacing them with new plants in order to produce optimal crop production and quality.

e) *Mechanization of harvest and fertilization by utilizing technology and field supervision digitalization system through gadget.*

This is done by the Company to improve efficiency, work quality, work results and use of the Company's operational costs.

f) *Managing the assisted and plasma estates.*

Apart from the nucleus gardens, the Company also manages the target gardens according to the agronomic technical culture to ensure the supply of fresh fruit bunches according to the fruit quality standards set by the Company.

g) *Producing RSS as a niche product.*

RSS products are categorized as niche market products with a smaller number of RSS producers compared to other rubber products such as crumb rubber. This is partly due to the existence of high quality standard requirements for RSS products (above SIR) and latex produced by rubber plantations must be immediately processed into RSS before agglomeration due to natural processes. In the South Sumatra region there are approximately 4 RSS factories including the company where 2 RSS factories are managed by PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) with a total processing capacity of 52 dry tons per day and 1 RSS factory owned by PT Milenia Sipef with a processing capacity of 25 dry tons per day. RSS products are used for further processing into health tools and products.



Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Capital Management

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi Perseroan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan Perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan meliputi: standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum kota/kabupaten, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pemberian insentif, fasilitas kesehatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk level manajerial, dan fasilitas pinjaman untuk keperluan darurat melalui departemen Sumber Daya Manusia.

The Company carries out programs to improve human resources through training, maintain employee satisfaction through competitive remuneration, and instill motivation through a performance management program.

The Company realizes that operational and financial success in a sustainable manner is highly dependent on the right HR team (the right employees in the right roles). For this reason, the Company will always strive to maintain productive industrial relations, carry out the recruitment process of the best talents and retain these talents.

Human resources are the main asset of the Company and have a very important role in determining the success of the Company's business activities. Realizing this, the Company believes that in order to achieve the Company's mission, efforts are absolutely necessary that can support the development and improvement of the quality of human resources so that optimal utilization of Human Resources can be achieved.

To achieve these HR development goals, the Company carries out programs to improve the quality of its human resources. The employee development policies are described in the Company's rule book as follows:

1. *The Company provides training programs according to the Company's business needs.*
2. *Identification of training needs is the responsibility of the superior together with the Human Resources Department.*
3. *Employees who refuse to take part in training or do not seriously carry out their duties in training without reasons acceptable to the Company are deemed to have refused work orders and will be subject to sanctions in accordance with Company Regulations.*

In addition, the Company also provides employee welfare facilities including: salary standards that meet city/district minimum wage requirements, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, incentives, health facilities (inpatient and outpatient) for managerial levels, and loan facilities for emergency purposes through human resources department.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum kota/kabupaten, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS untuk seluruh karyawan baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan.

The Company has also complied with regulations in the field of manpower, including providing salary standards to meet the city/regency minimum wage requirements, timely payment of salaries and THR, BPJS programs for all employees, both health and employment, employee leave rights are regulated in Company Regulations .

Pada tahun 2020, Perseroan mempekerjakan 3.050 orang karyawan yang terbagi atas orang karyawan tetap, dimana untuk kategori karyawan tetap diklasifikasikan hingga posisi jabatan Pegawai Bulanan (PB) atau Karyawan Harian Tetap (KHT) dan 1.125 orang Karyawan Harian Lepas (KHL). Seluruh karyawan Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

In 2020, the Company employs 3,050 employees which are divided into permanent employees, where for the category of permanent employees are classified up to the positions of Monthly Employees (PB) or Permanent Daily Employees (KHT) and 1,125 Freelance Daily Employees (KHL). All employees of the Company are Indonesian citizens (WNI) because the Company does not employ foreign workers.

Pada tahun buku 2020, jumlah karyawan mengalami penurunan sebesar 15% dari tahun 2019 sebanyak 3.609 orang menjadi 3.050 orang. Komposisi karyawan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

In the 2020 financial year, the number of employees decreased by 15% from 2019 as many as 3,609 people to 3,050 people. The composition of employees can be explained in the table below:

Komposisi Karyawan Menurut Level Jabatan

Employee's Composition by Level

Keterangan Description	2019	2020	%
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	7	3	(57,2)%
Direksi <i>Board of Directors</i>	5	5	0,0%
Manajer <i>Manager</i>	28	28	0,0%
Supervisor	146	141	(3,4)%
Pelaksana (Pegawai Bulanan (PB) dan Karyawan Harian Tetap (KHT)) <i>Executive (Monthly Employees (PB) and Permanent Daily Employees (KHT))</i>	1.715	1.748	1,9%
Pelaksana (karyawan Harian Lepas (KHL)) <i>Executives (Daily Freelance employee (KHL))</i>	1.708	1.125	(34,1)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%



Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Employee's Composition by Education

Keterangan Description	2019	2020	%
S1 Bachelor's Degree	108	105	(2,8)%
S2 Master's Degree			
S3 Doctoral's Degree			
Sarjana Muda Diploma	35	33	(5,8)%
Non Sarjana Non Graduate	3.466	2.912	(16,0)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Employee's Composition by Age

Keterangan Description	2019	2020	%
18 - 25 Tahun 18 - 25 Years of Age	665	568	(15,6)%
26 - 35 Tahun 26 - 35 Years of Age	1.451	1.313	(9,5)%
36 - 45 Tahun 36 - 45 Years of Age	972	859	(11,6)%
46 - 55 Tahun 46 - 55 Years of Age	440	268	(39,1)%
>56 Tahun >56 Years of Age	81	42	(48,1)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%

Komposisi Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Employee's Composition by Gender

Keterangan Description	2019	2020	%
Pria Male	2.685	2.337	(13,0)%
Wanita Female	924	713	(23,0)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%

Komposisi Karyawan Menurut Jenis Status Kepegawaian

Employee's Composition by Employment Status

Keterangan Description	2019	2020	%
Tetap Full-Time	1.901	1.925	1,3%
Kontrak Non-Permanent	1.708	1.125	(34,2)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Employee's Composition by Primary Activity

Keterangan Description	2019	2020	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	7	3	(57,2)%
Direksi Board of Directors	5	5	0,0%
Finance & Accounting (DKI Jakarta)	2	2	0,0%
Finance & Accounting (Palembang)	20	32	60,0%
GIS (Geography Information System)	6	4	(33,3)%
IT Dept.	4	3	(25,0)%
HRD	8	6	(25,0)%
GA, Legal & Plasma	63	47	(25,4)%
Sustainability	5	4	(20,0)%



Keterangan Description	2019	2020	%
Training	2	4	100,0%
Purchasing	15	13	(13,3)%
Export	7	7	0,0%
Commercial	5	2	(60,0)%
Internal Audit Dept.	12	12	0,0%
Community Development	7	8	14,3%
Automotive & Civil Engineering	78	83	6,4%
Plantation	2.615	2.102	(19,6)%
Pabrik Pengolahan Processing Plant	748	707	(5,5)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Employee's Composition by Location

Keterangan Description	2019	2020	%
DKI Jakarta	5	4	(20,0)%
Sumatera Selatan	3.604	3.046	(15,5)%
Jumlah Total	3.609	3.050	(15,5)%

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competence Training and Development

Strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM juga ditempuh melalui strategi hilir dengan dilaksanakannya pelatihan dan pendidikan bagi karyawan-karyawan yang membutuhkan. Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensinya. Tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan 10 (sepuluh) program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 242 karyawan. Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020 adalah sebesar Rp364.256.788.

The strategy for developing and improving HR capacity was also pursued through a downstream strategy with the implementation of training and education for employees in need. The Company has a strong commitment to improve the competence and quality of Human Capital through continuous training and development programs. The company provides equal opportunities for each employee to take part in education and training programs in order to develop their competencies. In 2020, the Company held 10 (ten) education and training programs participated by 242 employees. Realization of Education and Training Costs in 2020 is Rp364,256,788.

Dalam rangka membentuk karyawan yang tumbuh dari dalam dengan karakter yang tepat dan memadai, Perusahaan telah merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi kepemimpinan yang terstruktur, komprehensif dan berjenjang sejak tahap awal. Beberapa bentuk program yang dicanangkan seperti program pelatihan, *monitoring*, rotasi, pengembangan karir, pembinaan kepemimpinan dan sesi umpan balik, serta diperkuat dengan konten budaya Perusahaan.

In order to form growing employees with the right and adequate character, the Company has designed and implemented a leadership competency development program that is structured, comprehensive, and tiered from the initial stage. Some forms of programs were launched, such as training programs, monitoring, rotation, career development, leadership development and feedback sessions, and strengthened with the content of the Company's culture.

Teknologi Informasi Information Technology

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, kebutuhan akan teknologi informasi juga semakin meningkat. Berbagai aspek kehidupan tidak bisa terlepas dari teknologi informasi. Demikian pula dalam dunia kerja, Perusahaan dituntut untuk menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses bisnisnya agar dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Dalam hal teknologi informasi Perseroan telah membangun:

1. Teknologi Jaringan Informasi dari Kantor Palembang ke pelosok-pelosok kebun yang terpencil, sehingga komunikasi data dan media dapat berjalan dengan lancar.
2. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan tersebut Perseroan bisa melakukan sistem pelaporan *online* baik fisik maupun keuangan pada Sistem Informasi Akuntansi Perkebunan (SIAP) dengan *backbone Enterprise Resource Planning (ERP)* dengan SAP.
3. Pemanfaatan sistem digitalisasi supervisi di perkebunan seperti SIAP *Mobile*, Sistem Informasi Kebun (Si Kebun), LPO *online*, sehingga supervisi bisa lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas, pada masa pandemi Covid-19 dimana pembatasan pergerakan orang menjadi kendala operasional yang utama, Perseroan tetap dapat menjalankan bisnisnya tanpa gangguan yang berarti.

Along with the progressive development of the era, the exigency for information technology is also then immensely increasing. Various facets of life are inseparable from information technology. Likewise, in the world of work, companies are required to apply information technology in their multifarious business processes in order to contest in a progressively competitive business world. In terms of information technology, the Company has developed:

1. *Information Network Technology from Palembang Office to remote corners of the garden; thus, data and media communication can run, appropriately.*
2. *By harnessing this network technology, the Company is able to perform an online reporting system, both physical and financial, on the Plantation Accounting Information System (SIAP) with an Enterprise Resource Planning (ERP) backbone with SAP.*
3. *To employ digitisation systems for supervision in plantations, such as SIAP Mobile, Plantation Information System (Si Kebun), and online LPO so that supervision can be more effective and efficient.*

With the aforementioned matters, during the Covid-19 pandemic, where restrictions on the movement of people became a major operational obstacle, the Company could operate its business without significant disruption.



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders' Composition

Nama Name	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
Wilson Sutantio	173.250.000	22,18 %
Hasan Tantri	139.000.000	17,79 %
Charles Sutantio	139.000.000	17,79 %
Peter Unggul Sutantio)	139.000.000	17,79 %
Suryani Tantri	34.750.000	4,45 %
Masyarakat Public	156.170.000	19,99 %
ESA	80.000	0,01%
Jumlah Total	781.250.000	100,00 %

Kepemilikan Saham berdasarkan Klasifikasi

Share Ownership by Classification

Berdasarkan Data Pemegang Saham, kepemilikan saham per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Shareholder Data, share ownership as of December 2020 is as follows:

Uraian Description	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Kepemilikan Institusi Lokal Local Institution Ownership	0	0,00%
Kepemilikan Institusi Asing Foreign Institution Ownership	0	0,00%
Kepemilikan Individual Lokal Local Individual Ownership	646	19,99%
Kepemilikan Individual Asing Foreign Individual Ownership	14	0,01%
Jumlah Total	660	20,00%

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Uraian Description	Tanggal Pelaksanaan Date of Enforcement
Bookbuilding (Masa Penawaran Awal) Initial Offering Period	27 - 31 Juli 2020 July 27-31, 2020
Tanggal Pernyataan Efektif Date of Effective Statement	13 Agustus 2020 August 13, 2020
Masa Penawaran Umum Public Offering Period	18, 19, dan 24 Agustus 2020 August 18, 19, and 24, 2020
Tanggal Penjatahan Date of Allotment	26 Agustus 2020 August 26, 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Date of Subscription Refund	28 Agustus 2020 August 28, 2020
Tanggal Pencatatan Saham di BEI Date of Share Listing in IDX	31 Agustus 2020 August 31, 2020

Komposisi Kepemilikan Saham Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi per 31 Desember 2020

Share Ownership of Shareholders, the Board of Commissioners and Directors as on December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Total
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Wilson Sutantio	Komisaris Utama President Commissioner	173.250.000	22,18 %	22,18 %
Hasan Tantri	Komisaris Commissioner	139.000.000	17,79 %	17,79 %
Chairul Muluk	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0,00%	0,00%
Direksi Board of Directors				
Bambang Palgoenadi	Direktur Utama President Director	0	0,00%	0,00%
Meli Tantri	Direktur Keuangan dan Komersia Director of Finance and Commerce	0	0,00%	0,00%
Raymon Wahab	Direktur Processing dan Industri Director of Processing and Industry	0	0,00%	0,00%
Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun Director of Plantation	0	0,00%	0,00%
Komaruzzaman	Direktur Umum Director of General Affairs	0	0,00%	0,00%



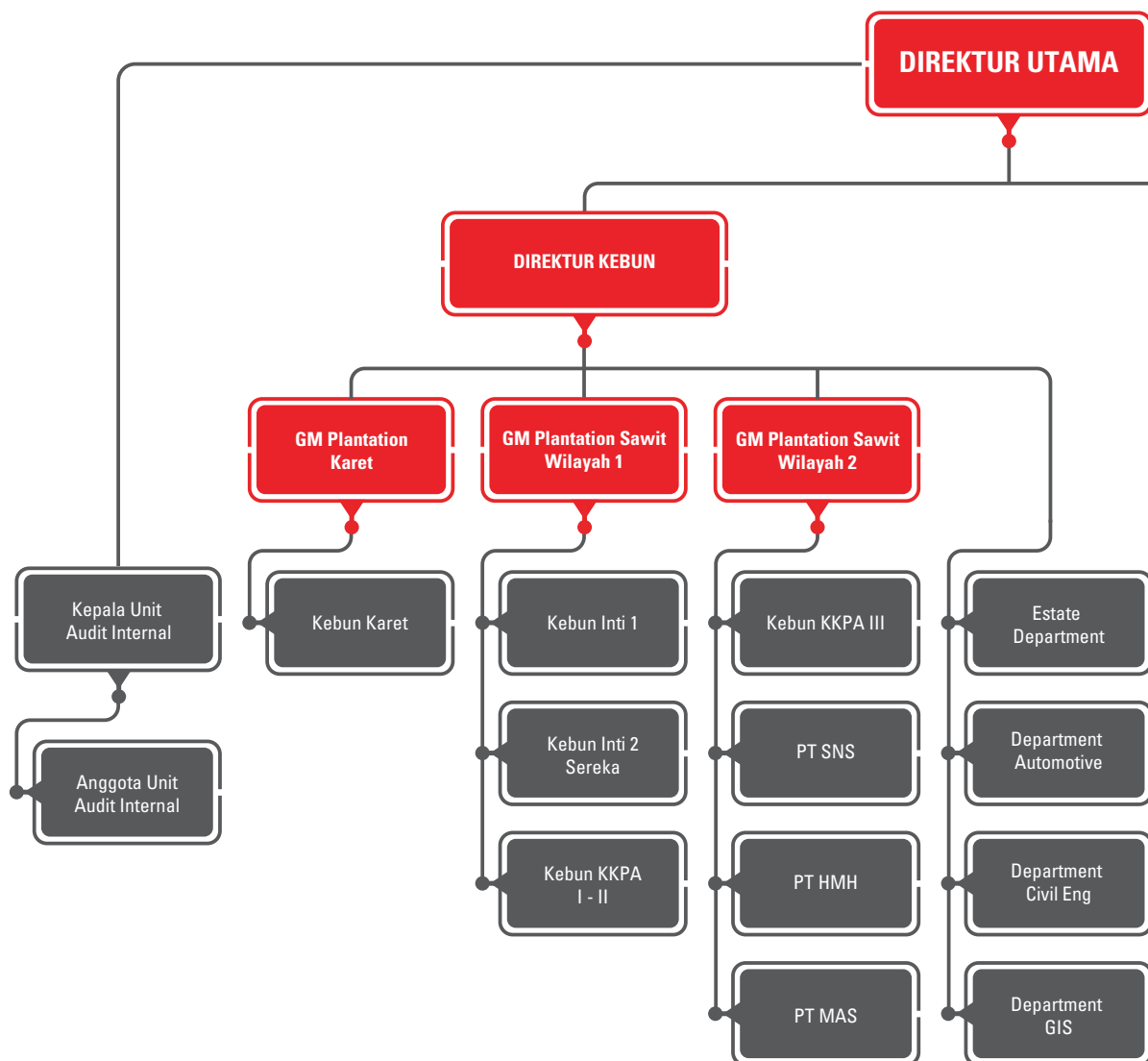
Entitas Anak

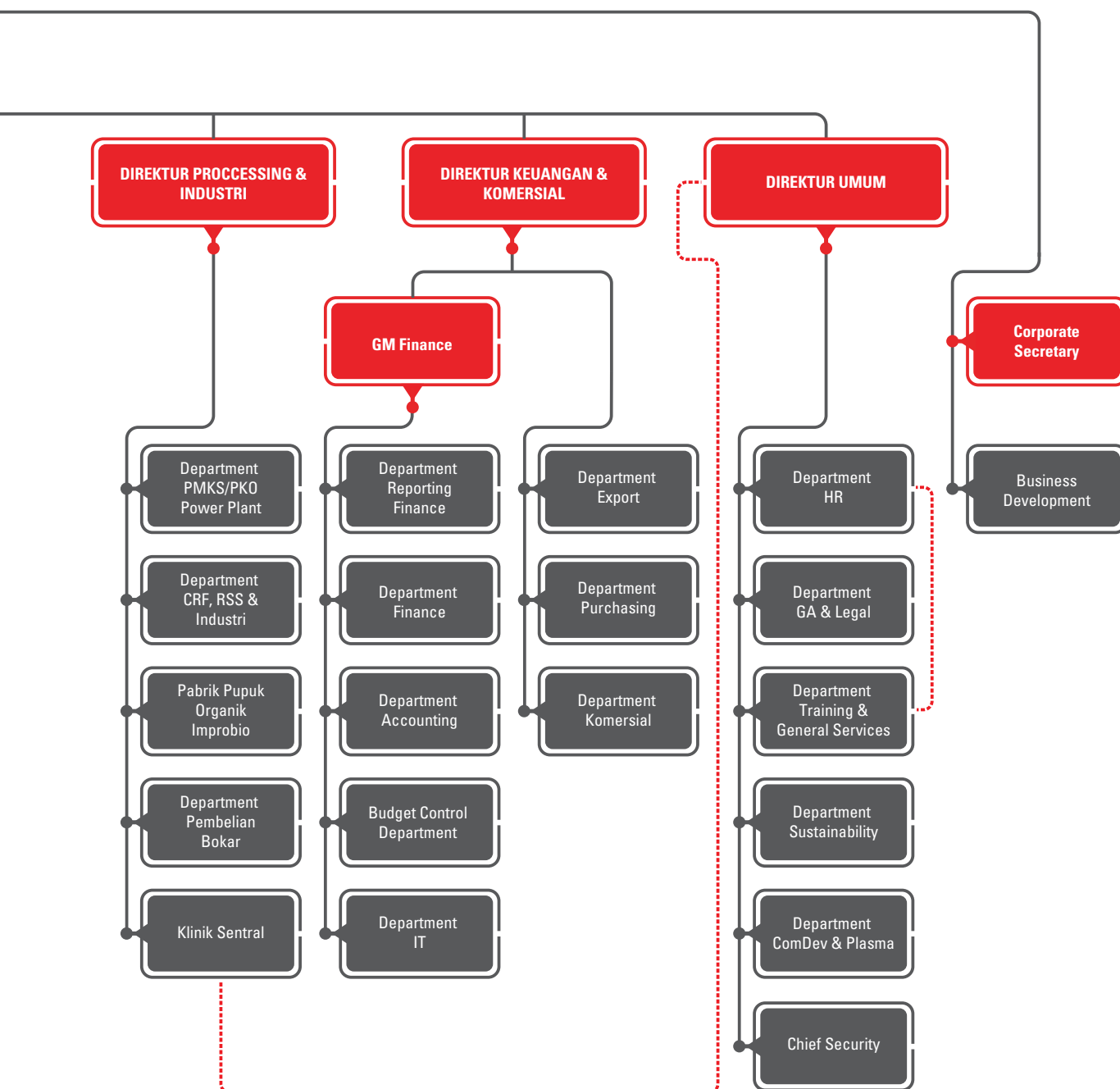
Subsidiaries

Nama Perusahaan Company's Name	Status	Persentase Kepemilikan (%) Share Ownership (%)	Tahun Penyertaan Years of Investment in Shares	Tahun Usaha Komersial Commercial Year	Bidang Usaha Line of Business
PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera ("SNS")	Beroperasi Operating	99%	2010	2014	Perkebunan Sawit Palm oil Plantation
PT Hamparan Mutiara Hijau ("HMH")	Beroperasi Operating	99%	2010	2017	Perkebunan Sawit Palm oil Plantation
PT Musi Andalan Sumatera ("MAS")	Beroperasi Operating	99%	2013	Belum komersial Not yet commercial	Perkebunan Sawit Palm oil Plantation

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure





Informasi Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professionals Information

AKUNTAN PUBLIK

Nama : Djoko, Sidik dan Indra (*International member of Antea*)
 Alamat : Graha Mandiri, d/h Plaza Bumi Daya, Lt. 19
 Jl. Imam Bonjol, No.61, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia
 Telp. : (021) 2247 6804
 Jasa : Memeriksa dan memastikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan hasil akhir berupa opini auditor terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

PUBLIC ACCOUNTANT

Name : Djoko, Sidik dan Indra (*International member of Antea*)
 Address : Graha Mandiri, d/h Plaza Bumi Daya, Lt. 19
 Jl. Imam Bonjol, No.61, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia
 Tel. : (021) 2247 6804
 Services : Checking and ensuring that the Company's Financial Statements have been presented in accordance with applicable accounting standards, with the final result in the form of an auditor's opinion on the Company's Financial Statements.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Nama : PT Adimitra Jasa Korpora
 Alamat : Rukan Kirana Buotique Office Jl. Kirana Avenue III
 Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
 Telp. : (021) 2974 5222
 Faks. : (021) 2928 9961
 Jasa : Mengelola administrasi saham atau mencatat daftar pemegang saham Perseroan.

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

Name : PT Adimitra Jasa Korpora
 Address : Rukan Kirana Buotique Office, Jl. Kirana Avenue III
 Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - North Jakarta 14250
 Tel. : (021) 2974 5222
 Fax. : (021) 2928 9961
 Services : Managing stock administration or write down a list of holders shares of the Company.

KONSULTAN HUKUM

Nama : MMI Law Office
 Alamat : Office 8, 15th Floor Suite H, Jl. Senopati Raya No. 8B
 Jakarta 12190
 Telp. : (021) 2933 2858/2933 2859
 Faks. : (021) 2933 2857
 Jasa : Konsultan Hukum & Legalitas

LAW CONSULTANT

Name : MMI Law Office
 Address : Office 8, 15th Floor Suite H, Jl. Senopati Raya No. 8B
 Jakarta 12190
 Tel. : (021) 2933 2858/2933 2859
 Fax. : (021) 2933 2857
 Services : Legal & Legality Consultants



Alamat Kantor Pusat & Entitas Anak

Addresses of Head Office and Subsidiaries

Alamat Kantor Pusat:

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Pantai Indah Kapuk. Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta
Utara 14470. DKI Jakarta

Head Office Address:

*Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Pantai Indah Kapuk. Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan North Jakarta
14470. DKI Jakarta*

Alamat Entitas Anak

PT SNS: Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015 Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning Palembang 30127, Sumatera Selatan;

Address of Subsidiaries

*PT SNS: Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015 Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning Palembang 30127, South Sumatra;*

PT HMM: Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015 Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning Palembang 30127, Sumatera Selatan;

*PT HMM: Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015 Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning Palembang 30127, South Sumatra;*

PT MAS: Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015 Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning Palembang 30127, Sumatera Selatan.

*PT MAS: Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015 Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning Palembang 30127, South Sumatra.*

Informasi pada Situs Perusahaan

Corporate Website Information

Media digital Perusahaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan sebagai syarat keterbukaan informasi adalah www.pinagoutama.com. Beberapa informasi yang terdapat di situs Perseroan sebagai berikut:

Company digital media accessible to the general public and as a condition of information disclosure is www.pinagoutama.com. Some of the information on the Company's website is as follows:

1. Informasi Perusahaan yang menjelaskan tentang Perusahaan, susunan organisasi dan profil Dewan Komisaris dan Direksi, budaya Perusahaan, penghargaan dan sertifikasi;
2. Lini Bisnis, menggambarkan strategi bisnis Perusahaan yang terdiri dari Industri dan Jasa Konstruksi;
3. Keberlanjutan, menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, *Human Capital*, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan;
4. Media, menjabarkan berita & siaran pers, Presentasi Perusahaan, majalah internal (elektronik), aplikasi *mobile*, *press kit* dan kegiatan pers;
5. Investor, menjelaskan informasi Keuangan (Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan), Kegiatan Presentasi, dan Layanan Investor;
6. Karir, menjelaskan ikhtisar dan Penerimaan Pegawai.

1. *Company Information that describes the Company, organisational structure and profile of the Board of Commissioners and Directors, Corporate culture, awards and certifications;*
2. *Business Line, describes the Company's business strategy consisting of Industry and Construction Services;*
3. *Sustainability, explain about Corporate Social Responsibility, Occupational Safety and Health, Environment, Human Capital, Risk Management and Corporate Governance;*
4. *Media, outlines news & press releases, Company presentations, internal magazines (electronics), mobile applications, press kits and press activities;*
5. *Investors, explain Financial information (Annual Reports, Annual Financial Reports), Presentation Activities, and Investor Services;*
6. *Careers, explain the overview of Human Capital and Employee Recruitment.*

Jangkauan Pasar dan Wilayah Operasi

Market Coverage and Operation Areas

LOKASI PERKEBUNAN DAN INDUSTRI

PT PINAGO UTAMA Tbk

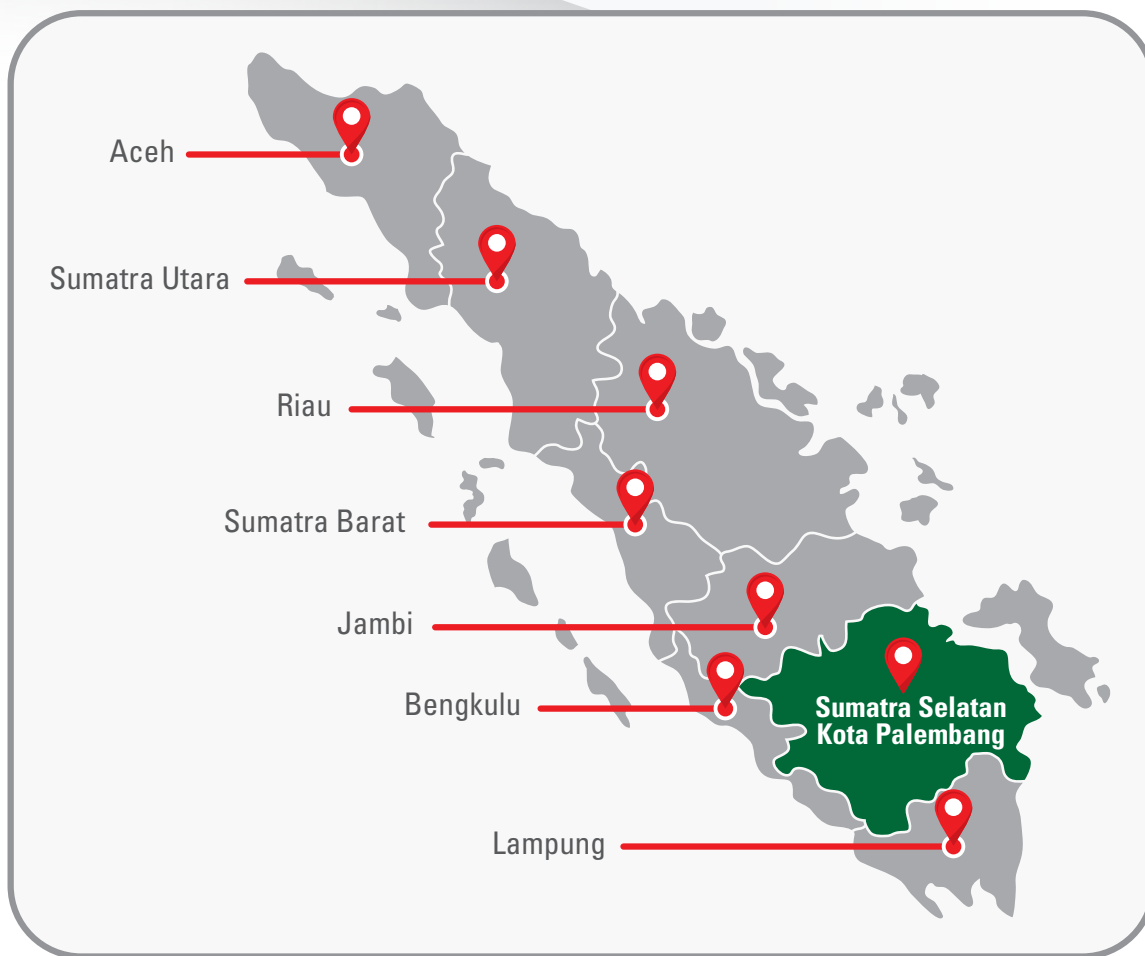




INFOGRAPHIC

PT Pinago Utama Tbk

SOUTH SUMATERA PALEMBANG CITY MUSI BANYUASIN DISTRICS







PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



04

Analisa & Pembahasan **Manajemen**

Management Discussion & Analysis

Tinjauan Industri & Kondisi Makro Ekonomi

Industry Overview & Macroeconomic Conditions

Tinjauan Makroekonomi

Macroeconomic Review

Tinjauan Perekonomian Global

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Ekonomi global berkontraksi dalam terutama pada semester I 2020, dan perlahan membaik pada semester II 2020, didorong oleh kemajuan penanganan Covid-19, peningkatan mobilitas, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegratif dan bersinergi antarotoritas maupun antarnegara. Covid-19 juga mengangkat tiga pelajaran penting di perekonomian global pada sistem perdagangan internasional, sistem moneter internasional, dan sistem keuangan dunia yang patut menjadi perhatian guna meningkatkan ketahanan ekonomi global ke depan.

Dinamika perekonomian global 2020 menghadapi krisis yang belum pernah dialami sebelumnya.

Episentrum krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya, seperti depresi tahun 1930an, krisis utang di Amerika Latin tahun 1980an, krisis Asia tahun 1997/98, maupun krisis keuangan global tahun 2008/2009. Krisis pada tahun 2020 bersumber dari penyakit Covid-19. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 dan kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Penyebaran yang sangat cepat tidak terlepas dari karakteristik Covid-19 yang berbeda dengan pandemi sebelumnya, seperti *Severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS). 1 Daya tular Covid-19 jauh lebih tinggi, yang tercermin dari tingkat transmisi (*Basic Reproductive Ratio, RO*) sebesar 2-4, jauh di atas *RO* pandemi lainnya. 2 Masa inkubasi Covid-19 juga lebih panjang dibandingkan pandemi lainnya yang menyebabkan penanganan penyakit ini secara dini menjadi terhambat, sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan yang kompleks. Sepanjang 2020, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 80 juta jiwa dan mengakibatkan kematian lebih dari 1,7 juta jiwa penduduk dunia (Tabel 1.1). Dampak tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak SARS dan MERS yang masing-masing menginfeksi sekitar 8.100 jiwa dan 2.494 jiwa.

Global Economic Review

The 2020 global economy was marked by the Covid-19 pandemic which had an extraordinary impact on health, humanity, the economy and financial system stability. Health endeavours to tackle the spread of Covid-19 have limited mobility and economic activity, increasing uncertainty in financial markets and a wave of contractionary economic growth in the world. The global economy contracted particularly in the first semester of 2020, and slowly improved in the second semester of 2020, driven by progress in handling Covid-19, increased mobility, and the impact of policy stimuli that are integrated and synergised amongst authorities and amongst countries. Covid-19 also raises three important lessons in the global economy in the international trade system, international monetary system, and the world financial system that deserve attention in order to increase the resilience of the global economy going forward.

The dynamics of the global economy in 2020 is facing a crisis that has never been experienced before.

The epicenter of the crisis this time is different from the crises that have occurred before, such as the depression in the 1930s, the debt crisis in Latin America in the 1980s, the Asian crisis in 1997/98, and the global financial crisis in 2008/2009. The crisis in 2020 originated from the Covid-19 disease. This disease first appeared in Wuhan, China, in December 2019 and then spread rapidly to various countries. The very rapid spread is inseparable from the characteristics of Covid-19 that are different from the previous pandemic, such as Severe acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS). 1 The infectivity of Covid-19 is much higher, which is reflected in the transmission rate (Basic Reproductive Ratio, RO) of 2-4, far above the RO of other pandemics. 2 The incubation period for Covid-19 is also longer than other pandemics which causes early handling of this disease to be hampered, causing complex health problems. Throughout 2020, Covid-19 has infected more than 80 million people and resulted in the death of more than 1.7 million people in the world (Table 1.1). This impact was much greater than the impact of SARS and MERS, which infected around 8,100 and 2,494, respectively.



Penerapan kebijakan kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 telah menimbulkan gejolak pada pasar keuangan dan aktivitas perekonomian.

Untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19 yang merata dan cepat, protokol kesehatan dan kebijakan untuk membatasi mobilitas antar wilayah maupun antar negara diterapkan dengan ketat. Kebijakan itu berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat sehingga menurunkan aktivitas konsumsi, produksi, dan investasi secara tajam. Aktivitas perdagangan internasional juga menurun akibat gangguan mata rantai produksi global. Covid-19 juga menekan kinerja pariwisata akibat pembatasan akses antarnegara. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat tajam sebagai dampak dari turunnya kepercayaan konsumen dan dunia usaha atas prospek perekonomian. Tekanan yang berat pada pasar keuangan dan ekonomi global terutama terjadi pada semester I 2020, khususnya pada triwulan II 2020. Krisis ekonomi ini juga menimbulkan kekhawatiran atas dampak rambatan selanjutnya pada stabilitas sistem keuangan, akibat menurunnya kinerja korporasi dan rumah tangga.

Berbagai kebijakan untuk mengatasi Covid-19 terus dilakukan, termasuk upaya untuk penemuan vaksin Covid-19.

Ketersediaan vaksin akan menentukan penyebaran Covid-19 ke depan dan proses pemulihan ekonomi di berbagai negara. Hingga akhir 2020, pengujian kandidat vaksin Covid-19 di banyak negara telah menunjukkan perkembangan yang positif.

Tinjauan Perekonomian Indonesia

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada tahun 2020, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020. Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait memperkuat sinergi kebijakan guna memitigasi dampak luar biasa dari Covid-19 tersebut. Berbagai respons yang ditempuh secara bertahap dapat kembali meningkatkan pemulihan perekonomian pada semester II 2020 dan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, meskipun berbagai penguatan terus dilakukan.

The implementation of health policies to reduce the spread of Covid-19 has caused turmoil on financial markets and economic activity.

To reduce the impact of the even and rapid spread of Covid-19, health protocols and policies to limit mobility between regions and between countries are strictly implemented. This policy has an impact on obstructing the mobility of the people, thereby sharply reducing consumption, production and investment activities. International trade activity has also decreased due to disruption in the global production chain. Covid-19 has also suppressed tourism performance due to restrictions on access between countries. Global financial market uncertainty also increased sharply as a result of the decline in consumer and business confidence in the economic outlook. Heavy pressure on financial markets and the global economy especially occurred in the first semester of 2020, particularly in the second quarter of 2020. This economic crisis also raised concerns over the impact of further spillovers on financial system stability, as a result of the decline in the performance of corporations and households.

Various policies to deal with Covid-19 continue to be carried out, including efforts to find a Covid-19 vaccine.

The availability of vaccines will determine the future spread of Covid-19 and the process of economic recovery in various countries. Until the end of 2020, testing of Covid-19 vaccine candidates in many countries has shown positive developments.

Indonesian Economic Review

The Covid-19 pandemic will put heavy pressure on Indonesia in 2020, not only on health and humanitarian aspects, but also on social and economic aspects. The slowing world economy and Large-Scale Social Restrictions policies to mitigate the spread of Covid-19, which reduce economic mobility, have resulted in a contraction in economic growth in 2020. The government, Bank Indonesia and related authorities are strengthening policy synergies to mitigate the extraordinary impact of Covid-19. Various responses that have been taken gradually can again improve economic recovery in the second semester of 2020 and maintain macroeconomic and financial system stability, even though various strengthening continues.

Dinamika perekonomian Indonesia 2020 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap Indonesia, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Awal Maret 2020, Indonesia memasuki siklus kasus positif Covid-19, yang dalam waktu singkat menyebar cepat ke berbagai wilayah Indonesia. Data menunjukkan penyebaran Covid-19 terus meningkat hingga akhir tahun, dengan catatan tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada Desember 2020, jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional mencapai 743.198 jiwa dengan jumlah kematian tercatat 22.138 jiwa. Kondisi ini diikuti oleh tingkat kematian (*fatality rate*) yang terus menurun menjadi 3,0% dari level tertingginya pada 9 April 2020 sebesar 9,5%.

Pemerintah dengan segera menempuh kebijakan untuk memitigasi penyebaran Covid-19, termasuk melalui kebijakan pembatasan mobilitas.

Kebijakan terutama dilakukan dengan mengurangi mobilitas individu, termasuk menerapkan kebijakan menjaga jarak (*social distancing*) antar individu. Kebijakan ini memperkuat kebijakan pengelolaan kesehatan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*), yang kemudian diimplementasikan melalui protokol kesehatan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) di tengah masyarakat. Sejalan dengan kebijakan ini, sejumlah Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020. Sementara itu, Jakarta menempuh PSBB sejak 10 April 2020. Dalam perkembangannya, kebijakan PSBB di beberapa daerah seperti di Jakarta dan Jawa Barat sempat dilonggarkan pada Juni 2020 sejalan dengan penurunan kasus. Namun demikian, kebijakan tersebut kembali diperketat pada September 2020 akibat peningkatan kembali kasus Covid-19.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait segera menempuh sinergi kebijakan luar biasa untuk memitigasi risiko pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Sinergi kebijakan diarahkan untuk meminimalkan dampak pembatasan mobilitas masyarakat terhadap perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan dilakukan melalui penerbitan landasan hukum yang kuat, yakni UU No.2 Tahun 2020, sehingga otoritas dapat menempuh langkah-langkah luar biasa secara cepat dan akuntabel dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN 2020. Di tengah tekanan inflasi yang rendah, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif

The dynamics of the Indonesian economy in 2020 are strongly influenced by the impact of the Covid-19 pandemic that has occurred around the world.

The Covid-19 pandemic had an extraordinary impact on Indonesia, not only on health and humanitarian aspects, but also on social and economic aspects. Early March 2020, Indonesia entered a cycle of positive Covid-19 cases, which in a short time spread rapidly to various parts of Indonesia. Data shows that the spread of Covid-19 continues to increase until the end of the year, with the highest records occurring in the provinces of DKI Jakarta, West Java, Central Java and East Java. In December 2020, the number of positive cases of Covid-19 nationally reached 743,198 people with a recorded death toll of 22,138. This condition was followed by the fatality rate which continued to decline to 3.0% from its highest level on April 9, 2020 at 9.5%.

The government immediately took policies to mitigate the spread of Covid-19, including through policies to restrict mobility.

Policies are mainly carried out by reducing individual mobility, including implementing policies to maintain social distancing between individuals. This policy strengthens the 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) health management policy, which is then implemented through the 3M health protocol (*Using masks, washing hands, maintaining distance*) in the community. In line with this policy, a number of Regional Governments have implemented a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy since April 2020. Meanwhile, Jakarta has pursued the PSBB since April 10, 2020. In its development, the PSBB policy in several regions, such as Jakarta and West Java was relaxed in June. 2020 is in line with the decrease in cases. However, the policy was tightened again in September 2020 due to an increase in Covid-19 cases.

The government, Bank Indonesia and related authorities immediately took extraordinary policy synergies to mitigate the risk of the Covid-19 pandemic on the economy.

Policy synergy is aimed at minimizing the impact of restricting community mobility on the national economy. In this regard, the policy mix is carried out through the issuance of a strong legal basis, namely Law No.2 of 2020, so that the authorities can take extraordinary steps quickly and accountably in overcoming the pandemic and promoting economic recovery. The government pursued an expansionary fiscal policy by providing large amounts of stimulus which resulted in a widening deficit and increased funding for the 2020 State Budget. In the midst of low inflationary pressure, Bank Indonesia pursued an accommodative policy mix that included providing monetary stimulus



yang mencakup pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*) dalam jumlah besar. Kebijakan itu juga didukung dengan langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter ekspansif juga diperkuat melalui waktu, jenis, dan besaran stimulus dari masing-masing kebijakan. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk membantu pembiayaan APBN 2020 melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang di pasar perdana dari Pemerintah dan berbagi beban pembiayaan fiskal. Selain itu, penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

Pada satu sisi, kebijakan fiskal yang ekspansif tidak dapat dihindari karena penerimaan negara menurun signifikan sebagai dampak kontraksi ekonomi dan kebijakan relaksasi perpajakan.

Pelemahan ekonomi domestik dan penurunan harga komoditas berdampak menjadikan penerimaan negara menurun tajam. Sampai dengan Desember 2020, penerimaan negara mencapai 96,1% dari pagu, atau terkontraksi 16,7% (yoy). Kontraksi terutama bersumber dari penerimaan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) baik di sisi migas maupun nonmigas. Kinerja penerimaan pajak yang rendah juga merupakan dampak realisasi program insentif fiskal dan restitusi pajak, serta penerapan diskon pajak sebesar 50%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga terkontraksi dibandingkan 2019, baik dari sumber daya alam maupun bagian Laba BUMN pada 2020.

Pada sisi lain, kebijakan fiskal yang ekspansif dipengaruhi oleh meningkatnya belanja untuk memitigasi risiko Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Target belanja negara meningkat sebagaimana tertuang pada Perpres No. 72 tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.739,2 triliun yang bersumber dari kebijakan *countercyclical* akibat adanya tambahan belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun (Gambar 2.2). Program PEN mencakup belanja *Public Goods* sebesar Rp397,56 triliun yang terdiri dari kluster kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, serta belanja *Non Public Goods* sebesar Rp297,64 triliun yang terdiri dari insentif usaha, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran Perlinsos sebesar Rp234,33 triliun terutama ditujukan untuk kelompok

through lowering interest rates and monetary easing (Quantitative Easing), in large numbers. This policy was also supported by measures to stabilize the Rupiah exchange rate, loosen macroprudential policies, and digitize the payment system. The synergy of expansionary fiscal and monetary policies was also strengthened through the timing, type and amount of stimulus for each policy. Bank Indonesia was given the authority to help finance the 2020 State Budget by purchasing long-term Government Securities (SBN) on the primary market from the Government and sharing the burden of fiscal financing. In addition, strengthening policy coordination was also carried out to maintain financial system stability through restructuring programs for MSMEs and corporations, as well as other initiatives to maintain the financing intermediary function pursued by the Financial Services Authority (OJK). Meanwhile, the Deposit Insurance Corporation (LPS) also relaxed policies to reduce pressure on banking liquidity.

On one hand, an expansionary fiscal policy cannot be avoided because state revenues have decreased significantly as a result of economic contraction and tax relaxation policies.

The weakening of the domestic economy and falling commodity prices resulted in a sharp decline in state revenues. As of December 2020, state revenues reached 96.1% of the ceiling, or contracted 16.7% (yoy). Contraction originated mainly from tax revenues, namely Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) both on the oil and gas and non-oil and gas sides. The low performance of tax revenues is also the impact of the realization of the fiscal incentive program and tax refunds and the application of a 50% tax discount. Non-Tax State Revenues (PNBP) also contracted compared to 2019, both from natural resources and the share of SOEs Profits in 2020.

On the other hand, an expansionary fiscal policy is influenced by increased spending to mitigate the risk of Covid-19 on public health and the economy.

The state expenditure target has increased as stated in the Presidential Decree No. 72 of 2020 to IDR2,739.2 trillion, originating from countercyclical policies due to additional spending for the National Economic Recovery (PEN) program of IDR695.2 trillion (Figure 2.2). The PEN program includes Public Goods spending of IDR397.56 trillion consisting of health clusters, social protection, sectoral Ministries/Institutions (K/L) and Local Governments, as well as IDR297.64 trillion non-public goods expenditures consisting of business incentives, MSME support and corporate financing. The social protection budget of IDR234.33 trillion is primarily intended for the poor and vulnerable

miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi, yang diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, kartu prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai lainnya. Perlinsos sebagai jaring pengaman sosial pada kelas bawah ini mengalami peningkatan baik besaran maupun cakupan penerima manfaat pada 2020. Untuk menjaga kelangsungan UMKM di tengah permintaan yang terbatas, Pemerintah memberikan insentif usaha dan dukungan UMKM dengan anggaran masing-masing Rp120,6 triliun dan Rp114,81 triliun. Untuk mempercepat penanganan Covid-19, memitigasi penyebaran, penemuan vaksin, dan memberikan insentif tenaga kesehatan Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp97,26 triliun.

Satu aspek yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah memperkuat pengadaan dan rencana implementasi vaksinasi.

Hingga akhir 2020, Pemerintah telah melakukan pemesanan beberapa vaksin, seperti Sinovac, Novovac, COVAX/GAVI, AstraZeneca, dan Pfizer untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 juta dosis untuk 181,5 juta penduduk Indonesia (Tabel 2.2). Vaksinasi Covid-19 direncanakan akan dilakukan secara bertahap mulai awal 2021 dengan prioritas pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik, diikuti dengan kelompok masyarakat rentan, dan kemudian masyarakat lainnya. Sejalan dengan kasus positif Covid-19 yang masih terus meningkat di beberapa wilayah yang membutuhkan sarana perawatan yang makin meningkat, Pemerintah Pusat juga meningkatkan koordinasi dengan beberapa Pemda. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan antara lain dengan peningkatan kapasitas ruang perawatan, penambahan rumah sakit rujukan baru, penambahan tenaga kesehatan, dan penguatan kembali implementasi protokol tata laksana Covid-19 di berbagai layanan fasilitas kesehatan. Pelaksanaan vaksin secara meluas ini akan menjadi prasyarat penting untuk pemulihan kegiatan perekonomian pascapandemi Covid-19.

Sinergi kebijakan juga dilakukan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan lain dalam upaya memitigasi risiko Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan (SSK).

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2020, kebijakan sektor keuangan difokuskan pada penguatan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tengah kondisi pandemi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi *Lender of the Last Resort* (LoLR), membeli SUN dan/atau SBSN di pasar perdana, membeli/repo SBN milik LPS, mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, dan memberikan akses pendanaan korporasi/swasta melalui repo SBN. Sementara itu, OJK diberikan kewenangan terkait

to socio-economic risks, which is provided in the form of the Family Hope Program (PKH), basic food assistance, pre-employment cards, and other direct cash assistance. The social protection as a social safety net for the lower classes has experienced an increase in both the size and coverage of beneficiaries in 2020. To maintain the continuity of MSMEs amidst limited demand, the Government provides business incentives and MSME support with a budget of IDR120.6 trillion and IDR114.81 trillion, respectively. To accelerate the handling of Covid-19, mitigate the spread, discovery of vaccines, and provide incentives for health workers, the Government has also allocated a budget of IDR97.26 trillion.

One aspect that is also of concern to the Government is strengthening the procurement and implementation plan for vaccination.

By the end of 2020, the Government had ordered several vaccines, such as Sinovac, Novovac, COVAX/GAVI, AstraZeneca, and Pfizer to meet the estimated needs of more than 400 million doses for Indonesia's 181.5 million people (Table 2.2). Covid-19 vaccination is planned to be carried out in stages starting in early 2021 with a priority on health personnel and public services, followed by vulnerable Companies of people, and then other communities. In line with the positive cases of Covid-19 which are still increasing in several areas that require increased treatment facilities, the Central Government has also increased coordination with several local governments. Strengthening coordination was carried out, among others, by increasing the capacity of the treatment room, adding new referral hospitals, adding health personnel, and strengthening the implementation of the Covid-19 management protocol in various health facility services. This widespread implementation of vaccines will be an important prerequisite for the recovery of post-Covid-19 economic activity.

Policy synergy was also carried out between the Government, Bank Indonesia and other financial authorities in an effort to mitigate the risk of Covid-19 on financial system stability (SSK).

Based on Law No.2 of 2020, financial sector policies are focused on strengthening the authority of the Financial System Stability Committee (KSSK), Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and the Deposit Insurance Corporation (LPS) in the midst of a pandemic. In this regard, Bank Indonesia is given the authority to strengthen the implementation of the lender of last resort (LoLR) function, buy SUN and/or SBSN on the primary market, buy/repo SBN owned by LPS, regulate the obligation to receive and use foreign exchange for residents, and provide access corporate/private funding through SBN repos. Meanwhile, OJK is given the authority related to the merger,



dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi lembaga jasa keuangan, pengecualian kewajiban keterbukaan di pasar modal, serta kewenangan mengatur pemanfaatan teknologi dalam RUPS pelaku industri jasa keuangan. LPS juga mendapatkan kewenangan untuk memperkuat peran dalam penanganan solvabilitas bank, keputusan penyelamatan bank selain bank sistemik, mencari dana untuk penanganan bank gagal, dan perumusan kebijakan penjaminan simpanan. Sinergi kebijakan otoritas sektor keuangan diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif bagi perekonomian masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

consolidation, acquisition, integration and conversion of financial service institutions, exemptions from the obligation to disclose in the capital market, and the authority to regulate the use of technology in the GMS of financial service industry players. LPS also has the authority to strengthen its role in handling bank solvency, decisions to save banks other than systemic banks, seeking funds for handling failed banks, and formulating deposit insurance policies. The policy synergy of the financial sector authorities is directed at producing effective policies for the people's economy and national economic recovery.

Tinjauan Industri Industry Review

Perekonomian Indonesia tidak dapat lepas dari bayang-bayang kondisi ekonomi global. Hal ini dapat dilihat jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang maupun kawasan Eropa, hal ini membawa dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian nasional Indonesia. Selain itu, tekanan *negative campaign* dari Uni Eropa terhadap industri kelapa sawit secara keseluruhan, dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan kebijakan bagi industri kelapa sawit. Kebijakan Uni Eropa yang secara bertahap akan melarang produk Biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit, untuk diimport ke Uni Eropa, akan memberikan tekanan kepada permintaan minyak kelapa sawit yang pada akhirnya akan memberikan tekanan terhadap harga.

The Indonesian economy cannot be separated from the shadow of global economic conditions. This can be seen if there is a slowdown in economic recovery in some developed countries such as the United States, Japan and the European region, this has had a significant impact on Indonesia's national economy. In addition, the negative campaign pressure from the European Union on the palm oil industry as a whole can put pressure on the government in terms of issuing policies for the palm oil industry. The European Union's policy of gradually banning Biodiesel products derived from palm oil from being imported to the European Union will put pressure on demand for palm oil which in turn will put pressure on prices.

Kondisi makro ekonomi pada tahun 2020 berdampak sangat signifikan karena dipengaruhi ketidakpastian dengan adanya penyebaran virus COVID-19. Dimulai dari Tiongkok pada akhir tahun 2019, penyebaran virus ini telah berdampak langsung pada penurunan volume perdagangan global akibat tertahannya aktivitas ekspor impor di sejumlah negara. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam melakukan perdagangan dengan Tiongkok segera merasakan dampaknya dan mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penyebaran virus yang sangat masif hingga ke Indonesia telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan realokasi anggaran guna menanggulangi penyebaran virus beserta dampak ekonominya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional tidak dapat dielakkan hingga penyebaran virus beserta dampaknya dapat diatasi.

Macroeconomic conditions in 2020 will have a very significant impact due to the uncertainty over the spread of the COVID-19 virus. Starting from China at the end of 2019, the spread of this virus has had a direct impact on decreasing global trade volume due to restrained export-import activities in a number of countries. Indonesia as a country that was active in trading with China immediately felt the impact and resulted in a slowdown in economic growth. The massive spread of the virus to Indonesia has been encouraging central and local governments to reallocate budgets to tackle the spread of the virus and its economic impact. The slowdown in global and national economic growth cannot be avoided until the spread of the virus and its effects can be overcome.

Perseroan yang merupakan bagian dari unit pelaku ekonomi nasional melihat hal tersebut sebagai suatu pertimbangan dalam menyusun perencanaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Companies that are part of the unit of national economic actors see this as a consideration in preparing plans for conducting business activities.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang bagi industri kelapa sawit. Pada awal tahun sampai dengan bulan Mei, harga CPO mengalami penurunan mencapai USD 531 per ton. Namun, harga CPO naik signifikan sampai dengan akhir tahun 2020 dengan menyentuh harga tertinggi sebesar USD 959 per ton.

Naiknya harga CPO diakibatkan oleh berjalannya program B30 yang mendorong permintaan di dalam negeri. Selain itu, naiknya permintaan bahan baku oleochemical yang berasal dari kelapa sawit juga mengalami peningkatan akibat kebutuhan sanitasi dalam penanganan Covid-19 di seluruh dunia. Dari sisi penawaran, menurunnya produksi CPO yang diakibatkan oleh efek musim kemarau dapat mendorong meningkatnya harga CPO.

Kondisi ini mendorong Perseroan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi. Perseroan juga mengembangkan program digitalisasi yang berfokus pada standardisasi proses kerja serta kecepatan dan ketepatan penyajian data melalui Sistem Informasi Akuntansi Perkebunan (SIAP).

The year 2020 was a difficult year for the palm oil industry. For de novo year up to May, CPO prices dropped to a low of USD 531 per ton. Fortunately, the market improved considerably and by the end of the year we witnessed a significant rise in CPO prices, touching a high of USD 959 per ton.

This was primarily caused by the successful implementation of the B30 program which boosted demand in the domestic market. In addition, we also saw a rising demand for oleochemicals, a raw material derived from palm oil, caused by the global sanitation-related needs in handling of Covid-19. On the supply side, the decrease in CPO production caused by the dry season, was also a factor contributing to the increase in prices.

These conditions prompted the Company to improve its productivity, effectiveness and efficiency. The Company also developed a digitalization program focused on standardising work processes and the speed and accuracy of data presented through the Plantation Accounting Information System (SIAP).





Tinjauan Operasional

Operational Review

Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Interest Rate Fluctuation Risk

Seluruh penjualan Perseroan, meski didominasi oleh mata uang Rupiah tetap mengacu kepada harga minyak kelapa sawit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi risiko yang diakibatkan dari fluktuasi tingkat suku bunga. Pinjaman bank Perseroan terdiri dari utang dengan tingkat suku bunga variabel yang berhubungan dengan suku bunga bank yang berlaku. Tingkat suku bunga bank akan dikaji ulang dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan suku bunga yang berlaku. Kenaikan pada suku bunga juga akan meningkatkan beban bunga yang berkaitan dengan pinjaman bersuku bunga mengambang dan kenaikan biaya atas utang yang baru. Fluktuasi suku bunga juga dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada nilai wajar kewajiban utang Perseroan.

Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah dan fluktuasi suku bunga bank dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan, secara tidak langsung Perseroan melakukan *natural hedging* karena harga karet masih dipengaruhi oleh pasar internasional, dengan pelemahan Rupiah atas mata uang Dollar Amerika Serikat, akan meningkatkan harga jual karet.

All of the Company's sales, although dominated by the Rupiah currency, still refer to the price of palm oil in US Dollars.

The Company and Subsidiaries also face risks resulting from fluctuations in interest rates. The Company's bank loans consist of loans with variable interest rates related to the prevailing bank interest rates. Bank interest rates will be reviewed and adjusted periodically according to the prevailing interest rates. An increase in interest rates will also increase the interest expense associated with floating rate loans and increase the cost of new debt. Interest rate fluctuations can also cause significant fluctuations in the fair value of the Company's debt obligations.

Thus, the fluctuations in the exchange rate of the United States dollar against the rupiah and fluctuations in bank interest rates can affect the results of the Company's operations, the Company indirectly implements natural hedging because rubber prices are still influenced by the international market, with the weakening of the Rupiah against the US dollars, will increase the selling price of rubber.

Hasil dari Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit

Products from Oil Palm Plantation and Mill

Peningkatan efisiensi dan produktivitas dari kebun kebun yang dimiliki Perseroan merupakan suatu proses yang senantiasa dilakukan, dalam rangka peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) maupun *Crude Palm Oil* (CPO). Selain itu efisiensi harga pokok produksi juga senantiasa menjadi prioritas Perseroan Semua itu dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga jual CPO yang semakin sulit terprediksi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Increasing the efficiency and productivity of the plantations owned by the Company is a process that is continuously carried out, in order to increase the production of Fresh Fruit Bunches (FFB) and Crude Palm Oil (CPO). In addition, the efficiency of the cost of goods manufactured has always been a priority for the Company. All of that in order to anticipate fluctuations in the selling price of CPO, which have become increasingly difficult to predict in recent years.

Kondisi Cuaca

Weather Conditions

Perubahan iklim yang semakin ekstrim dan tidak terprediksi juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi bisnis Perseroan secara signifikan. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang

Climate change that is increasingly extreme and unpredictable is also one of the factors that can significantly affect the Company's business. Oil palm is a plant that requires very high-water availability. Therefore,

memerlukan ketersediaan air yang sangat tinggi. Oleh sebab itu musim kering yang berkepanjangan, yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit secara keseluruhan.

Selain itu, faktor perubahan cuaca global di berbagai negara yang berdampak pada semakin tidak menentunya waktu produksi puncak, trek (gugur daun sehingga produksi turun) dan musim hujan (hujan lebat sehingga petani berhenti menyadap) yang mempengaruhi hasil sadapan karet sehingga pasokan menjadi lebih sulit diprediksi.

a prolonged dry season, which has become more frequent in recent years, can greatly affect the overall growth of the oil palm plantations.

In addition, factors of global weather changes in various countries have an impact on the increasingly uncertain times of peak production, tracks (fall in leaves causing production to fall) and the rainy season (heavy rains so that farmers stop tapping) which affect the yield of tapped rubber so that supply becomes more unpredictable. .

Harga Karet di Bursa Global

Rubber Prices on the Global Stock Exchange

Selain sebagai komoditas dunia yang diperdagangkan, karet alam juga merupakan salah satu instrument investasi dan spekulasi oleh para investor dan spekulan dunia. Akibatnya, harga karet fluktuatif dan ditentukan oleh berbagai macam faktor dan kondisi perekonomian dan perdagangan di bursa global dunia.

Apart from being a traded world commodity, natural rubber is also an instrument of investment and speculation by world investors and speculators. As a result, the price of rubber fluctuates and is determined by various factors and conditions of the economy and trade on world global exchanges.

Harga Minyak Mentah Dunia

World Crude Oil Price

Karet sintetis, yang berfungsi sebagai barang substitusi karet alam, dihasilkan dari polimerasi bahan baku turunan minyak bumi sehingga harga karet sintetis sangat tergantung pada harga minyak mentah dan pada akhirnya berkompetisi dengan harga karet alam. Pada umumnya, harga karet sintetis dan harga karet alam memiliki korelasi positif.

Synthetic rubber, which functions as a substitute for natural rubber, is produced from the polymeration of petroleum derived raw materials so that the price of synthetic rubber is highly dependent on the price of crude oil and in the end, it competes with the price of natural rubber. In general, synthetic rubber prices and natural rubber prices have a positive correlation.





Tinjauan Keuangan Financial Review

Laporan Laba rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income

Penjualan

Perseroan mencatat penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp1,51 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,16% dari Rp1,78 triliun pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan volume penjualan.

Sales

The Company recorded sales in 2020 amounting to Rp1.51 trillion or a decline of 15.16% from Rp1.78 trillion in 2019. This decrease was caused by a decrease in sales volume.

Laba Kotor

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,52% dari Rp324,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp333,1 miliar pada tahun 2020. Margin laba bruto mengalami kenaikan dari 18,23% di tahun 2019 menjadi 22,03% di tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan harga pokok penjualan sebesar 19,13% dari tahun 2019 dan kenaikan harga jual CPO 17,23% dan kenaikan harga jual Kernel 21,60% dari tahun 2019.

Gross Profit

The Company's gross profit increased by 2.52% from Rp324.9 billion in 2019 to Rp333.1 billion in 2020. The gross profit margin increased from 18.23% in 2019 to 22.03% in 2020, especially caused by a decrease in the cost of goods sold by 19.13% from 2019 and an increase in the selling price of CPO by 17.23% and an increase in the selling price of the Kernel by 21.60% from 2019.

Laba Usaha

Pada tahun 2020, laba usaha Perseroan meningkat 17,39% berada pada angka Rp155,9 miliar atau meningkat sebesar Rp23,1 miliar dari Rp132,8 miliar di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar 7,80% dari tahun 2019, dan kenaikan laba kotor sebesar 2,52%.

Operating Profit

In 2020, the Company's operating profit increased 17.39% to Rp155.9 billion or increased by Rp23.1 billion from Rp132.8 billion in 2019. This increase was due to a decrease in operating expenses by 7.80% from 2019, and an increase in gross profit of 2.52%.

Total Laba Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk

Perseroan mencatat adanya peningkatan signifikan pada total laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk di tahun 2020 sebesar Rp81,1 miliar. Peningkatan sebesar 277% dari Rp21,5 miliar di tahun 2019 terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar 17,3% dari tahun 2019 dan Penurunan Beban Lain-Lain sebesar 50,80% dari tahun 2019, dan kenaikan laba usaha 17,39% dari tahun 2019.

Total Profit for the Year Attributable to Parent Entity

The Company recorded a significant increase in total profit for the year attributable to the Parent Entity in 2020 amounting to Rp81.1 billion. An increase of 277% from Rp21.5 billion in 2019 was mainly due to an increase in operating profit by 17.3% from 2019 and a decrease in Other Expenses by 50.80% from 2019, and an increase in operating profit by 17.39% from 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk

Perseroan mencatat adanya peningkatan signifikan pada total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk di tahun 2020 sebesar Rp81,3 miliar. Peningkatan sebesar 283,49% dari Rp21,2 miliar di tahun 2019 terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar 17,39% dari tahun 2019 dan penurunan beban lain-lain sebesar 50,80% dari tahun 2019.

Total Comprehensive Income for the Year Attributable to the Subsidiaries

The Company recorded a significant increase in total comprehensive income for the year attributable to the Subsidiaries in 2020 amounting to Rp81.3 billion. An increase of 283.49% from Rp21.2 billion in 2019 was mainly due to an increase in operating profit of 17.39% from 2019 and a decrease in other expenses by 50.80% from 2019.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position

Aset

Total aset Perseroan pada tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,432 triliun atau turun 1,98% dibandingkan total aset tahun buku sebelumnya, yaitu sebesar Rp1,462 triliun. Penurunan aset Perseroan ini disebabkan pada penurunan kelompok aset lancar dari Rp451,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp425 miliar pada tahun 2020. Di sisi lain, aset tidak lancar juga mengalami penurunan dari Rp1,010 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,007 triliun pada tahun 2020.

Assets

Total assets of the Company in the financial year ended December 31, 2020 amounted to Rp1,432 trillion or decreased by 1.98% compared to the total assets of the previous financial year, which was Rp1.462 trillion. The decrease in the Company's assets was due to the decrease in the current assets group from Rp451.3 billion in 2019 to Rp425 billion in 2020. On the other hand, non-current assets also decreased from Rp1.010 trillion in 2019 to Rp1.007 in 2020.

Aset Lancar

Perseroan mencatat aset lancar sebesar Rp425 miliar pada tahun 2020 atau turun 5,83% dibandingkan posisi aset lancar tahun 2019 sebesar Rp451,3 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu penurunan kas dan setara kas, piutang lain-lain, Persediaan bahan baku, barang jadi, pajak dan biaya dibayar dimuka walaupun ada kenaikan piutang usaha pihak ketiga dan relasi, serta kenaikan persediaan barang dalam proses, suku cadang, pupuk dan kimia.

Current Assets

The Company recorded current assets of Rp425 billion in 2020 or a decrease of 5.83% compared to the position of current assets in 2019 of Rp451.3 billion. The decrease was influenced by several aspects, namely the decrease in cash and cash equivalents, other receivables, inventory of raw materials, finished goods, taxes and prepaid expenses even though there was an increase in trade receivables from third parties and relations, as well as an increase in inventories in process, spare parts, fertilizers, and chemicals.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sedikit sebesar 0,29% dari Rp1,010 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,007 triliun pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap yang disebabkan oleh penurunan pada bagian piutang plasma, tanaman menghasilkan, taksiran restitusi pajak penghasilan, aktiva pajak tangguhan dan aktiva tetap-neto walaupun ada peningkatan pada uang muka perolehan aset, pembibitan dan tanaman belum menghasilkan.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets decreased slightly by 0.29% from Rp1.010 trillion in 2019 to Rp1.007 trillion in 2020. This decrease was mainly due to a decrease in fixed assets caused by a decrease in the portion of plasma receivables, yielding plants, and estimates. income tax refunds, deferred tax assets and fixed assets - net even though there is an increase in advances for the acquisition of assets, nurseries and immature plantations.



Liabilitas

Perseroan mencatat penurunan total liabilitas sebesar 10,62% dari Rp1.013,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp905,6 miliar pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 21,76% dari Rp358,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp294,5 miliar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan di hutang Bank, hutang usaha pihak ketiga, hutang pembiayaan, dan beban akrual.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 6,66% dari Rp654,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp611,1 miliar pada tahun 2020, terutama penurunan signifikan pada utang pembiayaan dan utang bank.

Ekuitas

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar 17,48% dari Rp448,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp526,7 miliar pada tahun 2020. Peningkatan ekuitas ini seiring dengan kenaikan saldo laba, modal ditempatkan dan disetor dan tambahan modal disetor.

Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow

Perseroan mencatat posisi kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 sebesar Rp58,5 miliar atau turun 47,86% dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar Rp112,2 miliar. Hal ini dipengaruhi antara lain penurunan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi dan kenaikan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan.

Liabilities

The Company booked a reduction in total liabilities of 10.62% from Rp1,013.3 billion in 2019 to Rp905.6 billion in 2020. This decrease was caused by current and non-current liabilities.

Current Liabilities

The Company's current liabilities waned by 21.76% from Rp358.6 billion in 2019 to Rp294.5 billion in 2020. This was due to a decrease in bank loans, third-party trade payables, financing payables, and accrued expenses.

Non-Current Liabilities

The Company's long-term liabilities decreased by 6.66% from Rp654.7 billion in 2019 to Rp611.1 billion in 2020, especially a significant decrease in financing debt and bank loans.

Equity

The Company recorded an increase in equity of 17.48% from Rp448.3 billion in 2019 to Rp526.7 billion in 2020. This increase in equity was in line with the increase in retained earnings, issued and paid-up capital and additional paid-in capital.

The company recorded the position of cash and cash equivalents at the end of 2020 amounting to Rp58.5 billion or a decrease of 47.86% compared to the end of 2019 amounting to Rp112.2 billion. This was influenced by, among others, a decrease in net cash obtained from operating activities and an increase in net cash obtained from financing activities.

Utang dan Struktur Modal

Debts and Capital Structure

Hasil analisis fundamental Perseroan dengan menghitung rasio gearing dimana pinjaman bersih dibandingkan dengan kekayaan bersih Perseroan pada tahun 2020 adalah 1,73% [2019:2,27%]. Dengan kekayaan berwujud bersih yang dimiliki, Perseroan akan mampu untuk memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Dalam mengelola permodalan, Perseroan akan selalu memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Perseroan akan terus menelaah setiap kebijakan terkait permodalan, akan selalu memastikan struktur modal yang sehat dan mampu memberikan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham.

The result of the Company fundamental analysis was obtained by calculating the gearing ratio where the Company's net loan compared to equity ratio in 2020 showed a figure of 1.73% [2019:2.27%]. With the net tangible assets owned, the Company will be able to meet both its short term and long-term obligations.

In managing the capital, the Company will continue to maximise the benefits for all shareholders and other stakeholders. It will continue to analyse each policy related to capital and always ensure a healthy capital structure capable of providing optimal returns to its shareholders.

Kebijakan Dividen dan Dividen Kas per Saham

Dividends Policy and Cash Dividends per Share

1. Dividen hanya dapat dibagikan sesuai kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan, dapat dibagikan sebagai Dividen.
3. Pembagian Dividen Interim dapat dilakukan apabila ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

1. *Dividends can only be distributed according to the company's financial capacity based on the decisions taken at the GMS.*
2. *In the event that the Annual GMS does not determine other uses, then the net profit after deducting the reserves required by the Company Law and the Articles of Association of the Company, may be distributed as dividends.*
3. *Interim dividend distribution can be made if it is determined based on the decision of a meeting of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.*

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material

Commitment for Capital Goods Investment

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki komitmen untuk memperoleh aset tetap dengan nilai sebesar Rp22,8 miliar.

As of December 31, 2020, the Company committed to acquire fixed assets with a total value of Rp22.8 billion.



Investasi Barang Modal

Capital Expenditure

Untuk mendukung aktivitas operasi, selama tahun 2020, Perseroan melakukan pembelian barang modal dengan total nilai sebesar Rp70 miliar dengan perincian sebagai berikut:

To support operational activities, in 2020 the Company procured capital goods with a total value of Rp70 billion with the following breakdown:

dalam jutaan rupiah | in million rupiah

Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	Rp22,8 miliar <i>Rp22.8 billion</i>
Tanaman Produktif <i>Bearer Plants</i>	Rp47,2 miliar <i>Rp47.2 billion</i>
Jumlah Total	Rp70 miliar Rp70 billion

Prospek dan Rencana Strategis 2021

Prospects and Strategic Plans for 2021

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi Perseroan, dimana terdapat virus Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia. Efek dari musim kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019 juga masih mengakibatkan penurunan produksi kelapa sawit. Walaupun demikian, Perseroan yakin bahwa jangka panjang sektor perkebunan kelapa sawit masih prospektif.

2020 is a year full of challenges for the Company, where there is Covid-19 virus that has spread throughout the world. The effect of long-term drought season in 2019 still impacted in decrease of palm oil production. Nonetheless, the Company optimist that long term prospect of oil palm plantation sector will remain positive.

Perseroan melihat bahwa permintaan masih akan stabil mengingat penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku utama pangan, non-pangan, maupun sebagai sumber bahan bakar nabati (biodiesel). Biodiesel merupakan upaya Pemerintah dalam memperbesar daya serap produk minyak sawit di pasar dalam negeri. Dengan tantangan serta peluang yang diberikan oleh Pemerintah, industri kelapa sawit dapat meningkatkan produktivitas melalui perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit.

The Company sees that demand for palm oil will remain stable given the use of palm oil as main raw material of food and non-food products, as well as source of biodiesel. Biodiesel is the Government's efforts to increase the absorb ability of palm oil products in the domestic market. With the challenges and opportunities provided by the Government, palm oil industry can increase its productivity through improving the management of oil palm plantations.

Perseroan akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya melalui strategi-strategi yang akan dijalankan pada tahun 2021, yaitu:

The Company will do its utmost to improve productivity and cost efficiency through strategies that will be implemented in 2021, among other:

1. Meningkatkan kapasitas produksi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit.
2. Meningkatkan Kapasitas Produksi pabrik pengolahan karet.
3. Melakukan Penanaman atas sisa lahan kosong/*landbank* perseroan.
4. Melakukan Penanaman Kembali (*Replanting*).
5. Mekanisasi panen dan pemupukan dengan memanfaatkan teknologi.
6. Mengelola kebun binaan dan plasma.
7. Memproduksi RSS sebagai produk ceruk pasar.

1. *Increasing the production capacity of palm oil and palm kernel processing factories.*
2. *Increasing the production capacity of rubber processing plants.*
3. *Planting the remaining vacant land/landbank of the Company.*
4. *Performing Replanting.*
5. *Mechanization of harvest and fertilization by utilising technology.*
6. *Managing the assisted and plasma estates.*
7. *Producing RSS as a niche product.*

Target 2021

2021 Targets

Potensi yang terdapat dalam industri sawit serta dengan memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi tahun 2021, Perseroan mencanangkan beberapa target terkait dengan operasional Perseroan.

Considering on the potential in the palm oil industry and the upcoming challenges in 2021, the Company has determined related operational targets.

Berikut adalah target operasional tahun 2021:

The following are operational targets for 2021:

Target 2021 | 2021 Targets

Total lahan Sawit Tertanam <i>Total Oil Palm Planted Area</i>	1.465 ha <i>1,465 ha</i>
Total Produksi TBS (Inti dan Plasma) <i>Total FFB Production (Nucleus and Plasma)</i>	216.279 ton <i>216,279 tons</i>
Yield TBS Inti-Ton/Ha <i>Nucleus FFB Yield-Tons/Ha</i>	17,25 ton/ha <i>17.25 ton/ha</i>
Total Produksi CPO-Ton <i>Total CPO Production-Tons</i>	123.413 ton <i>123,413 tons</i>

Informasi Mengenai Investasi

Information on Investment

Pada tahun 2020, Perseroan mengembangkan inovasi serta teknologi dalam mendukung kegiatan operasional Perseroan.

In 2020, the Company invest on the development of innovation and technology in supporting the Company's operational activities.





Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Baru

New Statements of Accounting Standard Implementation

Standar akuntansi yang telah dipublikasikan dan relevan terhadap kegiatan operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

the accounting standards which have been published and relevant to the Company operations are as follows:

Berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

Effective for the year commenced as at 1 January 2020

Perseroan menerapkan standar baru yang berlaku efektif pada tahun 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

The Company adopted new standards that are effective in 2020. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

Perseroan telah melakukan penelaahan atas penerapan standar baru yang relevan dengan operasi Perseroan, dimana penerapan standar berikut menimbulkan dampak yang tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian:

The Company has made assessments related to the adoption of the new standards which are relevant to the Company's operations, where the implementation of following standards has an immaterial impact on the consolidated financial statements:

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55, "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran" yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan Kembali informasi komparatif.

PSAK 71 replaces the provisions of PSAK 55 "Financial instruments: recognition and measurement" that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, impairment of financial assets and hedge accounting. In accordance with the transition requirements in PSAK 71, the Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate the comparative information.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan telah menilai model bisnis mana yang berlaku untuk aset keuangan yang dimiliki Perseroan dan telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya ke dalam kategori yang sesuai dengan PSAK 71. Perseroan diwajibkan untuk merevisi metodologi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 untuk masing-masing kelompok aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi atas pemberlakuan PSAK 71 tidak material.

On January 1, 2020, the Company has assessed which business models apply to the financial assets held by the Company and has classified its financial instruments into the appropriate PSAK 71 categories. The Company was required to revise its impairment methodology under PSAK 71, "Financial instruments" for each classes of assets. The identified impairment loss from implementation of PSAK 71 was immaterial.

Pengaturan akuntansi lindung nilai dalam standar ini tidak berdampak pada pengakuan dan pengukuran instrument keuangan derivatif Perseroan.

The Hedge accounting rules in this standard had no impact on the recognition and measurement of the Company's derivative financial instruments.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

PSAK 72 determines that the revenue is recognised when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 72, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Prinsip pengakuan pendapatan dan waktu pengakuan dari standar baru ini selaras dengan model dan praktik bisnis yang Perseroan lakukan. Sehingga, penerapan standar ini tidak menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Berikut adalah standar dan interpretasi yang tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK No. 1 (Amandemen 2019): Penyajian laporan keuangan.
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- PSAK No. 25 (Amandemen 2019): Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- PSAK No. 55 (Amandemen 2020-Tahap 1): Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran.
- PSAK No. 60 (Amandemen 2020-Tahap 1): Pengungkapan.
- PSAK No. 71 (Amandemen 2020-Tahap 1): Instrumen keuangan.
- PSAK No. 73 (Amandemen 2020-Tahap 1): Sewa.
- ISAK No. 36: Interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16: Aset tetap dan PSAK 73: Sewa.

Belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK No. 1 (Amandemen 2020): Penyajian laporan keuangan
- PSAK No. 22 (Amandemen 2019): Kombinasi bisnis
- PSAK No. 25 (Amandemen 2020): Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan
- PSAK No. 55 (Amandemen 2020-Tahap 2): Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran
- PSAK No. 57 (Amandemen 2020): Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi
- PSAK No. 60 (Amandemen 2020-Tahap 2): Pengungkapan
- PSAK No. 71 (Amandemen 2020-Tahap 2): Instrumen keuangan
- PSAK No. 73 (Amandemen 2020-Tahap 2): Sewa

Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

In accordance with the transition requirements in PSAK 72, the Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate the comparative information. The underlying principles of new standard, relating to the measurement of revenue and the timing of recognition, are closely aligned with the Company's current business model and practices. As a result, the adoption of this standard did not have a material impact on the consolidated financial statements.

The following standards and interpretation did not result any significant impact in the consolidated financial statements:

- *PSAK No. 1 (Amendment 2019): Presentation of financial statements.*
- *PSAK No. 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures.*
- *PSAK No. 25 (Amendment 2019): Accounting policies, changes in accounting estimated and errors.*
- *PSAK No. 55 (Amendment 2020-Phase 1): Financial instrument: recognition and measurement.*
- *PSAK No. 60 (Amendment 2020-Phase 1): Disclosures.*
- *PSAK No. 71 (Amendment 2020-Phase 1): Financial instrument.*
- *PSAK No. 73 (Amendment 2020-Phase 1): Leases.*
- *ISAK No. 36: Interpretation on land rights provisions between PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases.*

Not effective for the year begin as at January 1, 2020:

- *PSAK No. 1 (Amendment 2020): Presentation of financial statements*
- *PSAK No. 22 (Amendment 2019): Business combination*
- *PSAK No. 25 (Amendment 2020): Accounting policies, changes in accounting estimated and errors*
- *PSAK No. 55 (Amendment 2020-Phase 2): Financial instrument: recognition and measurement*
- *PSAK No. 57 (Amendment 2020): Provisions, contingent liabilities, and contingent assets*
- *PSAK No. 60 (Amendment 2020-Phase 2): Disclosures*
- *PSAK No. 71 (Amendment 2020-Phase 2): Financial instrument*
- *PSAK No. 73 (Amendment 2020-Phase 2): Leases*

The Company is still evaluating the possible impact on the issuance of these financial accounting standards.







PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries

05

Tata Kelola **Perusahaan**
Corporate Governance

Pendahuluan

Introduction

Untuk dapat mewujudkan Perseroan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bagian dari komitmen PT Pinago Utama Tbk untuk mendorong terwujudnya perusahaan yang kokoh dan independen.

In terms of embodying a company that is trusted by stakeholders, work excellence, and grows sustainably, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within every business activity is necessarily required. With this commitment, the Company always follows the development of best governance practices which are applicable in the national, regional, and international domains that are relevant and are appropriate to their needs. This is part of PT Pinago Utama Tbk's commitment to encouraging the establishment of a solid and an independent Company.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Objectives of Corporate Governance Implementation

Dalam melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan, PT Pinago Utama Tbk berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya adalah Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan POJK No. 21/POJK.04/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai-nilai inti Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien;
3. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perseroan tersebut;
4. Memastikan setiap karyawan dalam Perseroan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
5. Mewujudkan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten.

In implementing the practice of Corporate Governance, PT Pinago Utama Tbk is guided by the applicable rules and regulations refers to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs number SK-16/S.MBU/2012 dated on June 6, 2012, and POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Good Corporate Governance. The Company is committed to applying the principles of Good Governance with the following objectives:

1. *Maximising the Company's core values by enhancing the principles of transparency, accountability, and responsibility;*
2. *Ensuring that the Company's management is professional organized, transparent, and efficient;*
3. *Independence in making decisions in accordance with the roles and responsibilities of each leader in the management;*
4. *Ensuring that each employee engaged within the Company in accordance with the applicable authority and responsibility;*
5. *Executing business practices with the GCG Principles, consistently.*



Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment of Corporate Governance Implementation

Penerapan tata kelola Perusahaan di lingkungan internal dan lingkungan eksternal Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen;
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*);
3. Meningkatkan nilai saham Perseroan di mata publik dalam jangka panjang;
4. Menciptakan dukungan para pemangku kepentingan dalam lingkungan Perseroan terhadap keberadaan Perseroan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh.

Beberapa faktor yang memegang peranan penting keberhasilan pelaksanaan praktik GCG adalah sebagai berikut:

Faktor internal

1. Budaya Perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di Perusahaan.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan prinsip dasar GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko Perusahaan berdasarkan pada standar GCG.
4. Sistem audit internal (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang akan terjadi.
5. Keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami perkembangan dan dinamika Perusahaan.

Faktor eksternal

1. Sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* untuk mewujudkan komitmen *Beyond Governance*.
3. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
4. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana Perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor Perusahaan dalam implementasi GCG.

The implementation of Corporate Governance in the Company's internal and external environment is expected to provide benefits, such as:

1. *Reducing agency cost, which is a cost that must be borne by the Shareholders due to delegation of authority to the management;*
2. *Reducing the cost of capital;*
3. *Increasing the value of the Company's shares in the long-term run;*
4. *Creating Stakeholders support in conjunction with the Company's environment and diverse strategies and policies adopted.*

Several factors having an imperative role in the successful implementation of GCG practices are as follows:

Internal factors:

1. *Corporate Culture supporting the implementation of GCG in the mechanism and business management system within the Company;*
2. *The diverse regulations and policies issued by the Company are in line with GCG's principles;*
3. *The Company's risk management is based on GCG standards;*
4. *Effective internal audit system (inspection) within the Company to avoid any irregularities that would occur;*
5. *Disclosure of information for the Public on the development and dynamics of the Company.*

External factors:

1. *Proper legal system as to ensure the enforcement of a consistent and effective legal supremacy;*
2. *Support the implementation of GCG from the public sector or government institutions that are expected to implement Good Governance and Clean Government towards the actual Good Governance;*
3. *Establishment of a social value system that supports the implementation of GCG in the community. This system is expected to arise the active participation of society to support the application and GCG socialization voluntarily;*
4. *The presence of an anti-corruption spirit in the public in which the Company operates is accompanied by improved quality of education and the expansion of employment opportunities. Improvement of the public environment affects the quality and score of the Company in the implementation of GCG.*

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Principles of Corporate Governance

Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh PT Pinago Utama Tbk dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan PT Pinago Utama Tbk dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan praktik terbaik *Good Corporate Governance*.

Transparency

Transparency is the act of openness in presenting material and relevant information about the Company. The transparency is actualised by PT Pinago Utama Tbk by always trying to spearhead the disclosure of financial and non-financial information to various interested parties and its disclosure is not limited to mandatory information. The disclosure of the information was well-executed by PT Pinago Utama Tbk while still complying with applicable laws and regulations following best corporate governance best practices.

Keadilan/Kewajaran (*Fairness*)

Fairness ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pinago Utama Tbk menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pinago Utama Tbk. Memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.

Fairness

Fairness is equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and due to the applicable laws and regulations. PT Pinago Utama Tbk ensures that all parties concerned receive fair treatment following applicable laws and regulations. PT Pinago Utama Tbk. Treating every employee fairly and freely by not discriminating against ethnicity, religion, race, origin, gender, or other matters that are not related to performance.

Implementasi dari prinsip *fairness* antara lain:

1. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perseroan memperlakukan secara adil dan transparan terhadap semua rekanan;
3. Perseroan menjamin kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The implementation of the fairness principle includes:

1. *Shareholders are entitled to attend and vote at the GMS following applicable regulations;*
2. *The Company treats the entire business partners, fairly and transparently;*
3. *The Company ensures good and safe working conditions for each employee following the Company's capabilities and applicable laws and regulations.*

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran Perseroan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada

Accountability

Accountability is the clarity of the functions, implementation, and accountability of each organ and all levels of the Company managing the Company, effectively. The Company believes that accountability is related to the existence of a system that controls the relationship between individuals and/or organs in the Company and the relationship between the Company and interested parties. The Company applies the principle of accountability as one of the solutions to overcome agency issues that arise as a logical consequence of differences in individual interests with the interests of the Company and interested parties. Accountability can be achieved through effective supervision based on the balance amongst the Company's Organs (AGMS, Board



keimbangan antar Organ Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi). RUPS memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ lain. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan untuk menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, meliputi:

1. RUPS antara lain berwenang untuk menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal-hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dewan Komisaris berwenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS;
3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara antara lain:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan.

of Commissioners, and Board of Directors). The GMS holds all powers and is not granted to other organs. The Board of Commissioners performs supervisory and advisory duties. The Board of Directors is responsible for managing the Company. Accountability throughout the Company means that everyone is responsible for every task mandated by him.

The Company implements accountability by encouraging all individuals and/or organs of the Company to manifest their rights and obligations, duties and responsibilities, as well as their authority. The implementation of the principle of accountability is realised by the subtle division of tasks amongst the Company's organs, including:

1. *The GMS includes, among others, the authority to approve the annual report, to determine the distribution of profits and dividends paid, and to decide on important matters that require the approval of the GMS as stipulated by the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;*
2. *The Board of Commissioners has the authority to ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP), to supervise the management of the Company carried out by the Directors, and to provide advice to the Directors including development plans as well as the implementation of the Articles of Association and follow-up to GMS Decrees;*
3. *The Board of Directors has the main task of leading and of managing the Company's goals and objectives and always strives to improve the efficiency and effectiveness of the Company to control, to maintain, and to manage the Company's assets.*

Responsibility

Accountability is well-known as compliance in managing the Company with applicable laws and regulations and sound corporate principles. The Company is responsible for complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, business competition, occupational health and safety, and so forth.

The implementation of the principle of responsibility is actualized in the following ways:

1. *Complying with the provisions of the Company's Articles of Association and the laws and regulations applying to the implementation of the Company's activities.*

2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan.
4. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal.

2. *Carrying out tax obligations well and on time.*
3. *Undertaking corporate social responsibility, making partnerships with the community, and fostering the environment, for instance by fostering small businesses and cooperatives.*
4. *Doing information disclosure obligations under capital market regulations.*

Kemandirian (*Independence*)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Perseroan melakukan implementasi terhadap prinsip kemandirian dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

Implementasi prinsip kemandirian oleh Perseroan antara lain:

1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing antar organ Perseroan;
2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
3. Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan;
4. Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dan mematuhi peraturan di bidang pasar modal yang mengatur tentang benturan kepentingan.

Independence

Independence is a condition where the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not under applicable laws and regulations and sound corporate principles.

The Company implements the principle of independence by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities, as well as the authority of each organ of the Company. The Company believes that by optimally implementing the principle of independence, all of the Company's organs can work properly and optimally make the best decisions and management for the Company.

The implementation of the principle of independence by the Company includes:

1. *Mutual respect for the rights, obligations, duties, authority, and responsibilities of each of the Company's organs;*
2. *Other than the Company's organs, they may not interfere in the management of the Company;*
3. *The Board of Commissioners, Directors, and employees of the Company, in making decisions, always avoid conflicts of interest;*
4. *Activities of the Company that have a conflict of interest must obtain in advance from the Independent Shareholders or their representatives who are authorised to do so at the General Meeting of Shareholders as regulated and comply with capital market regulations governing the conflict of interest.*



Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha Perusahaan sebagai standar landasan operasionalnya. Melalui penerapan Pedoman GCG, diharapkan semua nilai-nilai perusahaan dapat ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang menguntungkan.

Tujuan penyusunan Pedoman GCG Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan;
2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar GCG;
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan;
4. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju Budaya Perusahaan yang lebih baik.

The Corporate Governance Guidelines (GCG) are applied consistently across all lines and aspects of managing the Company's business as the operational foundation standard. Through the implementation of the GCG Guidelines, it is expected that all company's values could be increased optimally and produce a pattern of beneficial relationships.

The objectives of the Company's GCG Guidelines are as follows:

1. *Encouraging the Company's organs (General Meetings of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors) in decisions and execute actions in accordance with high moral values and compliance with the provisions of the Articles of Association and applicable Regulation and responsible to Stakeholders;*
2. *Encouraging and supporting the Company's development, resources and risk management with the application of prudent principles, in line with GCG's principles;*
3. *Encouraging the Company's awareness and social responsibility towards society and environmental sustainability especially around the Company;*
4. *Developing attitudes and behaviours that are in line with the evolving demands and changes in the business environment towards a better Corporate culture.*

Kegiatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan 2020 Corporate Governance Implementation Activities in 2020

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2020 antara lain:

1. Perseroan telah menetapkan:
 - Sekretaris Perusahaan
 - Komite nominasi & remunerasi
 - Komite audit
2. Perseroan telah menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen

During 2020, the Company has implemented multifarious activities reflecting the implementation of Corporate Governance as follow:

1. *The Company has determined:*
 - *Corporate Secretary*
 - *Nomination & remuneration committee*
 - *Audit committee*
2. *The Company has appointed 1 (one) Independent Commissioner*

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Self-Assessment of GCG

Dalam penilaian level implementasi GCG, Perusahaan mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 di mana penilaian yang dilaksanakan oleh internal PT Pinago Utama Tbk Hasil *self-assessment* pada tahun buku 2020 yang dapat dilihat di bawah ini.

In assessing the level of GCG's implementation, the Company refers to the provisions of the Ministry of SOE Secretary Decree Number: SK-16/S.MBU/2012 dated on June 6, 2012, where the assessment is undertaken by the internal of PT Pinago Utama Tbk itself. The results of the self-assessment in the fiscal year 2020 could be seen below.

Hasil Self-Assessment GCG Tahun Buku 2020

GCG Self-Assessment Result Fiscal Year 2020

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing/Indicator/Parameter Aspects	Bobot Standard	Capaian Tahun Buku 2020 Achievement in of Fiscal Year 2020		Keterangan Description
		Skor Score	%	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment towards Implementation of GCG in sustainable effects</i>	7,000	4,224	60,34%	Cukup Baik <i>Fair</i>
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,000	6,877	76,00%	Baik <i>Good</i>
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>	35,000	23,266	66,00%	Cukup Baik <i>Fair</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>	35,000	30,262	86,46%	Sangat Baik <i>Excellent</i>
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information and Transparency Disclosure</i>	9,000	7,548	83,86%	Baik <i>Good</i>
Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	3,750	75,00%	Baik <i>Good</i>
Skor Keseluruhan	100,000	75,927	75,93%	Baik <i>Good</i>

Keterangan/Note:

>85% = Sangat Baik/Excellent
75<X≤85 = Baik/Good
60<X≤75 =Cukup Baik/Fair
50<X≤60 =Kurang Baik/Inadequate
≤50 =Tidak Baik/Poor



Implementasi Rekomendasi OJK

Implementation of FSA Recommendation

Pedoman tata kelola untuk perusahaan terbuka meliputi lima aspek, delapan prinsip, dan dua puluh lima rekomendasi yang terkait dengan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan. Aspek pelaksanaan dan prinsip-prinsip pedoman tata kelola perusahaan yang unggul mencakup aspek implementasi standar dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang harus diterapkan Perseroan saat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola. Implementasi tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan. Adapun implementasi dari pedoman tata kelola perusahaan terbuka di Perusahaan selama tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Governance guidelines for open companies include five aspects, eight principles, and twenty-five recommendations related to aspects and principles of corporate governance. Implementation aspects and guiding principles of excellent corporate governance include aspects of the implementation of corporate governance standards and principles that must be applied by the Company when implementing governance principles. The implementation refers to the Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance. The implementation of the guidelines for open corporate governance in the Company during 2020 could be seen through the following table:

No.	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Realization		Penjelasan Description
		Sudah Realized	Belum Unrealized	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. <i>The Public Company has a way or technical procedure of voting either publicly or in privately, which will put forward the independence and interest of the shareholders.</i>	√		Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Adapun mekanisme pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “mengangkat tangan”. Prosedur pemungutan suara ini diatur dan disampaikan dalam Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham sebelum RUPS. <i>The Company's Articles of Association stipulates that the voting is done verbally, except if the Chairman of the Meeting decides otherwise.</i> <i>The voting mechanism is done by “rising hand”. This voting procedure is governed and delivered in the Rules of GMS to all shareholders prior to the GMS.</i>
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. <i>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the public Company are present in the Annual GMS.</i>	√		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. <i>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the Annual GMS.</i>
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. <i>The summary of meeting minutes of the GMS is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.</i>	√		Hasil/Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan beberapa hari setelah tanggal penyelenggaraan RUPS. Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Bahasa Indonesia. Saat ini, informasi Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam situs resmi Perusahaan paling sedikit selama satu tahun. <i>Results/Summary Minutes of GMS are available on the website of the Company after the date of the GMS. Summary Minutes of the GMS is available in Indonesian.</i> <i>Currently, the information Summary Minutes of GMS provided in the Company's web is available at least in one year.</i>

No.	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Realization		Penjelasan Description
		Sudah Realized	Belum Unrealized	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	√		Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham/investor serta menyediakan laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui web Perusahaan dan web Bursa Efek Indonesia.
	<i>The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.</i>			<i>The Company has communication policy with the shareholders/investors and provides periodic reports, information disclosure, condition or business prospects and performance, as well as the implementation of corporate governance through the Company's website and website of Indonesia Stock Exchange.</i>
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	√		Perusahaan mengungkapkan kebijakan dengan pemegang saham melalui situs resmi Perusahaan di www.pinagoutama.com dan web Bursa Efek Indonesia.
	<i>The Public Company discloses the communication policy that the public company has with shareholders/investors on the website.</i>			<i>The Company discloses the Company's policies with the shareholders via the Company's web at www.pinagoutama.com and website of Indonesia Stock Exchange.</i>
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	√		Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam <i>Board Manual</i> dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Jumlah Dewan Komisaris berbanding dengan jumlah Direksi, sebagai bentuk optimalisasi pengawasan berkenaan dengan kapasitas dan ukuran Perusahaan.
	<i>The stipulation of number of the Board of Commissioners' members will take into account the condition of the Public Company.</i>			<i>Stipulation of the Board of Commissioners' members has been stipulated in the Board Manual and adapted to the needs of the Company. Number of Board of Commissioners is proportional to the number of the Board of Directors, as a form of supervision optimisation with regard to the capacity and size of the Company.</i>
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	√		Komposisi Dewan Komisaris telah memperhatikan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
	<i>The composition stipulation of the Board of Commissioners pays attention to the diversity of required skills, knowledge, and experiences.</i>			<i>Composition of the Board of Commissioners has been attentive to the needs of the Company by taking into account the diversity of skill as well as necessary knowledge and experience.</i>
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	√		Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan menggunakan metode <i>self-assessment</i> seperti yang telah diatur dalam <i>Board Manual</i> .
	<i>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.</i>			<i>The evaluation of the Board of Commissioners' performance is held once every 1 (one) year, using the method of self-assessment as stipulated in the Board Manual.</i>



No.	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Realization		Penjelasan Description
		Sudah Realized	Belum Unrealized	
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. <i>The self-assessment policy that evaluates the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Public Company.</i>	√		Kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. <i>The self-assessment policy of Board of Commissioners' performance has been disclosed in this Annual Report.</i>
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>The Board of Commissioners has a resignation policy if the member of the Board of Commissioners is involved in a financial crime.</i>	√		Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam <i>Board Manual</i> untuk bahasan Masa Jabatan Dewan Komisaris. <i>The Board of Commissioners' resignation policy has been stipulated in the Board Manual – Term of Office of the Board of Commissioners.</i>
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. <i>The Board of Commissioners or Committee that executes the Nomination and Remuneration function prepares the succession policy in the process of nominating a member of the Board of Directors.</i>	√		Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perusahaan dijalankan melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang bertugas di antaranya untuk menyusun dan merekomendasikan sistem nominasi dan evaluasi kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta membuat rencana dan memastikan proses suksesi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. <i>The Nomination and Remuneration function in the Company is implemented by the Nomination, Remuneration Committee of which is tasked to conduct a review and monitor the nomination strategy and policy of the Company, provide recommendations to the Board of Commissioners concerning candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries and ensure that the process of selection and nomination comply with applicable regulation and mechanism.</i>
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. <i>The stipulation of number of Board of Directors' members will take into account the condition of the Public Company as well as the effectivity in decision-making.</i>	√		Penentuan jumlah anggota Direksi telah disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan telah diatur dalam <i>Board Manual</i> . <i>Stipulation of the Board of Directors' members has been stipulated in the Board Manual and adapted to the needs of the Company.</i>
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>The composition stipulation of the Board of Directors pays attention to the diversity of required skills, knowledge, and experiences.</i>	√		Latar belakang pendidikan Direksi telah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>The educational background of the Board of Directors is in accordance to the needs of the Company by taking into account the diversity of skill, as well as necessary knowledge and experience.</i>

No.	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Realization		Penjelasan Description
		Sudah Realized	Belum Unrealized	
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. <i>The member of Board of Directors who oversees accounting or finance has the skills and/or knowledge in accounting.</i>	√		Direktur yang membidangi akuntansi atau keuangan di Perseroan memiliki keahlian/pengetahuan di bidang akuntansi. <i>The Director in charge of accounting or financial in the Company has expertise/knowledge in accounting.</i>
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. <i>The Board of Directors have a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.</i>	√		Kebijakan penilaian kinerja Direksi seperti yang diatur dalam <i>Board Manual</i> dilakukan secara <i>self-assessment</i> dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. <i>The policy of Board of Directors' performance assessment as stated in the Board Manual is carried out in a self-assessment manner and evaluated by the Board of Commissioners.</i>
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. <i>The self-assessment policy that evaluates the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Public Company.</i>	√		Kebijakan penilaian sendiri untuk kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. <i>The self-assessment policy for the performance of the Board of Directors is disclosed in this Annual Report.</i>
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>The Board of Directors has a resignation policy if a member of Board of Directors is involved in a financial crime.</i>	√		Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi telah diatur dalam <i>Board Manual</i> terkait Prosedur Pengangkatan & Pemberhentian Direksi. <i>The Board of Directors' resignation policy has been stipulated in the Board Manual regarding the Procedure of Appointment & Dismissal of the Board of Directors.</i>
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . <i>The Public Company has the policy to prevent insider trading.</i>	√		Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait <i>Insider Trading</i> yang diatur dalam Kode Etik Perusahaan dan bertujuan mengatur transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) untuk menghindari ketidakadilan di mana suatu pihak akan mendapatkan keuntungan dari informasi eksklusif yang belum tersedia bagi orang yang akan bertransaksi dengan orang dalam tersebut sehingga berimplikasi menurunkan citra dan kepercayaan pasar terhadap Perseroan. <i>The Company has established policies related to Insider Trading policy as stipulated in the Company's Code of Conduct which aims to regulate insider trading to avoid injustice in which a party will benefit from exclusive information that is not yet available to people who will transact with the insider so that the implications of reducing the image and market confidence of Company.</i>



No.	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	Realisasi <i>Realization</i>		Penjelasan <i>Description</i>
		Sudah <i>Realized</i>	Belum <i>Unrealized</i>	
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud. <i>The Public Company has an anti-corruption policy and anti-fraud policy.</i>	√		Perusahaan telah memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud di dalam Kode Etik Perusahaan yang direalisasikan dalam program pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, dan <i>whistleblower system</i> . <i>The Company has anti-corruption and anti-fraud policy as stated in the Company's Code of Conduct which is realized in the program of anti-gratification, assets reporting, and whistleblower system.</i>
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> . <i>The Public Company has a policy on selection and capability improvement of suppliers or vendors.</i>	√		Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok yang diatur dalam dokumen tentang prosedur pengadaan barang dan jasa. <i>The Company has policy of selection and capability improvement of supplier as stated in the procedure of goods and services procurement.</i>
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. <i>The Public Company has a policy on complying creditors' rights.</i>	√		Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang tercantum dalam Kode Etik Perusahaan. <i>The Company has policy on the fulfillment of creditors' rights as stated in the Company's Code of Conduct.</i>
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . <i>The Public Company has a policy on the whistleblowing system.</i>	√		Perusahaan telah memiliki kebijakan sistem <i>wistleblowing</i> . Secara rinci Sistem <i>Wistleblowing</i> dibahas pada bab tersendiri di Laporan Tahunan ini. <i>The Company has a policy of a Whistleblowing System as disclosed in this Annual Report.</i>
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. <i>The Public Company has a policy on the provision of long-term incentives to the Board of Directors and employees.</i>	√		Kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang yang diimplementasikan di Perusahaan mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan oleh induk perusahaan. <i>Policies related to the provision of long-term incentives implemented in the Company refer to the policies determined by the parent Company.</i>

No.	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Realization		Penjelasan Description
		Sudah Realized	Belum Unrealized	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	√		Perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi (utamanya terkait dengan pelaporan-pelaporan) melalui teknologi informasi berbasis <i>web</i>, di antaranya IDXnet dan SPE OJK. Informasi lain terkait dengan Perusahaan di luar yang telah diatur oleh peraturan perundangan juga disampaikan melalui media sosial Perusahaan. Secara khusus, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas selain situs resmi Perusahaan sebagai media keterbukaan informasi. <i>The Public Company utilizes information technology more broadly as the media of information disclosure.</i> <i>The Company delivers information disclosure (particularly regarding the reporting) via web-based information technology, among others, IDXnet and SPE OJK.</i> <i>Additional information relating to the Company beyond those stipulated by law is also delivered through Company's social media.</i> <i>In particular, the Company utilises information technology more broadly as a media for information disclosure in addition to the Company's official website.</i>
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	√		Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Komposisi Pemegang Saham Lokal dan Asing serta pada bagian 20 Pemegang Saham Terbesar. <i>The Public Company's Annual Report discloses the final beneficial owner of shares in the ownership of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial ownership of the Public Company through the major and controlling shareholder.</i> <i>Final beneficial owners in the Company's shares ownership have been disclosed in the Annual Report on Domestic and Foreign Shareholders Composition of as well as in the 20 Majority Shareholders.</i>



Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan

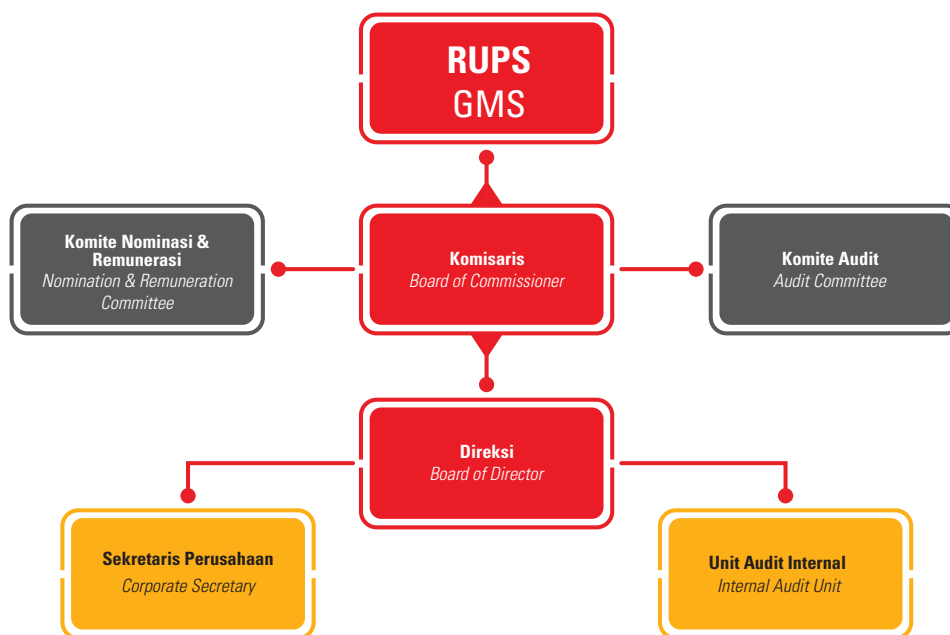
Corporate Governance Policy and Structure

Perseroan memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Code of Conducts* (CoC), Pedoman Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dan Piagam Audit Internal, serta manajemen risiko dan kebijakan lainnya untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

The Company enforces the Code of Governance (CoCG), the Code of Conducts, the Board Manual, the Internal Audit Charter, and risk management and other policies to support the implementation of Corporate Governance continuously in accordance with Regulation of the Republic of Indonesia.

Struktur Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka.

The Corporate Governance structure refers to the Financial Services Authority's Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning guidelines for Public Company Governance.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perseroan dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, wewenang tersebut antara lain termasuk mengambil keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan hal-hal lain terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh seluruh informasi tentang jalannya Perseroan dan meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perseroan. RUPS merupakan forum dimana Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Berbagai agenda yang dibahas dalam RUPS antara lain adalah penetapan arah dan strategi jangka panjang Perseroan, penilaian kinerja operasional dan keuangan, penetapan anggota Komisaris dan Direksi serta remunerasi mereka dan agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perseroan berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS:

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang diajukan oleh Direksi;
2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
3. Perseroan menjamin keputusan yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
4. Perseroan menyediakan ringkasan Risalah RUPS di laman Perseroan dan laman Bursa Efek Indonesia;
5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the management structure of the Company and has authority not owned by the Board of Commissioners and Directors. In accordance with the Articles of Association of the Company, these authorities include making decisions relating to amendments to the Company's Articles of Association, appointing and dismissing Directors and Members of the Board of Commissioners, deciding the distribution of duties and authority among Directors and other matters relating to merger, consolidation, expropriation, bankruptcy, and dissolution of the Company.

The General Meeting of Shareholders has the right to obtain all information about the Company's operations and hold the Board of Commissioners and Directors accountable for the management of the Company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company's element possessing the entire authorities that are not delegated towards the Board of Commissioners nor towards the Board of Directors. GMS is a place for shareholders to predispose the Company. GMS is a forum where the Board of Commissioners and the Board of Directors report and are responsible for conducting their duties and performances towards the Shareholders. Some agendas discussed at the GMS include setting the Company's direction and long-term strategy, evaluating operational and financial performance, determining the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as their remuneration and other agendas proposed by the Shareholders.

GMS consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS. The Company is necessary to purvey a complete exegesis and accurate information to each Shareholder regarding the conduct of the GMS.

Concerning the holding of the GMS are as follows:

1. *The Company summons the Shareholders, provides information regarding the agenda of the GMS including proposals submitted by the Board of Directors;*
2. *Shareholders attain an explanation of the matters on the agenda of the GMS given before and/or when the GMS takes place;*
3. *The Company vouches for decisions taken through transparent and fair procedures;*
4. *The Company provides the GMS minutes in the Company's and Indonesia Stock Exchange's website.*
5. *The Company discloses to Shareholders a system of determining salaries and facilities for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the details regarding salaries and benefits received by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*



- A. RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan
 - b. RUPS Luar Biasa
- B. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun untuk menyetujui di antaranya Laporan Tahunan, penggunaan laba, atau penetapan Kantor Akuntan Publik.
- C. RUPS Tahunan mengenai laporan tahunan diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun penutupan buku yang bersangkutan.
- D. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

- A. *RUPS consists of:*
 - a. *Annual GMS*
 - b. *Extraordinary GMS*
- B. *AGMS are held annually to approve, among others, the Annual Report, the use of profits, or the determination of the Public Accounting Firm.*
- C. *AGMS regarding annual report is held no later than six months after the book's closing year.*
- D. *Extraordinary GMS could be held at any time in accordance with the needs for the benefit of the Company.*

Wewenang RUPS

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar;
3. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan;
4. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian;
5. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
6. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain;
7. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal Perseroan;
8. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus;
9. Berbagai kewenangan lain sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor. 40 Tahun 2007.

GMS Authority

1. *Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
2. *Approving changes to the Articles of Association;*
3. *Giving approval for the repurchase or further transfer of shares issued by the Company;*
4. *Approving the annual work plan if the articles of association determine;*
5. *Approving the annual report and ratify the financial report as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners;*
6. *Deciding the use of net income, including determining the amount of allowance for statutory reserves and other reserves;*
7. *Approving the addition and reduction of the Company's capital;*
8. *Setting the procedure for taking dividends that have been put into special reserves;*
9. *Various powers in accordance with Law Number. 40 of 2007.*

Penyelenggaraan RUPS

The Enforcement of GMS

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan telah melakukan serangkaian proses persiapan mulai dari pemberian informasi terkait waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS kepada seluruh Pemegang Saham serta pendistribusian materi pembahasan RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS dalam Perusahaan mencakup RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa ("RUPSPLB").

In holding the GMS, the Company has conducted a series of preparatory processes starting from providing information regarding the time and place for holding the GMS to all Shareholders and distributing the GMS discussion material. In accordance with the Articles of Association of the Company, the GMS in the Company includes the Annual GMS ("AGM") and other GMS, including the Extraordinary GMS ("EGMS").

RUPS Tahunan (RUPST)

RUPST diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku. Selama rapat berlangsung, para Pemegang Saham membahas agenda yang telah ditetapkan dan hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS Lainnya/RUPS Luar Biasa (RUPSPLB)

RUPS lainnya/RUPSPLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Penyelenggaraan RUPSPLB dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rencana dan Penyelenggaraan RUPS

RUPST dan RUPS Lainnya diselenggarakan dengan didahului perencanaan yang matang dan tetap mematuhi panduan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Dalam peraturan tersebut, penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan terdiri dari beberapa tahap mulai dari pemberitahuan penyelenggaraan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS.

Pemungutan Suara

RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. RUPS dimulai dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS. Pada pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS akan menyampaikan kondisi Perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan untuk mata acara rapat dan prosedur untuk menggunakan hak suara pemegang saham dalam mengajukan permintaan dan/atau komentar.

Pada akhir pembahasan setiap mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap agenda rapat. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk oleh ketua rapat, menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham yang hadir.

Annual GMS (AGMS)

The AGM is held no later than 6 (six) months after the end of the financial year. During the meeting, the Shareholders discuss the determined agenda and other matters that require the approval of the GMS for the benefit of the Company with due regard to the provisions of the Company's Articles of Association.

Other GMS/Extraordinary GMS (EGMS)

Other GMS/EGMS could be held at any time based on needs for the benefit of the Company. The implementation of EGMS could be carried out at the request of 1 (one) person or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.

Plan and Implementation of GMS

The AGMS and Other GMS were enforced preceded by cautious planning and referring to the procedural guidelines as instructed in the Articles of Association and Financial Services Authority's Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated on April 20, 2020, concerning the Planning and Implementation of an open Company GMS. In this regulation, the holding of a GMS by the Company entails several phases commencing from the notification of the GMS, announcement of the GMS, summons for the GMS, and the holding of the GMS.

Voting

The GMS is chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners and held in Indonesian. The GMS begins with first reading the rules of the GMS. At the opening of the GMS, the Chairperson of the GMS would convey the conditions of the Company, the mechanism of decision making for the agenda of the meeting, and the procedure for using the voting rights of shareholders to submit requests and/or comments.

At the end of the discussion of each AGM agenda, the Chairperson of the GMS provides an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions/responses and/or proposals on each meeting agenda. The Chairperson of the GMS or the Director appointed by the chairman of the meeting, answers or responds to the questions/notes of the shareholders present.



Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilaksanakan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara diselenggarakan secara lisan dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara dan membuat risalah rapat RUPS.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020.

After all the questions were answered and responded to, then a decision was made based on deliberation to reach consensus. Should deliberations for consensus be not reached, decision making would be carried out through voting. Voting is held verbally and only shareholders or their authorized proxies have the rights to cast votes. Every share gives the holder the rights to cast one vote. The Company has appointed an independent party, namely the Notary assisted by the Securities Administration Bureau in calculating and/or validating the vote and making minutes of the GMS meeting.

In 2020, the Company has held a GMS of 1 (one) time, namely the 2019 Annual GMS held on June 4, 2020.

Agenda dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2019

Agenda and Decision of 2019 GMS

Agenda dan Keputusan atas Keputusan pemegang saham pengganti RUPSLB No.001/PU/RUPSLB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Agenda and Resolutions on Decision of Shareholders of EGMS No.001/PU/EGMS/I/2020 dated January 15, 2020.

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
1.	Pembagian dividen tunai dari saldo laba ditahan sampai dengan tahun 2019.	Menyetujui pembagian dividen tunai dari saldo laba ditahan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
	<i>Distribution of cash dividends from retained earnings until 2019.</i>	<i>Approved the distribution of cash dividends from retained retained earnings until 2019 amounting to Rp12,000,000,000 (twelve billion Rupiahs)</i>

Kehadiran Keputusan pemegang saham pengganti RUPSLB No.001/PU/RUPSLB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau setara 100% dari seluruh jumlah saham.
Attendance Decision of substitute shareholders for EGMS No.001/PU/EGMS/I/2020 dated on January 15, 2020, attended by all shareholders or the equivalent of 100% of the total number of shares.

Agenda dan Keputusan atas RUPSLB No. 7 yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2020.

Agenda dan Keputusan atas RUPSLB No. 7 yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2020

No. No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
1.	Perubahan seluruh Anggaran Dasar Entitas Induk yang mencakup: a. Perubahan status perseroaan dari tertutup menjadi perseroaan terbuka. b. Perubahan pasal 3 tentang Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. c. Penurunan nilai nominal saham. d. Peningkatan Modal dasar perseroaan. e. Penyesuaian Seluruh anggaran dasar perseroaan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.	Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Entitas Induk yang mencakup antara lain: a. Perubahan status perseroaan dari tertutup menjadi terbuka. b. Maksud dan tujuan Entitas Induk adalah menjalankan usaha di bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan; industri; pengelolaan air, pengeolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi; perdagangan; jasa; ketenagalistrikan; pertambangan dan penggalian; real estat; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; aktivitas kesehatan manusia. c. Menyetujui Penurunan nilai nominal tiap saham dari Rp10.000.000,- menjadi Rp80,- d. Meningkatkan modal dasar perseroaan yang semula berjumlah Rp50.000.000.000,- menjadi Rp200.000.000.000,- e. Penyesuaian Seluruh ketentuan anggaran dasar perseroaan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
	<i>Amendments to the entire Articles of Association of the Parent Entity which include:</i> a. <i>Change of company status from closed to public company.</i> b. <i>Amendment to Article 3 concerning Purpose and objectives and business activities.</i> c. <i>Decrease in par value of shares.</i> d. <i>Increase in the company's authorized capital.</i> e. <i>Adjustment of the entire articles of association of the company with the laws and regulations in the capital market.</i>	<i>Approving Amendments to the entire Articles of Association of the Parent Entity, which include, among others:</i> a. <i>The Change of the Company status from closed to open.</i> b. <i>The purposes and objectives of the Parent Entity are to carry through business in the fields of agriculture, livestock, and forestry; industry; water management, wastewater management, management and recycling waste and remediation activities; trading; services; electricity; mining and excavation; real estate; construction; transportation and warehousing; health activity human.</i> c. <i>Approving the reduction in the nominal value of each share from Rp10,000,000 to Rp80, -</i> d. <i>Increaseing the authorised capital of the company from Rp50,000,000,000 to Rp200,000,000,000.</i> e. <i>Adjustment of all provisions of the company's articles of association with the laws and regulations in the capital market.</i>



No. No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
2.	Pengeluaran saham baru dalam simpanan Entitas Induk Untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Entitas Induk, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, yang jika diperlukan termasuk pengalokasian saham baru untuk program <i>Employee Stock Allocation</i>. <i>Issuance of new shares in the holding of the Parent Entity to be offered to the public through an Initial Public Offering of the Parent Entity's Shares, which is offered at an Offer Price, which if necessary, includes the allocation of new shares for the Employee Stock Allocation program.</i>	Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Entitas Induk sejumlah 156.250.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp80, yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Entitas Induk, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, yang jika diperlukan termasuk di dalamnya pengalokasian saham baru 10% dari program <i>Employee Stock Allocation</i>. <i>Approving the issuance of new shares in the holding of the Parent Entity in the amount of 156,250,000 shares, each with a nominal value of Rp80, which was offered to the public through the Initial Public Offering of the Parent Entity's Shares, offered at an Offer Price, which, if necessary, included the allocation of new shares 10% of the Employee Stock Allocation program.</i>
3.	Pemberian kuasa kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan penawaran umum perdana perseroan <i>Granting power of attorney to the company's Board of Directors to carry out all actions related to the company's initial public offering</i>	Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan penawaran umum perdana perseroan. <i>Approving to authorise the Company's Board of Directors to carry out all actions related to the company's initial public offering.</i>
4.	Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. <i>Changes to the Board of Commissioners and Directors of the Company.</i>	Menyetujui memberikan Kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum perdana tersebut dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana dilaksanakan dan mencatatkan saham saham tersebut pada Bursa efek dan dalam daftar pemegang saham perseroan. <i>Approving to grant power to the Company's board of commissioners to state in a separate notary deed regarding the realization of the number of shares that have been issued in the initial public offering and the increase in issued and paid-up capital after the initial public offering is carried out and to register these shares on the stock exchange and in the list of the Company's shareholders.</i>
	Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : - Menyetujui Pengunduran diri : - Charles Sutantio sebagai Komisaris Perseroan. - Kahidir Amypalupy MS sebagai Komisaris Perseroan. - Peter Unggul Sutantio sebagai Komisaris Perseroan. - Kartadjaja Intan sebagai Komisaris Perseroan. Memberikan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) atas tindakan pengawasan yang mereka telah jalankan untuk tahun buku 2019 sepanjang tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan tahun buku 2019. - Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. - Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tahun 2023, menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Wilson Sutantio Komisaris : Hasan Tantri Komisaris Independen : Chairul Muluk Direksi Direktur Utama : Bambang Palgoenadi Direktur : Komaruzzaman Direktur : Meli Tantri Direktur : Raymon Wahab Direktur : Thomas Valian C.

No. No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
5.		<i>Approving changes to the Company's Board of Commissioners and Directors as follows:</i> <i>Approving the resignation:</i> <i>Charles Sutantio as a Commissioner of the Company.</i> <i>Kahidir Amypalupy MS as a Commissioner of the Company.</i> <i>Peter Unggul Sutantio as a Commissioner of the Company.</i> <i>Kartadja Intan as a Commissioner of the Company.</i> <i>Providing a release of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions they have carried out for the 2019 financial year as long as their actions are contained in the financial statements for the 2019 financial year.</i> <i>Approving the dismissal of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors with respect.</i> <i>Approving the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors which is valid until 2023, as follows:</i> <i>Board of Commissioners</i> <i>President Commissioner: Wilson Sutantio</i> <i>Commissioner: Hasan Tantri</i> <i>Independent Commissioner: Chairul Muluk</i> <i>Board of Directors</i> <i>President Director: Bambang Palgoenadi</i> <i>Director: Komaruzzaman</i> <i>Director: Meli Tantri</i> <i>Director: Raymon Wahab</i> <i>Director: Thomas Valian C.</i> <i>Changes to the Board of Commissioners and Directors of the Company.</i>
6.	Pemberian kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan rapat termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan dalam akta notaris (jika diperlukan) dan mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. <i>Granting power of attorney to the Board of Directors of the company with the right of substitution to state part or all of the meeting decisions including restating all provisions of the Company's articles of association in a notary deed (if necessary) and submitting requests for approval, notification of changes to the Company's articles of association and changes to company data</i>	Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan rapat termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan dalam akta notaris (jika diperlukan) dan mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. <i>Approving to give power to the Board of Directors of the company with the right of substitution to state part or all of the meeting decisions including restating all provisions of the company's articles of association in a notary deed (if necessary) and submitting requests for approval, notification of changes to the Company's articles of association and changes to Company data.</i>

Kehadiran Keputusan pemegang saham pengganti RUPSLB No.7 tanggal 4 Juni 2020 dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau setara 100% dari seluruh jumlah saham.

Attendance Decision of substitute shareholders of EGMS No. 7 dated on June 4, 2020, was attended by all shareholders or the equivalent of 100% of the total number of shares.



Agenda dan Keputusan Pemegang saham sebagai pengganti RUPS Tahunan No. 001/PU/RUPST/VI/2020 yang diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2020.

Agenda and Decision of Shareholders in lieu of Annual GMS No. 001/PU/AGMS/VI/2020 which was held on June 4, 2020.

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
1.	Penyampaian Laporan tahunan dari direksi, laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 <i>Approval of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019 Including the report on the implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties.</i>	Menerima Laporan tahunan dari direksi, laporan tugas pengawasan komisaris dan laporan keuangan perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. <i>Receiving Annual Report of the Company for the Financial Year 2019 including the report on the implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties.</i>
2.	Pengesahan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. <i>Approval of Financial Report of the company for ended on December 31, 2019</i>	Menyetujui pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku 2019 dan dengan demikian membebaskan (<i>acquit et de charge</i>) sepenuhnya kepada direksi perseroan dewan komisaris perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2019, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan perusahaan. <i>Approving the ratification of the financial statements for the 2019 financial year and thereby rendering (acquit et de charge) entirely to the Board of Directors of the Company for all management and supervision actions of the Company for the financial year 2019, so long it is not a criminal act or does not infringe applicable legal provisions and procedures as well as recorded in the Company's financial statements.</i>
3.	Penetapan Penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019. <i>Determination of the Company's net profit for the Financial Year that ended on December 31, 2019.</i>	Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan yang diatribusikan kepada Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.21.504.888.161 sebagai berikut: a. Menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019. b. Cadangan wajib sebesar 4,65% atau senilai Rp1.000.000.000. c. Sisanya sebesar Rp20.504.888.161 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. <i>Determining the use of the Company's current year net profit attributable to the entity Parent for the financial year ended on December 31, 2019, amounting to Rp21,504,888,161 as follows:</i> <i>a. Stipulating that there is no dividend distribution from the Company's net income for the 2019 financial year.</i> <i>b. Mandatory reserves of 4.65% or an amount of Rp1,000,000,000.</i> <i>c. The remaining amount of Rp20,504,888,161 was set as the Company's retained earnings.</i>
4.	Penggunaan laba ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. <i>Determination of the Company's Retained Earning for the Financial Year that ended on December 31, 2019.</i>	Menyetujui untuk membagikan dividen dari saldo laba ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp28.000.000.000,-. <i>Ratifying to distribute dividends from retained earnings until December 31, 2019, amounting to Rp28,000,000,000.</i>

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
5.	Penetapan besaran tantiem untuk dewan direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku 2019 serta besaran gaji dan/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2020. <i>Determination of tantiem for member of the board of Directors of the company and members of the board of Commissioners the company ended on 2019 and Determination salaries and allowances for members of the Board and/or allowances for members of the board of commissioners of the Company on 2020.</i>	Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan komisaris perseroan untuk menetapkan besaran tantiem untuk dewan direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku 2019 serta besaran gaji dan / honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2020. <i>Ratifying to grant the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of tantiem for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2019 financial year as well as the amount of salary and/ honorarium, facilities and allowances for the 2020 financial year.</i>
6.	Penunjukan Akuntan publik/ Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. <i>Approval of the Appointment of a Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year ended December 31, 2020.</i>	Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan terkait. <i>Approving to render the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements ending on December 31, 2020, as well as to govern the amount of honorarium and other requirements in relation with related appointments.</i>

Kehadiran Keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS Tahunan No. 001/PU/RUPST/VI/2020 yang diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2020 dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau setara 100% dari seluruh jumlah saham.
Attendance of Shareholders Decree in lieu of Annual GMS No. 001/PU/AGMS/VI/2020 which was held on June 4, 2020, attended by all shareholders or the equivalent of 100% of the total number of shares.

Agenda dan Keputusan RUPSLB No. 18 tanggal 21 Desember 2020

EGMS Agenda and Resolution No. 18 dated on December 21, 2020.

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
1.	Peningkatan Modal Dasar Perseroan setelah penawaran umum perdana saham Perseroan.	Berdasarkan kuasa dari Akta RUPSLB No. 7 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat di depan notaris Fathiah Helmi, S.H., menyatakan telah menempatkan dan menyeter penuh sejumlah 781.250.000 lembar saham dengan nilai nominal persaham Rp80,- dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp62.500.000.000,- yang telah disetor penuh sehingga susunan pemegang saham perseroan menjadi : - Wilson Sutantio sejumlah 173.250.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp80,- dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp13.860.000.000,- - Charles Sutantio sejumlah 139.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp80,- dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp11.120.000.000,- - Hasan Tantri sejumlah 139.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp80,- dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp11.120.000.000,- - Peter Unggul Sutantio sejumlah 139.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp80,- dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp11.120.000.000,- - Suryani Tantri sejumlah 34.750.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp80,- dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp2.780.000.000,- - Masyarakat sejumlah 156.250.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal saham Rp80,- dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp12.500.000.000,-



No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Decisions
	<i>Increasing in the Company's Authorized Capital after the initial public offering of the Company's shares.</i>	<i>Based on the power of attorney from the Deed of EGMS No. 7 dated June 4, 2020 drawn up in front of the notary Fathiah Helmi, S.H., stated that he had placed and fully paid 781,250,000 shares with a nominal value per share of Rp80, - with a total nominal value of Rp62,500,000,000, - which has been fully paid so that the composition of the company's shareholders becomes:</i> <i>1. Wilson Sutantio, amounting to 173,250,000 shares, each with a share nominal value of Rp80, - with a nominal value of Rp13,860,000,000, -</i> <i>2. Charles Sutantio, amounting to 139,000,000 shares, each with a nominal value of shares of Rp80, - with a nominal value of Rp11,120,000,000, -</i> <i>3. Hasan Tantri, a number of 139,000,000 shares, each with a nominal value of shares of Rp80, - with a nominal value of Rp11,120,000,000, -</i> <i>4. Peter Unggul Sutantio, amounting to 139,000,000 shares, each with a nominal value of shares of Rp80, - with a nominal value of Rp11,120,000,000, -</i> <i>5. Suryani Tantri, amounting to 34,750,000 shares, each with a nominal value of shares of Rp80, - with a nominal value of Rp2,780,000,000, -</i> <i>6. The public, a total of 156,250,000 shares, each with a nominal value of shares of Rp80, - with a nominal value of Rp12,500,000,000, -</i>

Kehadiran Keputusan RUPSLB No. 18 tanggal 21 Desember 2020 dikuasakan kepada Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPSLB No.7 tanggal 4 Juni 2020.
Attendance of EGMS Decree No. 18 dated on December 21, 2020, was authorized to the Board of Commissioners in accordance with the resolution of the EGMS No.7 dated on June 4, 2020.

Pengambilan Keputusan dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan

Seluruh keputusan RUPS Tahunan sebagaimana tertera di atas telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dan seluruh keputusan telah direalisasikan.

Decision Making and Follow-Up to Annual AGMS Decisions

All decisions of the Annual GMS as stated above are agreed upon by consensus and all decisions have been realised as follows:

Kehadiran RUPS Tahunan 2019

RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 dihadiri oleh 5.000 lembar saham atau setara dengan 100% dari seluruh jumlah saham. Lebih dari 50% atau ½ bagian dari jumlah seluruh saham telah hadir sehingga telah memenuhi persyaratan kuorum RUPS Tahunan serta sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat kehadiran RUPS.

The Attendance of the 2019 Annual GMS

The Annual GMS held on June 4, 2020, was attended by 5,000 shares or equivalent to 100% of the total shares. More than 50% or ½ part of the total shares have been present so that they have met the requirements of the Annual GMS quorum and are legitimate and entitled to make legitimate decisions and bind the presence of the GMS.

Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Realization of the Previous Year GMS Decision

No.	Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 Resolution of Annual GMS for Year 2019	Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realisation
1.	Menyetujui Laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahun buku 2018 serta tugas pengawasan Dewan Komisaris perseroan tahun 2018 dengan demikian membebaskan (<i>acquitt et de charge</i>) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris perseroan atas segala tindak pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan. <i>Approving the annual report including the ratification of the 2018 financial statements as well as the supervisory duties of the company's 2018 board of commissioners, thereby releasing (<i>acquitt et de charge</i>) completely to the company directors and the company's board of commissioners for all actions of the company's management and supervision for the 2018 financial year, as long as it is not a not criminal or violate the provisions and legal procedures in force and recorded in the company's financial statements.</i>	Realisasi <i>Realited</i>
2.	Menyetujui pembagian dividen final Rp35.000.000.000 yang diambil dari saldo laba berjalan tahun buku 2018 <i>Approving a final dividend distribution of Rp35,000,000,000 derived from the current balance of profit for the 2018 financial year</i>	Realisasi <i>Realited</i>
3.	Penunjukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2019 wewenanganya dilimpahkan kepada dewan komisaris perseroan <i>The appointment of KAP to audit the financial statements for the 2019 financial year is delegated to the company's board of commissioners</i>	Realisasi <i>Realited</i>

Dewan Komisaris

The Board of Commissioners

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Program Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu demi kepentingan Perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun memiliki kemampuan menjalankan tugasnya.

In accordance with the duties and authorities of the Board of Commissioners regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Work Program of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has a supervisory function on management activities carried out by the Board of Directors and their staff. Aside from being a supervisory organ, the Board of Commissioners also has responsibilities in terms of providing advice and views regarding plans or decisions made for the Company. In general, the Board of Commissioners is one of the balancing organs so that business activities are carried out in accordance with the Articles of Association and established standards.

The Board of Commissioners has to oversee the management of the Company and to provide advice to the Directors should it deemed necessary in the interest of the Company. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Directors in any condition can execute their duties, responsibly.



Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada Direksi pada saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi, mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris selalu berpegang teguh pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional mandiri dan/atau membentuk Komite Khusus atas biaya Perseroan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris sendiri.

In conducting the duties, the Board of Commissioners is necessary to purvey opinions and suggestions to the Board of Directors when discussing the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors, to follow the development of the Company's activities, to report immediately to Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance or other matters deemed necessary to immediately received the attention of the Shareholders. In carrying out its duties, the Board of Commissioners always adheres to the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners may use professional advice independently and/or form a Special Committee at the expense of the Company under procedures determined by the Board of Commissioners themselves.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Criteria of the Board of Commissioners' Members

PT Pinago Utama Tbk menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Namun demikian, Dewan Komisaris yang memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perseroan maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

PT Pinago Utama Tbk is manifestly aware that Shareholders within the GMS have full authority to appoint the Board of Commissioners. However, for the Board of Commissioners to have a performance that is in line with the expectations of the Shareholders and the needs of the Company, the Company requires to set policies regarding the criteria for the members of the Board of Commissioners according to the needs.

Kriteria Dewan Komisaris Perseroan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

The criteria for the Company's Board of Commissioners include the following:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- a. *Having good morals, values and integrity*
- b. *Being competent in doing legal actions*
- c. *Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:*
 - 1) *Never been declared bankrupt.*
 - 2) *Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt.*
 - 3) *Never been convicted of committing a criminal act that caused losses to state finances and/or was related to the financial sector.*
 - 4) *Have never been a member of the Board of Directors and/or Commissioners who during the term of office:*
 - i. *Never held an annual GMS.*
 - ii. *His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS.*

- iii. Pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

- iii. Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.

- d. *Having a commitment to comply with laws and regulations*
- e. *Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company*

Kriteria Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Criteria for Appointment of the Board of Commissioners' Members

Perseroan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

1. Integritas dan moral yang baik;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan.

The Company possesses the criteria for candidate members of the Board of Commissioners referring to the Company's Articles of Association embracing:

1. *Good integrity and morals;*
2. *Physical and spiritual health;*
3. *Able to execute legal actions;*
4. *Have never been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination;*
5. *Have never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or Supervisory Board that was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;*
6. *Possess sufficient knowledge in the business field of the Company.*

Masa Jabatan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Tenure

1. Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah tiga tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan menurut keputusan RUPS.

1. *The term of office of the Board of Commissioners is three years without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time. After the term of office had expired, the members of the Board of Commissioners may be reappointed by the General Meeting of Shareholders;*
2. *The term of office of the member of the Board of Commissioners ends if:*
 - a. *The term of office is completed;*
 - b. *Resigning;*
 - c. *No longer meeting the requirements of the applicable laws and regulations;*
 - d. *Passed away;*
 - e. *Having been dismissed according to the resolution of the GMS.*



Apabila masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Dalam hal terdapat penambahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

If the term of office of the member of the Board of Commissioners ceases or is dismissed before his term of office had expired, the term of office of his replacement is the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners that he replaces. If there is an additional term of office for the members of the Board of Commissioners, the term of office of the members of the Board of Commissioners is to come to an end with the expiration of the terms of office of other existing members of the Board of Commissioners.

Program Pengenalan Dewan Komisaris *The Board of Commissioners' Introduction Program*

Di tahun 2020, terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2020. Oleh karena itu Perseroan menyelenggarakan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perseroan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Penyelenggaraan program orientasi atau pengenalan tersebut telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

In 2020, there was a change in the composition of the Board of Commissioners in accordance with the Resolutions of the Extraordinary GMS held on June 4, 2020. Therefore the Company held an orientation or introduction program for new members of the Board of Commissioners with the aim of providing an overview of business activities, future corporate plans, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Commissioners. The implementation of the orientation or introduction program has been regulated in the Board of Commissioners Work Guidelines.

Selain pemaparan atas Perseroan, dalam program orientasi tersebut juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Kerja Komite di bawah Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perseroan, program orientasi juga meliputi kunjungan langsung ke lapangan.

In addition to the presentation of the Company, the orientation program also provided supporting documents, including the Annual Report, Corporate Work Plan and Budget (RKAP), Company Long Term Plan (RJPP), Company Articles of Association, Corporate Governance Policy, Code of Ethics, Work Program of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, Board of Commissioners Work Guidelines, Board of Directors Work Guidelines and Committee Work Guidelines under the Board of Commissioners, as well as regulations relating to the implementation of duties of the Board of Commissioners. In addition, to understand directly the Company's business processes, the orientation program also includes direct visits to the field.

Agar Dewan Komisaris dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan yang lain, maka bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat akan diberikan Program Pengenalan. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke Proyek dan Pabrik atau program lainnya. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan ini berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.

For the Board of Commissioners to work in harmony with other Company organs, new Board members will be given an Introductory Program. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to Projects and Factories, or other programs. The responsibility for the procurement of the introduction program rests with the President Commissioner or if the President Commissioner is absent, then the responsibility for implementing the introduction program rests with the President Director.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

The introductory program provided to members of the Board of Commissioners will include, among others, the following:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi *good corporate governance*;
2. Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Berbagai peraturan perundang-undangan berlaku serta Kebijakan Perseroan.

Perseroan akan mengadakan program pengembangan diri bagi Dewan Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan kebutuhan Perseroan. Program pengembangan diri Dewan Komisaris akan diadakan secara teratur minimal satu tahun sekali.

1. *The principles and implementation of good corporate governance;*
2. *The description of the company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, short-term and long-term business plan strategies, competitive position, risks and other strategic issues;*
3. *Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and the audit committee;*
4. *Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors;*
5. *Miscellaneous laws and regulations apply as well as Company Policies.*

The Company will conduct a self-development program for the Board of Commissioners with agenda and material according to the needs of the Board of Commissioners and the needs of the Company. The Board of Commissioners' personal development program will be held regularly at least once a year.

Etika Jabatan *Ethics in Position*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Panduan *Good Corporate Governance* Perseroan serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan;
2. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan lain sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan RUPS;
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga secara ekonomis kepada nasabah atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya dengan maksud yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

In running the duties and functions, the Board of Commissioners adheres to the following principles:

1. *Members of the Board of Commissioners must comply with the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Guidelines for Good Corporate Governance and established Company policies;*
2. *The members of the Board of Commissioners may not hold another position in accordance with the provisions of the legislation, political party management and/candidates/members of the legislature and or candidates for the Regional Head/Deputy Regional Head and or other positions that may lead to a conflict of interest;*
3. *The members of the Board of Commissioners are prohibited from taking personal benefits from the Company's activities other than salaries and other benefits as a member of the Board of Commissioners determined by the GMS;*
4. *The members of the Board of Commissioners are prohibited from giving or offering or receiving either directly or indirectly something of economic value to a customer or a Government official to influence or in return for what he has done and other actions with the same purpose in accordance with applicable laws and regulations;*



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Anggota Dewan Komisaris menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Dewan Komisaris dengan Direksi; 6. Antara para anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; 7. Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan karyawan Perseroan; 8. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan; 9. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>The members of the Board of Commissioners avoid actions that could damage the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors;</i> 6. <i>Amongst members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relations to the third degree, both straight lines and lateral lines, including relationships arising from marriage;</i> 7. <i>The members of the Board of Commissioners must be able to make themselves good role models for the Directors and employees of the Company;</i> 8. <i>The members of the Board of Commissioners must maintain the confidentiality of Company information;</i> 9. <i>Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must be kept confidential in accordance with the applicable laws and regulations.</i> |
|---|---|

Komposisi Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Composition

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1.	Wilson Sutantio	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Akte Notaris <i>Notarial Deed</i>
2.	Hasan Tantri	Komisaris <i>Commissioner</i>	Akte Notaris <i>Notarial Deed</i>
3.	Chairul Muluk	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Akte Notaris <i>Notarial Deed</i>

Independensi Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Independence

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perseroan dengan memerhatikan kualifikasi serta persyaratan terutama dalam hal independensi. Dewan Komisaris menyatakan status independensinya terhadap kemungkinan situasi yang mengandung benturan kepentingan dari setiap individu anggota Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is appointed based on applicable provisions in the Company by taking into account the qualifications and requirements, especially in terms of independence. The Board of Commissioners declares its independent status with regard to the possibility of situations that contain conflicts of interest from each individual member of the Board of Commissioners.

Tabel Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Table of the Board of Commissioners' Independence Statement

Pernyataan Independensi <i>Independence Statement</i>	Wilson Sutantio	Hasan Tantri	Chairul Muluk
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya. <i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.</i>	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. <i>Do not have shares directly or indirectly with the Company.</i>	-	-	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan. <i>Not affiliated with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders.</i>	-	-	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perseroan. <i>Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's main activities.</i>	-	√	√
Memenuhi kriteria independensi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. <i>Meet the independence criteria as stipulated in the applicable provisions.</i>	√	√	√



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan kinerja Perseroan mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*). *Board Manual* menjelaskan secara garis besar pola kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan sebagai wujud dari komitmen Perseroan untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*) menghendaki kejelasan sistem dan struktur menyangkut hubungan antar organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing-masing organ Perseroan harus didefinisikan secara jelas dan dijalankan dengan konsisten. Oleh karena itu diperlukan suatu panduan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing tersebut.

Board Manual ini merupakan kompilasi dan implementasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang mengatur tentang anak Perusahaan, dan ketentuan Anggaran Dasar PT Pinago Utama Tbk serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Board Manual (Panduan Pengelolaan Perusahaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi) ini merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Pinago Utama Tbk dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik selaku Dewan (*Board*) maupun individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dokumen ini juga mengatur tata hubungan di antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

Untuk pelaksanaan manual ini diperlukan komitmen bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola Perseroan untuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya. Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektivitas dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Dokumen ini tidaklah bersifat statis tetapi dapat dikembangkan sesuai kondisi Perseroan. Namun demikian dalam perubahannya haruslah di dasarkan pada kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Secara umum, penyusunan *Board Manual* ini mengacu kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar PT Pinago Utama Tbk, Keputusan RUPS serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan serta *best practices* yang disarankan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

The Board of Commissioners carries out the function of monitoring the Company's performance by referring to the Board of Commissioners' Work Guidelines (Board Manual). The Board Manual outlines the work patterns between the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association as a manifestation of the Company's commitment to implementing good corporate governance.

Good corporate governance requires a clear system and structure regarding the relationship between company organs, which consists of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The authority, duties and work relations of each organ of the company must be clearly defined and carried out consistently. Therefore we need a guide that can be a common reference in the implementation of each of these tasks.

This Board Manual is a compilation and implementation of the principles of corporate law, as stipulated in Law Number 40 of 2007 and regulations related to State-Owned Enterprises, as long as it regulates subsidiaries, and the provisions of the Articles of Association of PT Pinago Utama Tbk and practices best practices (best practices) Good Corporate Governance.

This Board Manual (Company Management Guide for the Board of Commissioners and Directors) is a document that becomes a reference for the Board of Commissioners and Directors of PT Pinago Utama Tbk in carrying out their duties, powers, responsibilities, rights and obligations, both as a Board (Board) and as an individual member of the Board of Commissioners. and Directors. This document also regulates the relationship between the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Shareholders.

The implementation of this manual requires a joint commitment from the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the company for the benefit of shareholders and stakeholders in general. With the clarity of the main duties and functions of each, it is hoped that it will boost the effectiveness and performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

This document is not static but can be developed according to company conditions. However, the amendment must be based on an agreement amongst the Board of Commissioners and the Board of Directors. In general, the preparation of this Board Manual refers to the provisions, applicable laws and regulations, PT Pinago Utama Tbk's Articles of Association, GMS Decisions and other relevant regulations and best practices recommended in the implementation of Good Corporate Governance.

Oleh karena *Board Manual* ini hanya memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan Perseroan, maka dalam pelaksanaannya ketentuan ini tidak bersifat limitatif. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Petunjuk Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan di sini.

Prinsip iktikad baik, penuh tanggung jawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang inheren dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

Adapun peraturan yang menjadi dasar penyusunan *Board Manual* ini di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0038685.A.H.01.02. Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pinago Utama Tbk.
- g. Akta No. 7 Tanggal 04 Juni 2020 Notaris Fathiah Helmi, S.H., Tentang Berita Acara Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar secara Keseluruhan PT Pinago Utama Tbk.
- h. *The Board of Commissioners, Section A. The Board of Commissioner Authority*, The Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.
- i. Surat Keputusan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 003/PU/SK-Kom/VI/2020 tentang Piagam Komite Audit PT Pinago Utama Tbk.
- j. Surat Keputusan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 004/PU/SK-Kom/VI/2020 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pinago Utama Tbk.
- k. Surat Keputusan Direksi PT Pinago Utama Tbk No. 002/SK-DIR/VII/2020 Tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan di PT Pinago Utama Tbk.
- l. Surat Keputusan Direksi PT Pinago Utama Tbk No. 005/SK-DIR/VI/2020 Tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Pinago Utama Tbk.

Since this Board Manual contains only the basic principles of managing the Company, the implementation of this provision is not restrictive. Various detailed provisions contained in the Articles of Association, Shareholders Guidelines stipulated in the GMS, and various other legal provisions remain binding although not specifically described here.

The principles of good faith, full responsibility and fiduciary duties, skills and care inherent in the positions of the Board of Commissioners and Directors are general principles that must be respected by the Company's organs in charge of supervising and managing the Company.

The regulations that form the basis for the preparation of this Board Manual include:

- a. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).*
- b. *Law Number 8 of 1995 Concerning Capital Market (UUPM).*
- c. *Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
- d. *Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Governance Guidelines for Public Companies.*
- e. *Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 Concerning Governance Guidelines for Public Companies.*
- f. *Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0038685.A.H.01.02. Tahun 2020 concerning the Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Pinago Utama Tbk.*
- g. *Deed No. 7 Date June 04, 2020 Notary Fathiah Helmi, S.H., Concerning Minutes of Meeting concerning Amendments to the Overall Articles of Association of PT Pinago Utama Tbk.*
- h. *The Board of Commissioners, Section A. The Board of Commissioner Authority, The Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.*
- i. *Decree of the Commissioner of PT Pinago Utama Tbk No. 003/PU/SK-Kom/VI/2020 concerning the Audit Committee Charter of PT Pinago Utama Tbk.*
- j. *Decree of the Commissioner of PT Pinago Utama Tbk No. 004/PU/SK-Kom/VI/2020 concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Pinago Utama Tbk.*
- k. *Decree of the Board of Directors of PT Pinago Utama Tbk No. 002/SK-DIR/VII/2020 concerning the Appointment of a Corporate Secretary at PT Pinago Utama Tbk.*
- l. *Decree of the Board of Directors of PT Pinago Utama Tbk No. 005/SK-DIR/VI/2020 Regarding the Internal Audit Charter of PT Pinago Utama Tbk*



Tugas dan Kewajiban Komisaris Utama

The Board of Commissioners' Duties and Obligations

A. Tugas Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan Direksi dalam pengurusan Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu demi kepentingan Perseroan termasuk kepentingan Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya.

Dewan Komisaris harus selalu mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri serta membentuk komite-komite khusus.

Secara umum rincian tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Memberikan nasihat kepada Dewan Direksi;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris akan melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu.

B. Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Dewan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

A. The Board of Commissioners' Duties

In general, the Board of Commissioners has the task of supervising the policies and the actions of the Board of Directors in managing the Company and in providing advice to the Board of Directors if deemed necessary in the interest of the Company including the interests of the shareholders and stakeholders, generally. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors, in any condition, is capable of performing their duties.

The Board of Commissioners must always comply with the Articles of Association and applicable laws and regulations. In terms of being able to run the duties and the functions, the Board of Commissioners can apply independent professional advice and form special committees.

In general, the details of the duties of the Board of Commissioners are:

1. *Supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors;*
2. *Providing advice to the Board of Directors;*
3. *Supervising the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget of the Company as well as the provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as the prevailing laws and regulations, the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*

In carrying out its duties, the Board of Commissioners will undertake the division of them amongst each member of the Board of Commissioners to supervise certain fields, specifically.

B. Board of Commissioners' Obligations

In doing the duties the Board of Commissioners is obliged to:

1. *Providing advice to the Board of Directors in carrying out management of the Company;*
2. *Examining and examining and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;*

3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
6. Membentuk Komite Audit;
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

3. *Examining and studying periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report;*
4. *Providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if requested;*
5. *Preparing an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget;*
6. *Establishing an Audit Committee;*
7. *Proposing a Public Accountant to the GMS;*
8. *Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings and keep a copy thereof;*
9. *Reporting to the Company regarding its share ownership and/or its family in the Company and other Companies;*
10. *Providing reports on supervisory duties that have been carried out during the previous financial year to the GMS;*
11. *Carrying out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as it does not conflict with laws and regulations, the Articles of Association and/or the GMS Decision.*



Wewenang Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Authorities

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

On the basis of the Company's Articles of Association, the authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. *Scrutinising books, letters and other documents, examine cash for verification purposes, and other securities and examine the assets of the Company;*
2. *Entering the premises, buildings and offices used by the Company;*
3. *Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;*
4. *Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;*
5. *Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the meeting of the Board of Commissioners;*
6. *Appointing and dismissing the Secretary of the Board of Commissioners if deemed necessary;*
7. *Suspending members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company;*
8. *Establishing Committees other than the Audit Committee if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;*
9. *Using experts for certain matters and within a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary;*
10. *Taking action in managing the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations;*
11. *Attending the Board of Directors Meeting and provide views on matters being discussed;*
12. *Carrying out other supervisory powers as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association and/or the resolutions of the GMS.*

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Assignment Distribution

Dewan Komisaris mengatur pembagian tugas di antara masing-masing anggota Komisaris dengan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi tidak dilaksanakan secara individual anggota Komisaris kepada individual anggota Direksi, namun bersifat kolegial atau bersama-sama yang dibantu pelaksanaannya melalui peran dan fungsi setiap komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners regulates the division of tasks between each member of the Board of Commissioners with the assistance of the Secretary of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' oversight of the Board of Directors is not carried out individually by Commissioners to individual members of the Board of Directors, but is collegial or jointly assisted through the roles and functions of each committee under the Board of Commissioners.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Field of Assignments
Wilson Sutantio	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	- Memimpin rapat dewan komisaris - Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan - Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar - Membentuk komite nominasi dan remunerasi <i>Leading the board of commissioners meeting</i> <i>Providing advice to the Board of Directors in carrying out management of the Company</i> <i>Researching and examining and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of this Articles of Association.</i> <i>Establishing a nomination and remuneration committee</i>
Hasan Tantri	Komisaris <i>Commissioner</i>	- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan - Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta <i>Examining and studying periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report</i> <i>Providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested</i>
Chairul Muluk	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	- Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan - Membentuk Komite Audit - Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS. - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya <i>Preparing an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget</i> <i>Establishing an Audit Committee</i> <i>Proposing a Public Accountant to the GMS.</i> <i>Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings and keep a copy</i>



Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

The Board of Commissioners' Assignment Implementation Report 2020

Sepanjang tahun 2020, kegiatan Dewan Komisaris mencakup memberikan rekomendasi yang merupakan tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Secara garis besar, kegiatan Dewan Komisaris mencakup:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
6. Membentuk Komite Audit serta komite nominasi dan remunerasi
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris bersama komite-komite penunjangnya juga telah melaksanakan 4 (empat) kali kunjungan proyek guna memastikan bahwa seluruh prosedur dan tata kelola Perusahaan khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas serta manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Throughout 2020, the activities of the Board of Commissioners included providing recommendations which were a follow-up to the Board of Commissioners' Meeting with the Board of Directors. Broadly speaking, the activities of the Board of Commissioners include:

1. *Providing advice to the Board of Directors in carrying out management of the Company*
2. *Examining and studying and signs the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of this Articles of Association.*
3. *Examining and studying periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report*
4. *Providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested*
5. *Preparing an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget*
6. *Establishing an Audit Committee as well as a nomination and remuneration committee*
7. *Proposing a Public Accountant to the GMS*
8. *Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings and keep a copy*

During 2020, the Board of Commissioners and its supporting committees have also carried out 4 (four) project visits to ensure that all procedures and corporate governance, especially aspects of transparency and accountability and risk management, have been carried out, effectively and consistently.

Kunjungan Kerja Work Visit	Waktu Kunjungan Kerja Time of Work Visit
Kebun/Pabrik Farm/Factory	2 hari (29-30 Desember 2020) 2 days (December 29-30, 2020)
Kantor Operasional Operational Office	1 hari (28 April 2020) 1 day (April 28, 2020)
Kantor Operasional Operational Office	1 hari (14 Juli 2020) 1 day (July 14, 2020)
Kunjungan ke Kebun Visit to the Farm	2 hari (17-18 November 2020) 2 days (November 17-18, 2020)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Training and Competency Development

Informasi mengenai pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perusahaan selama tahun 2020 telah diungkapkan pada profil masing-masing Dewan Komisaris.

Information on training and development that was followed by the Company's Board of Commissioners during 2020 has been disclosed in each of Board of Commissioners' profile, respectively.

Direksi

The Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai maksud dan tujuannya, mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Posisi jabatan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.

The Board of Directors is the Company's organ that has the authority and is fully responsible for managing the Company in the best interests of the Company in accordance with its aims and objectives, representing the Company both inside and outside the court, ensuring that the Company carries out its social responsibilities, and paying attention to the interests of various stakeholders in accordance with regulations current regulation. The Board of Directors carries out their duties and make decisions in accordance with the division of tasks and authorities. The position of each member of the Board of Directors including the President Director is equivalent.

Kriteria Anggota Direksi

The Board of Directors' Criteria

PT Pinago Utama Tbk menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Dewan maupun anggota Direksi yang memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi yang sesuai kebutuhan. Kriteria Direksi Perusahaan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

PT Pinago Utama Tbk is thoroughly cognisant that Shareholders through the GMS have full authority to appoint the Board of Directors. However, to vouch for the members of the Board of Directors who have performed in line with the expectations of the Shareholders and the needs of the Company, the Company needs to arrange policies regarding the criteria for members of the Board of Directors that benefit their needs. The criteria for the Company's Board of Directors are as follows:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun, sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- a. Have good morals, morals and integrity.
- b. Able to take legal actions.
- c. Within 5 (five) years, before the appointment and during the term of office:
 - 1) Never been declared bankrupt
 - 2) Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt
 - 3) Never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and/or related to the financial sector
 - 4) Have never been a member of the Board of Directors and/or Commissioners who during the term of office:
 - i. Never held an annual GMS
 - ii. His/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS
 - iii. Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.



- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

- d. Having a commitment to comply with laws and regulations*
- e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company*

Kriteria Pengangkatan Anggota Direksi

The Board of Directors' Appointment Criteria

Perusahaan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

1. Integritas dan moral yang baik;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
6. Memiliki Pengalaman dengan rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan Perusahaan/Anak Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
7. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
8. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.

The Company possesses the criteria for candidate members of the Board of Commissioners referring to the Company's Articles of Association embracing:

- 1. Good integrity and morals;*
- 2. Physical and spiritual health;*
- 3. Able to conduct legal actions;*
- 4. Have never been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination;*
- 5. Have never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or Supervisory Board that was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;*
- 6. Have experience with a track record that shows the success in managing the Company/Subsidiary/Institution in which s/he works;*
- 7. Have sufficient knowledge in the business field of the Company.*
- 8. Have the ability to formulate and implement strategic policies in the framework of developing the Company.*

Komposisi Direksi

The Board of Directors' Composition

Susunan Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2020, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment
1	Bambang Palgoenadi	Direktur Utama <i>President Director</i>	Akte Notaris No. 7 tanggal 4 Juni Tahun 2020, Notaris Fatiah Helmi, S.H. <i>Notary Deed No. 7 dated June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H.</i>
2	Meli Tantri	Direktur Keuangan dan Komersial <i>Director of Finance and Commerce</i>	Akte Notaris No. 7 tanggal 4 Juni Tahun 2020, Notaris Fatiah Helmi, S.H. <i>Notary Deed No. 7 dated June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H.</i>
3	Raymon Wahab	Direktur Processing dan Industri <i>Director of Processing and Industry</i>	Akte Notaris No. 7 tanggal 4 Juni Tahun 2020, Notaris Fatiah Helmi, S.H. <i>Notary Deed No. 7 dated June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H.</i>
4	Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun <i>Director of Plantation</i>	Akte Notaris No. 7 tanggal 4 Juni Tahun 2020, Notaris Fatiah Helmi, S.H. <i>Notary Deed No. 7 dated June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H.</i>
5	Komaruzzaman	Direktur Umum <i>Director of General Affairs</i>	Akte Notaris No. 7 tanggal 4 Juni Tahun 2020, Notaris Fatiah Helmi, S.H. <i>Notary Deed No. 7 dated June 4, 2020, Notary Fatiah Helmi, S.H.</i>

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

The Board of Directors' Guideline and Code of Conducts

Direksi melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Perusahaan mengacu kepada Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*). Board Manual menjelaskan secara garis besar pola kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan sebagai wujud dari komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

The Board of Directors carries out the supervisory function of the Company's performance referring to the Directors' Working Guidelines (Manual Board). The Board Manual outlines the working patterns between the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Company as a manifestation of the Company's commitment to implement good Corporate Governance.

Board Manual tersebut tertuang dalam dokumen No. PU-CS-BDM.-Rev.01,2020 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pinago Utama Tbk.

The Board Manual is contained in document No. PU-CS-BDM.-Rev.01,2020 Regarding the Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PT Pinago Utama Tbk.



Tugas dan Wewenang Direksi

The Board of Directors' Duties and Authorities

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang meliputi:
 - a) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam ataupun di luar negeri.
 - b) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.
 - c) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan
 - e) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

The Board of Directors has the following duties and authorities:

1. *The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or Resolution of the GMS.*
2. *The Board of Directors has the authority to determine the management policies of the Company which include:*
 - a) *Arranging the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors specially appointed for this purpose or to a person or several employees of the Company either individually or collectively or to other people and arrange the transfer the power of the Board of Directors to represent the Company to Branch Heads or Heads of Representatives at home or abroad.*
 - b) *Regulating the provisions concerning the company's employment including the determination of the salary, pension, or old age security and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and the resolution of the GMS.*
 - c) *Appointing and dismissing employees of the Company based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations*
 - d) *Appointing and Dismissing the Corporate Secretary*
 - e) *Carrying out all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events with the restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.*

Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi

The Company's Policies Stipulation by the Board of Directors

Kebijakan Perusahaan dalam hal ini adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu di mana substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu aturan yang baku

Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat berupa suatu kebijakan yang diambil melalui konsensus antara seluruh atau sebagian besar anggota Direksi berkaitan dengan masalah pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, atau dapat pula merupakan kebijakan yang diambil secara individual tanpa adanya konsensus dimaksud.

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut dalam kegiatan sehari-hari maka prinsip-prinsip berikut ini dipatuhi oleh Direksi:

1. Komitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan ketentuan perusahaan yang berlaku.
2. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG: profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Bebas benturan kepentingan (*conflik of interest*).

The Company's policy is a decision or an action taken by the Board of Directors in carrying out, directing and controlling certain work activities or resolving a particular problem where the substance of the issue or work activity has not been regulated in a standard rule

Policies taken by the Board of Directors can be in the form of policies taken by consensus between all or most members of the Board of Directors relating to the management and management of the Company, or it can also be policies that are taken individually without the consensus.

To use and carry out these rights and obligations in daily activities, the following principles are adhered to by the Board of Directors:

1. *Commitment to always complying with laws and regulations, articles of association and applicable company regulations.*
2. *Implementing the principles of GCG: professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.*
3. *Free from conflicts of interest*

Hak dan Kewajiban Direksi

The Board of Directors' Rights and Obligations

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi berhak untuk:

1. Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan;
2. Mengatur ketentuan tentang kepagawaian perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan;
4. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan;
5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.

Sedangkan kewajiban Direksi meliputi:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

In doing the duties, the Board of Directors has the rights to:

1. *Representing the company inside and outside the court;*
2. *Regulating the provisions concerning the Company's independence;*
3. *Appointing and laying off company workers;*
4. *Appointing and dismiss the company secretary;*
5. *Carrying out all actions and deeds regarding the management of the perseron as stipulated in the rules of invitation, articles of association and resolutions of the GMS.*

Whereas the Board of Directors' obligations is as follows:

1. *Striving for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives as well as its business activities.*
2. *Preparing in due time the Company's Long-Term Work Plan, the Company's Work Plan and Budget, and amendments thereof and submit it to the Board of Commissioners for approval from the Board of Commissioners.*



3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
 4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi.
 5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
 6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
 7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
 8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
 9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana Anggaran Dasar.
 11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya.
 12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
 14. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.
 16. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan.
 17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. *Providing an explanation to the Board of Commissioners regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget.*
 4. *Making a List of Shareholders, a Special Register and Issues of the Board of Directors Meeting.*
 5. *Preparing an Annual Report as a form of responsibility for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents.*
 6. *Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to a Public Accountant for auditing.*
 7. *Submitting the Annual Report including the Financial Report to the GMS for approval and ratification.*
 8. *Providing an explanation to the GMS regarding the Annual Report.*
 9. *Submitting the Balance Sheet and Profit and Loss Statement approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations.*
 10. *Maintaining a Register of Shareholders, a Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Annual Reports and financial documents of the Company as per the Articles of Association.*
 11. *Keeping at the domicile of the Company: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Annual Reports and financial documents of the Company, as well as other Company documents.*
 12. *Preparing an accounting system in accordance with financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the separation of management, recording, storage and supervision functions.*
 13. *Providing periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners.*
 14. *Preparing the complete organizational structure of the Company with details and duties.*
 15. *Providing an explanation of everything that is asked or requested by the members of the Board of Commissioners.*
 16. *Compiling and determining the organizational structure of the Company.*
 17. *Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association and those stipulated by the GMS based on the laws and regulations.*

Pembagian Tugas Direksi

The Board of Directors' Assignment Distribution

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Field of Assignment
Bambang Palgoenadi	Direktur Utama President Director	Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Perseroan. Responsible for all activities of the Company.
Meli Tantri	Direktur Keuangan dan Komersial Director of Finance and Commerce	Bertanggung jawab atas aktivitas keuangan dan komersial. Responsible for financial and commercial activities.
Raymon Wahab	Direktur Processing dan Industri Director of Processing and Industry	Bertanggung jawab atas operasional processing dan industri. Responsible for processing and industrial operations.
Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun Director of Plantation	Bertanggung jawab atas operasional kebun. Responsible for plantation operations.
Komaruzzaman	Direktur Umum Director of General Affairs	Bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan umum. Responsible for human resources and general affairs.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020

Report on the Implementation of Directors' Duties in 2020

Terkait pelaksanaan tugas di tahun 2020, Direksi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Direksi setiap bulan
2. Kunjungan lapangan
3. Seminar/pertemuan dengan asosiasi (GAPKI, GAPKINDO dan Pemerintahan)
4. Rapat Direksi dengan Komisaris dan Pemegang Saham.

Regarding the implementation of duties in 2020, the Board of Directors carry out the following activities:

1. *Board of Directors Meeting every month*
2. *Field visits*
3. *Seminars/meetings with associations (GAPKI, GAPKINDO and Government)*
4. *Meetings of the Board of Directors with the Commissioners and Shareholders.*

Program Orientasi Direksi

The Board of Directors' Orientation Program

Agar Direksi Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan organ Perusahaan yang lain, maka bagi anggota Direksi yang baru diangkat akan diberikan Program Pengenalan. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, kunjungan ke cabang-cabang atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang lain yang ditunjuk.

In terms of having the Company's Board of Directors been able to always work in harmony with other Company organs, then newly appointed members of the Board of Directors will be given an Introductory Program. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to branches, or other programs. The responsibility for conducting the introduction program rests with the President Director. If the President Director is absent, then the responsibility for implementing the introduction program rests with the President Commissioner or other appointed members of the Board of Directors.



Perusahaan memiliki program pengenalan untuk anggota Direksi yang baru yang bertujuan agar dapat membantu Direksi dalam hal penerapan GCG, peningkatan kinerja, pemahaman visi, misi, dan strategi usaha Perusahaan. Tanggung jawab terhadap program pengenalan ini berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan dapat dilakukan oleh anggota Direksi lainnya. Implementasi Program tersebut dilaksanakan melalui presentasi, pertemuan, dan kunjungan kerja ke fasilitas Perusahaan.

The Company has an introduction program for new members of the Board of Directors whose aim is to be able to assist the Board of Directors in implementing GCG, improving performance, understanding the Company's vision, mission and business strategy. The responsibility for this introduction program is with the President Director or if the President Director is unable to be carried out by other members of the Board of Directors. Implementation of the Program is carried out through presentations, meetings and work visits to the Company's facility.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

The Board of Directors' Competence Training and Development

Informasi mengenai pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh Direksi Perusahaan selama tahun 2020 telah diungkapkan pada profil masing-masing Direksi.

Information on training and development that was followed by the Company's Board of Directors during 2020 has been disclosed in each of Board of Directors' profile, respectively.

Etika Jabatan

Ethics in Position

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Direksi berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Profesionalisme
2. Efisiensi
3. Transparansi
4. Kemandirian
5. Akuntabilitas
6. Pertanggungjawaban
7. Kewajaran

In performing the duties and functions, the Board of Directors adheres to the following principles, such as:

1. Professionalism
2. Efficiency
3. Transparency
4. Independence
5. Accountability
6. Responsibility
7. Fairness

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and Directors' Performance Assessment

Penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui *self-assessment*. Hasil *self-assessment* untuk kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2020 akan dilaporkan pada periode tahun buku 2021. Adapun kriteria penilaian yang digunakan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is undertaken through self-assessment. The results of self-assessment for the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 will then be reported in the fiscal year 2021. The assessment criteria utilised refer to the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated on November 17, 2015, concerning Governance Guidelines for Public Companies.

Proses Pelaksanaan Penilaian

Assessment Process

Terkait penilaian kinerja Direksi, pada setiap akhir tahun dan awal tahun buku, Direksi membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dilengkapi dengan Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang harus dicapai. Kemudian, Direksi bersama dengan Dewan Komisaris mengesahkan dan menandatangani Kontrak Manajemen yang di dalamnya terdapat RKAP beserta KPI Perusahaan. Dewan Komisaris kemudian melakukan penilaian atas kinerja manajemen berdasarkan pencapaian KPI/target serta berdasarkan indikator yang digunakan oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian Dewan Komisaris atas kinerja manajemen selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat usulan pemberian remunerasi dan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Regarding the performance evaluation of the Board of Directors, at the end of each year and the beginning of the financial year, the Board of Directors creates and submits the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which is equipped with Key Performance Indicators (KPI) that must be achieved. Then, the Board of Directors together with the Board of Commissioners ratifies and signs the Management Contract which includes the Work and Plan Budget along with the Company's KPI. The Board of Commissioners then evaluates management performance based on KPI/target achievement and based on indicators used by the Board of Commissioners. The results of the Board of Commissioners' assessment of management's performance are then used as a basis for making proposals for providing remuneration and bonuses to the Directors and Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders.

Sedangkan penilaian kinerja Dewan Komisaris selain melalui *self-assessment* juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan pada saat RUPS. Pelaksanaan RUPS pertanggungjawaban laporan tahun buku membahas jalannya Perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang selanjutnya menyatakan serta memberikan pembebasan sepenuhnya pertanggungjawaban (*acquitted et decharge*) kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk operasional tahun buku.

*While the assessment of the performance of the Board of Commissioners other than through self-assessment is also carried out at the time of the accountability of the annual report at the AGM. The implementation of the GMS for the accountability of the financial year report discusses the course of the Company and the results achieved during the financial year which further states and provides full release of liability (*acquitted et decharge*) to the Board of Commissioners of the Company for the operational year.*



Kriteria/Indikator Kinerja Performance Criteria/Indicators

RUPS menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan, pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan yang tercantum dalam *Board Manual*, kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Evaluasi kepribadian
2. Evaluasi kompetensi
3. Evaluasi kinerja komite-komite Dewan Komisaris
4. Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab dan proses kerja Dewan Komisaris
5. Efektivitas rapat
6. Evaluasi diri dan rekan sejawat
7. Evaluasi oleh Direktur Utama (mewakili Direksi)

Sedangkan indikator kinerja yang dipakai sebagai tolak ukur penilaian kinerja Direksi seperti yang tercantum dalam *Board Manual*, antara lain meliputi:

1. Kinerja keuangan
2. Kepuasan mitra kerja/pelanggan
3. Tata kelola dan kepatuhan
4. Perbaikan proses
5. Pengelolaan SDM

The GMS establishes the performance criteria of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners. Criteria for assessing the performance of the Board of Commissioners include the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function of the Company's road management policies, giving advice to the Board of Directors for the interests and objectives of the Company, and implementing tasks specifically given to them according to the Articles of Association and/or based on decisions GMS in the corridor of applicable legislation.

Based on what is stated in the Board Manual, the evaluation criteria for individual performance of the Board of Commissioners include:

1. *Personality evaluation*
2. *Competence evaluation*
3. *Evaluating the performance of the Board of Commissioners committee committees*
4. *Effectiveness of the responsibilities and work processes implementation of the Board of Commissioners*
5. *Effectiveness of meetings*
6. *Self and peer evaluation*
7. *Evaluation by the President Director (representing the Board of Directors)*

While the performance indicators that are used as a benchmark for evaluating the performance of the Board of Directors as listed in the Board Manual include:

1. *Financial performance*
2. *Partner/customer satisfaction*
3. *Governance and compliance*
4. *Process improvement*
5. *HC management*

Pihak yang Melaksanakan Penilaian

Party Conducting the Assessment

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI Direksi sebagaimana uraian di atas. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode tahun buku, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun mendatang.

The party that evaluates the performance of the Board of Commissioners is the GMS, while the assessment of the performance of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners and the GMS. In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Directors KPI indicator as described above. The Board of Commissioners and Directors account for their performance achievements in the financial year period, including the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors in the GMS that will be held in the coming year.

Hasil Self-Assessment Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Result of the Board of Commissioners' Performance Self-Assessment in 2020

No.	Aspek Aspect	Penilaian Score
1.	Program pelatihan/pembelajaran Training/learning program	Cukup Baik Fair
2.	Pembagian tugas dan wewenang di antara Dewan Komisaris Division of duties and authorities among the Board of Commissioners	Baik Good
3.	Persetujuan RJPP dan RKAP The agreement of RJPP and RKAP	Baik Good
4.	Fungsi pemberian arahan pada Direksi The function of giving direction to the Board of Directors	Sangat Baik Excellent
5.	Fungsi pengawasan (termasuk Audit) Supervision function (including Audit)	Baik Good
Rata-rata Average		Baik Good

Hasil Self-Assessment Kinerja Direksi Tahun 2020

Result of the Board of Directors' Performance Self-Assessment in 2020

No.	Aspek Aspects	Nilai Score
1.	Kinerja Produk dan Proses Performance of Product and Process	
1.	Produksi TBS TBS Production	68,30
2.	Produksi Latex Latex Production	71,82
3.	Produksi CPO CPO Production	64,33



No.	Aspek Aspects	Nilai Score
4.	Produksi Kernel <i>Kernel Production</i>	58,90
5.	Produksi SIR <i>SIR Production</i>	76,44
6.	Produksi RSS <i>RSS Production</i>	69,86
2.	Kinerja Fokus Pelanggan Performance Customer Focus	
7.	<i>Customer Satisfaction Index</i>	88,75
3.	Kinerja Keuangan dan Pasar Financial and Market Performance	
8.	Penjualan <i>Sale</i>	79,11
9.	Laba Bersih <i>Net Profit</i>	95,29
4.	Kinerja Fokus Tenaga Kerja Workforce Focus Performance	
10.	Tingkat kepuasan Karyawan <i>Employee satisfaction level</i>	76
11.	Angka kecelakaan kerja (<i>fatality</i>) <i>Work accident rate (fatality)</i>	100
12.	Pencapaian sertifikasi <i>Achievement of certification</i>	100
5.	Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership Performance and Governance	
13.	GCG Level	75,93
	Rata Rata Average	78,36

Indikator Pengukuran Kinerja Utama untuk Mengukur Kinerja Direksi Tahun 2020 Berdasarkan RKAP 2020

Key Performance Measurement Indicators for Measuring The Board of Directors' Performance in 2020 Based on the Company's Work Plan & Budget 2020

Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Satuan Unit	RKAP 2020 Company's Work Plan & Budget in 2020		
		Rencana Plan	Realisasi Realization	Capaian Achievement
1. Kinerja Produk dan Proses Product and Process Performance				
1. Produksi TBS TBS Production	Ton Ton	184.193	135.386	73.50%
2. Produksi Latex Latex Production	Kilo liter	9.965	7.157	71.82%
3. Produksi CPO CPO Production	Ton	114.167	73.441	64.33%
4. Produksi Kernel Kernel Production	Ton	26.098	15.371	58.90%
5. Produksi SIR SIR Production	Ton	49.000	37.457	76.44%
6. Produksi RSS RSS Production	Ton	3.062	2.139	69.86%
2. Kinerja Fokus Pelanggan Customer Focus Performance				
7. Customer Satisfaction Index	Indeks Index	10	8.87	88.75%
3. Kinerja Keuangan dan Pasar Financial and Market Performance				
8. Penjualan Sale	Miliar Rp Rp billion	1.910	1.511	79.11%
9. Laba Bersih Net Profit	Miliar Rp Rp billion	85	81	95.29%
4. Kinerja Fokus Tenaga Kerja Workforce Focus Performance				
10. Tingkat kepuasan Karyawan Employee satisfaction level	%	5	3.8	76.00%
11. Angka kecelakaan kerja (fatality) Work accident rate (fatality)	M/org M/person	0	0	100.00%
12. Pencapaian sertifikasi Achievement of certification		14	14	100.00%
5. Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance Performance				
13. GCG Level	Skor Score	100.00	75.93	75.93%



Penilaian atas Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners' Supporting Committees

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif dengan periode setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris menjadi bahan penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya. Penilaian antara lain meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif sesama anggota Komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan rencana strategis perusahaan, serta kualitas atas saran/rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

The evaluation of the performance of the members of the Committees under the Board of Commissioners is carried out both individually and collectively with a self-assessment period of 1 (one) year using the evaluation method in a system determined by the Board of Commissioners. The results of the performance evaluation of the members of the Committees under the Board of Commissioners are subject to evaluation for the extension of the working period of members of the Committees under the Board of Commissioners for the following year. Assessments include attendance at meetings, the ability to work together and actively communicate with other members of the Committee, integrity, the ability to understand the vision and mission and the company's strategic plans, and the quality of advice/recommendations related to the work programs of each Committee under the Board Commissioner.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Penyusunan kebijakan dan usulan remunerasi yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi & Remunerasi. Rekomendasi remunerasi tersebut kemudian diteruskan pada Dewan Komisaris untuk dibahas dan dianalisis lalu diajukan dalam RUPS.

Preparation of policies and proposed remuneration carried out by the Nomination & Remuneration Committee. The remuneration recommendations are then forwarded to the Board of Commissioners to be discussed and analysed and then submitted at the GMS.

Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja Perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.

Determination of income in the form of salary or honorarium, allowances, and facilities that are permanent is carried out by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the company and other relevant factors and may not conflict with laws and regulations. Determination of income in the form of tantiem/variable performance incentives (merit rating) is carried out by considering the Company's performance factors and other relevant factors.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, komponen penghasilan Dewan Komisaris pada umumnya terdiri dari:

Based on the applicable laws and regulations concerning the determination of income of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the component of income of the Board of Commissioners generally consists of:

1. Honorarium/Gaji
2. Tunjangan
3. Tantiem/Bonus

1. Honorarium/Salary
2. Allowances
3. Tantieme/Bonus

Struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in the past three years are as follows:

(dalam Rupiah/in Rupiah)

Jabatan Position	31 Desember December 31		
	2020	2019	2018
Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>	Rp2.800.000.000	Rp6.600.000.000	Rp5.600.000.000
Direksi <i>The Board of Directors</i>	Rp19.700.000.000	Rp17.000.000.000	Rp14.000.000.000

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and Directors Meetings

Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Meeting

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

The Meeting of the Board of Commissioners is a meeting held by the Board of Commissioners. The meeting is based on the following basic principles:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat 1 kali dalam 2 bulan.
2. Dewan Komsiaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan/tempat kegiatan usaha/tempat kedudukan bursa efek.
4. Rapat dipimpin Komisaris Utama.
5. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani seluruh peserta rapat dan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

1. *The Board of Commissioners must hold a meeting once every 2 months.*
2. *The Board of Commissioners shall hold regular meetings with the Board of Directors at least once every 4 months.*
3. *The meeting is held at the domicile of the Company/place of business activity/domicile of the stock exchange.*
4. *The meeting is chaired by the President Commissioner.*
5. *The results of the meeting are set forth in the minutes of the meeting which are signed by all meeting participants and must be documented by the Company.*



Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat *Attendance Level and Meeting Agenda*

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali untuk membahas kinerja Perusahaan. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Throughout 2020, the Board of Commissioners has conducted 5 (five) times internal meetings of the Board of Commissioners to discuss the Company's performance. The frequency and level of attendance at the Board of Commissioners' Meetings are as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners' Meeting in 2020

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Percentage
Wilson Sutantio	5	5	100%
Hasan Tantri	5	5	100%
Chairul Muluk	5	5	100%

Berikut ini adalah risalah dan daftar Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2020:

Following are the minutes and lists of the Board of Commissioners present at the internal meetings of the Board of Commissioners held throughout the 2020 financial year:

Agenda Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
28 April 2020 April 28, 2020	Percepatan penyelesaian permasalahan Perusahaan <i>Accelerating resolution of the Company's issues</i>	Wilson Sutantio Hasan Tantri Chairul Muluk Charles Sutantio Peter Unggul Sutantio Khaidir Amypalupy Kartadjaja Intan
14 Juli 2020 July 14, 2020	Evaluasi semester pertama dan proyeksi semester kedua <i>First semester evaluation and second semester projections</i>	Wilson Sutantio Hasan Tantri Chairul Muluk Charles Sutantio Peter Unggul Sutantio Khaidir Amypalupy Kartadjaja Intan
5 November 2020 November 5, 2020	Laporan Komite Audit triwulan III 2020 <i>Audit Committee Report for Quarter III 2020</i>	Wilson Sutantio Hasan Tantri Chairul Muluk
27 November 2020 November 27, 2020	Hasil kunjungan kerja Komisaris Utama <i>The results of the President Commissioner work visit</i>	Wilson Sutantio Hasan Tantri Chairul Muluk
29 Desember 2020 December 29, 2020	Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 <i>The Approval of the 2021 Company's Work Plan and Budget (RKAP)</i>	Wilson Sutantio Hasan Tantri Chairul Muluk

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

The Evaluation Performance of the Board of the Commissioners

Kinerja Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT Pinago Utama Tbk maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Program pelatihan/pembelajaran
2. Pembagian tugas dan wewenang di antara dewan komisaris
3. Persetujuan RJPP dan RKAP
4. Fungsi pemberian arahan pada Direksi
5. Fungsi pengawasan (termasuk Audit)
6. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris secara rutin melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah dan komposisi anggotanya. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan masukan kepada Pemegang Saham.

The performance of the Board of Commissioners will be annually evaluated by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Regularly, the performance of the Board of Commissioners is circumscribed based on the duties declared in the relevant laws and regulations and the Articles of Association of PT Pinago Utama Tbk and the mandate of the Shareholders. The precise evaluation criteria are readily communicated to the Board of Commissioners since their appointment.

The results of the evaluation of the overall performance of the Board of Commissioners and the performance of each member of the Board of Commissioners individually will form an indivisible part in the compensation plot and the prerequisite of incentives for the Board of Commissioners. The consequences of the performance evaluation of each member of the Board of Commissioners individually is one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or to reappoint the relevant member of the Board of Commissioners. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners both as a Board and individuals are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

The General Meeting of Shareholders determines the performance criteria of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners. The evaluation criteria for the individual performance of the Board of Commissioners include:

1. *Training/learning program*
2. *The division of duties and authorities among the board of commissioners*
3. *Approval of RJPP and RKAP*
4. *The function of providing direction to the Board of Directors*
5. *Supervision function (including Audit)*
6. *Nomination and Remuneration Function*

To extend the effectiveness of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners routinely evaluates the needs of the number and composition of its members. The results of the evaluation are employed as input for the Shareholders.



Rapat Direksi

The Board of Directors' Meeting

Kebijakan tentang Frekuensi Rapat

Policy on Meeting Frequency

Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali atau setiap waktu bila diperlukan. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Direksi atau yang mewakili secara sah dalam rapat tersebut. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Aturan pengambilan keputusan lainnya pada Rapat Direksi pada dasarnya sama dengan aturan pada Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan.

Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan rapat 1 kali dalam 1 bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Komsiaris secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan/tempat kegiatan usaha/tempat kedudukan bursa efek.
4. Rapat dipimpin Direktur Utama
5. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani seluruh peserta rapat dan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Directors' meetings are held regularly at least once a month or at any time if needed. Meetings of the Board of Directors are legitimate and have the right to make binding decisions only if they are attended by at least 1/2 (half) of the total members of the Board of Directors or who represent legally at the meeting. Decisions of Directors' meetings must be based on deliberation to reach consensus. If this is not achieved, then the decision taken based on the agreed vote is more than 1/2 (half) of the number of valid votes issued at the meeting. Each member of the Board of Directors has the right to issue 1 (one) vote. Other decision-making rules at the Board of Directors Meeting are basically the same as the rules at the Board of Commissioners Meeting.

The Board of Directors' Meeting is a meeting held by the Directors to perform numerous business decisions, to evaluate the performance of the Company, and to hover multiple policies in the management of the Company.

The Board of Directors meeting is based on the following principles, such as:

1. *The Board of Directors must hold a meeting once a month.*
2. *The Board of Directors is obliged to hold a joint meeting with the Commissioner regularly at least once every 4 months*
3. *The meeting is held at the domicile of the Company/place of business activity/domicile of the stock exchange*
4. *The meeting is chaired by the President Director*
5. *The results of the meeting are set forth in the minutes of the meeting which are signed by all meeting participants and must be documented by the Company.*

Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat

Attendance Level and Meeting Agenda

Selama tahun 2020, rapat Direksi diselenggarakan sebanyak 14 (empat belas) kali untuk membahas berbagai masalah pengelolaan Perusahaan. Adapun rincian frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi adalah sebagai berikut:

During 2020, the Board of Directors' meetings were held 14 (fourteen) times to discuss various problems in managing the Company. The details of the frequency of meetings and the attendance level of members of the Board of Directors in the Board of Directors meeting are as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Frequency and Attendance Level of the Board of Directors' Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Percentage
Bambang Palgoenadi	Direktur Utama President Director	14	14	100%
Meli Tantri	Direktur Keuangan dan Komersial Director of Finance and Commerce	14	14	100%
Raymon Wahab	Direktur Processing dan Industri Director of Processing and Industry	14	14	100%
Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun Director of Plantation	14	14	100%
Komaruzzaman	Direktur Umum Director of General Affairs	14	14	100%

Di bawah ini adalah risalah dan daftar anggota Direksi yang hadir dalam rapat internal Direksi yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2020:

Below is the minutes and list of members of the Board of Directors present at the Board of Directors internal meetings held throughout the 2020 financial year:

Agenda Rapat Direksi

The Board of Directors' Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
6 Januari 2020 January 6, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
20 Januari 2020 January 20, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
10 Februari 2020 February 10, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
24 Februari 2020 February 24, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
3 Maret 2020 March 3, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
30 Maret 2020 March 30, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
27 April 2020 April 27, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
14 Mei 2020 May 14, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
8 Juni 2020 June 8, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5



Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
12 Agustus 2020 August 12, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
24 September 2020 September 24, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
13 Oktober 2020 October 13, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
23 November 2020 November 23, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5
16 Desember 2020 December 16, 2020	EVALUASI KINERJA Bulanan dll PERFORMANCE EVALUATION Monthly etc.	5

Evaluasi Kinerja Direksi

The Board of Directors' Performance Evaluation

Kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Kontrak Manajemen, tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan serta amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian skema kompensasi bagi Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi baik selaku Dewan maupun individu juga merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:

1. Kinerja Produk dan Proses
2. Kinerja Fokus Pelanggan
3. Kinerja Keuangan dan Pasar
4. Kinerja Fokus Tenaga Kerja
5. Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola

The performance of the Board of Directors and members of the Directors will be evaluated annually by the Shareholders at the GMS.

In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the performance targets stated in the Management Contract, the duty obligations stated in the applicable legislation and the Company's Articles of Association and the mandate of the Shareholders. Legal evaluation criteria are openly communicated to the Board of Directors since their appointment.

The results of evaluations of the overall performance of the Directors and the performance of each member of the Board of Directors are an integral part of the provision of compensation schemes for the Directors. The results of the performance evaluation of each member of the Board of Directors is one basis for consideration for Shareholders to dismiss and/or reappoint the relevant member of the Board of Directors. The results of evaluating the performance of the Directors both as a Board and individuals are also a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Directors.

The GMS sets the performance criteria of the Directors and individual members of the Board of Directors. Criteria for evaluating the performance of individual members of the Board of Directors include:

1. *Product and Process Performance*
2. *Customer Focused Performance*
3. *Financial and Market Performance*
4. *Workforce Focus Performance*
5. *Leadership Performance and Governance*



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat

Attendance Level and Meeting Agenda

Setelah penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bersama Direksi juga mengadakan rapat gabungan dengan agenda, jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

After having held the Board of Commissioners meetings, the Board of Commissioners and the Board of Directors also hold joint meetings with the agenda, number of meetings, and attendance levels of each member of the Board of Commissioners and Directors as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>			
Wilson Sutantio	4	4	100%
Hasan Tantri	4	4	100%
Chairul Muluk	4	4	100%
Direksi <i>The Board of Directors</i>			
Bambang Palgoenadi	4	4	100%
Meli Tantri	4	4	100%
Raymon Wahab	4	4	100%
Thomas Valian Christanto	4	4	100%
Komaruzzaman	4	4	100%

Di bawah ini adalah risalah dan daftar anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat gabungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020:

Below are the minutes and lists of members of the Board of Commissioners and Directors who attended the joint meeting held throughout 2020:

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
28 April 2020 <i>April 28, 2020</i>	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN PER TRIWULAN <i>QUARTERLY PERFORMANCE EVALUATION</i>	8
14 Juli 2020 <i>July 14, 2020</i>	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN PER TRIWULAN <i>QUARTERLY PERFORMANCE EVALUATION</i>	8
5 November 2020 <i>November 5, 2020</i>	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN PER TRIWULAN <i>QUARTERLY PERFORMANCE EVALUATION</i>	8
29 Desember 2020 <i>December 29, 2020</i>	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN PER TRIWULAN <i>QUARTERLY PERFORMANCE EVALUATION</i>	8

Risalah Rapat

Minutes of Meetings

Keputusan rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Risalah tersebut didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang menghadiri rapat maupun yang tidak. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut turut dicantumkan dalam risalah rapat disertai dengan alasan di balik perbedaan pendapat.

The decision of the meeting is recorded and documented properly in the minutes of the meeting signed by the chairman of the meeting and one of the members of the Board of Commissioners. The minutes were distributed to all members of the Board of Commissioners, both those who attended the meeting and those who did not. In the event that there are differences of opinion, these matters are also included in the minutes of the meeting accompanied by the reasons behind differences of opinion.

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information about Major and Controlling Shareholders

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan telah diungkapkan pada bab Profil Perusahaan bagian Struktur dan Komposisi Pemegang Saham.

Information about the Company's main and controlling shareholders has been disclosed in the Company Profile chapter in the Shareholders Structure and Composition section.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Affiliation of the Board of Commissioners and Directors with Major and Controlling Shareholders

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Dalam kepengurusan Perusahaan, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali; dan pada saat yang sama, semua anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi. Dengan kondisi tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Financial Relationship and Family Members of the Board of Commissioners

In the management of the Company, there are no members of the Board of Commissioners who have family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders. In addition, the majority of the members of the Board of Commissioners do not have mutual financial relationships with the controlling shareholders; and at the same time, all members of the Board of Commissioners also do not have financial relations with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. Under these conditions, members of the Board of Commissioners can act independently in carrying out their duties and responsibilities.



Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Wilson Sutantio	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√
Hasan Tantri	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√
Chairul Muluk	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Direksi

Financial Relationship and Family Members of the Board of Directors

Hubungan keluarga dan keuangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat melalui tabel berikut:

The family and financial relationships of the Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders could be seen through the following table:

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bambang Palgoenadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Meli Tantri	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√
Raymon Wahab	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√
Thomas Valian Christanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Komaruzzaman	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees Under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite-Komite yang berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Komite-Komite yang dapat dibentuk tersebut berupa Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite-Komite tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

1. Komite Audit

Berfungsi membantu terbentuknya pengawasan internal yang memadai, meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan penugasan auditor eksternal meliputi dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa audit, pengalaman, independensi serta objektivitas. Selain itu Komite Audit juga bertanggung jawab mempersiapkan pernyataan yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh auditor eksternal, di mana surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

In doing daily duties under the principles of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners can form Committees that help as a supporting means for the supervisory function of the Board of Commissioners.

The committees include Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The endowment of the Committees is customised to the conditions and needs of the Company.

1. Audit Committee

Functioning to help strengthen the establishment of sufficient internal supervision, progressing openness in financial reporting, assessing the scope and accuracy of the assignment of external auditors (including and not limited to the fairness of audit service costs, experience, independence and objectivity). Forby, the Audit Committee is further responsible for equipping statements that outline the duties and responsibilities of the Committee during the financial year being reviewed by the external auditors, where the letter must be involved in the annual report submitted to the Shareholders.

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as stipulated in FSA's Regulation No. 55/2015 which regulates the following matters:

- 1) *Reviewing the financial information that will be issued by the Company or Public Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information.*
- 2) *Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities.*
- 3) *Providing independent opinion in the event of disagreements between management and accountants for the services they purvey.*
- 4) *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope, assignment and fees.*
- 5) *Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-ups by the Board of Directors on the findings of the internal auditors.*



- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3) Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Peraturan OJK No. 21/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite

- 6) *Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.*
- 7) *Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Company or Public Company.*
- 8) *Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company or Public Company.*
- 9) *Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.*

In carrying out its duties the Audit Committee has the following powers:

- 1) *Accessing documents, data and information of the Company or Public Company regarding employees, funds, assets and sources of company data required.*
- 2) *Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the internal audit function (Internal Audit Unit), risk management and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.*
- 3) *If necessary, with the approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may employ independent experts outside the members of the Audit Committee to assist in carrying out its duties.*
- 4) *Performing other powers assigned by the Board of Commissioners.*

2. Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting in carrying out the functions and duties of the Board of Commissioners related to the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

The Company has formed a Nomination and Remuneration Committee and Guidelines for the Company's Nomination and Remuneration Committees in accordance with FSA's Regulation No. 34/2014 and FSA's Regulation No. 21/2015, the Company hereby decides to form a Nomination and Remuneration Committee based on the Circular Decree of the Board of Commissioners as a Substitute for the Meeting of the Board of Commissioners of PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 dated on

Nominasi dan Remunerasi dan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
- 7) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

June 8, 2020, concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee and has had the Nomination and Remuneration Committee Charter dated on June 8, 2020. The term of office of the members of the Nomination and Remuneration Committee is 3 (three) years and not may be longer than the term of office of the Company's Board of Commissioners.

The duties and powers of the Nomination and Remuneration Committee include:

- 1) *The Nomination and Remuneration Committee is obliged to act independently in carrying out its duties.*
- 2) *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
 - b. *Policies and criteria required in the Nomination process; and*
 - c. *Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
- 3) *Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials.*
- 4) *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
- 5) *Providing proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
- 6) *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration Structure;*
 - b. *Remuneration Policy; and*
 - c. *Amount of Remuneration;*
- 7) *Assist the Board of Commissioners in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*



Susunan Komite Audit

Audit Committee Composition

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015 dan Peraturan OJK No. 21/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 005/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite Audit, dan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Komite Audit 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun susunan Komite Audit sebagai berikut ini:

In order to comply with the provisions of OJK Regulation No. 55/2015 and OJK Regulation No. 21/2015, the Company hereby decides to form the Company's Audit Committee based on the Circular Decree of the Board of Commissioners as a Substitute for the Meeting of the Board of Commissioners of PT Pinago Utama Tbk No. 005/PU/SK-KOM/VI/2020 dated on June 8, 2020, concerning the Appointment of the Audit Committee, and has had an Audit Committee Charter dated June 8, 2020. The term of office of members of the Audit Committee is 3 (three) years and may not be longer than the term of office of the Board Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for the next 1 (one) period.

Jabatan Position	Nama Name	Periode Period
Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan) <i>Chairman (concurrently as an Independent Commissioner of the Company)</i>	Chairul Muluk	2020-2023
Anggota <i>Member</i>	Andiek Nugroho	2020-2023
Anggota <i>Member</i>	Dedik Budianta	2020-2023

Profil Komite Audit

Audit Committee's Profile

Ketua Komite Audit

Chairman of Audit Committee

Chairul Muluk

Profil Bapak Chairul Muluk dapat dilihat pada bagian penjelasan Profil Dewan Komisaris di Bab Laporan Manajemen.

Chairul Muluk

The profile of Mr. Chairul Muluk can be viewed in the elucidation part of the Board of Commissioners' Profile in Management Report Chapter.

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

Andiek Nugroho



Warga Negara Indonesia, lahir di Balikpapan, umur 46 tahun. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2020. Beliau memperoleh gelar *Master of Accounting*, dari Universitas Trisakti, Kota Jakarta (2014).

Beliau memulai karir sebagai Senior Akuntan di PT Newmont (1999-2004), Senior Akuntan di KAP Kanaka Robert Yogi dan Rekan (2004-2007), Senior Akuntan di KAP Paul Hadiwinata dan Rekan (2007-2009), *Manager* di KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan (2009-2010), *Associate Partner* di KAP Anwar dan Rekan (2010-2019), *Partner* di KAP Heriantoro dan Rekan (2020-sekarang). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Komite Audit (Juni 2020-sekarang).

Indonesian citizen, born in Balikpapan, 46 years of age. He has served as a Member of the Company's Audit Committee since June 2020. He obtained a Master of Accounting degree, from Trisakti University, Kota Jakarta (2014).

He started his career as a Senior Accountant at PT Newmont (1999-2004), Senior Accountant at KAP Kanaka Robert Yogi dan Rekan (2004-2007), Senior Accountant at KAP Paul Hadiwinata and Rekan (2007-2009), Manager at KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan (2009-2010), Associate Partner at KAP Anwar dan Rekan (2010-2019), Partner at KAP Heriantoro dan Rekan (2020-present). Then he joined the Company as the Audit Committee (June 2020-present).



Dedik Budianta



Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo, Yogyakarta, umur 57 tahun. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2020. Beliau memperoleh gelar Doktor (Ph.D), jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Ghent, Kota Belgium (1999), gelar pasca sarjana, jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta kerjasama dengan Universitas Ghent, Kota Belgium (1992), dan gelar sarjana, jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta (1988).

Beliau memulai karir sebagai Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya (1999-2003), Senat Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya (1999-2003 dan 2008-sekarang), Kepala Laboratorium Kimia, Biologi dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya (2009-sekarang). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Komite Audit (Juni 2020-sekarang).

Indonesian citizen, born in Kulon Progo, Yogyakarta, 57 years of age. He has served as a Member of the Company's Audit Committee since June 2020. He obtained a Doctoral degree, majoring in Soil Science from Ghent University, City of Belgium (1999), a postgraduate degree, majoring in Soil Science from Gadjah Mada University, Yogyakarta in collaboration with Ghent University, City of Belgium (1992), and a bachelor's degree, majoring in Soil Science from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1988).

He started his career as Head of the Department of Soil, Faculty of Agriculture at Sriwijaya University (1999-2003), Senate of the Faculty of Agriculture at Sriwijaya University (1999-2003 and 2008-present), Head of the Laboratory of Chemistry, Biology and Soil Fertility, Faculty of Agriculture at Sriwijaya University (2009- now). Then he joined the Company as the Audit Committee (June 2020-present).

Dalam menjalankan karirnya, beliau sering mendapatkan penghargaan seperti Satya Lencana Karya Satya (Pengabdian 20 tahun) dari Presiden Republik Indonesia (2010), Satya Lencana Karya Satya (Pengabdian 10 tahun) dari Presiden Republik Indonesia (2002).

In carrying out his career, he often received awards such as Satya Lencana Karya Satya (20 years of service) from the President of the Republic of Indonesia (2010), Satya Lencana Karya Satya (10 years of service) from the President of the Republic of Indonesia (2002).

Independensi dan Pedoman Kerja Komite Audit

Independence and Work Guidelines of Audit Committee

Anggota Komite Audit dan Risiko merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai upaya untuk dapat menjaga independensi setiap anggota Komite, masing-masing anggota Komite memberikan pernyataan independensi. Pernyataan independensi Komite Audit dan Risiko Perusahaan disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 7 terkait Persyaratan dan Keanggotaan Masa Tugas Komite Audit serta Piagam Komite Audit.

Members of the Audit and Risk Committee are professional individuals who do not have a relationship with the Company to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. In an effort to maintain the independence of each member of the Committee, each member of the Committee gives a statement of independence. The statement of independence of the Audit Committee and Company Risk is prepared based on the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee Article 7 regarding the Requirements and Membership of the Audit Committee's Term of Office and the Audit Committee Charter.

Pernyataan Independensi <i>Independence Statement</i>	Chairul Muluk	Andiek Nugroho	Dedik Budianta
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√
<i>Not a person in the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other party that provides insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.</i>			
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.	√	√	√
<i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for an Independent Commissioner.</i>			
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.	√	√	√
<i>Do not have direct or indirect shares in the Company.</i>			
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.	√	√	√
<i>Do not affiliate with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders.</i>			
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	√	√	√
<i>Do not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.</i>			



Pedoman Kerja Komite Audit

Work Guideline of Audit Committee

Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 005/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite Audit, dan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 8 Juni 2020.

The Company decided to form the Company's Audit Committee based on the Circular Decree of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting of PT Pinago Utama Tbk No. 005/PU/SK-KOM/VI/ 2020 dated on June 8, 2020, concerning the Appointment of the Audit Committee, and has an Audit Committee Charter dated 8 June 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Tahun 2020

Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2020

Komite Audit melaksanakan kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

The Audit and Risk Committee carries out activities in carrying out the duties and responsibilities as set out in the table below:

No.	Butir-Butir dalam Piagam Audit Matters in Audit Charter	Realisasi Kegiatan Activities Realization
1.	Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik kepada publik atau pihak otoritas lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. <i>Reviewing the financial information that will be issued by the Public Company to the public or other authorities, financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information.</i>	√
2.	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. <i>Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities.</i>	√
3.	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. <i>Providing independent opinion in the event of disagreements between management and accountants for the services rendered.</i>	√
4.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan imbalan jasa. <i>Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope, assignment, and service fees</i>	√
5.	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. <i>Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors</i>	√
6.	Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. <i>Reviewing the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.</i>	√

No.	Butir-Butir dalam Piagam Audit Matters in Audit Charter	Realisasi Kegiatan Activities Realization
7.	Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan atau Perusahaan Publik. <i>Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Company or Public Company.</i>	N/A
8.	Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan atau Perusahaan Publik. <i>Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company or Public Company.</i>	N/A
9.	Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan <i>Maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information</i>	√

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Frequency of Meetings and Level of Attendance of the Audit Committee

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Since the appointment, the Audit Committee has not held any meetings, but the Audit Committee plans to meet at least 4 (four) times in 1 (one) year in accordance with OJK Regulation No. 55/2015. Since the establishment of the Audit Committee, the Company has not yet provided a brief report on the implementation of the duties of the Company's Audit Committee.

Program Pelatihan dan/atau Pendidikan yang Dilaksanakan Komite Audit

Training and/or Education Program Implemented by the Audit Committee

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit belum mengikuti pelatihan karena baru dibentuk.

In 2020, the Audit Committee did not join some trainings, for it was just formed:

Rencana Program Kerja Komite Audit Tahun 2021

Plan for the Audit Committee Work Program In 2021

No.	Nama Kegiatan Activities	Rencana Plan
1.	Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan <i>Reviewing of Financial Information and Financial Performance</i>	Melakukan penelaahan dan berdiskusi dengan manajemen baik mengenai laporan keuangan konsolidasian Perusahaan maupun informasi keuangan lainnya. <i>Reviewing and discussing with management both the Company's consolidated financial statements and other financial information.</i>



No.	Nama Kegiatan Activities	Rencana Plan
2.	Pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal	1. Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Eksternal Perusahaan mengenai rencana audit dan implementasinya 2. Menelaah temuan-temuan penting dari Auditor Eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit 3. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan 4. Memastikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dapat dipublikasikan secara tepat waktu
	<i>Supervision of the work of the External Auditor</i>	1. <i>Reviewing and discussing with the Company's External Auditor regarding the audit plan and its implementation</i> 2. <i>Reviewing the important findings of the External Auditor and monitoring the implementation of the audit recommendations</i> 3. <i>Monitoring the financial reporting process by discussing the audit results on the Company's Consolidated Financial Statements</i> 4. <i>Ensuring that the Company's Consolidated Financial Statements can be published in a timely manner</i>
3.	Evaluasi efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi Audit Internal	1. Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2020 dan rencana Audit Internal tahun 2021 2. Mengevaluasi pelaksanaan Audit internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal serta memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
	<i>Evaluate the effectiveness of internal controls and the implementation of the Internal Audit function</i>	1. <i>Reviewing and discussing with the Company's Internal Auditor regarding audit activities during 2020 and the plan for Internal Audit for 2021</i> 2. <i>Evaluating the implementation of internal audit and reviewing important findings from internal auditors and monitoring the implementation of audit recommendations.</i>
4.	Penelaahan Manajemen Risiko	1. Melakukan pemantauan risiko dan mitigasinya secara berkala. 2. Melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam dengan Manajemen mengenai risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan dan bagaimana strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perusahaan.
	<i>Risk Management Review</i>	1. <i>Performing regular risk monitoring and mitigation.</i> 2. <i>Conducting in-depth discussions and discussions with Management regarding the main risks faced by the Company and how the risk mitigation strategies are carried out by the Company.</i>
5.	Kepatuhan terhadap peraturan dan Perundang-Undangan	Melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan pada peraturan dan hukum, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perusahaan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perusahaan maupun kegiatan usaha Perusahaan.
	<i>Compliance with laws and regulations</i>	<i>Reviewing and supervising the Company's compliance with regulations and laws, including monitoring regulations and laws related to the Company's line of business as well as cases/ disputes related to the Company and the Company's business activities.</i>

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition of Nomination and Remuneration Committee

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Peraturan OJK No. 21/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut ini:

The Company has formed a Nomination and Remuneration Committee and Guidelines for the Company's Nomination and Remuneration Committees in accordance with FSA's Regulation No. 34/2014 and FSA's Regulation No. 21/2015, the Company hereby decides to form a Nomination and Remuneration Committee based on the Circular Decree of the Board of Commissioners as a Substitute for the Meeting of the Board of Commissioners of PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 dated on June 8, 2020, concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, and has had the Nomination and Remuneration Committee Charter dated June 8, 2020. The term of office of the members of the Nomination and Remuneration Committee is 3 (three) years and may not be longer than the term of office of the Company's Board of Commissioners. The composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Periode Period
Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan) <i>Chairman (concurrently as an Independent Commissioner of the Company)</i>	Chairul Muluk	2020-2023
Anggota <i>Member</i>	Wilson Sutantio	2020-2023
Anggota <i>Member</i>	Hasan Tantri	2020-2023



Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Chairul Muluk

Profil Bapak Chairul Muluk dapat dilihat pada bagian penjelasan Profil Dewan Komisaris di Bab Laporan Manajemen.

Chairul Muluk

The profile of Mr. Chairul Muluk can be viewed in the elucidation part of the Board of Commissioners' Profile in Management Report Chapter.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of Nomination and Remuneration Committee

Wilson Sutantio

Profil Bapak Wilson Sutantio dapat dilihat pada bagian penjelasan Profil Dewan Komisaris di Bab Laporan Manajemen.

Wilson Sutantio

The profile of Mr. Wilson Sutantio can be viewed in the elucidation part of the Board of Commissioners' Profile in Management Report Chapter.

Hasan Tantri

Profil Bapak Hasan Tantri dapat dilihat pada bagian penjelasan Profil Dewan Komisaris di Bab Laporan Manajemen.

Hasan Tantri

The profile of Mr. Hasan Tantri can be viewed in the elucidation part of the Board of Commissioners' Profile in Management Report Chapter.

Independensi dan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence and Work Guidelines for the Nomination and Remuneration Committee

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai upaya untuk dapat menjaga independensi setiap anggota Komite, masing-masing anggota Komite memberikan pernyataan independensi. Pernyataan independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Perusahaan disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee are professional individuals who do not have a relationship with the Company to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. In an effort to maintain the independence of each member of the Committee, each member of the Committee gives a statement of independence. The statement of independence of the Company's Nomination, Remuneration and GCG Committee is prepared based on the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Pernyataan Independensi <i>Independence Statement</i>	Chairul Muluk	Wilson Sutantio	Hasan Tantri
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. <i>Having no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Company's Major Shareholders.</i>	√	√	√
Memiliki pengalaman terkait Nominasi & Remunerasi. <i>Having nomination & related experience Remuneration.</i>	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. <i>Having no direct or indirect shares in the Company.</i>	√	√	√

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Guideline of Nomination and Remuneration Committee

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Peraturan OJK No. 21/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 8 Juni 2020.

The Nomination and Remuneration Committee Guidelines for the Company in accordance with OJK Regulation No. 34/2014 and OJK Regulation No. 21/2015, the Company hereby decides to form a Nomination and Remuneration Committee based on the Circular Decree of the Board of Commissioners as a Substitute for the Meeting of the Board of Commissioners of PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 dated on June 8, 2020, concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, and has a Nomination and Remuneration Committee Charter dated on June 8, 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Report on the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee for 2020

Sepanjang tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Throughout 2020 the Nomination and Remuneration Committee carries out activities in carrying out its duties and responsibilities as set out in the table below.

No.	Butir-Butir dalam Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi <i>Matters in the Work Guideline of Nomination, Remuneration, and GCG Committee</i>	Realisasi Kegiatan <i>Activities Realization</i>
1.	Penyusunan piagam Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Preparation of the Nomination and Remuneration Committee charter</i>	4 Juni 2020 <i>June 4, 2020</i>
2.	Pengesahan piagam oleh Dewan Komisaris <i>Ratification of the charter by the Board of Commissioners</i>	8 Juni 2020 <i>June 8, 2020</i>
3.	Rapat evaluasi bersama Direksi <i>Evaluation meeting with the Board of Directors</i>	5 November 2020 <i>November 5, 2020</i>
4.	Rapat evaluasi bersama pemegang saham <i>Evaluation meeting with shareholders</i>	29 Desember 2020 <i>December 29, 2020</i>



Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Frequency of Meetings and Attendance at the Nomination and Remuneration Committee

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sejak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Since the appointment, the Nomination and Remuneration Committee has not held a meeting, but the Nomination and Remuneration Committee plans to hold a meeting at least 1 (one) time in 4 (four) months in accordance with FSA's Regulation No. 34/2014. Since the establishment of the Nomination and Remuneration Committee, the Company has not yet provided a brief report on the implementation of the duties of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Program Pelatihan dan/atau Pendidikan yang Dilaksanakan Komite Nominasi dan Remunerasi

Training and/or Education Program Implemented by the Nomination and Remuneration Committee

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi tidak mengikuti pelatihan disebabkan adanya Covid-19.

In 2020, the Nomination and Remuneration Committee did not join some trainings due to Covid-19.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Plan for the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2021

- | | |
|---|---|
| 1. Meninjau dan evaluasi kebijakan nominasi dan remunerasi tahun 2020. | 1. <i>Reviewing and evaluating the 2020 nomination and remuneration policies.</i> |
| 2. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi tahun 2020. | 2. <i>Helping the board of commissioners evaluate the performance of the Board of Directors in 2020.</i> |
| 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan struktur kebijakan dengan besaran remunerasi. | 3. <i>Providing recommendations to the board of commissioners regarding the policy structure with the amount of remuneration.</i> |
| 4. Mengadakan rapat berkala 1 kali dalam 4 bulan. | 4. <i>Holding regular meetings once every 4 months.</i> |

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Meli Tantri sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web* Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan me-*record* Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.

The Company has formed a Corporate Secretary as required in OJK Regulation No. 35/2014. The Company has appointed Meli Tantri as the Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No. 002/SK-DIR/VI/2020 dated 8 June 2020 concerning the appointment of the Corporate Secretary in the Company.

The Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. *Keeping abreast of developments in the capital market, particularly the prevailing laws and regulations in the capital market.*
2. *Providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to comply with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.*
3. *Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing Good Corporate Governance, which includes:*
 - a. *Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website;*
 - b. *Timely submission of reports to FSA;*
 - c. *Organising and documenting the General Meeting of Shareholders;*
 - d. *Organising and documenting the meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and*
 - e. *Implementation of the Company's orientation programs for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.*
4. *As a liaison amongst the Company and the shareholders of the Company, FSA, and other general stakeholders.*
5. *The Corporate Secretary and employees in the work unit that carries out the function of the Corporate Secretary are obliged to maintain the confidentiality of documents, data and information which are confidential except for fulfilling obligations in accordance with statutory regulations or otherwise stipulated in laws and regulations.*
6. *The Corporate Secretary and employees in the work unit who carry out the functions of the Corporate Secretary are prohibited from taking personal gain directly or indirectly, which is detrimental to the Company.*
7. *In order to increase knowledge and understanding to assist in the implementation of his duties, the Corporate Secretary must attend education and/or training.*
8. *The Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors.*
9. *Any information conveyed by the corporate secretary to the public is official company information.*
10. *Managing Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors and record Agenda, Minutes, Policies, Decisions, and data generated in the Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.*



11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

11. *Assisting the Board of Directors in solving Company problems in general.*
12. *Monitoring the application of applicable regulations while still adhering to the principles of GCG.*
13. *Administering and keeping the Company's documents.*
14. *Providing services to the public or shareholders for the information needed by investors relating to the condition of the Company:*
 - a. *Annual Financial Statements (Audited);*
 - b. *Annual Report on the Company's Performance (Annual Report);*
 - c. *Material Fact Information;*
 - d. *Significant products or inventions (awards, featured projects, special method inventions, etc.);*
 - e. *Changes in the control system or important changes in management.*

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary

Meli Tantri

Profil Ibu Meli Tantri dapat dilihat pada bagian penjelasan Profil Direksi di Bab Laporan Manajemen.

Meli Tantri

Ms. Meli Tantri's profile can be seen in the explanation section of the Directors Profile in the Management Reports Chapter.

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Training Program

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Ke depannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Until now, there has been no training program attended by the Corporate Secretary in order to improve the competence of the Corporate Secretary. In the future, the Corporate Secretary will take part in a training program related to:

- *Capital market developments, particularly the prevailing laws and regulations.*
- *Understanding of corporate governance that is guided by the principles of GCG.*
- *Ability to act as a liaison between the shareholders of the Company, FSA, and other public stakeholders.*

Audit Internal

Internal Audit

Untuk menjalankan fungsi audit internal, Perusahaan membentuk Unit Audit Internal (UAI) dalam rangka mengamankan aset dan kepentingan Perusahaan dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan penerapan tata kelola Perusahaan. Pembentukan UAI mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan OJK No. 21/2015.

Berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala dan Anggota Unit Audit Internal No. 003/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

To carry out the internal audit function, the Company established an Internal Audit Unit (IAU) in order to secure the assets and interests of the Company by evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and the implementation of corporate governance. The establishment of the IAU refers to the Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter and FSA's Regulation No. 21/2015.

Based on the Letter of Appointment of the Head and Members of the Internal Audit Unit No. 003/SK-DIR/VI/2020 dated on June 8, 2020. The term of office of members of the Internal Audit Unit is 3 (three) years and may not be longer than the term of office of the Company's Board of Commissioners. The composition of the Internal Audit Unit is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
R. Sofyan	Kepala Unit Audit Internal Head of Internal Audit Unit	2020-2023



Profil Unit Audit Internal

Internal Audit Unit's Profile

Kepala Unit Audit Internal

Head of Internal Audit Unit

R. Sofyan



Warga Negara Indonesia, lahir di Tulung Agung, umur 51 tahun. Beliau menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 2020. Beliau memperoleh gelar Diploma 1 jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur (1988-1989).

Beliau memulai karir sebagai Pembukuan di PT Bina Sains Corp (1991-1992), Operator Komputer Dept IT di PT Cipta Subur Nusajaya, Salim Group (1992-1996), Pembukuan Dep. Accounting di Salim Group (1996-2002). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Administrasi Plasma (2003), Staf Audit (2003-2005), Koordinator Internal Audit (2005-2012), Manajer Internal Audit (2012-2016) dan Kepala Unit Audit Internal (2016-sekarang).

Indonesian citizen, born in Tulung Agung, 51 years of age. He has served as Head of the Company's Internal Audit Unit since 2020. He obtained a Diploma 1 degree in Accounting from Brawijaya University, Malang City, East Java (1988-1989).

He started his career as Bookkeeping at PT Bina Sains Corp (1991-1992), Computer Operators at the IT Dept. at PT Cipta Subur Nusajaya, Salim Group (1992-1996), Bookkeeping Dep. Accounting at the Salim Group (1996-2002). Then he joined the Company as Plasma Administration (2003), Audit Staff (2003-2005), Internal Audit Coordinator (2005-2012), Internal Audit Manager (2012-2016) and Head of Internal Audit Unit (2016-present).

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal

Appointment and Dismissal of the Head of the Internal Audit Unit

Unit Audit Internal (UAI) Perusahaan dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala UAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya.

The Company's internal audit unit is led by the Head of the Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Head of the Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director and coordinates with the Audit Committee and external auditors in carrying out their duties.

Piagam Audit Internal

Internal Audit Charter

Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Audit Internal PT Pinago Utama Tbk No. 005/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama. Penyusunan Piagam Unit Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

The Company has designed and implemented the Internal Audit Charter of PT Pinago Utama Tbk No. 005/SK-DIR/VI/2020 dated on June 8, 2020, which has been ratified by President Director. The Internal Audit Unit Charter has been prepared in accordance with the provisions of Article 9 of FSA's Regulation No. 56/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:

1. *Develop and implement an annual Internal Audit plan;*
2. *Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies;*
3. *Examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;*
4. *Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;*
5. *Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;*
6. *Monitor, analyse, and report on the implementation of the follow-up improvements that have been suggested;*
7. *Cooperate with the Audit Committee;*
8. *Develop a program to evaluate the quality of the internal audit activities it performs; and*
9. *Conduct special examinations if necessary.*

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

In carrying out its duties, the Internal Audit Unit has the following authorities:



1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

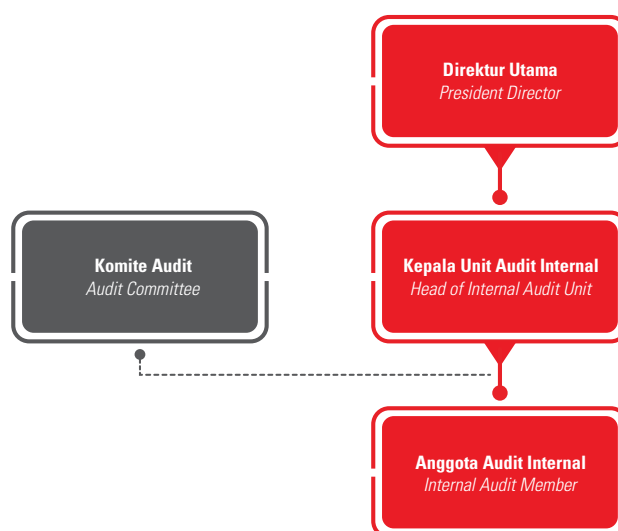
Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

1. Access all relevant information about the company related to its duties and functions;
2. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
3. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
4. Coordinate activities with the activities of external auditors.

In the implementation of Good Corporate Governance, the Internal Audit Unit has an important role in assessing the adequacy of internal control, compliance with regulations; thus, internal control becomes an integrated part of the systems and procedures in every activity in the work unit so that any irregularities can be identified in a clear manner. early so that corrective steps can be taken by the work unit concerned. The Internal Audit Unit always carries out internal supervision by taking a systematic approach so that the implementation of the principles of Good Corporate Governance can run, properly and correctly.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit

Structure and Position of Internal Audit



Struktur dan kedudukan Audit Internal antara lain mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
3. Dalam hal Unit Audit Internal 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal bertindak juga sebagai Kepala Unit Audit Internal.
4. Jumlah auditor sebagaimana dimaksud pada poin 1 disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

The structure and position of Internal Audit, among others, governs the following matters:

1. *The Internal Audit Unit consists of 1 (one) or more internal auditors.*
2. *The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit.*
3. *In the event that the Internal Audit Unit has 1 (one) internal auditor, the internal auditor also acts as the Head of the Internal Audit Unit.*
4. *The number of auditors as referred to in point 1 is adjusted to the size and level of complexity of the Issuer's or Public Company's business activities.*

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal

Report on the Implementation of Internal Audit Activities

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh UAI antara lain mencakup audit fungsi keuangan & akuntansi, audit fungsi produksi, serta audit manajemen risiko. Adapun pelaksanaan audit di tahun 2020 belum sesuai dengan rencana, terealisasi (48%) yakni sebanyak 26 objek pemeriksaan dari rencana 54 objek pemeriksaan. Tidak terealisasinya rencana audit, disebabkan adanya audit investigasi sebanyak 7 kali dan audit khusus sebanyak 36 kali.

Examination activities carried out by UAI include audits of finance & accounting functions, audits of production functions, and risk management audits. The implementation of the audit in 2020 has not been in accordance with the plan, realised (48%), namely as many as 26 objects of examination of the plan for 54 objects of examination. The audit plan was not actualised, due to the 7 investigative audits and 36 special audits.

Program Pelatihan Audit Internal

Training Program of Internal Audit

Program pelatihan audit internal Perusahaan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya yang sesuai dengan pelaksanaan tugas Audit Internal. Adapun informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh Audit Internal selama tahun 2020 telah dipaparkan pada bab Profil Perusahaan.

The Company's internal audit training program is carried out in the form of training, seminars, workshops that are in accordance with the implementation of Internal Audit duties. Information about training followed by Internal Audit during 2020 has been presented in the chapter of the Company Profile.

No.	Tanggal Date	Topik Topic	Tempat Venue
1.	9-11 Feb 2020 Feb 9-11, 2020	Analisis Manajemen Risiko Berkualifikasi Qualified Risk Management Analyst	CRMS/LPK-MKS- Jakarta – Virtual



Akuntan Publik *Public Accountant*

Prinsip Umum dan Kebijakan *Basic Principle and Policy*

Penggunaan jasa Akuntan Publik yang termasuk ke dalam auditor eksternal dibutuhkan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada dasarnya, pernyataan Akuntan Publik merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran Laporan Keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut.

Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan.

The use of Public Accountant services included in the external auditor is needed to express opinions about fairness, in all material respects, financial position, business results, changes in equity and cash flows in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia. Basically, the statement of the Public Accountant is the opinion of an independent third party regarding the fairness of the Financial Report submitted to shareholders and other stakeholders concerning material matters listed in the financial statements.

The Public Accountant Firm that checks the Company's financial statements for the 2020 financial year determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. To guarantee the independence and quality of audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with each level of Company officials.

Mekanisme Penunjukkan Akuntan *Public Accountant Appointment Mechanisms*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penunjukkan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selain itu, dalam pelaksanaan penunjukannya, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pada tahun 2020, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra dengan biaya audit sebesar Rp325 juta (tidak termasuk PPN 10%).

As explained earlier, the appointment of the Public Accountant Office was determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. In addition, in implementing its appointment, the Company also referred to the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities. In 2020, the Company's consolidated financial statements were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra with an audit fee of Rp325 million (excluding 10% VAT).

Periode Audit dan Biaya Audit

Audit Period and Audit Fees

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit berikut nilai jasa, ruang lingkup, dan opini Audit selama 5 (lima) tahun terakhir:

The following is the Public Accountant Office appointed to carry out audits following service values, scope, and Audit opinion for the past 5 (five) years:

Tahun Year	KAP Public Accountant Firm	Auditor	Nilai Jasa Service Fee	Ruang Lingkup Jasa Field of Services	Opini Audit Audit Opinion
2016	Anwar & rekan	Anwar	Rp185 juta <i>Rp185 million</i>	Melaksanakan audit laporan keuangan. <i>Carry out financial report audits.</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair without exeption</i>
2017	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan	Emanuel Handojo Pranadjaja	Rp198,5 juta <i>Rp198.5 million</i>	Melaksanakan audit laporan keuangan. <i>Carry out financial report audits.</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair without exeption</i>
2018	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan	Emanuel Handojo Pranadjaja	Rp240 juta <i>Rp240 million</i>	Melaksanakan audit laporan keuangan. <i>Carry out financial report audits.</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair without exeption</i>
2019	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan	Emanuel Handojo Pranadjaja	Rp262 juta <i>Rp262 million</i>	Melaksanakan audit laporan keuangan. <i>Carry out financial report audits.</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair without exeption</i>
2020	Djoko, Sidik & Indra	Ahmad Nadhif T.	Rp325 juta <i>Rp325 million</i>	Melaksanakan audit laporan keuangan. <i>Carry out financial report audits.</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair without exeption</i>

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan Publik

Other Services Provided by Public Accountants

Selain jasa audit keuangan, KAP Djoko, Sidik & Indra tidak memberikan jasa lain kepada Perusahaan.

In addition to financial audit services, KAP Djoko, Sidik & Indra did not provide other services to the Company.



Manajemen Risiko *Risk Management*

Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko *Risk Management System Implementation Basis*

Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu Perseroan menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

The Company is aware of that the course of the Company's operations is inseparable from various risks, both those risks which are under control and those that are beyond the Company's control. Therefore, the Company realizes the importance of risk management in an integrated, optimal and sustainable manner.

Perseroan senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan perusahaan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan kegiatan operasi perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal.

The Company continues to carry out risk control and management of company policies in an integrated and sustainable manner to realise healthy company operations and be able to generate optimal profits.

Perseroan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya menggunakan asuransi yang relevan dengan transaksi, mengkaji dan/atau negosiasi kontrak sedemikian rupa sehingga kepentingan Perseroan terlindungi secara hukum.

The Company is obliged to identify the possibility of risks both external and internal. Based on this identification, the Company will make the necessary efforts to minimize the occurrence of these risks, for example using insurance that is relevant to the transaction, reviewing and/or negotiating contracts in such a way that the interests of the Company are legally protected.

Perseroan selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan, akan tetapi Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya secara internal. Namun, Perseroan selalu melakukan evaluasi risiko melalui *assessment* manajemen risiko sehingga dapat meminimalisasi potensi risiko.

The Company always monitors and reviews risks regularly so that these risks are expected to be controlled so as not to significantly reduce the value of the Company, but the Company is also aware of risks that are out of control that cannot be completely eliminated internally. However, the Company always evaluates risks through risk management assessments so as to minimize potential risks.

Perseroan membentuk tim dan/atau forum manajemen risiko yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perseroan pada seluruh aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja.

The Company forms a team and/or risk management forum that gives consideration in decision making, in order to handle new work that has not been done by the Company in all activities carried out in all work units.

Perseroan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Dengan demikian pemangku berkepentingan dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

The Company is committed to transparently disclosing risks that can significantly affect the value of the Company. Thus, the stakeholders can calculate the relevant risks when conducting business transactions with the Company.

Manajemen Risiko di Perseroan antara lain meliputi:

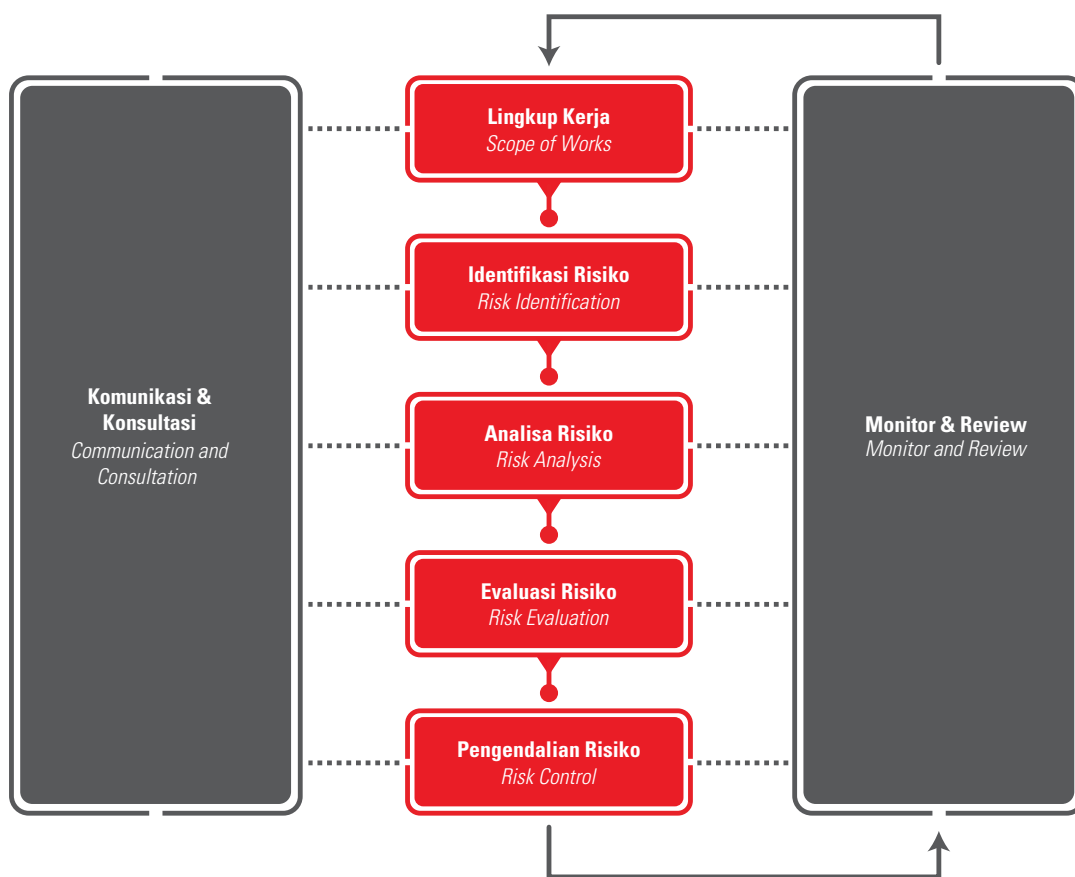
1. Risiko harga komoditas
2. Risiko kegiatan usaha atau operasional
3. Risiko umum

Risk Management in the Company includes:

1. *Commodity price risk*
2. *Risk of business or operational activities*
3. *General risk*

Dalam perjalanannya, Perusahaan senantiasa menghadapi perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang sangat pesat sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Melalui manajemen risiko, Perusahaan berusaha meminimalkan terjadinya ancaman dan memaksimalkan peluang yang ada. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada berbagai pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang juga berlaku di industri. Sebagai dasar penerapan manajemen risiko yang berlaku di skala internasional, infrastruktur manajemen risiko Perusahaan berdasarkan ISO 31000:2009 dapat dilihat melalui skema berikut:

In its journey, the Company continues to face the development of a very rapid internal and external environment which creates uncertainty that can affect the achievement of company goals. Through risk management, the Company strives to minimise the occurrence of threats and maximize the opportunities that exist. The application of risk management in the Company refers to various risk management guidelines and policies that also apply in the industry. As a basis for applying risk management that applies on an international scale, the Company's risk management infrastructure based on ISO 31000: 2009 can be seen through the following scheme:



Manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen untuk mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang dihadapi Perusahaan beserta langkah-langkah mitigasi untuk mengeliminasi dampak dari risiko. Perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Elemen langkah-langkah dalam manajemen risiko meliputi:

Risk management is an integral part of the management process to identify potential risks faced by the Company along with mitigation measures to eliminate the impact of risk. The company is committed to managing risk consistently and continuously. Elements of the steps in risk management include:



1. Penetapan tujuan

Menetapkan strategi, kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan mencakup identifikasi tujuan dari proyek yang akan dilakukan, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan proyek, penentuan wilayah tanggung jawab setiap unit, koordinasi antara satu proyek dengan yang lainnya.

2. Identifikasi risiko

Mengidentifikasi apa dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut.

3. Analisis risiko

Menentukan kemungkinan dan konsekuensi yang akan terjadi.

4. Evaluasi risiko

Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Tingkatan risiko yang ada untuk beberapa bahaya (*hazards*) dibuat tingkatan prioritas risiko.

5. Pengendalian risiko

Menyiapkan dan melaksanakan rencana penanggulangan risiko serta melakukan penurunan derajat kemungkinan dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan metode *transfer*/mitigasi risiko.

6. *Monitor* dan Meninjau

Monitor dan *Review* terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.

7. Komunikasi dan konsultasi

Komunikasi dan konsultasi dengan pengambil keputusan internal dan eksternal Perusahaan untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan.

Manajemen risiko Perusahaan diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga diterapkan pada proyek yang spesifik, untuk membantu proses pengambilan keputusan.

1. *Setting goals*

Establishing strategies, organizational policies and the scope of risk management to be carried out includes identifying the objectives of the project to be carried out, determining the time and place of project implementation, determining the area of responsibility for each unit, coordinating between one project and another.

2. *Risk identification*

Identifying what and how factors influencing the occurrence of risk for further analysis.

3. *Risk analysis*

Determining the possibilities and consequences that would occur.

4. *Risk evaluation*

Comparing the level of risk that exists with standard criteria. The level of risk that exists for some hazards is made a risk priority level.

5. *Risk control*

Preparing and implementing risk management plans and reduce the degree of possibilities and consequences that exist by using risk transfer/mitigation methods.

6. *Monitor and Review*

Monitoring and reviewing the results of the risk management system carried out and identify changes that need to be made.

7. *Communication and consultation*

Communication and consultation with internal and external decision makers of the Company for follow-up of the results of risk management carried out.

Company risk management is implemented at the strategic level and operational level. Risk management is also applied to specific projects, to assist the decision-making process.

Implementasi Manajemen Risiko

Risk Management Implementation

Perusahaan mendefinisikan Indikator Kinerja Utama (KPI) sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko yang terdiri dari:

1. *Risk Maturity Level*

Penilaian tingkat *maturity* risiko Perusahaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kredibilitas untuk mengevaluasi dan memberi masukan terkait pengelolaan manajemen risiko.

2. *Audit Manajemen Risiko*

Audit manajemen risiko ini dilakukan secara terintegrasi dengan Unit Audit Internal (UAI) Perusahaan.

3. *Risk Management Training Program*

Program Pelatihan Pengelolaan Risiko Perusahaan adalah pelatihan dan/atau sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi terhadap identifikasi risiko. Perusahaan belum mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen risiko sebagai berikut:

The Company defines the Main Performance Indicator as part of the implementation of risk management which consists of:

1. *Risk Maturity Level*

The assessment of the Company's risk maturity level is carried out by those who have credibility to evaluate and provide input regarding risk management.

2. *Audit of Risk Management*

This risk management audit is carried out in an integrated manner with the Company's Internal Audit Unit (IAU).

3. *Risk Management Training Program*

The Corporate Risk Management Training Program is training and/or certification to improve competency for risk identification. The Company has not conducted training related to risk management as follows:





Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Upaya Mitigasi Risiko

Risks Faced by Companies and Risk Mitigation Measures

A. Fluktuasi harga Komoditas

1. Fluktuasi harga CPO, PK dan Karet dipasar internasional.

B. Risiko terkait dengan usaha perseroan/operasional

1. Risiko terhentinya kegiatan usaha Perseroan;
2. Risiko Perubahan kebijakan dan pembatasan ekspor ke negara tujuan;
3. Risiko kebakaran, kerusakan maupun kehilangan pada perkebunan, pabrik dan fasilitas yang dimiliki Perseroan;
4. Risiko terhadap cuaca, hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit dan karet;
5. Risiko Persaingan Usaha;
6. Risiko dalam perizinan seperti pembatasan, pencabutan dan penolakan atas perijinan dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan;
7. Risiko konflik dengan warga sekitar lahan tempat beroperasinya perseroan maupun lokasi perkebunan Perseroan;
8. Risiko terhadap perubahan permintaan konsumen atas jenis dan varietas produk;
9. Risiko Perubahan Teknologi;
10. Terbatasnya Lahan Perkebunan.

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global;
2. Risiko Perlambatan Ekonomi;
3. Risiko perubahan politik yang terjadi di dalam dan luar negeri;
4. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan;
5. Risiko fluktuasi nilai tukar;
6. Risiko fluktuasi suku bunga pinjaman.

A. Commodity price fluctuations

1. CPO, PK and Rubber price fluctuations in international markets.

B. Risks associated with the Company's business/operations

1. Risk of cessation of the Company's business activities;
2. Risks of Changes in policies and restrictions on exports to destination countries;
3. Risk of fire, damage or loss to plantations, factories and facilities owned by the Company;
4. Risks to weather, pests and diseases can disrupt the growth and production of oil palm and rubber crops;
5. Business Competition Risk;
6. Risks in licensing such as restriction, revocation and rejection of licenses and certifications required for the Company's business activities;
7. Risk of conflict with residents around the land where the company operates and the location of the Company's plantations;
8. Risks to changes in consumer demand for product types and varieties;
9. Risk of Technology Change;
10. Limited land for plantations.

C. General Risks

1. Risk of macro or global economic conditions;
2. Risk of Economic Slowdown;
3. Risk of political change occurring at home and abroad;
4. Risk of compliance with applicable laws and regulations related to the Company's line of business;
5. Risk of exchange rate fluctuation;
6. Risk of fluctuation in loan interest rates.

Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement

Kebijakan Perusahaan dalam menerapkan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu kepada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres nomor 54 tahun 2010. Perusahaan memandang proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara internasional sebagai berikut:

1. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
4. Transparan, ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat dan masyarakat umum;
5. Adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
6. Akuntabel, mencapai sasaran keuangan dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Prinsip-prinsip tersebut diadaptasikan ke dalam Perusahaan melalui Dokumen No. SMT-PO-PBL-02 yang diberlakukan sejak tanggal 2 April 2018.

The Company's policy in implementing Goods and Services Procurement refers to Presidential Regulation number 54 of 2010 concerning the procurement of government goods/services and Presidential Regulation number 4 of 2015 concerning the fourth amendment to Presidential Regulation number 54 of 2010. The company views the process of procuring goods and services based on principles procurement which is practised internationally as follows:

1. *Efficient, procurement of goods/services must be sought by using limited funds and power to achieve the targets set in the shortest possible time and could be accounted for;*
2. *Effective, the procurement of goods/services must be in accordance with the requirements specified and can provide the maximum benefit in accordance with the targets set;*
3. *Open and competitive, procurement of goods/services must be open to providers of goods/services that meet the requirements and carried out through fair competition and fulfil certain conditions/criteria based on clear provisions and procedures;*
4. *Transparency, provisions, and information regarding the procurement of goods/services, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, determination of prospective suppliers of goods/services, are open to interested participants in goods/services and the general public;*
5. *Fair and non-discriminatory, giving equal treatment to all prospective providers of goods/services and not aiming to provide benefits to certain parties, by any means or reason;*
6. *Accountable, achieving financial goals and benefits for the smooth implementation of general government duties and community services in accordance with the principles and provisions that apply in the procurement of goods/services.*

These principles are adapted into the Company through Document No. SMT-PO-PBL-02 which took effect from April 2, 2018.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Procedure

Prosedur pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh Perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Kualifikasi
 - a. Memastikan berjalannya kegiatan kualifikasi Calon Penyedia Jasa, Pemasok, dan Mandor yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

The procedure for the procurement of goods and services implemented by the Company has the following objectives:

1. *Qualification*
 - a. *Ensure the running of qualifying activities for Prospective Service Providers, Suppliers and Overseers who are competent in accordance with their fields.*



- | | |
|--|--|
| <p>b. Mendapatkan database Penyedia Jasa, Pemasok, dan Mandor yang dapat digunakan oleh Perusahaan.</p> | <p>b. <i>Get a database of Service Providers, Suppliers and Overseers that can be used by the Company.</i></p> |
| <p>2. Rencana Pengadaan</p> <p>a. Memastikan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan telah direncanakan sehingga proses pengadaan dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien.</p> <p>b. Memastikan proses kegiatan pengadaan barang, jasa, dan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.</p> | <p>2. <i>Procurement Plan</i></p> <p>a. <i>Ensure that every procurement of goods and services by the Company has been planned so that the procurement process can be carried out appropriately, effectively, and efficiently.</i></p> <p>b. <i>Ensure the process of procurement of goods, services, and equipment in accordance with the applicable provisions in the Company.</i></p> |
| <p>3. Perolehan Kontrak Pengadaan Barang & Jasa</p> <p>Menjamin terselenggaranya pelaksanaan proses perolehan kontrak pengadaan barang dan jasa sehingga memenuhi asas optimalisasi, efisiensi, dan transparansi.</p> | <p>3. <i>Acquisition of Goods & Services Procurement Contracts</i></p> <p><i>Ensure the implementation of the process of obtaining contracts for the procurement of goods and services so as to fulfil the principle of optimisation, efficiency and transparency.</i></p> |
| <p>4. Evaluasi Penyedia Jasa & Pemasok</p> <p>Memastikan terselenggaranya kegiatan evaluasi atas kinerja Penyedia Jasa dan Pemasok sehingga kinerja Penyedia Jasa dan Pemasok tersebut sesuai dengan apa yang disyaratkan.</p> | <p>4. <i>Evaluation of Service Providers & Suppliers</i></p> <p><i>Ensure the implementation of evaluation activities on the performance of Service Providers and Suppliers so that the performance of Service Providers and Suppliers is in accordance with what is required.</i></p> |
| <p>5. Kepuasan Penyedia Jasa & Pemasok</p> <p>Untuk mengukur sampai sejauh mana Penyedia jasa dan Pemasok puas terhadap komitmen kerja sama Perusahaan, dan upaya-upaya untuk meningkatkannya sehingga Penyedia Jasa dan Pemasok tidak hanya puas tetapi juga “<i>delighted</i>” (sangat puas) sebagaimana yang dijabarkan dalam kebijakan Perusahaan.</p> | <p>5. <i>Satisfaction of Service Providers & Suppliers</i></p> <p><i>To measure the extent to which service providers and suppliers are satisfied with the commitment of the Company's cooperation, and efforts to improve it so that Service Providers and Suppliers are not only satisfied but also "delighted" (very satisfied) as outlined in Company policy.</i></p> |
| <p>6. Prosedur Pengadaan Barang Loco Pabrik dan Pengirimannya</p> <p>Untuk memberikan pedoman dalam pengadaan barang loco pabrik atau gudang <i>supplier</i>/pemasok dan pengirimannya.</p> | <p>6. <i>Procurement Procedure for Loco Factory and Delivery</i></p> <p><i>To provide guidance on the procurement of loco factory goods or the supplier/supplier warehouse and delivery.</i></p> |
| <p>7. Pemeliharaan Peralatan/Mesin</p> <p>Untuk menjamin bahwa peralatan/mesin yang digunakan di lingkungan Perusahaan dipelihara sebagaimana mestinya sehingga kondisi peralatan/mesin selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.</p> | <p>7. <i>Equipment Maintenance/Machinery</i></p> <p><i>To ensure that the equipment/machinery used in the Company is maintained properly so that the condition of the equipment/machinery is always in good condition and ready to use.</i></p> |
| <p>8. Penyusunan Daftar Harga Satuan Material & Sewa Peralatan</p> <p>Mendapatkan database harga material dan sewa peralatan yang terkini untuk mendukung proses <i>tender</i>.</p> | <p>8. <i>Preparation of Material Unit Price List & Equipment Rental</i></p> <p><i>Get the latest database of material prices and equipment leases to support the tender process.</i></p> |

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Perusahaan telah menerbitkan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Perusahaan dalam bentuk SK Direktur No. 004/HRD/SK-DIR/VII/2016 dan Prosedur Pelaporan Pelanggaran Kode Etik yang diterbitkan tanggal 14 April 2019 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan bagi karyawan mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan terhadap diri maupun keluarganya dari potensi dikenakan tuduhan tindak pidana suap. Hal ini bertujuan untuk membentuk lingkungan Perusahaan yang terkendali dalam penanganan gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik serta menghindari terjadinya *conflict of interest* dengan pihak tertentu. Untuk menangani hal ini, Perusahaan telah memiliki Tim Pengendalian Gratifikasi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

The Company has issued provisions regarding gratuity control as stipulated in the Company Documents in the form of Director Decree No. 004/HRD/SK-DIR/VII/2016 and the Code of Conduct Violation Reporting Procedure issued on April 14, 2019 concerning Gratification Control Procedures. This policy serves as a guide for employees regarding the importance of compliance with reporting gratuities to protect themselves and their families from the potential for being charged with bribery. This aims to establish a controlled environment for the Company in handling gratuities so that the principles of transparency and accountability can be implemented properly and avoid conflicts of interest with certain parties. To deal with this, the Company has a Gratification Control Team that is assigned to monitoring and evaluating the implementation of gratification control.

Informasi Praktik *Bad Corporate Governance*

Bad Corporate Governance Practice Information

Dengan menempatkan komitmen yang besar dalam pemenuhan seluruh prinsip-prinsip GCG, Perusahaan berupaya sebaik mungkin melakukan pencegahan dan meminimalisasi terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, Perusahaan mengadopsi dan melakukan internalisasi terhadap beberapa regulasi yang berlaku secara umum. Sepanjang tahun 2020, tidak terjadi praktik-praktik yang mencerminkan *bad corporate governance* di Perusahaan.

By placing a strong commitment in fulfilling all the principles of GCG, the Company strives to prevent and minimise the practice of Bad Corporate Governance as much as possible by forming the policies needed. In formulating the policy, the Company adopted and internalised several regulations that generally apply. During 2020, there were no practices that reflected bad corporate governance in the Company.

Ketidakpatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Non-Compliance in Fulfilling Tax Obligations

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat teguran yang bersifat ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang ditujukan kepada Perusahaan.

Throughout 2020, there were no reprimands that were non-compliance with the fulfilment of tax obligations directed at the Company.



Informasi Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Incompatible Information on Annual Reports and Financial Reports Presentation

Penyajian materi dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah merujuk pada parameter yang berlaku seperti kriteria *Annual Report Award* (ARA), *ASEAN CG Scorecard*, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Panduan terhadap kesesuaian isi Laporan Tahunan dengan Kriteria SEOJK dan ARA juga telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

The presentation of material in the Company's Annual Report has referred to the applicable parameters such as the Annual Report Award (ARA) criteria, the ASEAN CG Scorecard, and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 20/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Issuer's Annual Report or Public Company. Guidelines for the suitability of the contents of the Annual Report with SEOJK and ARA Criteria have also been presented in this Annual Report.

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Important Issues Faced by the Company

Perkara penting yang dimaksud merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Perusahaan selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan serta diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Sampai dengan 31 Desember 2020, permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan sejumlah 8 (delapan) perkara perdata yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Untuk lebih jelasnya, uraian perkara penting atau kasus litigasi yang dihadapi Perusahaan selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

The important case in question is a civil and criminal case faced by the Company during the reporting period and has been submitted through a judicial process and is estimated to have a significant impact on business continuity. As of December 31, 2020, the legal problems faced by the Company were 8 (eight) civil cases which did not have a significant impact on the Company's business continuity. For more details, important case descriptions or litigation cases faced by the Company during 2020 can be seen in the following table:

Status	Jenis Perkara Types of Issues			
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perpajakan Taxation	Hubungan Industrial Industrial Relations
Telah selesai (berkekuatan hukum tetap)	-	-	-	-
<i>Has been completed (permanent legal force)</i>				
Dalam proses penyelesaian	1	-	7	-
<i>On completion process</i>				
Jumlah Total	1	-	7	-

Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi tersebut, Perusahaan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak material pada kondisi usaha atau keuangan Perusahaan. Adapun jumlah perkara penting yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, serta anak perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

For the cases being faced, the Company believes that whatever the outcome of the decisions of these cases will not have a material impact on the business conditions or the Company's finances. The number of important cases faced by members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, as well as subsidiaries during 2020 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	Perkara Penting yang Dihadapi <i>Important Issues Faced</i>
Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the Board of Commissioners</i>	Tidak ada <i>None</i>
Anggota Direksi <i>Member of Directors</i>	Tidak ada <i>None</i>
Anak Perusahaan <i>Subsidiary</i>	Tidak ada <i>None</i>

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas terkait baik terhadap Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta anak perusahaan.

Throughout 2020, there were no administrative sanctions given by the relevant authorities both to the Company, members of the Board of Commissioners and Directors, and subsidiaries.

Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

Etika Bisnis merupakan standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen Perusahaan dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. Seiring dengan munculnya masalah pelanggaran etika dalam bisnis menyebabkan dunia perdagangan menuntut etika dalam berbisnis segera dibenahi agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik.

Business Ethics is a standard and guideline for all employees including company management based on noble, honest, transparent moral and professional attitude. Along with the emergence of the problem of violations of ethics in business, causing the world of commerce to demand ethics in doing business immediately, so that the world economic order would improve.

Kode Etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu Perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai budaya perusahaan. Hal ini terutama penting bagi Perusahaan yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. Dengan adanya kode etik, secara internal semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama, sehingga akan mengambil kebijakan/keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Kode Etik Perusahaan mengatur beberapa hal antara lain:

The Code of Ethics can increase the credibility of a company, because ethics has been used as a corporate culture. This is especially important for companies whose employees do not all know each other. With the existence of a code of ethics, internally all employees are bound by the same ethical standards, so that they will take the same policies/decisions on similar cases that arise. The Company's Code of Ethics regulates several things including:

1. Etika Bisnis Perusahaan meliputi:
 - ✓ Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan;
 - ✓ Hubungan dengan Pemegang Saham;

1. *The Company's Business Ethics include:*
 - ✓ *Compliance with Laws and Regulations;*
 - ✓ *Relationship with Shareholders;*



- ✓ Hubungan dengan Pelanggan;
- ✓ Hubungan dengan Mitra Usaha;
- ✓ Kerahasiaan Informasi;
- ✓ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- ✓ Pemeliharaan Lingkungan;
- ✓ Keselamatan & Kesehatan Kerja;
- ✓ Perlakuan yang Wajar.

2. Etika Kerja Pekerja meliputi:

- ✓ Ketaatan terhadap Hukum & Peraturan;
- ✓ Penyalahgunaan Kekuasaan & Tindak Kekerasan;
- ✓ Perlindungan & Penggunaan Aset Berwujud dan Aset Tidak Berwujud;
- ✓ Peningkatan Kompetensi & Dukungan;
- ✓ Pekerjaan Lain di Luar Perusahaan;
- ✓ Transaksi dengan Pihak Terkait;
- ✓ Gratifikasi;
- ✓ Obat-obatan terlarang dan Minuman Keras;
- ✓ Perjudian;
- ✓ Senjata;
- ✓ Hubungan Organisasi/Politik/Serikat Pekerja.

- ✓ Relationships with customers;
- ✓ Relationships with Business Partners;
- ✓ Confidentiality of Information;
- ✓ Corporate Social Responsibility;
- ✓ Environmental Maintenance;
- ✓ Occupational Health & Safety;
- ✓ Fair treatment.

2. Worker Work Ethics include:

- ✓ Compliance with Laws & Regulations;
- ✓ Abuse of Power & Violence;
- ✓ Protection & Use of Tangible Assets and Intangible Assets;
- ✓ Competency Improvement & Support;
- ✓ Other jobs outside the company;
- ✓ Transactions with Related Parties;
- ✓ Gratuities;
- ✓ Drugs and Liquor;
- ✓ Gambling;
- ✓ Weapons;
- ✓ Organizational/Political/Trade Union Relationships.

Pemberlakuan Kode Etik

Code of Conduct Implementation

Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan ditujukan dan berlaku bagi setiap karyawan Perusahaan dengan harapan dapat menciptakan pengelolaan operasi Perusahaan yang wajar (*fair*), tidak diskriminatif dan bertanggung jawab (*accountable*). Kode Etik Perusahaan dicanangkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. 001/DIR-COC/I/2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Pinago Utama Group pada tanggal 4 November 2015.

The implementation of the Company's Code of Ethics is aimed at and applies to every employee of the Company with the hope of creating a fair, non-discriminatory and accountable management of the Company's operations. The Company's Code of Ethics was promulgated by the Board of Directors through Decree No. 001/DIR-COC/I/2014 concerning PT Pinago Utama Group's Code of Conduct on November 4, 2015.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Code of Conducts Violation Sanctions

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran Kode Etik antara lain:

1. Setiap pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan;
2. Karyawan yang diperiksa dan dinyatakan bersalah, sanksi dapat berupa:

The types of sanctions for each violation of the Code of Ethics include:

1. *Every violation of the code of conduct is subject to sanctions based on the Laws and Regulations of the Company;*
2. *Employees who are examined and found guilty, sanctions can be in the form of:*

- a. Teguran Lisan & Surat Teguran Tertulis;
- b. Peringatan tertulis I, II, III;
- c. Penundaan kenaikan upah berkala;
- d. Penundaan kenaikan golongan dan atau jabatan;
- e. Penurunan golongan dan atau pembebasan dari jabatan
- f. Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja.

- a. *Viva voce warning;*
- b. *Written warning I, II, III;*
- c. *Salary deductions;*
- d. *Decreased rank;*
- e. *Termination from office;*
- f. *Termination of employment.*

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Total of Code of Conducts Violation

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik Perusahaan.

Throughout 2020, there were no violations of the Company's Code of Conducts.





Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan mekanisme untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan pelanggaran, yang tidak terbatas pada etika bisnis dan etika kerja (kode etik), Anggaran Dasar Perusahaan, Perjanjian Kemitraan, kontrak dengan pihak eksternal, rahasia perusahaan, konflik kepentingan, dan peraturan yang berlaku. Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan, etika bisnis dan etika kerja adalah hal yang harus dihindari oleh karyawan. Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab,

Perusahaan menyusun dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan.

Sistem pelaporan pelanggaran ini diharapkan dapat mendeteksi secara dini (*early warning*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

The Whistleblowing System is a mechanism to avoid and reduce the possibility of violations, which are not limited to business ethics and work ethics (code of conducts), Articles of Association, Partnership Agreements, contracts with external parties, company secrets, conflicts of interest, and regulations applicable. The company is always required to carry out its business activities based on the principles of Corporate Governance (GCG), as well as complying with applicable laws and regulations. Violations of Company regulations, business ethics and work ethics are things that should be avoided by employees. As a manifestation of the Company's commitment to create a clean and responsible work situation,

The Company prepares and implements a violation reporting system in order to provide opportunities for employees to submit reports regarding alleged violations of laws and/or regulations that apply to the internal company.

This violation reporting system is expected to be able to detect early (early warning) the possibility of problems due to a violation. Complaints obtained from the violation reporting mechanism need attention and follow-up, including the imposition of appropriate penalties in order to provide a deterrent effect for violators.

Perlindungan bagi Whistleblower *Protection to Whistleblower*

Perusahaan berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran serta merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada pelapor dan/atau menjadi saksi atas pelanggaran serta tindak pidana yang terjadi di internal Perusahaan. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

The Company is obliged to provide security to the reporter related to the threats/actions obtained as a result of reports of violations and keep confidential and provide appropriate protection to the reporter and/or be a witness of violations and criminal acts that occur in the Company's internal. Protection of whistleblowers also applies to managers of the violation reporting system, parties who carry out investigations, as well as those who provide information related to the complaint.

Penanganan Pengaduan *Whistleblowing Supervision*

Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan pelaporan dugaan penyimpangan diterima oleh Sistem (Laman Perusahaan, Email, SMS dan Telepon);
2. Tim memastikan kesediaan Pelapor untuk pengungkapan identitas;
3. Tim melakukan registrasi pelaporan yang dilakukan secara intensif oleh pelapor Sistem yang telah tersedia;
4. Tim melakukan validasi dan analisis pelaporan serta menyusun laporan untuk disampaikan ke Dewan Direksi;
5. Dewan Direksi menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berhak memeriksa atau Tim yang ditunjuk untuk melakukan pencarian fakta dan atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku;
6. Dewan Direksi pejabat yang berhak menghukum dan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.

The mechanism for handling violation reporting is as follows:

1. *The reporter submits a report on suspected irregularities received by the System (Company Website, Email, SMS and Telephone);*
2. *The Team ensures the Reporting Party's willingness to disclose his identity;*
3. *The team registers reporting which is carried out intensively by the reporting system that has been available;*
4. *The team performs reporting validation and analysis and compiles reports to be submitted to the Board of Directors;*
5. *The Board of Directors submits recommendations to the Official who has the right to examine or the Team appointed to carry out fact finding and/or examination in accordance with applicable Company regulations;*
6. *Board of Directors, officials who have the right to punish and impose sanctions on employees who are proven to have committed violations.*

Pihak yang Mengelola Pengaduan *Parties Managing Whistleblowing*

Perusahaan memberikan wewenang kepada Tim Kepatuhan GCG untuk mengelola pengaduan atas Pelanggaran. Tim Kepatuhan GCG bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Tim Kepatuhan GCG terdiri dari Bagian HRD dan *Sustainability*.

The company authorizes the GCG Compliance Team to manage complaints of violations. The GCG Compliance Team is directly responsible to the President Director. The GCG Compliance Team consists of the HRD and Sustainability Divisions.

Laporan yang Diterima Selama Tahun 2020 *Reports Received During 2020*

Selama periode tahun 2020, tidak terdapat pelaporan kasus pelanggaran yang terjadi di dalam Perusahaan.

During the period of 2020, there were no reports of cases of violations occurring within the Company.

Berdasarkan *resume* hasil penerapan *Whistleblowing System* sepanjang tahun 2020 tidak terdapat laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System*. Sehingga bisa disimpulkan bahwa selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilaporkan oleh karyawan kepada Tim Pengelola dan Pengaduan Pelanggaran.

Based on the resume of the results of the implementation of the Whistleblowing System throughout 2020, there were no reports of violations reported through the Whistleblowing System mechanism. Thus, it can be concluded that during 2020, there were no violations or violations reported by employees to the Management and Complaints of Whistleblowing Team.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Komitmen Perusahaan untuk menerapkan asas transparansi dalam GCG direalisasikan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan tahunan, dan siaran pers serta informasi lainnya yang dapat diakses oleh seluruh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, teknologi informasi dan komunikasi yang andal dibutuhkan Perusahaan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik secara luas dan tepat.

Dalam hal keterbukaan informasi, Perusahaan mengacu kepada ketentuan Peraturan OJK nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Perusahaan. Kegiatan komunikasi Perusahaan kepada publik sepanjang tahun 2020 dilakukan juga melalui situs www.pinagoutama.com yang isinya mengacu kepada Peraturan OJK nomor 08/POJK.04/2015.

Informasi terkait kinerja dan aksi korporasi Perusahaan disampaikan kepada publik melalui press release dan laman Perusahaan. Perusahaan akan menyampaikan transparansi penyampaian Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, serta Siaran Pers sebagai berikut:

The Company's commitment to implement the principle of transparency in GCG is realised through the submission of financial reports, annual reports, and press releases and other information that can be accessed by all investors and other stakeholders. For this reason, reliable information and communication technology is needed by the Company to support the delivery of information to the public, widely and precisely.

In terms of information disclosure, the Company refers to the provisions of OJK Regulation number 31/POJK.04/2015 concerning disclosure of information or material facts by the Company. The Company's communication activities to the public throughout 2020 are also carried out through the website www.pinagoutama.com whose contents refer to OJK Regulation number 08/POJK.04/2015.

Information related to the performance and corporate actions of the Company is conveyed to the public through press releases and Company's website. The Company will convey the transparency of submission of Financial Statement, Annual Reports, and Press Releases as follows:

Materi Pengumuman Announcement Material	Media
Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements	Website Perusahaan Company Website
Laporan Tahunan Annual Report	Website Perusahaan dan Website Bursa Efek Indonesia Company Website and Indonesia Stock Exchange Website
Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Consolidated Interim Financial Report	Website Perusahaan Company Website
Informasi Saham Shares Information	Website Perusahaan Company Website

Sedangkan untuk daftar Siaran Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

While the list of Press Releases issued by the Company during 2020 are as follows.

Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
31 Agustus 2020 August 31, 2020	Press release IPO PT Pinago Utama Tbk Press release of the IPO of PT Pinago Utama Tbk

Akses Informasi Eksternal

External Information Access

Perusahaan secara rutin akan menerbitkan laporan tahunan setiap tahun. Laporan ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan. Laporan Tahunan dan informasi lainnya dapat diperoleh di laman Perusahaan.

The Company will regularly publish annual reports every year. Reports are written in two languages, namely Indonesian and English, which present information about the Company's performance. Annual reports and other information can be obtained at the Company's website.

Perusahaan membuka akses bagi para pemegang saham, pemangku kepentingan, investor dan masyarakat luas untuk menyampaikan pendapat, keluhan maupun pertanyaan melalui berbagai sarana komunikasi atau dengan menghubungi:

The Company opens access for shareholders, stakeholders, investors and the wider community to express their opinions, complaints and questions through various means of communication or by contacting:

Sekretaris Perusahaan : Meli Tantri
Hubungan Investor : Meli Tantri
Telp : 0711 (825999)
Alamat : Kantor Palembang

Company Secretary : Meli Tantri
Investor Relations : Meli Tantri
Telephone : 0711 (825999)
Address : Palembang Office

Akses Informasi Internal

Internal Information Access

Intensitas komunikasi internal merupakan kunci penyebaran informasi perusahaan dan alat untuk membangun soliditas tim kerja. Keberhasilan komunikasi internal sangat ditunjang dari muatan informasi yang disebarkan, serta media komunikasi itu sendiri. Kedua hal ini sangat saling terkait agar seluruh karyawan dapat mengerti informasi yang disampaikan dengan cepat dan tepat dapat menindaklanjuti informasi tersebut.

The intensity of internal communication is the key to disseminating company information and tools to build the work team's solidity. The success of internal communication is greatly supported by the content of information disseminated, as well as the communication media itself. Both of these are very interrelated so that all employees can understand the information conveyed quickly and precisely can follow up on the information.

Dalam hal penunjang komunikasi internal, Perusahaan mengembangkan berbagai sarana seperti Aplikasi *Online* dan media sosial internal lainnya.

In terms of supporting internal communication, the Company develops various facilities, such as Online Application and other internal social media.



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors

Pesatnya perkembangan dunia melahirkan berbagai tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh Perusahaan. Kondisi geopolitik, iklim usaha, perkembangan teknologi serta perubahan-perubahan hukum, sosial dan ekonomi menjadi indikator yang perlu diperhatikan oleh seluruh karyawan Perusahaan agar terus dapat menyesuaikan diri. Untuk itu, keberadaan profesional dari beragam latar belakang disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh Perusahaan dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan di masa mendatang atau kebijakan-kebijakan strategis yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Hal tersebut bertujuan agar Perusahaan senantiasa beradaptasi dan bersinergi dengan kondisi-kondisi di sekitarnya serta menghasilkan keuntungan bisnis yang optimal.

The rapid development of the world has given birth to various new challenges that must be prepared for the Company to face. Geopolitical conditions, business climate, technological developments and legal, social and economic changes are indicators that need to be considered by all employees of the Company to continue to adjust. For this reason, the existence of professionals from a variety of disciplinary backgrounds is urgently needed by the Company in preparing future policy planning or strategic policies that are needed at any time. It is intended that the Company always adapt and synergize with the conditions around it and produce optimal business benefits.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Determination of the composition of the Board of Commissioners and Directors is carried out by considering the needs and complexity of the Company. The composition of the Board of Commissioners and Directors is based on knowledge, expertise, professional experience, background to support the effectiveness of the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The company provides opportunities for everyone, therefore the nomination of candidates for the Board of Commissioners and Directors is reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or source of initial recommendations.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Usia Age	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>				
Wilson Sutantio	Komisaris Utama	SMA	61 tahun	Manajemen Perusahaan
	<i>President Commissioner</i>	<i>Senior High School</i>	<i>61 years of age</i>	<i>Company's Management</i>
Hasan Tantri	Komisaris	Master's Degree	64 tahun	Manajemen Perusahaan dan Engineering
	<i>Commissioner</i>		<i>64 years of age</i>	<i>Company's Management and Engineering</i>



Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Usia Age	Keahlian Expertise
Chairul Muluk	Komisaris Independen	Doctorate Degree	63 tahun	Manajemen Perusahaan dan Perkebunan (Agronomi)
	<i>Independent Commissioner</i>		<i>63 years of age</i>	<i>Company' Management and Plantation (Agronomy)</i>
Direksi Board of Directors				
Bambang Palgoenadi	Direktur Utama	Bachelor's Degree	62 tahun	Manajemen Perusahaan dan Mekanisasi Perkebunan
	<i>President Director</i>		<i>62 years of age</i>	<i>Company's Management and Plantation Mechanization</i>
Meli Tantri	Direktur Keuangan dan Komersil	Bachelor's Degree	54 tahun	Manajemen Keuangan Perusahaan
	<i>Director of Finance and Commerce</i>		<i>54 years of age</i>	<i>Company's Financial Management</i>
Raymon Wahab	Direktur Proccesing dan Industri	Bachelor's Degree	53 tahun	Manajemen Industri Pengolahan & Engineering
	<i>Director of Processing and Industry</i>		<i>53 years of age</i>	<i>Processing Industry Management & Engineering</i>
Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun	Bachelor's Degree	47 tahun	Manajemen Perkebunan, Budget Control, Keuangan
	<i>Director of Plantation</i>		<i>47 years of age</i>	<i>Plantation Management, Budget Control, Finance</i>
Komaruzzaman	Direktur Umum	Master's Degree	59 tahun	Manajemen SDM, Umum
	<i>Director of General Affairs</i>		<i>59 years of age</i>	<i>HC Management, GA.</i>







PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries



06

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Corporate Sosial Responsibility



Sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizenship*), pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh Perseroan yang menjalankan usahanya di tengah masyarakat dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

As a good corporate citizen, the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program is part of the moral responsibility that must be performed by the Company that runs its business in the community and interacts with numerous stakeholders.

Perseroan meyakini, eksistensi suatu entitas akan diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bilamana tanggung jawab sosial dan lingkungan dijalankan secara benar dan bertanggungjawab.

The Company convinces the existence of an entity will be well-received by the community and other stakeholders should social and environmental responsibility be conducted, correctly and responsibly.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial *Governance of Social Responsibilities*

Komitmen Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Commitment to Implementing Corporate Social Responsibility Programs*

PT Pinago Utama Tbk memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pemangku

PT Pinago Utama Tbk does have a strong commitment to actively contributing towards growing a better quality of life with stakeholders,



kepentingan yang diwujudkan dengan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam seluruh kegiatan usaha. Tanggung jawab sosial ini merupakan wujud kepedulian secara berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan pegawai, mengutamakan terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Perseroan memiliki keyakinan kuat bahwa sinergi antara kegiatan CSR dan kinerja bisnis berperan penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Perseroan menerapkan kebijakan strategis dalam implementasi CSR untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR Perseroan mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 maupun UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Regulasi ini menjadi landasan sekaligus pedoman bagi Perseroan untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial yang baik dan merata di seluruh Aspek.

which is effectuated by the realisation of integrated social and environmental responsibility in the entire business activities. This social responsibility is a form of ongoing concern for the environment, respect for human rights, the obligation to grant a convenient place and a good working relationship with employees, prioritise the maintenance of occupational health and safety and participate in developing the economy as well as local communities.

The Company believes that the synergy between CSR activities and business performance plays a major role in achieving sustainable growth. The Company implements a strategic policy in implementing CSR to foster a conducive and sustainable business climate. The implementation of Corporate CSR refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies article 74 as well as Law No. 25 of 2007 concerning Investment.

This regulation becomes the foundation as well as a guideline for the Company to carry out good and equitable social responsibility in all aspects.

Metode dan Lingkup *Due Diligence* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perseroan

Method and Scope of Due Diligence on Social, Economic, and Environmental Impacts of the Company's Activities

Perseroan menyadari, sekecil apapun, aktivitas operasional yang dijalankan memberikan dampak baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, hingga akhir tahun 2020, Perseroan belum melakukan *Due Diligence* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari operasional Perseroan terhadap pemangku kepentingan.

Perseroan menyadari, *Due Diligence* dibutuhkan untuk memetakan dampak dan pengaruh dari setiap pemangku kepentingan terhadap Perseroan. *Due Diligence* juga dapat menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja khususnya yang berkaitan dengan program CSR Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan melaksanakan *Due Diligence* pada tahun buku 2020 seiring dengan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Hingga saat ini, perumusan strategi pelaksanaan program CSR masih berdasarkan hasil diskusi di tingkat internal mengenai dampak dan kontribusi serta keterkaitan dengan strategi Perseroan secara umum.

The Company notices, no matter how diminutive it is, the operational activities performed by the Company have a useful force on social, economic, and environmental aspects towards all stakeholders. Nevertheless, until the end of 2020, the Company has not conducted Due Diligence on the social, economic, and environmental impacts of the Company's operations on stakeholders.

The Company understands that due diligence is necessary to notice the result and influence of each stakeholder on the Company. Due Diligence can also be the basis for preparing work plans related to the Company's CSR programs, specifically. For this reason, the Company will implement Due Diligence in the fiscal year 2020 in line with the preparation of the Sustainable Financial Action Plan under POJK Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

In a recent moment, the formulation of approaches for implementing CSR programs is still based on the results of discussions at the internal level regarding the impact and contribution as well as the relationship

Perseroan telah menetapkan pilar-pilar utama dalam pelaksanaan program CSR, yaitu pada bidang:

- Bidang Sosial
- Bidang Lingkungan hidup
- Bidang Ketenagakerjaan

with the Company's strategy in general. The Company has established the main pillars in the implementation of CSR programs, namely in the fields of:

- *Social Field*
- *Environmental Field*
- *Employee Field*

Stakeholder Penting yang Terdampak dan Berdampak dari Kegiatan Perseroan *Pivotal Stakeholders Affected and Impacted from the Company's Activities*

Sebagai Perseroan yang bergerak di industri kelapa sawit terintegrasi, Perseroan umumnya berinteraksi dengan berbagai *stakeholder* yang berasal dari beragam bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, Perseroan juga tidak menafikan keberadaannya sebagai perusahaan publik yang memiliki jangkauan yang lebih luas.

As an entity works in integrated palm oil industry, the Company associates with various stakeholders who come from various fields, both directly and indirectly. Notwithstanding, the Company does not deny its being as a public company that has a wider reach.

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan pelibatan *stakeholder* guna meningkatkan nilai pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* yang signifikan terkait dengan kegiatan, strategi dan program kerja perseroan dapat dipetakan sebagai berikut:

The Company is committed to strengthening stakeholder involvement to enhance the value of shareholders and other stakeholders. Significant stakeholders related to the Company's activities, strategies, and work programs can be imparted as follows:

Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i>	Berdampak <i>Affected</i>	Terdampak <i>Impacted</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Kebijakan Perseroan <i>Company's Policy</i>	Kinerja Perseroan <i>Company's performance</i>
Pemerintah/Regulator <i>Government/Regulator</i>	Peraturan perundang-undangan <i>Laws and regulations</i>	Kinerja Perseroan <i>Company's performance</i>
Masyarakat <i>Community</i>	Potensi pelanggan <i>Customer's potential</i>	Sosial, ekonomi dan lingkungan <i>Social, economics, and environment</i>
Nasabah <i>Customer</i>	Kinerja Perseroan <i>Company's performance</i>	
Karyawan <i>Employee</i>	Kinerja Perseroan <i>Company's performance</i>	Sosial dan ekonomi <i>Social and Economics</i>
Mitra Kerja <i>Business Partner</i>		
Media Massa <i>Mass Media</i>	• Citra Perseroan • Informasi <i>public</i> • <i>Company's image</i> • <i>Public disclosure</i>	
Lingkungan <i>Environment</i>	Pencemaran lingkungan <i>Environmental pollution</i>	Bencana alam <i>Natural Disaster</i>



Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Penting Terkait Dampak Kegiatan Perseroan *Significant Social, Economic, and Environmental Issues Related to the Impact of the Company's Activities*

Penetapan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang terkait dampak dari kegiatan Pinago Utama dilakukan oleh Perseroan secara internal. Perseroan belum melibatkan pihak eksternal dalam penetapan isu dan risiko sosial, ekonomi dan lingkungan.

The resolution of significant social, economic, and environmental issues related to the impact of Pinago Utama activities is internally carried out by the Company. The Company has not involved external parties in arranging social, economic and environmental issues and hazards.

Isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang menjadi prioritas Perseroan dan metode pelibatan yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

Significant social, economic, and environmental issues which are the priority of the Company and the engagement methods that have been implemented are as follows:

Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i>	Isu Penting <i>Significant Issues</i>	Metode Pelibatan <i>Methods</i>
Pemegang Saham	- Kinerja keuangan - Kinerja non-keuangan - Kinerja sepanjang tahun tentang tata kelola, kinerja keuangan, non-keuangan, dan lain-lain	- Pelaporan Kinerja - RUPS
<i>Shareholders</i>	<i>Financial performance</i> <i>Non-financial performance</i> <i>Year-round performance on governance, financial, non-financial performance, etc.</i>	<i>Performance Report</i> <i>GMS</i>
Pemerintah/Regulator	Informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pelaporan pelaksanaan Kepatuhan dan Notifikasi pada Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): - Laporan Bulanan - Laporan Tribunalan - Laporan Tahunan
<i>Government/Regulator</i>	<i>Information about compliance with applicable statutory provisions</i>	<i>Reporting the implementation of Compliance and Notification to the Government and the Financial Services Authority (FSA):</i> <i>Monthly Report</i> <i>Quarterly Report</i> <i>Annual Report</i>
Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat	- Jenis program CSR - Cara mengoptimalkan pencapaian program CSR - Informasi tentang kegiatan perseroan	Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan
<i>Community and Non-Governmental Organizations</i>	<i>Types of CSR programs</i> <i>How to optimise the achievement of CSR programs</i> <i>Information about the Company's activities</i>	<i>Strategic cooperation to run Corporate Social Responsibility programs, both in the social and environmental fields</i>

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu Penting Significant Issues	Metode Pelibatan Methods
Pelanggan	- Keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi - Kemudahan mendapatkan kredit - Informasi produk dan layanan yang jelas dan transparan - Mendapatkan kepuasan layanan	- Website dan <i>frontline information</i> - Kunjungan langsung - Layanan <i>contact center</i> - Survei Kepuasan Nasabah
Customer	<i>Safety and comfort when transacting</i> <i>Ease of getting credit</i> <i>Clear and transparent product and service information</i> <i>Get service satisfaction</i>	<i>Website and frontline information</i> <i>Direct visits</i> <i>Contact center services</i> <i>Customer Satisfaction Survey</i>
Karyawan	- Sosialisasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian - Kesetaraan kesempatan - Pengembangan karier, pelatihan dan lain-lain - Tingkat kepuasan pegawai, menjangkau harapan mereka.	- Media Internal - Survei Kepuasan Pegawai
Employee	<i>Dissemination of policies and strategies relating to staffing</i> <i>Equal opportunity</i> <i>Career development, training, and others</i> <i>Level of employee satisfaction, capturing their expectations.</i>	<i>Internal Media</i> <i>Employee Satisfaction Survey</i>
Mitra Kerja	- Proses pengadaan yang obyektif - Kerja sama saling menguntungkan, transparan dan adil	Kontrak kerja
Business Partner	<i>An objective procurement processes</i> <i>Mutually beneficial, transparent and fair cooperation</i>	<i>employment contract</i>
Media Massa	- Kinerja keuangan - Kinerja non-keuangan - Dampak dan kinerja kegiatan sosial dan lingkungan Perseroan - Informasi tentang kegiatan perseroan - Informasi terbaru terkait bisnis jaminan kredit yang perlu diketahui oleh publik	<i>Press release</i> <i>Press conference</i>
Mass Media	<i>Financial performance</i> <i>Non-financial performance</i> <i>Impact and performance of the company's social and environmental activities</i> <i>Information about company activities</i> <i>Latest information regarding the necessary business credit guarantees</i> <i>Known to the public</i>	



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu Penting Significant Issues	Metode Pelibatan Methods
Lingkungan	- Pencemaran lingkungan - Kebakaran Hutan, Perkebunan dan Lahan	Komitmen terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki seperti AMDAL.
<i>Environment</i>	<i>Environmental pollution</i> <i>Forest, Plantation and Land Fires</i>	<i>Commitment to owned environmental documents, such as AMDAL.</i>

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Scopes of Corporate Social Responsibility

Pelaksanaan program CSR yang dijalankan Perseroan diarahkan sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 21 Oktober 2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur. Selain itu, Perseroan juga mengacu pada ISO 26000 yang mengatur lingkup tanggung jawab sosial menjadi 7 bidang utama, yaitu:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Operasi Yang Adil;
4. Lingkungan Hidup;
5. Ketenagakerjaan;
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan; dan
7. Masyarakat.

Rincian tiap-tiap kategori tanggung jawab sosial akan disajikan dalam secara rinci pada tiap-tiap bagian yang terkait dalam Laporan Tahunan ini.

The implementation of CSR programs run by the Company is guided under United Nations Resolution (UN) on October 21, 2015, concerning Sustainable Development Goals (SDGs) consisting of 17 goals with 169 measurable achievements. Besides, the Company also refers to ISO 26000 which regulates the scope of social responsibility into 7 main domains, viz.:

1. *Governance of Social Responsibility;*
2. *Human Rights;*
3. *Fair operation;*
4. *Environment;*
5. *Employment;*
6. *Fulfilment of Customer Interests; and*
7. *Society.*

The details of each category of social responsibility would be exhibited in detail in each of the relevant sections in this Annual Report.



Program Kerja *Work Program*

- | | |
|--|---|
| 1. Bidang Pemberdayaan Ekonomi & Pengembangan Masyarakat | 1. <i>Economic Empowerment & Community Development</i> |
| 2. Bidang Pendidikan | 2. <i>Education</i> |
| 3. Bidang Kesehatan | 3. <i>Health</i> |
| 4. Bidang Keagamaan dan Sarana Ibadah | 4. <i>Religious Affairs and Facilities of Worship</i> |
| 5. Bidang Infrastruktur | 5. <i>Infrastructure</i> |
| 6. Bidang Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan | 6. <i>Sports and Youth Development</i> |
| 7. Bidang Bina Lingkungan | 7. <i>Community Development</i> |
| 8. Bidang <i>Stakeholder Relation</i> (Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dan Kampanye) | 8. <i>Stakeholder Relations (Relations with Stakeholders and Campaigns)</i> |
| 9. Bidang Donasi kegiatan Masyarakat dan Kemanusiaan | 9. <i>Donation for Community and Humanitarian activities</i> |
| 10. Kegiatan Sosial karyawan | 10. <i>Employee social activities</i> |
| 11. Bidang Tanggap Darurat Bencana Alam & Kemanusiaan (Kabut Asap, Kebakaran, Banjir, dll) | 11. <i>Natural & Humanitarian Response Sector (Haze, Fire, Flood, etc.)</i> |

Anggaran CSR *CSR Budget*

Anggaran CSR disusun oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan diajukan kepada Bagian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran untuk kemudian masuk kedalam rencana kerja anggaran tahun berikutnya, selanjutnya anggaran tersebut disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Adapun besaran anggaran ditetapkan berdasarkan hasil realisasi tahun sebelumnya dan diproyeksikan sesuai dengan rencana dan program kerja CSR yang telah ditetapkan.

Anggaran CSR 2019: Rp1.350.000.000, **Realisasi:** Rp1.341.723.419
Anggaran CSR 2020: Rp1.120.000.000; **Realisasi Biaya:** Rp1.114.419.861.

The CSR budget is planned by the Corporate Secretariat Division and proffered to the Budget Planning and Control Section and then entered into the following year's budget work plan, then the budget is submitted to the Directors for approval. The budget amount is determined based on the results of the prior year's realization and is projected under the CSR plans and work programs that have been set.

CSR Budget 2019: Rp1,350,000,000; **Realization:** Rp1,341,723,419
CSR Budget 2020: Rp1,120,000,000; **Realization:** Rp1,114,419,861.



Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia *Social Responsibility Related to Human Rights*

Komitmen dan Kebijakan *Commitment and Policy*

Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak asasi manusia, baik hak asasi yang berkaitan dengan karyawan Perseroan maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan hak asasi manusia di Perseroan juga ditujukan untuk membangun citra Perseroan dan menjadi daya tarik bagi investor, calon pelanggan dan calon karyawan.

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dari seluruh karyawannya dijunjung dengan tinggi, antara lain meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah.

The Company pays prominent attention to the fulfilment of human rights, both those relating to the Company's employees and other stakeholders. The fulfilment of human rights at the Company is as well intended to create a corporate image and is as an attraction for the investors, prospective customers, and considered employees.

In leading the business, the Company pledges that the human rights of all its employees are profoundly respected, including the prevention of acts of discrimination, freedom of association, arrangements for working hours, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship.

Isu-Isu HAM Terkait Kegiatan Perseroan *Issues of Human Rights Related to the Company's Activities*

Eksistensi Perseroan sebagai entitas yang bergerak di bidang kelapa sawit terintegrasi menjadikan Perseroan rentan terhadap berbagai macam isu, termasuk isu hak asasi manusia yang disebabkan oleh kegiatan operasional. Isu-isu yang dimaksud merupakan perkara yang menyentuh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak internal dan eksternal. Selama tahun 2020, isu-isu hak asasi manusia yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan mencakupi:

a. **Penyetaraan gender tenaga kerja wanita**

Dalam pengelolaan Perseroan, Manajemen berkomitmen untuk **menjunjung tinggi kesetaraan gender** antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja perempuan di Perseroan saat ini yang mencapai lebih kurang 695 orang dan beberapa diantaranya menduduki jabatan level manajerial yaitu Direktur Keuangan, *Manager HRD*, *Manager Sustainability* dan Asisten Kepala Export.

b. **Mempekerjakan tenaga kerja anak-anak**

Perseroan berkomitmen untuk **tidak mempekerjakan tenaga kerja anak-anak** di seluruh unit usahanya dan tertuang dalam *Standar Procedure Operational* *Penerimaan Karyawan* No. PU/SOP/HRD/08.1.0.01 yang mempersyaratkan usia calon tenaga kerja yang harus minimal 18 tahun. Perseroan juga melarang seluruh karyawan untuk membawa/melibatkan anak-anaknya pada saat melaksanakan pekerjaannya di lokasi kerja. Untuk

The existence of the Company as an entity engaged in integrated palm oil makes the Company unsafe to a variety of issues, including human rights issues caused by the Company's operational activities. The issues in question are cases that involve directly or indirectly to the internal and external parties. During 2020, human rights issues related to the Company's activities include:

a. **Gender equality of female workers**

In managing the Company, the Management is committed to upholding gender equality between male and female workers. This can be seen from the number of female workers in the company which currently reaches approximately 695 people and some of them hold managerial positions, namely Finance Director, HRD Manager, Sustainability Manager and Export Assistant Head.

b. **Employing child labour**

The Company is committed not to employing child labour in all of its business units and is revealed in the Standard Operating Procedure for Employee Admission No. PU/SOP/HRD/08.1.0.01 which requires the age of prospective workers to be at least 18 years old. The Company also prohibits all employees from bringing/ involving their children when carrying out their work at the work location. To anticipate this, the Company carries out socialization

mengantisipasi hal tersebut Perseroan melaksanakan sosialisasi dan inspeksi di tempat kerja termasuk menyediakan fasilitas penitipan anak di masing-masing unit kerja.

c. Diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas

Perseroan berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas salah satu wujud nyata yang telah dilakukan, yaitu Perseroan tetap mempekerjakan tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dengan pengaturan beban kerja sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan tenaga kerja tersebut.

Perseroan menyadari bahwa perkara dan permasalahan merupakan domain yang tidak terelakkan. Dengan demikian, untuk mengurangi dampak kegiatan operasional Perseroan terhadap hak asasi manusia, Perseroan telah dan akan melakukan mitigasi yang lebih sistematis sebagai manifestasi kesungguhan Perseroan dalam menghadapi isu-isu yang telah terjadi dan mengurangi efek domino di kemudian hari.

and inspections in the workplace, including providing child care facilities in each work unit.

c. Discrimination against workers with disabilities

The Company is committed to not discriminating against workers with disabilities. One of the concrete manifestations that has been done is that the Company continues to employ workers who experience disabilities due to work accidents by arranging workloads in accordance with the abilities and abilities of these workers.

The Company realises that cases and predicaments are an inevitable domain. Thus, to reduce the impact of the Company's operational activities on human rights, the Company has and is about to carry out more well-organised mitigation as a manifestation of the Company's enormity in dealing with issues that have befallen and in reducing the domino effect in the future.

Risiko Pelanggaran HAM

Risks of Human Rights Violation

Kendati tidak memiliki isu-isu HAM berat yang berkaitan dengan aktivitas Perseroan, namun pelanggaran terhadap ketentuan HAM juga memberikan risiko baik bagi Perseroan maupun pemangku kepentingan. Risiko yang dihadapi Perseroan dan juga pemangku kepentingan terkait pelanggaran HAM adalah permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun hubungan industrial, serta risiko kerugian material dan non-material yang terkait dengan citra Perseroan.

Although they do not have serious human rights issues related to the Company's activities, violations of human rights requirements also pose risks for both the Company and the stakeholders. The risks faced by the Company and stakeholders related to human rights violations are legal issues, both civil, criminal and industrial relations, as well as the risk of material and non-material losses related to the Company's image.

Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan

Activities Plans and Implementation

Perseroan berkomitmen untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan terkait HAM, baik yang berlaku bagi karyawan maupun nasabah. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan HAM bagi karyawan
 - a. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Merujuk pada Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Membentuk Organisasi.

The Company is committed to fulfilling various human rights related provisions, both those that apply to employees and customers. Fulfilment of these provisions can be elucidated as follows:

1. *Fulfilment of human rights for employees*
 - a. *Freedom of Association and Association Referring to Presidential Decree No. 83 of 1998 concerning Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Form Organizations.*



Pendirian Serikat Kerja Karyawan

Berdasarkan SK No. 030/Nakertrans/SPSB/2015 pada tanggal 12 Februari 2015.

Establishment of Employees' Unions

Based on Decree No. 030/Nakertrans/SPSB/2015 dated on February 12, 2015

b. Terbebas dari Praktik Kerja Paksa

Waktu kerja yang berlaku di Perseroan adalah sesuai dengan pasal 77 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Waktu kerja karyawan Perseroan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

b. Free from Forced Labour Practices

The working time in force in the Company is in accordance with article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which is 40 hours a week. The Company's employee's work time can be explained in the following table:

Uraian Description	Pegawai Non-Shift Non-Shift Employee	Pegawai Shift Shift Employee
Hari kerja	a. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (kebun dan pabrik) b. 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (kantor Palembang)	Sesuai dengan jadwal shift dgn hitungan hari pertama s.d hari keenam kerja efektif, hari ketujuh off day/libur
Working days	a. 6 (six) working days in 1 (one) week (plantation and factory) b. 5 (five) working days in 1 (one) week (Palembang office)	In accordance with the shift schedule with a count of the first day to the sixth day of effective work, the seventh day off/holiday
Jam kerja	a. 7 (tujuh) jam kerja efektif sehari & 40 (empat puluh) jam efektif seminggu (kebun dan pabrik) b. 8 (delapan) jam efektif sehari & 40 (empat puluh) jam efektif seminggu (kantor Palembang)	7 (tujuh) jam kerja efektif sehari & 40 (empat puluh) jam efektif seminggu
Working hours	a. 7 (seven) effective working hours a day & 40 (forty) effective hours a week (gardens and factories) b. 8 (eight) effective hours a day & 40 (forty) effective hours a week (Palembang office)	7 (seven) effective working hours a day & 40 (forty) effective hours a week
Hak cuti	12 (dua belas) hari setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut 12 (twelve) days after working for 12 consecutive months	12 (dua belas) hari setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut
Leave rights		12 (twelve) days after working for 12 consecutive months

Dengan ketentuan di atas, Perseroan memastikan tidak terdapat praktik kerja paksa yang terjadi karena pekerja memiliki waktu istirahat yang cukup. Sejak pertama kali berdiri hingga saat ini tidak terdapat laporan kasus kerja paksa di lingkungan kerja Perseroan.

Based on the aforementioned provisions, the Company assures that no forced labour practices happen since the workers have adequate rest periods. Since it was first established up to now, there have been no reports of forced labour circumstances in the Company's work environment.

a. Tidak Mempekerjakan Tenaga di Bawah Umur

Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di Pinago Utama. Hal ini dituangkan dalam persyaratan penerimaan pegawai yang mensyaratkan calon pegawai minimal harus berusia 18 tahun dan sudah memiliki e-KTP.

a. Do not Employ the Underage

The Company ensures that no underage workers are working at Pinago Utama. This is declared in the recruitment requirements that demand that prospective employees must be at least 18 years of age and have had e-ID

b. Cuti

Cuti Tahunan:

1. Karyawan yang telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.
2. Dengan tidak mengurangi hak cuti karyawan, maka penggunaan hak cuti tahunan diatur sebagai berikut:
 - a. Sebanyak-banyaknya 8 (delapan) hari digunakan dalam cuti bersama yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang disesuaikan dengan penetapan kalender kerja tahunan Perseroan;
 - b. Sisanya digunakan oleh masing-masing karyawan menurut kepentingannya dengan memperhatikan kelancaran pekerjaan dan persetujuan atasannya.
3. Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari timbulnya hak cuti Karyawan tidak menggunakan hak hari cutinya, maka hak cuti tahunan akan gugur/hangus.
4. Permohonan cuti tahunan harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.

Cuti Bersalin/Keguguran:

1. Karyawan wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan yang menangani/merawatnya.
2. Karyawan wanita wajib mengambil cuti bersalin seperti diatur dalam ayat 1 pasal ini.
3. Karyawan wanita yang mengalami keguguran kandungan dapat diberikan izin berdasarkan surat keterangan Dokter/ Bidan atau maksimal selama 1,5 (satu setengah) bulan.
4. Dalam hal cuti bersalin/keguguran bersamaan dengan cuti bersama yang ditetapkan Perseroan maka jumlah hari cuti bersalin/keguguran yang dimaksud dalam ayat 1 dan 3 sudah diperhitungkan dengan cuti bersama tersebut.
5. Karyawan wanita yang akan melaksanakan cuti bersalin harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada atasan langsung yang bersangkutan disertai dengan surat keterangan dokter/bidan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan cuti melahirkan tersebut.

1. Pemenuhan HAM bagi Mitra Kerja

- a. Ruang Tunggu/Aula
Menyediakan ruang tunggu khusus dan rapat untuk mitra kerja yang berkunjung ke Kantor.
- b. Call Centre
Perseroan menyediakan fasilitas *call center* bagi mitra kerja untuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan, serta sebagai sarana pengaduan dan penyampaian keluhan pelanggan.

b. Leave

Annual Leave:

1. *Employees who have worked for 1 (one) year or 12 (twelve) consecutive months are entitled to 12 (twelve) working days of annual leave.*
2. *Without prejudice to employee leave rights, the use of annual leave entitlements is regulated as follows:*
 - a. *A maximum of 8 (eight) days are used in joint leave, the implementation of which will be regulated in separate provisions which are adjusted to the determination of the Company's annual work calendar;*
 - b. *The rest is used by each employee according to their interests with due regard to the smooth running of the job and the approval of their superiors.*
3. *If after the 12 (twelve) months after the employee's leave entitlement arises, the employee does not exercise his/her leave day right, the annual leave entitlement will be invalid.*
4. *Requests for annual leave must be submitted at least 7 (seven) calendar days before implementation.*

Delivery/Miscarriage Leave:

1. *Female employees are entitled to rest for 1.5 (one and a half) months before the time to give birth to a child and 1.5 (one and a half) months after giving birth to a child according to the calculation of the obstetrician or midwife who handles/cares for them.*
2. *Female employees are required to take maternity benefits as regulated in paragraph 1 of this article.*
3. *Female employees who experience a miscarriage can be granted permission based on a doctor/midwife certificate or for a maximum of 1.5 (one and a half) months.*
4. *In the case of maternity leave/miscarriage together with joint leave determined by the Company, the number of days of maternity leave/miscarriage referred to in paragraphs 1 and 3 have been calculated with such joint leave.*
5. *Female employees who are going to take maternity leave must first submit an application to their immediate supervisor accompanied by a doctor/midwife's certificate no later than 7 (seven) days prior to the implementation of the maternity leave.*

1. Fulfilment of Human Rights for the Business Partner

- a. Waiting Room/Hall
Providing special waiting rooms and meetings for business partners who visit the Office.
- b. Call Centre
The Company affords call centre facilities for customers to gain information related to the products and services offered, as well as a means for customer complaints and complaints.



Call Centre Perseroan adalah pada nomor akses 0711 (825999) yang dapat dihubungi selama jam kerja. Selain itu, Perseroan menyediakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi dengan mitra kerja, yaitu:

Email : corporate.secretary@pinagoutama.com

Website : www.pinagoutama.com

The Company's Call Centre is on the access number 0711 (825999) which can be contacted within work hours. Furthermore, the Company provides social media as a means of communication with business partner, viz.:

Email : corporate.secretary@pinagoutama.com

Website : www.pinagoutama.com

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM

Procedure and Mechanism for Complaints of Human Rights Violations

Tatkala terjadi pelanggaran HAM, Perseroan telah memiliki sarana pengaduan dan mekanisme penyelesaiannya, sebagai berikut:

When human rights violations occur, the Company has a complaint facility and its resolution mechanism, as follows:

Pelapor Informant	Sarana yang Digunakan Means Used	Mekanisme Penyelesaian Settlement Mechanism
Karyawan <i>Employee</i>	Serikat Pekerja <i>Labour Union</i>	Perundingan Bipartit, Tripartit hingga Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial <i>Bipartite negotiations, Tripartite until the Industrial Relations Dispute Court</i>
Mitra Kerja <i>Business Partner</i>	<i>Customer Satisfaction</i>	1. Menerima keluhan 2. Verifikasi data 3. Analisa dan persiapan 4. Keluhan selesai 5. Kunjungan langsung dari mitra kerja 1. Receiving complaints 2. Data verification 3. Analysis and preparation 4. Complaint finished 5. Visit from business partner
Masyarakat <i>Public</i>	Call centre, Customer Service, dan Media Sosial <i>Call centre, Customer Service, and Social Media</i>	Perundingan <i>Deliberation</i>

Dampak Kegiatan dan Pencapaian

Impact of Activities and Achievements

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat laporan, baik dari karyawan maupun pelanggan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perseroan.

Until the end of 2020, there were no reports, either from employees or customers related to human rights violations committed by the Company.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibilities Related to Fair Operations

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Perseroan tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil, yaitu kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System (WBS)*, *Code of Conducts* dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan praktik pengembangan usaha yang sehat tanpa merugikan pihak manapun. Demikian juga halnya dengan hubungan dengan mitra kerja dan *vendor*. Perseroan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan.

The Company is committed to implementing business development by promoting fair operating principles. The Company complies with and obeys any applicable laws and regulations. The Company has various policies that regulate fair operations, namely internal control policies, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, and gratification policies. This policy is specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing sound business activities.

Forbye, the Company runs a safe and sound business development practices without harming any party. Furthermore, relationships with work partners and vendors. The Company performs the process of procuring goods and services, transparently.

Target dan Rencana Kegiatan

Target and Activity Plan

Perseroan senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

The Company remains to target in its annual planning to assure the implementation of all fair operating policies. Any violations that transpire will be subject to unequivocal sentences under the Company's policy and applicable regulations.

Pelaksanaan Kegiatan

Implementation of Activities

1. Pengendalian Internal
Perseroan telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal, baik untuk aspek operasional maupun keuangan. Sistem pengendalian internal yang dijalankan Perseroan telah mengacu pada standar yang berlaku secara internasional, yaitu COSO. Sistem pengendalian internal ditujukan untuk menghindarkan Perseroan dari berbagai risiko yang muncul, baik risiko operasional maupun risiko keuangan.
2. Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi
Perseroan telah memiliki kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi yang tertuang dalam Nomor: Surat Keputusan Direksi No.001/DIR-COC/I/2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) tanggal 1 Januari 2014.

1. Internal Control
The Company has implemented an Internal Control System, both for operational and financial viewpoints. The internal control system implemented by the Company has referred to internationally accepted standards, namely COSO. The internal control system is designed to prevent the Company from numerous perils that appear, both operational and financial risks.
2. Anti-Corruption and Gratification Policy
The Company has had an Anti-Corruption and Gratification policy contained in Number: Decree of the Board of Directors No.001/DIR-COC/I/2014 concerning the Code of Conduct dated on January 1, 2014.



3. Whistleblowing System

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur No. 003/HRD/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Susunan Dewan Kehormatan Karyawan Pinago Utama Group dan Prosedur Pelaporan Pelanggaran Kode Etik tanggal 14 April 2019. Perseroan menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Email : corporate.secretary@pinagoutama.com
- b. Telpon* : (0711) 825 999 (*hunting*)
- c. Datang Langsung* : Jln. Basuki Rahmat No.23 Palembang, 30127 Sumatera Selatan, Indonesia – Bagian Legal/Sustainability.
- d. Melalui Surat : Bagian HRD/Bagian Sustainability.

*) Setiap hari kerja : Senin-Jumat, Pukul 08.00-17.00 WIB.

4. Kode Etik

Kode Etik Perseroan mulai diberlakukan sebagai pedoman, tata cara etis, dan pola aturan yang berlaku di dalam setiap kegiatan operasional Perseroan. Kode etik bagi seluruh karyawan dan pejabat manajemen berlaku wajib dipahami, ditaati dan dilaksanakan. Perseroan juga memutakhirkan kebijakan mengenai Kode Etik Perseroan pada tanggal 4 November 2015 tentang Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

5. Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Perseroan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan. Sesuai dengan kebijakan Nomor No. SMT-PO-PBL-02 tanggal 2 April 2018.

3. Whistleblowing System

The Company has policies related to the implementation of the Whistleblowing System which is outlined in the Decree of the Director No. 003/HRD/SK-DIR/VIII/2016 dated on August 1, 2016, concerning the Composition of the Honor Board for Pinago Utama Group Employees and the Code of Conduct Reporting Procedure on April 14, 2019. The Company provides a special channel used to submit violation reports as follows:

- a. Email : corporate.secretary@pinagoutama.com*
- b. SMS/Phone * : (0711) 825 999 (*hunting*)*
- c. Come Directly * : Jln. Basuki Rahmat No.23 Palembang, 30127 South Sumatra, Indonesia - Legal/Sustainability Section.*
- d. By mail : HRD/Sustainability Section*

**) Every working day: Monday-Friday, 08.00-17.00 WIB.*

4. Code of Conducts

The Company's Code of Conducts has come into force as guidelines, ethical procedures, and patterns of rules that administer in every operational activity of the Company. The ethics for all employees and management officers must be noted, obeyed, and well-performed. The Company as well renewed the policy regarding the Company's Code of Conducts dated on November 4, 2015, regarding the Policy on the Implementation of Good Corporate Governance.

5. Procurement of Transparent Goods and Services

The Company operates a transparent system of procurement of goods and services. In accordance with the policy No. SMT-PO-PBL-02 dated on April 2, 2018.

Dampak dan Capaian Kegiatan *Impact and Achievement of Activities*

Berlandaskan pada berbagai upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan praktik operasi yang adil, sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pengaduan mengenai indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Perseroan. Pada tahun 2020, tidak terdapat kasus korupsi di Perseroan.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil
Procedure and Mechanism for Complaints of Fair Operational Violations
Perseroan sudah memiliki prosedur WBS dan jumlah pengaduan tidak ada.

Based on the multiple resolutions made by the Company in implementing fair operating practices, throughout 2020, there were no complaints regarding indications of criminal acts of corruption committed by the Company's employees. In 2020, there is no any corruption case within the Company.

*Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil
Procedure and Mechanism for Complaints of Fair Operational Violations
The Company has had WBS procedures and the number of complaints does not exist.*

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Social Responsibilities of the Environmental Preservation

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

Perseroan meyakini bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Kerusakan lingkungan, baik darat, air maupun udara, akan berimbas dan berdampak negatif bagi manusia. Selain bencana alam yang silih berganti dan iklim yang mengalami anomali, kerusakan dan pencemaran lingkungan terbukti memicu munculnya penyakit baru atau bangkitnya penyakit lama yang sangat mengganggu kesehatan manusia. Hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan.

Menyadari besarnya bahaya dan dampak yang muncul akibat kerusakan lingkungan, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil peran dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan/bumi.

The Company supposes that the environment is one of the main determinants affecting the sustainability of the Company's business. Environmental damage in land, water and air will strike and impact people at large, negatively. In addition to natural disasters that continue to change and anomalous climate, environmental damage and pollution are proven to trigger the emergence of new diseases or the appearance of old diseases that are disturbing to people's health. This will affect the Company's business continuity, ultimately.

Having recognised the magnitude of the threats and impacts that arise due to environmental damage, the Company has been making every endeavour to take a role and to be involved in environmental/earth conservation forces.

Dampak dan Risiko Operasional Terhadap Lingkungan

Impacts and Operational Risks on the Environment

Perseroan menyadari bahwa menjalankan bisnis di bidang kelapa sawit terintegrasi secara langsung akan mengubah bentang alam, dan peruntukkan lahan. Perseroan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional yang dikerjakan telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan terus berupaya melakukan kegiatan operasional dengan berwawasan lingkungan, dan patuh pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perseroan juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001:2015. Penerapan tersebut telah berjalan dengan baik, dan di tahun 2020 Perseroan tidak mendapatkan laporan, sanksi ataupun denda terkait dengan ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan.

The Company acknowledges that doing business in the integrated palm oil sector will directly change landscapes, and designate land. The Company ensures that the entire operational activities that have been done has been through a process in accordance with the rules and regulations applicable.

The Company continues to strive to carry out operational activities that are environmentally sound, and comply with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The Company has also implemented an ISO 14001: 2015 based environmental management system. This implementation has been going well, and in 2020, the Company did not get reports, sanctions or fines related to non-compliance with environmental laws and regulations.

Jangkauan Lingkup Pengaruh Operasional Perseroan Terhadap Lingkungan

Scope of the Company's Impact on the Environment

Aktivitas operasional Perseroan memberikan dampak langsung yang besar terhadap lingkungan hidup, namun dampak tidak langsung yang ditimbulkan akan sangat besar. Untuk mengurangi dampak negatif tidak langsung dari kegiatan operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup, Perseroan menerapkan:

The Company's operational activities have a great direct impact on the environment; however, the indirect results that are caused will be immense. To reduce the indirect negative consequences of the Company's operational activities on the environment, the Company implements:



1. Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL dan regulasi yang berlaku;
2. Mengelola limbah dengan cara-cara yang bertanggung jawab, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta pengelolaan sampah berdasarkan prinsip *reuse-reduce-recycle-recovery* (4R);
3. Melakukan upaya konservasi dan perlindungan sumber daya air, kawasan lindung, nilai konservasi tinggi (NKT), serta keanekaragaman hayati (*Biodiversity*) dalam area Perseroan.

1. *Environmental Monitoring and Management in accordance with AMDAL documents and applicable regulations;*
2. *Managing waste in a responsible manner, including Hazardous and Toxic Material (B3) waste, as well as waste management based on the principle of reuse-reduce-recycle-recovery (4R);*
3. *Carrying out efforts to conserve and protect water resources, protected areas, high conservation value (HCV), and biodiversity in the Company's area.*

Rencana Program CSR di Bidang Lingkungan Hidup

CSR Program Plans in the Field of Environment

1. Pemberian bantuan bibit pohon hutan (Jabon, Mahoni, Trembesi) untuk sempadan sungai.
2. Kegiatan Simulasi Kebakaran Hutan, Perkebunan dan Lahan dengan Kelompok Masyarakat Peduli Api di Desa Sumber Rezeki dan Desa Srimulyo.

1. *Provision of forest tree seedlings (Jabon, Mahoni, Trembesi) for river borders.*
2. *Forest, Plantation and Land Fire Simulation Activities with Fire Concerned Community Groups in Sumber Rezeki and Srimulyo Villages.*

Kegiatan yang Dilakukan

Activities Performed

Meskipun bukan berasal dari jenis industri bisnis yang memiliki aktivitas utama produksi, namun Perseroan tetap berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup. Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada pekerja, di antaranya adalah:

1. Pengurangan penggunaan kertas dengan membangun sistem *electronic office (e-office)* dimana komunikasi internal yang sebelumnya masih menggunakan media kertas, saat ini sudah menggunakan sistem elektronik. Termasuk dalam penggunaan kertas bekas untuk mencetak dokumen *draft*/kurang penting. Jumlah penggunaan kertas di tahun 2019 dan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Item	Jumlah 2019	Jumlah 2020
HVS A3	3	2
HVS A4	1.237	824
HVS F4	179	105

Although it does not begin from the type of business industry having main production activities, the Company is still committed to participating in preserving the environment. The Company as well conducts outreach to the workers, including:

1. *Reducing the use of paper by building an electronic office (e-office) system in which internal communications that were previously still using paper media, are now exerting electronic systems, including in the use of used paper to print draft/fewer valuable documents. Total paper usage in 2019 and in 2020 are as follows:*

Item	Total in 2019	Total in 2020
HVS A3	3	2
HVS A4	1,237	824
HVS F4	179	105

2. Mengalihkan komputer yang digunakan pekerja ke modus *sleep* (tidur) ketika tidak sedang dipergunakan, sehingga dapat menghemat daya listrik.
3. Mematikan lampu ketika tidak digunakan.
4. Menggunakan gelas yang dapat digunakan kembali sehingga menghemat gelas sekali pakai.
5. Menggunakan air secara bijak.
6. Menggunakan produk yang dapat didaur ulang melalui 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*).

2. *Putting a computer that is used by workers to the sleep mode when not in use, to save electricity.*
3. *Turning off the lights when not in use.*
4. *Utilising reusable glass so that it saves disposable glass.*
5. *Having water, sensibly.*
6. *Using products that can be recycled through 3R (Reduce, Reuse, and Recycle).*

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Certification in the Environmental Field

1. Sertifikasi ISO 14001:2015 dan Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan yang terintegrasi dengan Kebijakan Sistem Manajemen Perseroan.
2. Penghargaan pengelolaan lingkungan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, perkebunan dan lahan dari pemerintah daerah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sertifikasi Industri Hijau dari Lembaga Sertifikasi Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang.

1. *ISO 14001: 2015 Certification and Environmental Management System Policy which is integrated with the Company's Management System Policy.*
2. *Environmental management award for the prevention and control of forest, plantation and land fires from the regional government of the Regent of Musi Banyuasin.*
3. *Green Industry Certification from the Industrial Certification Institute of the Palembang Industrial Research and Standardization Institute.*

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Mengenai Lingkungan Hidup

Sarana yang disediakan Perseroan untuk penyelesaian jika terdapat pelanggaran terkait lingkungan hidup melalui laman Perusahaan dan email corporate.secretary@pinagoutama.com.

Complaints Procedure and Mechanism Regarding the Environment

Facilities provided by the Company for resolution should there be violations related to the environment via company's website and email corporate.secretary@pinagoutama.com.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibilities Related to Labour, Health, and Safety

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

Perseroan berupaya untuk menjadi entitas yang taat asas dan taat aturan. Termasuk di bidang ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perseroan berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh karyawan.

Untuk itu, Perseroan berupaya untuk menjadi lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan di seluruh lokasi operasional. Dengan mentaati peraturan perundangan berikut:

- UU RI No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan
- Tertuang dalam Surat Keputusan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: 06/Kep-P2K3/Nakertrans-SS-MUBA/2021 Tanggal 22 Pebruari 2021

The Company strives to be an entity that dwells by principles and endures by-laws, including in the fields of employment, health, and safety, the Company strives to comply with all applicable laws and regulations. The Company provides high attention and commitment in terms of gender equality and job opportunities, job training to improve employee professionalism, equivalent reward system to work health, and safety for the entire employees.

For this reason, the Company strives to be a safe and comfortable work environment for all employees within all operational locations. By complying with the following laws and regulations:

- RI Law No.13/2013 concerning Employment
- As stated in the Decree from the Manpower and Transmigration Office of Musi Banyuasin Regency, the Committee for Occupational Safety and Health Guidance Number: 06/Kep-P2K3/Nakertrans-SS-MUBA/2021 dated on February 22, 2021m

Isu-Isu dan Risiko di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Issues and Risks in the Field of Labour, Health, and Safety

Isu-isu utama di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja utamanya adalah terkait pelaksanaan kedua undang-undang di atas. Perseroan telah melakukan mitigasi terkait risiko-risiko yang mungkin muncul akibat dari isu-isu tersebut, yaitu dengan cara mentaati kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak Perseroan dengan Serikat Pekerja yang merupakan implementasi dari peraturan ketenagakerjaan dengan manajemen Perseroan. PKB tersebut terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep: 249/PHIJSK-PK/PKB/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan SK P2K3 06/Kep-P2K3/Nakertrans-SS-Muba/2021 Tanggal 22 Februari 2021.

The first matters in the fields of labour, health, and work compliance are mainly related to the implementation of the two aforementioned laws. The Company has carried through mitigations associated with the uncertainties that may emerge as a result of these issues, namely by complying with these two laws and regulations. Besides, the Collective Labour Agreement (PKB) has been ratified between the Company and the Workers Union which is an implementation of labour regulations with the Company's management. The PKB is registered in Decree of the Directorate General of Industrial Relations and Workers Social Security No. Kep: 249/PHIJSK-PK/PKB/XII/2018 dated December 27, 2018 and SK P2K3 06/Kep-P2K3/Nakertrans-SS-Muba/2021 dated February 22, 2021.

Pelaksanaan Kegiatan

Implementation of Activitiy

1. Pengelolaan Hubungan Industrial
Hubungan yang terjadi di antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Perseroan, diatur dalam sistem pengaturan kerja

1. Industrial Relations Management
Associations that befall among multiple parties, both inside and outside the Company, are regulated in a work regulation system,

yang disebut sebagai hubungan industrial. Pengaturan tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Setiap perselisihan yang timbul antara Perseroan dengan pekerja, atau antara pekerja dengan pekerja lainnya, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Perseroan, dan tetap memperhatikan ketentuan lain yang berlaku. Penyelesaian yang dilakukan tetap mengutamakan kepentingan bersama, sehingga dapat mendorong iklim yang kondusif bagi terciptanya hubungan industrial yang konstruktif.

2. Kestaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Seluruh peraturan internal Perseroan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh pekerja tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh pekerja, dimana posisi-posisi yang ada tidak mencantumkan kualifikasi yang membedakan berdasarkan gender. Kualifikasi yang ada di posisi (*position requirement*) hanya mensyaratkan pendidikan dan kompetensi (*soft-skill dan hard-skill*). Hak (kompensasi, benefit, kesempatan pengembangan karir dan kompetensi, waktu kerja, fasilitas kerja) dan kewajiban berlaku untuk seluruh pekerja tanpa membedakan gender.

3. Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu mengedepankan kesejahteraan karyawan karena menyadari bahwa karyawan merupakan salah satu aset penting Perseroan yang harus dijaga dan diperhatikan. Pinago memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan meliputi:

- Standar gaji yang sudah memenuhi ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Memberikan insentif kerja dan tunjangan kerja sesuai dengan bidang/lingkup tugasnya;
- Fasilitas Perumahan dan Air Bersih melalui *system water treatment*;
- Fasilitas kesehatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk level Manajerial;
- Fasilitas pinjaman karyawan melalui Koperasi Karyawan;

Realisasi Rasio Gaji Pegawai Tertinggi & Terendah di tahun 2020

1. Gaji Tertinggi: Rp40.000.000,-
2. Gaji Terendah: Rp3.147.036

namely industrial relations. The regulation incorporates economic, social, political, and legal aspects. Any disputes that arise between the Company and workers, or between workers and other workers, are fixed under relevant internal stipulations of the Company as well as under other applicable terms. The settlement carried out still prioritises the mutual interests so that it can support a conducive climate for the creation of constructive industrial relations.

2. Gender Equality and Job Opportunities

All relevant internal Company statutes are applied consistently and equally to the entire workers regardless of gender. Moreover, the job opportunities offered to apply to all workers, where the positions do not include qualifications that discriminate by gender. Qualifications in position (position requirements) only expect education and competencies (soft-skills and hard-skills). Rights (compensation, benefits, career and competency development opportunities, working time, work facilities) and obligations apply to all workers regardless of gender.

3. Employee Welfare

The Company forevermore prioritises employee's welfare for the Company realises that employees are one of the imperative assets that need maintaining and caring for. The Company purveys employee's welfare facilities including:

- *Standard salary that has met the minimum wage stipulated by the Government;*
- *Enrolling employees in the BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan programs;*
- *Providing work incentives and work allowances in accordance with the field/scope of their duties;*
- *Housing and Clean Water Facilities through a water treatment system;*
- *Health facilities (inpatient and outpatient) for Managerial level;*
- *Employee loan facilities through the Employee Cooperative;*

Realization of the Highest & Lowest Salary Employee Ratio in 2020

1. *Highest salary: Rp40,000,000,-*
2. *Lowest Salary: Rp3,147,036*



4. Program Pengembangan Karyawan

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensinya. Tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 242 karyawan.

Perseroan menyediakan anggaran yang cukup sesuai kebutuhan untuk menjalankan program pendidikan dan pelatihan. Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020 adalah sebesar Rp364.256.788 atau 23,9% dari Anggaran Tahunan Perusahaan. Realisasi biaya tahun 2020 tersebut menurun 26,1% dari realisasi biaya tahun sebelumnya, yakni Rp1.396.114.473 juta atau sebesar 52,5% dari anggaran setahun.

5. Kesehatan Karyawan

Adapun Benefit lain berupa:

Dalam rangka memelihara dan menjamin kesehatan karyawan Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Kesehatan. Perseroan juga menyediakan fasilitas klinik yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menjadi Fasilitas Kesehatan I yang terdiri dari 1 unit Klinik Sentral dan 4 unit Klinik Pembantu dengan dukungan Dokter dan tenaga medis yang siap memberikan pelayanan kepada karyawan termasuk melakukan program edukasi kesehatan secara terjadwal. Perseroan juga rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala karyawan di seluruh unit kerja secara periodic bekerja sama dengan Balai Hiperkes dan Pihak yang terkait.

6. Keselamatan Kerja

1. Pengendalian bahaya di tempat kerja Seperti Pemantauan tindakan tidak aman & Kondisi Tidak aman dengan cara inspeksi rutin.
2. Pembinaan & Pengawasan seperti: pelatihan & Pendidikan K3, Briefing, Konsultasi mengenai penerapan K3 dan pengembangan sumber daya ataupun teknologi.
3. Melalui sistem manajemen seperti : Prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana & prasarana K3 serta pendukungnya di tempat kerja, Memberikan Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja.

4. Employee Development Program

The Company provides equitable opportunities for every employee to take part in education and training programs to develop his/her competencies. In 2020, the Company organised education and training programs participated by 242 employees.

The Company provides adequate budget as needed to run an education and training program. The realisation of Education and Training Costs in 2020 is Rp364,256,788 or 23.9% of the Company's Annual Budget. The realisation of the costs in 2020 decreased 26.1% from the realisation of the previous year's costs, which was Rp1,396,114,473 or by 52.5% of the year's budget.

5. Employee Health

Other benefits include:

In order to maintain and ensure the health of employees, the Company includes all employees in the BPJS Health program. The company also provides clinical facilities that have collaborated with BPJS Kesehatan to become Health Facility I, which consists of 1 Central Clinic unit and 4 Auxiliary Clinic units with the support of doctors and medical personnel who are ready to provide services to employees including conducting health education programs on a scheduled basis. The company also regularly carries out periodic health checks for employees in all work units periodically in collaboration with the Hiperkes Center and related parties.

6. Work Safety

1. Control of hazards in the workplace such as monitoring unsafe actions & unsafe conditions by means of routine inspections.
2. Coaching & Supervision such as: OHS training & education, Briefing, Consultation on the application of K3 and development of resources or technology.
3. Through a management system such as: OSH rules and procedures in the workplace, provision of K3 facilities & infrastructure and its supporters in the workplace, Giving awards and sanctions to the implementation of K3 in the workplace to workers.

Dampak Kegiatan

The Impacts of the Activities

Tingkat *turnover* karyawan:

2019

1. Karyawan Keluar : 812 orang
2. Karyawan Masuk : 308 orang
3. Karyawan Pensiun : 5 orang

2020

1. Karyawan Keluar : 673 orang
2. Karyawan Masuk : 123 orang
3. Karyawan Pensiun : 9 orang

Turnover rate:

2019

1. *Resigned Employees* : 812 people
2. *Incoming Employees* : 308 people
3. *Retired employees* : 5 people

2020

1. *Resigned Employees* : 673 people
2. *Incoming Employees* : 123 people
3. *Retired employees* : 9 people

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

- Sertifikasi ISO 14001:2015 dan Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan yang terintegrasi dengan Kebijakan Sistem Manajemen Perseroan.
- Penghargaan pengelolaan lingkungan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, perkebunan dan lahan dari pemerintah daerah Bupati Musi Banyuasin.
- Sertifikasi Industri Hijau dari Lembaga Sertifikasi Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang.
- Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- *ISO 14001: 2015 Certification and Environmental Management System Policy which is integrated with the Company's Management System Policy.*
- *Award for environmental management for the prevention and control of forest, plantation and land fires from the regional government of the Regent of Musi Banyuasin.*
- *Green Industry Certification from the Industrial Certification Institute for Industrial Research and Standardization Institute of Palembang.*
- *Award for Corporate Performance Rating Program in Environmental Management.*

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Procedure and Mechanism for Complaints of Labor, Health and Safety Issues

Mekanisme dalam pengaduan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui rapat secara berkala dengan unit kerja bertujuan untuk membahas pelaksanaan dan penerapan K3 didalam operasional sebagai evaluasi mencegah terjadinya Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja.

The complaint mechanism for Occupational Health and Safety through regular meetings with work units aims to discuss the implementation and implementation of OHS in operations as an evaluation of preventing occupational diseases and accidents.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Mitra Kerja

Corporate Social Responsibilities Related to Business Partner Responsibilities

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga kepentingan konsumen. Komitmen tersebut diwujudkan termasuk dengan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan pasar, sebagaimana diatur dalam serangkaian kebijakan manajemen terkait aspek pengembangan produk, keamanan produk, dan termasuk layanan pengaduan konsumen.

The Company has committed to always safeguarding the interests of consumers. This commitment is manifested with making adjustments to market needs and demands, as stipulated in a series of management policies related to aspects of product development, product safety, and including consumer complaint services.

Rencana Kegiatan

Activity Plan

Salah satu upaya Perseroan untuk menjalin hubungan kerja yang berkelanjutan dengan pelanggan adalah dengan memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas dan tepat waktu, melalui proses yang aman dan sesuai dengan harapan pelanggan.

One of the Company's efforts to establish sustainable working relationships with customers is to provide quality and timely work, through safe processes and in accordance with customer expectations.

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan minimal setiap satu tahun sekali Perseroan melakukan survei indeks kepuasan pelanggan. Selain itu untuk menjaga kepercayaan pelanggan, Perseroan menyediakan media penyampaian keluhan atau pengaduan, serta merespon dalam waktu 1x24 jam. Akses layanan ini diantaranya melalui:

1. Pusat pengaduan konsumen di email corporate.secretary@pinagoutama.com
2. Corporate Secretary di nomor telepon: 0711 (825999)

To find out customer satisfaction at least once a year the Company conducts a customer satisfaction index survey. In addition to maintaining customer trust, the Company provides a medium for delivering complaints or complaints, and responds within 1x24 hours. Access to this service includes:

1. Consumer complaints centre at email corporate.secretary@pinagoutama.com
2. Corporate Secretary at telephone number: 0711 (825999)

Pelaksanaan Kegiatan

Implementation of Activities

Pengaduan Pelanggan

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak menerima pengaduan.

Customer Complaints

Throughout 2020, the Company received zero complaints.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Pengembangan Sosial Masyarakat

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

Perseroan meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target-target finansial semata. Perseroan juga menyadari bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan bisnis bukan hanya dipengaruhi faktor internal, melainkan juga oleh masyarakat di sekitar lingkungan bisnis Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kewajiban moral untuk memberi manfaat, termasuk memperbesar akses bagi masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

The Company considers that business chain is not only gained by the achievement of financial targets. Furthermore, the Company realises breakthrough in accomplishing business objects is not only determined by internal factors, but also by the community around the Company's business environment. Consequently, the Company has a moral obligation to provide benefits, including increasing access for the community to reach better social, economic, and quality of life conditions.

Isu dan Risiko Sosial yang Relevan dengan Perusahaan

Issues and Social Risks Relevant to the Company

Tidak terdapat isu dan risiko sosial yang relevan dengan Perseroan.

There are no issues and social risks relevant to the Company.

Target dan Rencana Kegiatan

Target and Plan Activity

Dalam hal pengembangan sosial dan masyarakat, Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja terbaiknya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan Perseroan harus diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup komunitas sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian maka akan terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara Perseroan dengan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat melalui dua program utama, yaitu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

In terms of social and community development, the Company attempts to enhance its best performance to provide the highest advantages for the stakeholders. The Company believes that the Company's growth must be followed by an increase in the welfare and standard of living of the surrounding community, both economically and socially. Hence, there will be a rhythmical relationship and mutual support between the Company and the community. To actualise the objective, the Company carries out various social, economic, and environmental activities for the community through two main programs, namely Corporate Social Responsibility.



Lingkup Kegiatan CSR yang Dijalankan *Scope of CSR Activities Conducted*

Program CSR diberikan kepada kegiatan yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

CSR programs are given to activities that have a positive impact on the environment and society.

Kegiatan yang Dilaksanakan *Activities Performed*

1. Perseroan mempekerjakan Masyarakat Lokal sebesar 81.85% dari total karyawan sebanyak 4022 Orang.
2. Penyerapan Komoditi lokal berupa Bahan Olah Karet Rakyat (Bokar) sebanyak 25.341.831 Kg, TBS Plasma sebanyak 48.030.010 Kg, TBS Non Plasma sebanyak 61.621.160 Kg.
3. Perseroan juga memberdayakan kontraktor lokal baik di unit kebun & pabrik.

1. *The Company employs local people as much as 81.85% of the total employees of 4022 people.*
2. *Absorption of local commodities in the form of Community Rubber (Bokar) as much as 25,341,831 Kg, Plasma TBS as much as 48,030,010 Kg, Non-Plasma FFB as much as 61,621,160 Kg.*
3. *The Company also empowers local contractors both in the plantation & factory units.*







PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries

07

Laporan **Keuangan**
Financial Report



PT. Pinago Utama Tbk
Integrated Palm Oil & Rubber Industries

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Block I - 09 Pantai Indah Kapuk
14470 Jakarta - Indonesia
Telp: +62-21 55966133, 55965869,
Fax : +62-21 55965977